

Dinamika Isu-Isu Sosial Politik Kontemporer

by Andries Lionardo

Submission date: 05-May-2023 03:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2084929740

File name: DINAMIKA_ISU-ISU_SOSIAL_POLITIK_KONTEMPORER.pdf (8.78M)

Word count: 106613

Character count: 692769



Editor:
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib., MM
Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A

DINAMIKA ISU-ISU SOSIAL POLITIK KONTEMPORER

Kontributor:

Andries Lionardo | M. Nur Budiyanto | Diana Dewi Sartika | Dadang Hikmah Purnama | Andy Alrath |
 Zulfikri Suleman | Yoyok Hendarso | Ridha Taqwa | Abdul Nadjib | Sena Putra Prabujaya | Dyah Hapsari
 Eko M | Tri Agus Susanto | Retno Susilowati | Eva Litya | Yusnani | Mery Yanti | Djunaidi | Gita
 Isyanawulan | Vireonica Varsi S | Gunawan Lestari Elake | Ferdiansyah Rival | Januar Eko Arvansah |
 Muhammad Yusuf Abror | Bandi | Muhammad Izzudin | Farisha Sestri Mustalifah | Nur Aslamiah Supli |
 Yulasteriyani | Yosi Arifianti | Abdul Halim | Sadira Soraida | Sari Mutiara Aisyah | Febrimarani Maulinda |
 Annisa Rahmawati | Nurul Aulia | Ramdhan Lamato | Safitri Elhandari | Eko Pelayan Jaya | Muhammad
 Hidayatullaham | Adi Iggigi Hanudoko | Khairunnas | Rahmat Ratinzar | Dimes Akbar Perdana



Editor:
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib., MM
Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A

DINAMIKA ISU-ISU SOSIAL POLITIK KONTEMPORER



Buku bunga rampai (*Book chapter*) "**Dinamika Isu Sosial Politik Kontemporer**" karya 43 orang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang ini disusun dalam rangka peringatan 39 tahun FISIP UNSRI pada tahun 2022. Menyadari bahwa seorang dosen bukan hanya menjadi guru bagi mahasiswa melainkan juga menjadi guru bagi anak bangsa dimahapun berada maka usaha menuliskan ide, pemikiran, informasi, dan solusi dalam aspek apapun merupakan suatu keniscayaan. Kontribusi para dosen dalam buku bunga rampai merupakan usaha sadar untuk turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa sesuai pepatah "buku adalah jendela ilmu pengetahuan sekaligus jendela dunia".

Materi buku terdiri atas 35 chapter yang berisi berbagai tulisan bebas kekinian mencakup aspek administrasi publik, sosiologi, komunikasi, dan hubungan internasional, bahkan di dalamnya juga menyajikan seperti sejarah berdirinya Fakultas dan Jurusan pada FISIP Universitas Sriwijaya. Beberapa tulisan menarik dalam *book chapter* ini antara lain Tragedi Kanjuruhan dalam perspektif komunikasi krisis; *Core Beliefs* dalam *Advocation Coalition Framework* Konflik Kebijakan publik; G20; Intoleransi intra agama; Tantangan *peacebuilding* dalam pendidikan komunitas; Etnis Tionghoa dalam politik Inonesia; Ketidaktambilan politik kirgizitan; Gerakan sosial global; Modal sosial dan revolusi industri 4.0; Perempuan menghapus stigma kepemimpinan; dan masih banyak tulisan bernas lainnya yang disajikan dalam buku bunga rampai ini khusus untuk anda.

Book chapter ini menjadi menarik karena menyajikan artikel dalam berbagai tema sosial politik kontemporer atau kekinian yang perlu untuk diketahui dan dipahami para mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dosen, pengamat, politikus, pejabat, dan anak bangsa di seluruh pelosok tanah air. Terbitnya *book chapter* karya para dosen FISIP UNSRI ini membuktikan bahwa budaya menulis dikalangan akademisi terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan di jagat Nusantara ini.



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
 Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
 telp/fax. (0274) 6466541
 Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN-978-623-6074-XXX



9 786236 074XXX



Editor:
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib,. MM
Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A

DINAMIKA

ISU-ISU

SOSIAL POLITIK

KONTEMPORER

Kontributor:

Andries Lionardo | M. Nur Budiyanto | Diana Dewi Sartika | Dadang Hikmah Purnama | Andy Alfatih |
Zulfikri Suleman | Yoyok Hendarso | Ridha Taqwa | Abdul Nadjib | Sena Putra Prabujaya | Dyah Hapsari
Eko N | Tri Agus Susanto | Retno Susilowati | Eva Lidya | Yusraini | Mery Yanti | Djunaidi | Gita
Isyanawulan | Vieronica Varbi S | Gunawan Lestari Elake | Ferdiansyah Rivai | Januar Eko Aryansah |
Muhammad Yusuf Abror | Randi | Muhammad Izzudin | Farisha Sestri Musdalifah | Nur Aslamiah Supli |
Yulasteriyani | Yosi Arianti | Abdul Halim | Safira Soraida | Sari Mutiara Aisyah | Febrimarani Malinda |
Annisa Rahmawati | Nurul Aulia | Ramdan Lamato | Safitri Elfandari | Eko Pebryan Jaya | Muhamad
Hidayatul Ilham | Adi Inggit Handoko | Khairunnas | Rahmat Rafinzar | Dimes Akbar Perdana

KATA PENGANTAR

Buku bunga rampai (*Book Chapter*) “Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer” ini merupakan karya 43 orang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya (FISIP UNSRI) dalam rangkaian peringatan 39 Tahun FISIP UNSRI tahun 2022. Buku ini ditulis dengan kesadaran penuh untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Book Chapter ini menarik untuk dibaca karena berisi sepintas sejarah pendirian jurusan lingkup FISIP UNSRI, artikel bebas buah pikiran dan kreativitas, hasil riset dan atau hasil pengabdian masyarakat para dosen dari 4 jurusan lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. *Book Chapter* ini juga membuktikan bahwa budaya menulis di kalangan akademisi FISIP UNSRI terus tumbuh dan berkembang.

Book Chapter Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer ini terdiri dari 7 Bab dan 35 Sub bab yang terdiri dari Bab I. Pendahuluan; Bab II. Selayang Pandang Sejarah FISIP UNSRI; Bab III. Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer dalam Ilmu Administrasi Publik ; Bab IV. Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer dalam Sosiologi; Bab V Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer dalam ilmu Komunikasi; Bab VI. Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer dalam Ilmu Hubungan Internasional Bab VII. Penutup yang didahului Sekapur sirih, Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Dekan FISIP UNSRI dan para Wakil Dekan, Ketua & Sekretaris Jurusan lingkup FISIP UNSRI, para dosen FISIP UNSRI, Tim Persiapan Penyusunan *Book Chapter*, para tenaga kependidikan, alumni dan mahasiswa

serta masyarakat luas yang telah mendukung terbitnya *book Chapter* ini. *Tiada gading yang tak retak*, saran dan kritik dari pembaca sangat kami nantikan untuk penyempurnaan buku ini lebih lanjut.

Selamat membaca! Semoga buku ini bermanfaat.-

Palembang, November 2022
Editor,

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib,. MM
Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A

SEKAPUR SIRIH
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Saya menyambut baik terbitnya buku bunga rampai (*Book chapter*) **Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer**, sebagai invensi dan inovasi para tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya dalam rangkaian peringatan 39 Tahun FISIP UNSRI tahun 2022. Hal ini patut kita apresiasi sebagai sebuah karya nyata para dosen yang dipersembahkan kepada civitas academica, alumni dan masyarakat luas sekaligus sebagai bukti kapasitas dosen dalam proses belajar - mengajar di kampus.

Dinamika Isu Isu Sosial Politik Kontemporer menjadi menarik untuk ditulis dan dibahas karena dinamika sosial politik yang senantiasa ada dalam peristiwa dan praktek pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal, regional, nasional, dan global mengalami perubahan sangat cepat dengan berbagai peristiwa yang terjadi seperti masuknya revolusi industry 4.0, wabah pandemi covid 19, konflik antar negara, potensi disintegrasi di beberapa negara, ancaman terorisme, radikalisme, narkoba, korupsi, masalah kemiskinan dan kelaparan, masalah pelayanan public, konsolidasi demokrasi, efisiensi pemerintahan dan lain lain.

Penerbitan *book chapter* ini merupakan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang merupakan tujuan dan kewajiban civitas academica untuk melaksanakan dan mewujudkannya, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKB) yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar -mengajar

yang kreatif, inovatif, produktif dan bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan selamat kepada para dosen yang dengan cermat dan inovatif menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermanfaat dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Saya berharap karya tulis semacam ini dapat terus dikembangkan dan dilanjutkan kedepan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kita, para akademisi dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dr. Ir. Abdul Nadjib,.MM dan Sdr Muhammad Yusuf Abror S.IP,MA yang telah bekerja keras mewujudkan buku ini dan sekaligus berkenan menjadi editor, sehingga *book chapter* ini layak untuk diterbitkan.

Semoga invensi, inovasi dan informasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Inderalaya, November 2022
Dekan,

Prof. Dr. Alfitri MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SEKAPUR SIRIH	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
NARASI PENGANTAR	
• <i>Muhammad Yusuf Abror</i>	2-5
39 TAHUN FISIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA: DARI SUMATERA SELATAN UNTUK PERADABAN DUNIA	
• <i>Andries Lionardo</i>	6-10
BAB II: SELAYANG PANDANG SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	11
SEJARAH FISIP UNSRI	
• <i>Muhammad Yusuf Abror, Dyah Hapsari Eko N, Andy Alfatih</i>	12-17
SEJARAH JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	
• <i>Januar Eko Aryansah</i>	18-21
SEJARAH JURUSAN GEOLOGI	
• <i>Gita Isyanawulan, Randi</i>	22-25
SEJARAH JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	
• <i>Ferdiansyah Rivai, Nur Aslamiah Supli, Sari Mutiara Aisyah</i>	26-32

BAB III: DINAMIKA ISU-ISU SOSIAL POLITIK KONTEMPORER	
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	33
NEGARA GAGAL VS NEGARA BERHASIL	
• <i>M. Nur Budiyanto</i>	<i>34-42</i>
KONSEP CAPACITY BUILDING: DALAM PENGUATAN	
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA	
• <i>Rahmat Rafinzar</i>	<i>43-58</i>
CORE BELIEFS DALAM ADVOCATION COALITION	
FRAMEWORK KONFLIK KEBIJAKAN PELARANGAN	
PENGGUNAAN ALAT TANGKAP CANTRANG	
• <i>Dimes Akbar Perdana, Sena Putra Prabujaya</i>	<i>59-70</i>
BAB IV: DINAMIKA ISU-ISU SOSIAL POLITIK	
KONTEMPORER SOSIOLOGI	71
TEORI PRAKTIK DALAM STUDI TENTANG KEJAHATAN	
• <i>Diana Dewi Sartika, Dadang Hikmah Purnama</i>	<i>72-91</i>
KONSEP PENGGUNA INTERNET	
• <i>Mery Yanti, Yusnaini</i>	<i>92-104</i>
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	
• <i>Dyah Hapsari Eko Nugraheni, Yoyok Hendarso</i>	<i>105-124</i>
PERKEMBANGAN URBANISASI DI ASIA: TINJAUAN	
SOSIOLOGI KEPENDUDUKAN (<i>Urbanization Development in</i>	
<i>Asia: Overview of Population Sociology</i>)	
• <i>Muhammad Izzudin, Ridha Taqwa</i>	<i>125-142</i>
TANTANGAN DAN MASA DEPAN SOSIOLOGI: STUDI	
BIBLIOMETRIK DAN VISUALISASI	
• <i>Vieronica Varbi Sununianti, Tri Agus Susanto</i>	<i>143-159</i>
SOSIOLOGI MIGRASI: PILIHAN RASIONAL MIGRASI	
TENAGA KERJA INDONESIA	
• <i>Randi, Eva Lidya</i>	<i>160-173</i>
URGENSI PENGAJARAN SOSIOLOGI ISLAM DI	
PERGURUAN TINGGI	
• <i>Ridhah Taqwa</i>	<i>174-186</i>

**DAMPAK KONVERGENSI MEDIA DALAM PENURUNAN
NILAI-NILAI PANCASILA PADA REMAJA
DI KOTA PALEMBANG**

- *Febrimarani Malinda, Safira Soraida,
Adi Inggit Handoko* 187-215

**PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
KARET “MANTARMAS” MELALUI PENGUATAN MODAL
USAHA KELOMPOK**

- *Gita Isyanawulan, Yulasteriyani, Yosi Arianti* 216-228

**BAB V: DINAMIKA ISU-ISU SOSIAL POLITIK
KONTEMPORER ILMU KOMUNIKASI** 229

**EFEKTIVITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL
DENGAN GENERASI Z**

- *Safitri Elfandari* 230-235

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL PASANGAN
DARI KELUARGA BROKEN HOME PADA FILM
“ROMANTIK PROBLEMATIK”**

- *Eko Pebryan Jaya* 236-241

**TRAGEDI KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF
KOMUNIKASI KRISIS**

- *Muhamad Hidayatul Ilham* 242-249

**AKTIVISME DIGITAL FANDOM K-POP:
ARMY INDONESIA**

- *Annisa Rahmawati* 250-260

**MEREFLEKSIKAN MEDIA DI TENGAH
PERUBAHAN MASYARAKAT**

- *Farisha Sestri Musdalifah* 261-282

**BAB VI: DINAMIKA ISU-ISU SOSIAL POLITIK KONTEMPORER
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL** 283

**MENINJAU KEMBALI KOMITMEN INDONESIA TERHADAP
IMPLEMENTASI CRPD DAN PEMENUHAN
HAK DISABILITAS**

- *Ramdan Lamato* 284-291

KETIDAKSTABILAN POLITIK KIRGIZTAN MENIMBULKAN KONFLIK DOMESTIK (KONSEP KEAMANAN MANUSIA; PERSONAL)	
• <i>Muhammad Yusuf Abror</i>	292-303
MODAL SOSIAL DALAM PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	
• <i>Abdul Nadjib</i>	304-325
ETNIS TIONGHOA DALAM POLITIK INDONESIA	
• <i>Khairunnas</i>	326-335
GERAKAN SOSIAL DAN GERAKAN SOSIAL GLOBAL	
• <i>Zulfikri Suleman, Abdul Halim</i>	336-351
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI	
• <i>Djunaidi</i>	352-368
TANTANGAN PEACEBUILDING MELALUI PENDIDIKAN DI TINGKAT KOMUNITAS STUDI KASUS: RUANG BELAJAR PENYALA (RBP) DI MALUKU	
• <i>Abdul Halim</i>	369-378
PEREMPUAN-PEREMPUAN PENGHAPUS STIGMA KEPEMIMPINAN	
• <i>Ferdiansyah Rivai</i>	379-385
INTOLERANSI INTRA-AGAMA: STUDI KONFLIK SEKTARIAN KOMUNITAS SUNNI-SYIAH DI SAMPANG MADURA	
• <i>Gunawan Lestari Elake</i>	386-402
MEMAHAMI G20 SEBAGAI <i>INFORMAL</i> <i>INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION</i>	
• <i>Nurul Aulia</i>	403-414
REFLEKSI TIGA INDEKS DI NEGARA G20	
• <i>Retno Susilowati</i>	415-424
BAB VII: PENUTUP	425

BAB I

Pendahuluan

NARASI PENGANTAR

Muhammad Yusuf Abror

Latar Belakang

Buku “Dinamika Isu-isu Sosial Politik Kontemporer” merupakan buku yang dipersiapkan untuk menelurkan karya tulisan dari dosen yang berada di lingkup FISIP Unsri. Buku ini membahas mengenai beragam isu-isu sosial dan politik yang terjadi saat ini. Dinamika dalam ilmu sosial dan ilmu politik sangat beragam dan cepat terjadinya perubahan. Melalui buku ini disampaikan berbagai isu mulai dari tingkat lokal hingga internasional sehingga dapat diambil pelajaran dan dijadikan pedoman serta solusi dari setiap masalah yang terjadi ke dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui slogan FISIP Menyapa, Peduli, dan Berbagi sebagai bentuk dari azas kebermanfaatannya FISIP Unsri secara inklusif sehingga banyak masyarakat dapat merasakan kontribusi dari keberadaan FISIP Unsri. Slogan tersebut sangat relevan dengan dinamika isu-isu sosial dan politik yang terjadi saat ini. Semua masyarakat dari ujung dunia hingga ke ranah domestik menjadi satu kesatuan. Maka, masyarakat global harus saling peduli dan berbagi akan isu-isu yang membutuhkan perhatian besar seperti masalah negara, birokrasi, teknologi, penduduk, ideologi, media, perang, kelaparan, diskriminasi terhadap gender, disabilitas atau SARA, keamanan manusia, kesejahteraan masyarakat kecil, kemiskinan, krisis ekonomi dan kemanusiaan, dan disrupsi isu lainnya. Isu *high politics* hingga *low politics* terangkum semua di dalam buku ini, sehingga

akan mengubah (setidaknya mendapatkan perspektif berbeda) cara berpikir pembaca di luar kebiasaannya.

Meminjam kalimat dari tokoh kosmopolitanisme yang merupakan filsuf Yunani yaitu Diogenes. Ia ketika ditanya berasal dari mana dan jawabannya adalah "*I am citizen of the world*". Maknanya adalah ia merasa bahwa dia merupakan warga negara dunia sehingga bisa berperan dan memiliki peranan untuk seluruh dunia. Tentu ini menjadi antitesa terhadap suatu unsur kelompok/kedaerahan tertentu saja. Jika dijewantahkan ke dalam slogan FISIP Menyapa, Peduli, dan Berbagi tentu memiliki makna yang sangat luas. Slogan ini sangat inklusif dan manfaat dari adanya FISIP di dunia ini tidak hanya bisa dirasakan oleh lokal civitas akademik FISIP Unsri saja, namun lebih dari itu yaitu FISIP yang lebih kosmpolitan menuju internasionalisasi. Maka, apapun yang dikerjakan oleh FISIP dapat berkontribusi bagi masyarakat global sehingga menjadi amal jariyah dan peningkatan mutu civitas akademik. Sehingga buku ini menjadi salah satu cara dari FISIP Unsri untuk berkontribusi dalam isu-isu sosial dan politik yang terjadi saat ini.

Agar tujuan dari FISIP Unsri ini dapat dicapai dan dijalankan dengan baik, dimulailah program-program yang dapat memajukan Fisip dan lingkungan global. Diantaranya adalah penekanan kinerja di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui pendidikan dosen di FISIP Unsri mengedepankan kualitas pendidikan melalui berbagai cara mulai dari intrakurikuler di dalam kelas maupun ekstrakurikuler seperti di laboratorium. Program pendidikan melalui Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) poros pembelajaran tidak lagi pada *lecturer centered* tapi sudah berubah menjadi *student centered*. Ini berarti mahasiswa harus menjadi aktor utama di dalam kelas sehingga akan menghasilkan *critical thinking* yang baik bagi mahasiswa.

Kemudian dalam ranah penelitian, dosen dan mahasiswa harus bersinergi dalam membuat penelitian agar hasil dari penelitian lebih tepat guna dan siap pakai, tentu ini menjadi pendukung dari slogan FISIP Menyapa, Peduli, dan Berbagi karena dapat menjadi

pemecah masalah dari kondisi sosial yang ada bahkan dampaknya bisa lebih luas dan lebih kosmopolitan. Sedangkan dalam bagian pengabdian kepada masyarakat, saat ini FISIP Unsri telah memiliki banyak program-program yang telah tersebar diberbagai desa baik di dalam Sumatera Selatan maupun berada di luar Sumatera Selatan. Sehingga FISIP Unsri tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan namun juga oleh masyarakat dunia yang sudah berada di ranah globalisasi melintasi batas lintas negara. Sehingga nilai-nilai globalisasi dan kosmpolitan dapat meluas ke berbagai penjuru. Tentu ini dapat mempercepat internasionalisasi FISIP Unsri diberbagai bidang ilmu. Apalagi saat ini FISIP Unsri memiliki empat jurusan yang sudah siap untuk mengglocal dan bersaing secara internasional dengan masyarakat dunia (kosmopolitan).

Salah satu cara kontribusi FISIP Unsri dengan slogan FISIP Menyapa, Peduli, dan Berbagi adalah dengan cara menulis sejarah awal dari berbagai jurusan yang di FISIP. Hal ini sebenarnya untuk memperkuat emosional dan kedekatan antara penulis dengan pembaca yang diharapkan dapat disebarluaskan ke masyarakat luas. Pepatah menyatakan “tak kenal, maka tak sayang”, maka dari itu melalui buku ini sejarah diceritakan terlebih dahulu agar pembaca lebih mengenal mengenai FISIP Unsri yang kemudian akan menyukai dan menyayangi FISIP Unsri beserta dengan jurusan yang ada di dalamnya. Di dalam seri buku ini membahas mengenai artikel penelitian dari dosen-dosen yang ada di FISIP Unsri, tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas dan memberikan masukan dan solusi yang lebih konstruktif atas berbagai macam isu-isu yang ada di dunia internasional. Tema-tema yang disajikan sangat beragam, mulai dari isu lokal hingga global dibahas di dalam buku ini. Isu-isu dinamika kontemporer sosial politik yang terjadi saat ini menjadi nyawa dari buku ini. Sehingga bisa memberikan perspektif baru dan solusi baru dari beragam isu yang ada.

Adapun isi dari buku ini dimulai dari sejarah dari masing-masing jurusan yang ada di lingkup kerja FISIP UNSRI, yaitu dimulai Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, dan

Ilmu Hubungan Internasional. Sehingga pembaca dalam lebih dekat mengenal jurusan yang berada di FISIP UNSRI. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai berbagai judul artikel dari keempat jurusan tersebut seperti isu-isu dalam ranah sosial politik. Dengan demikian pembaca akan dibawa ke berbagai sudut pandang yang beragam dan memperluas perspektif ke ranah yang lebih luas. Lebih lanjut lagi, artikel yang ada di dalam buku ini dapat memantik karya-karya lainnya di tengah civitas akademik di FISIP Unsri sehingga memperkaya khasanah keilmuan dan memperkuat kolaborasi antar jurusan di FISIP bahkan kolaborasi dengan penduduk dunia lainnya. Sehingga misi FISIP Unsri menuju internasionalisasi dapat dicapai dalam waktu dekat. Harapannya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas karena di dalam buku ini memiliki beragam artikel yang dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pembacanya.

39 TAHUN FISIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA: Dari Sumatera Selatan untuk Peradaban Dunia

Andries Lionardo

Pendahuluan

Tahun 2022 ini tepatnya 39 tahun yang silam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (UNSRI) lahir sebagai salah satu kawah keilmuan di Indonesia. Usia tersebut adalah kondisi sebuah fakultas yang tentunya telah memiliki catatan sejarah panjang dalam membangun sumberdaya bangsa dan negeri. FISIP UNSRI dengan jargon “Kampus Kebangsaan” telah memberikan warna bagi peradaban kemajuan Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dan Dunia. Lembaga ini telah melahirkan beberapa alumni menjadi “*policy making* dan *policy executing*” di beberapa Pemerintahan Daerah. Kita sebut saja, misalnya H. SN Prana Putra Sohe telah menjadi Walikota Lubuklinggau dan H. Maulin Aklil menjadi Walikota Pangkal Pinang. Fakta di atas jelaslah menunjukkan kemampuan lembaga pendidikan ini dalam menghadirkan sosok kepemimpinan bagi bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Kegembiraan warga FISIP UNSRI Pada tahun 2022 ini semakin terasa istimewa setelah suksesnya penyelenggaraan pembelajaran yang terus inovatif dan adaptif dari awal pendirian hingga saat ini. Terlebih lembaga ini telah memiliki empat jurusan yang sangat diminati masyarakat yakni jurusan Administrasi Publik, Ilmu Sosiologi, Komunikasi, dan Ilmu Hubungan Internasional serta program studi Pascasarjana Magister Ilmu Sosiologi, Magister Administrasi Publik dan Program Doktor Ilmu Administrasi Publik. FISIP UNSRI terus berupaya dengan berbagai strategi dan

kebijakan publik untuk menciptakan inovasi yang sangat menarik dan kontekstual, yaitu menyongsong 39 Tahun FISIP UNSRI.

Strategi Merawat tradisi ilmu untuk membangun peradaban dunia telah membangkitkan semangat civitas akademika untuk terus melahirkan Sumber Daya Indonesia sebagai insan yang akan merawat alam semesta. Prinsip keseimbangan teori dan kondisi nyata masyarakat menjadi semangat baru FISIP UNSRI menjadikan mahasiswa sebagai kunci dalam membangun Indonesia Emas 2045. Pesan ini merupakan upaya implementasi dari frasa membangun peradaban dengan menciptakan sebuah kemajuan ilmu dan teknologi dan kebudayaan yang tinggi untuk menjadikan Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang, tetapi mampu menjadi negara terdepan yang unggul dalam kebijakan publik dunia.

Prinsip FISIP UNSRI Menyapa, Peduli dan Berbagi serta motto “keuletan, keluwesan menuju keunggulan dunia akan mampu menghantarkan civitas fakultas untuk hidup berakal, berharkat dan bermartabat bersama rakyat Indonesia di era disrupsi revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0. Adaptasi peradaban yang tinggi ini tak sekadar bagi FISIP UNSRI sebagai sebuah peradaban kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga peradaban yang berpusat pada pemikiran penciptaan manusia Indonesia yang mampu setara dengan warga global dunia. Ilmu pengetahuan adalah alat pengabdian tentunya indikator untuk mencapai harkat dan martabat tersebut.

Kejayaan FISIP UNSRI tentunya tidak terlepas dari nama “Sriwijaya” sebuah masa di mana telah hadir kerajaan besar nan jaya di abad ke-7 hingga abad ke-14 di Kota Palembang. Masa itu menggambarkan bahwa kunci hidup masyarakat yang sejahtera dan makmur adalah kemampuan memiliki ilmu pengetahuan sehingga melahirkan sikap dan keteladan dalam kepemimpinan. Dengan demikian wajar jika kita tangkap tujuan dari FISIP UNSRI adalah untuk melahirkan pemimpin emas Indonesia di masa yang akan datang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masa ketika ilmu dan pengetahuan menjadi alat membangun bangsa dan negeri, melalui masyarakat yang berilmu dan pemimpin yang berilmu.

Kehadiran FISIP UNSRI tentunya harus memiliki manfaat bagi alam semesta untuk menolak eksploitasi pendidikan ketika pengetahuan digunakan untuk merusak masyarakat. Bangsa

Indonesia akan bangkit manakala lembaga pendidikan mampu melahirkan calon pemimpin negara yang berwawasan lokal, nasional dan global. Selanjutnya, FISIP UNSRI dalam konteks keluwesan adalah lembaga yang mampu melahirkan para organisasi pembelajar (*learning organization*) dalam bersikap arif terhadap kondisi dunia seperti sebagai alam dan lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global dan isu lainnya. Di sanalah letak kesuksesan FISIP UNSRI kedepan untuk membangun “pemimpin dunia”. Lahirnya mahasiswa yang berkarakter pemimpin dunia akan menjamin kejayaan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sosok tersebut adalah sosok pemimpin yang mampu memberikan pemikiran kebijakan publik yang unggul bagi pembangunan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri.

Komitmen bersama civitas FISIP UNSRI akan menjamin prinsip satu kesatuan atas lahirnya pemimpin lokal (Sumatera Selatan), pemimpin nasional, dan pemimpin dunia yang akan terus merawat jagat ditengah terjalnya kemajuan zaman. FISIP UNSRI harus menjadi bagian dari komponen bangsa lainnya secara bersama-sama berusaha menyelesaikan persoalan dan ketimpangan melalui ilmu sebagai alat pengabdian, FISIP UNSRI harus menjadi lokomotif pendidikan agar masyarakat Indonesia tidak menjadi masih menjadi strata paling bawah dalam berkehidupan sosial ekonomi. Kolaborasi kelembagaan daerah sangat membantu menyelesaikan ketimpangan bagi pemerintah daerah membangun sistem birokrasi (Utomo, 2000).

Harapan dan tantangan internasionalisasi FISIP UNSRI tentunya terus menjadi sesuatu yang konkrit dan nyata dalam bagaimana mengimplementasikannya, bukan sesuatu yang abstrak atau sekadar slogan. Hal tersebut telah dipraktikkan FISIP UNSRI dalam menunjukkan eksistensinya sebagai kampus lahirnya para ilmuwan sosial di bumi Sriwijaya. *Tagline Fisip Menyapa, Peduli dan Berbagi*, telah melahirkan berbagai program. Misalnya, program FISIP UNSRI menyapa seniman menunjukkan kampus ini mampu bekerja sama dengan para seniman dan budayawan lokal yang tersaji secara nasional. Begitu juga program *political and cultural series* menunjukkan bahwa praktik ilmu sosial telah tersaji di era digitalisasi dan *society 5.0*. Dalam persoalan sosial dan politik, FISIP

UNSRI telah menjadi *benchmarking* kampus lain dalam merawat kemajemukan bangsa Indonesia.

FISIP UNSRI berkolaborasi Menuju Peradaban Dunia

FISIP UNSRI sebagai kampus yang memiliki nama besar Kerajaan Sriwijaya sudah selayaknya memberikan *platform* kemajemukan atas kebijakan publik yang unggul pada sektor pendidikan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut sangatlah diperlukan kolaborasi antar institusi publik sebagai tempat bertemunya dunia pendidikan, sektor swasta dan alumni terhadap dunia usaha dan industri dalam pengembangan keilmuan bagi kemajuan dan keunggulan negara Indonesia. Kebijakan publik menjadi kunci keberhasilan dalam institusi publik karena peran aktor nya yang sangat dominan (Dunn, 2002). FISIP UNSRI di era revolusi digital 4.0 harus mampu menjawab berbagai tantangan dan revolusi industri yang memaksa kita untuk merubah mindset menuju semangat (*spirit*), harga diri, (*self esteem*) dan keyakinan (*trust*) untuk menjadi fakultas kebangsaan yang bermartabat di mata dunia.

Oleh karenanya, seluruh civitas akademika wajib memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan skill berkolaborasi secara luwes dan ulet untuk bangsa Indonesia. Revolusi administrasi publik digital harus mampu menjawab tantangan dunia kerja bagi alumni FISIP UNSRI di masa yang akan datang dalam rangka menjawab dunia kerja global. FISIP UNSRI harus mampu berkolaborasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan revolusi industri ini untuk melakukan inovasi besar dalam membangun negara. Dengan demikian sejalan dengan pendapat bahwa institusi publik dapat membangun tujuannya melalui implementasi kebijakan publik yang didukung oleh pemahaman terhadap hambatan dan tantangannya (Grindle, 1980).

FISIP UNSRI tidak dapat berjalan sendiri untuk menciptakan keunggulan dunia pendidikan, akan tetapi terdapat beberapa aspek pendukung lainnya yang biasa disebut dengan sinergi dan *networking* dalam dunia pendidikan. Peran FISIP UNSRI akan membantu sumber daya manusia di Perguruan Tinggi untuk dapat meningkatkan kemampuannya sehingga unggul dalam partisipasi penyusunan kurikulum sesuai dengan kondisi dunia kerja yang

akan terus berubah dan berkembang. Sinergi yang luwes dan ulet akan menciptakan kekuatan baru aktor kampus dalam membangun kedaulatan manusia Indonesia menuju daya saing antar bangsa. Akselerasi FISIP UNSRI harus hadir dalam membangun *knowledge management* mahasiswa di masa yang akan datang sehingga bisa menjawab pengembangan manusia sebagai pilihan publik (*public choice*) solusi untuk masalah kebijakan pendidikan. FISIP UNSRI harus mampu menjadi aktor implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka guna menjawab dan mendorong mahasiswa mampu memiliki keahlian khusus yang unggul dan siap untuk bersaing di tengah peradaban dunia. Kolaborasi dengan para profesional industri atau dunia usaha harus hadir di kampus.

Dengan demikian, upaya strategi pusat peradaban ilmu akan menjadi prioritas FISIP UNSRI dalam memberikan memberi rahmat bagi semua. Sudah selayaknya kita semua civitas keluarga besar FISIP UNSRI di ulang tahun ke 39 ini mampu membangun *self management* diri kita masing-masing untuk mencapai visi besar pendidikan Indonesia menuju peradaban dunia. Mari kita memberikan sumbangan-sumbangan kecil dan beberapa pemikiran akademis yang terkumpul dari banyak orang akan bernilai dan menghasilkan manfaat besar bagi publik. FISIP UNSRI dapat menjadi wadah bersama untuk mencapai tujuan besar. Potensi yang terserak dan berbagai keahlian yang tersebar yang dimiliki oleh banyak orang dapat dikelola dan diarahkan bersama-sama melalui institusi publik yang kita cintai ini.

Daftar Pustaka

- Dunn, William. (2002). *Public Policy Analysis An Introduction New Jersey*. Prentice Hall International Inc.
- Grindle, M. S. (1980). *Politic and Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press; New Jersey.
- Utomo, Warsito. (2000). *Otonomi dan Pengembangan Kelembagaan di Daerah*. Fisipol UGM.

BAB II

Selayang Pandang Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SEJARAH FISIP UNSRI

Muhammad Yusuf Abror, Dyah Hapsari Eko N, Andy Alfatih

Sejarah Awal Berdirinya FISIP UNSRI

Awal pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (UNSRI) dimulai pada tahun 1980 dengan melakukan persiapan secara administratif dan teknis. Adapun tim yang melakukan persiapan pembentukan FISIP diantaranya yaitu, Mustofa Abdulah, SH, Drs. A. W. Widjaja, Drs. Zainal Alamsyah, Drs. M. Ayoeb Akbar, H.A.S. Natabaya, SH, LLM. Tim melakukan studi banding ke FISIP yang ada di Jawa dan di sekitar Sumatera, melakukan konsultasi ke Ilmu-ilmu Sosial, Direktur Pembinaan Sarana Akademik, Ketua Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS), Gubernur Sumatera Selatan dan para tokoh masyarakat maupun pemerintah dan para alumni ilmu sosial dan ilmu politik yang ada di Sumatera Selatan. Namun, pada saat itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik belum dapat dibentuk menjadi fakultas yang berdiri sendiri karena melalui persetujuan Direktur Pembinaan Sarana Akademik Dirjen Dikti disarankan untuk membuat program studi terlebih dahulu di bawah koordinasi dan naungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Atas segala masukan dan arahan tersebut, tim pembentukan menindaklanjuti dengan melakukan pembentukan panitia persiapan yang dipimpin dan diketuai oleh Drs. Zainal Alamsyah dan Sekretaris Drs. Mansyur Rahman dan panitia teknis yang diketuai oleh H.A.S Natabaya, SH, LLM dan wakil ketua Drs. A. W. Widjaja. Hasil dari

dua tim persiapan tersebut menghasilkan rekomendasi dari Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selanjutnya dari Rektor Universitas Sriwijaya melakukan pengajuan persetujuan mengenai penyelenggaraan program studi kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sehingga pada tanggal 12 Februari 1983 disetujui pembentukan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7/DJ/Kep/1983. Adapun bidang ilmu yang berada di bawah Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah Ilmu Administrasi Negara sekaligus menjadi yang pertama. Pada tahun yang sama kegiatan ajar mengajar sudah mulai diadakan, hal ini ditandai dengan dimulainya kuliah umum oleh Prof. Dr. Selo Sumarjan pada tanggal 3 Agustus 1983. Maka, Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan bidang ilmu yang diselenggarakan yaitu Ilmu Administrasi Negara menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat ini.

Secara kelembagaan berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 10/DIKTI/Kep/1986 tanggal 4 Maret 1986, Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik langsung di bawah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sedangkan hubungan dengan Fakultas yaitu pada bidang akademik, kemahasiswaan, dan administratif hanya bersifat koordinatif. Sehingga Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus berupaya untuk merubah statusnya menjadi fakultas dari sebelumnya program studi. Upaya ini sudah beberapa kali diajukan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rektor Universitas Sriwijaya. Pada akhirnya pimpinan Universitas Sriwijaya secara formal mencantumkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dalam statuta Universitas Sriwijaya yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0431/0/1992 dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya. Perjuangan tersebut masih belum usai, hal ini masih membutuhkan kelengkapan persyaratan agar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

dapat berdiri secara definitif. Perjuangan tanpa kenal lelah tersebut menghasilkan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1421/DJ/4/1996 tanggal 10 April 1996 yang isinya antara lain untuk segera mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya.

Langkah awal yang dibentuk yaitu pada tahun 1997 membentuk satu program studi sehingga menambah program studi Sosiologi masuk ke dalam rencana pembentuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi Sosiologi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 378/DIKTI/Kep/1997 tanggal 25 September 1997. Pada tahun itu juga berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 378/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 September 1997, Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diubah menjadi Program Studi S1 Administrasi Negara. Berdasarkan kedua keputusan tersebut, Rektor Universitas Sriwijaya mengubah nama program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 470/PT.11.1.1/OT/1998.

Meskipun telah banyak usaha yang telah dikerjakan untuk merubah statu dari Program Studi menjadi Fakultas, namun ternyata tidak semudah itu. Perjuangan terus dilakukan oleh para pendiri salah satunya dengan bekal Surat Tugas Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0822/PT.11.1.1/e.5.9/2000 tanggal 15 Februari 2000, Drs. H. Slamet Widodo, MS berhasil menyelesaikan pengurusan izin pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2000 tanggal 9 Maret 2000. Berkat rahmat Allah dan izin Tuhan yang maha kuasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik resmi berdiri menjadi fakultas tersendiri dengan dekan pertamanya yaitu Drs. Mahdor Syatri, M.Si. Bahkan hingga tahun 2022 ini telah menambah lebih banyak jurusan dan program studi, adapun jurusan dan program studi yang saat ini telah berdiri di FISIP UNSRI adalah sebagai berikut:

1. Jurusan Starata S1:
 - Jurusan Ilmu Administrasi Publik
 - Jurusan Sosiologi
 - Jurusan Ilmu Komunikasi
 - Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
2. Program Studi Strata S2:
 - Magister Ilmu Administrasi Publik
 - Magister Sosiologi
3. Program Studi Strata S3:
 - Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik

Kerja sama antar Instansi

Kerja sama antar instansi merupakan bagian penting dari kemajuan suatu lembaga hal ini merupakan salah satu cara transfer pengetahuan maupun teknologi. Saat ini Kemendikbud sedang gencar mengedepankan misi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan keahlian dari mahasiswa maupun dosen. FISIP sendiri sudah memiliki beragam kerja sama jauh sebelum program MBKM ada, yaitu seperti pada tahun 2012 FISIP UNSRI merancang program internasionalisasi FISIP bekerja sama dengan *National Academy of Public Administration (NAPA)*, Vietnam ditandai dengan adanya *Memorandum of Understanding (MoU)*. Kerja sama ini disepakati oleh Rektor UNSRI, Prof. Dr. Badia Perizade, MBA., sedangkan dari pihak NAPA, MoU ditandatangani oleh President NAPA, yaitu Assc.Prof. Nguyen Dang Tanh. Sedangkan turunan dari MoU tersebut yaitu *Memorandum of Agreement (MoA)*, yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2012, dari pihak Unsri diwakili oleh Dekan FISIP, yakni Dra. Dyah Hapsari E.N.H, MSi. Sedangkan, pihak NAPA diwakili oleh *The Dean of Faculty of Basic Theory*, Dr. Hoang Quang Dat. Inisiasi kerja sama ini diawali ketika adanya konferensi internasional mengenai *Eastern Regional Organization for Public Administration* di Jakarta pada 28 Oktober – 1 November 2012 perwakilan dari FISIP Unsri beranggotakan Dr. Andy Alfatih, MPA dan Drs. Eko Budi Wijayanto, MSi., dan perwakilan

dari NAPA Vietnam Assc.Prof. Nguyen Dang Tanh beserta Assoc. Prof. Ngo Thanh Can, Ph.D. Atas pertemuan dari kedua belah-pihak maka diadakan kesepakatan kerja sama untuk saling berkolaborasi dalam segala bidang akademik dan penelitian. Melalui kerja sama ini FISIP Unsri mengirimkan dosen ke NAPA Vietnam pada tahun 2013 diantaranya adalah Dra. Dyah Hapsari ENH, MSi sebagai Dekan FISIP Unsri, Dr. Andy Alfatih, MPA sebagai dosen Jurusan Administrasi Negara, Dr. Andries Lionardo, SIP, MSi sebagai Dosen Jurusan Administrasi Negara, dan Merryanti, S.Sos., MSi sebagai Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unsri ke NAPA Vietnam.

Atas dasar kunjungan kerja sama tersebut, membuat hubungan kedua universitas semakin kuat. Hal ini ditandai dengan adanya program pertukaran mahasiswa FISIP Unsri ke NAPA di tahun 2013 dan mahasiswa NAPA ke FISIP Unsri pada tahun 2017. Kemudian dilakukannya kolaborasi penelitian antara pihak FISIP Unsri dengan NAPA yang diwakilkan oleh Dr. Andy Alfatih, MPA, Dra. Dyah Hapsari ENH, MSi, Diana Dewi Sartika, S.Sos., MSi. Selain pihak FISIP Unsri yang berkunjung ke NAPA, pihak NAPA juga melakukan kunjungan pada tahun 2014 dan 2016. Program konferensi Internasional HIPIIS yang dilaksanakan 2016 di FISIP Unsri juga mengundang pembicara dari NAPA yaitu Assoc. Prof. Ngo Thanh Can, Ph.D.

Selain berkolaborasi dengan NAPA Vietnam, FISIP Unsri juga mengadakan kerja sama dengan *Khon Kaen University's, Collage of Local Administration* dari Thailand melalui konferensi internasional dalam *The 5th International Conference on Local Government* pada tahun 2014 yang diadakan di Palembang. Kerja sama internasional bersama instansi lain juga terus berlangsung hingga sekarang. Seperti pada tahun 2018 kerja sama yang diinisiasi oleh Prof. Kgs. Muhammad Sobri sebagai dekan FISIP Unsri dan Prof. Alfitri, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP Unsri digencarkan kembali. Diantaranya adalah kerja sama bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia berkolaborasi melalui koneferensi internasional bertajuk *International Conference on Social Studies and Humanities (ICOSH)* yang dilaksanakan

setiap tahun. Hingga saat ini telah terselenggarakan lima kali konferensi internasional.

Bahkan kolaborator dari konferensi yang dimotori FISIP Unsri ini telah bertambah seperti datang dari Universitas Pendidikan Sultan Idris dari Malaysia, Dundee University dari Skotlandia, dan Edith Cowan University dari Australia. Di tahun 2022, FISIP Unsri telah menambah rekan kerja sama internasional dengan Rikkyo University. Kerja sama ini ditandai dengan dilakukannya kegiatan *public lecturer* dengan mengundang Prof. Yukiko Kuramoto, PhD membahas *Gender Mainstreaming and Global Public-Private Partnerships* di FISIP Unsri, Palembang.

Kerja sama antar institusi ini tidak terbatas pada universitas luar negeri, namun juga universitas dalam negeri. Tercatat diantaranya FISIP Unsri telah melakukan kerja sama yang didasari oleh MoU dengan Universitas Lampung, Universitas Jember, Universitas Islam Riau, UIN Syarif Hidayatullah dan akan lebih banyak lagi kedepannya. Selain bekerja sama dengan universitas dalam dan luar negeri, FISIP Unsri juga telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Pemda kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Bea Cukai, BKKBN, Imigrasi, dan PT. Penerbit Erlangga.

SEJARAH JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Januar Eko Aryansah

Sejarah Pendirian Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Jurusan Ilmu Administrasi menjadi Jurusan tertua di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang dulunya bernama Jurusan Ilmu Administrasi Negara merupakan jenjang studi sarjana yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang melakukan aktivitas pendidikan sejak tahun 1983 hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7/ DJ/Kep/1983 tanggal 12 Februari 1983. Pada saat itu Jurusan Ilmu Administrasi Negara berada di bawah Fakultas Hukum dengan nama Program Studi Ilmu Sosial dan Politik (Prosopol). Saat ini Jurusan Ilmu Administrasi Publik mendapatkan nilai Akreditasi A Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2838/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020. Jurusan Ilmu Administrasi Publik diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian akademik di bidang Kebijakan Publik, Manajemen Sektor Publik, dan Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal. Serta lulusan dari Sarjana Ilmu Administrasi Publik diharapkan mampu mengisi posisi-posisi penting di lembaga negara, lembaga pemerintahan daerah, organisasi publik dan privat lainnya.

Jurusan Ilmu Administrasi Publik memberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021 yang didasarkan

atas Surat Keputusan Rektor Nomor 0390/UN9/SK.BAK.Ak/2021 tanggal 22 Desember 2021. Kurikulum yang diberlakukan pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki muatan akademik dan memiliki muatan praktis. Muatan akademis ditujukan agar lulusan Ilmu Administrasi Publik memiliki kemampuan akademik dan didukung oleh motivasi yang tinggi sehingga dapat meneruskan ke jenjang studi pascasarjana. Sedangkan muatan praktis diharapkan dapat menyiapkan tenaga profesional Administrasi Negara yang mempunyai kualitas kepemimpinan, kemampuan mengelola organisasi, kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan menjadi manajer publik yang handal dan dapat dijadikan panutan dalam masyarakat. Jurusan Administrasi Publik memiliki tujuan agar mampu menghasilkan sarjana atau tamatan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum tahun 2021 dengan profil lulusan menjadi, birokrat, administrator publik, Analis kebijakan serta menjadi peneliti dan pengelola kegiatan lapangan.

Dalam perjalanannya Jurusan Ilmu Administrasi Publik telah mengalami banyak periode pergantian ketua program studi atau ketua Jurusan. Dimulai pada awal berdirinya program studi ilmu sosial dan politik (Proso spol) yaitu pada tahun 1983-1985 adapaun ketua prodi yang pertama adalah Drs. H Syafran Sjamsudin. Sebelum berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tahun 1985-1995 Jurusan Administrasi negara berada di bawah Fakultas Hukum dengan nama Program Studi Sosial dan Politik dengan Ketua Program Studi pertama adalah Prof. Drs. H.AW Wijaya sedangkan Sekretaris Program Studi mengalami beberapa kali pergantian dari Drs. Gatot Budiarto, M.Si, Drs. Joko Siswanto, M.Si, pada saat itu gelar Program Studi Sospol diberi gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Selanjutnya tahun 1996-2000 Ketua Program Studi ketuai oleh H. Gustam Idris, SH., M.Hum yang sekarang namanya diabadikan menjadi salah satu ruangan pertemuan di Gedung A FISIP Unsri Kampus Indralaya. Kemudian pada Tahun 2000 terjadi pemisahan dari dari Fakultas Hukum ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Dekan Pertama Drs. Mahdor Syatri, M.Si. Tahun 2000-2003

Program Studi Administrasi Negara diketuai oleh Drs. Ahmad Fikri Rahman. Selanjutnya pada tahun 2003-2006 ketua jurusan Ilmu Administrasi negara adalah Drs. Andy Alfatih, MPA dengan Sekretaris jurusan Drs. Syaifudin Zakir. Kemudian pada tahun 2004 dikarenakan Drs. Syaifudin Zakir melanjutkan pendidikan S2 ke Filipina Sekretaris Program Studi dijabat oleh Raniasa Putra, S.IP. Pada periode kepemimpinan Drs. Andy Alfatih MPA diselenggarakan kegiatan *English Speaking Seminar* sebagai wadah kegiatan pelatihan bahasa Inggris untuk dosen berupa kegiatan seminar dalam bahasa Inggris yang tujuan kegiatannya adalah untuk memfasilitasi dosen-dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara agar lancar berbahasa Inggris. Pada Periode ini untuk pertama kali Program Studi Administrasi Negara mendapat peringkat Akreditasi B.

Selanjutnya pada tahun 2006-2008 Dra. Lili Erina, M.Si terpilih sebagai Ketua Jurusan sedangkan sekretaris jurusan masih dijabat oleh Raniasa Putra, S.IP., M.Si, kemudian pada tahun 2007 dikarenakan Raniasa Putra, S.IP., M.Si akan melanjutkan pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran, Sekretaris Jurusan dilanjutkan oleh Sofyan Efendy, S.IP., M.Si. Pada tahun 2008 ketika Ketua Jurusan pada saat itu cuti melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah, kegiatan Jurusan diserahkan kepada Dra. Nengyanti, M.Si sebagai Plt ketua Jurusan Administrasi Negara untuk beberapa waktu mendapat amanah mengurus jurusan. Berkat perjuangan keras ketua jurusan dan para dosen-dosen pada tahun 2008 Jurusan ilmu Administrasi negara mendapatkan akreditasi peringkat A untuk pertama kalinya berdasarkan SK BAN-PT no.017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 yang ditandatangani pada 9 Agustus 2008.

Pada tahun 2009 Bu Dra. Lili Erina, M.Si melanjutkan pendidikan Doktor (S3) ke Universitas Padjadjaran di Bandung dan Ketua Jurusan Administrasi Negara dilanjutkan oleh Sofyan Efendi, S.IP., M.Si yang sebelumnya adalah sekretaris jurusan, kemudian untuk sekretaris jurusan dijabat oleh Junaidi, S.IP., M.Si. Kemudian selanjutnya pada periode tahun 2010-2012 ketua Jurusan Ilmu Administrasi negara diketuai oleh Dr. M Husni Thamrin., M.Si bersama dengan Junaidi, SIP, M.Si sebagai sekretarisnya,

menjadi Ketua dan Sekretaris Jurusan. Tahun 2012 Dr. M Husni Thamrin diangkat menjadi ketua Magister Administrasi Publik dan dilanjutkan dengan Dr. Andries Lionardo tahun 2012-2014 dengan sekretaris masih tetap dijabat oleh Junaidi, S.IP., M.Si.

Kemudian Pada tahun 2014-2018 Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si, bersama dengan Dra. Martina, M.Si menjadi Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Negara. Pada tahun 2016 Jurusan Administrasi Negara mendapat peringkat A untuk yang kedua kalinya dengan SK BAN- PT no. 2996/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Selanjutnya pada periode 2018-2022 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik adalah Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, dan Sekretaris Jurusan Ermanovida, S.Sos., M.Si. Pada tahun 2020 untuk ketiga kalinya Jurusan Administrasi negara mendapatkan Akreditasi peringkat A dengan Surat Keputusan BAN PT No. 2838/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 yang ditanda tangani pada tanggal 5 mei 2020, Sertifikat Akreditasi ini berlaku sejak 5 Mei 2020 sampai dengan 5 mei 2025.

Pada periode ini dengan mempertimbangkan perkembangan keilmuan Administrasi Negara dan masukan dari berbagai pihak diusulkan perubahan nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara menjadi Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan perubahan gelar dari S.IP (Sarjana Ilmu Politik) menjadi S.AP (Sarjana Administrasi Publik) perubahan nomenklatur jurusan tersebut sampai saat ini didasarkan pada SK Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0077/UN9/SK.BAK.Ak/2019 tanggal 13 Maret 2019. Pada masa periode tahun ini yaitu tahun 2022-2026 ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fisip Unsri ditunjuk oleh Dekan untuk menjadi ketua jurusan adalah Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, sedangkan Sekertaris Jurusan dijabat oleh Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.S yang ditunjuk oleh Dekan Fisip Usri untuk menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri.

SEJARAH JURUSAN SOSIOLOGI

Gita Isyanawulan, Randi

Sejarah Pendirian Jurusan Sosiologi

Sejarah Jurusan Sosiologi tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya FISIP Universitas Sriwijaya. Jurusan Sosiologi merupakan salah satu jurusan tertua di FISIP Universitas Sriwijaya, setelah Jurusan Administrasi Publik yang dulunya bernama Jurusan Administrasi Negara. Jurusan Sosiologi secara resmi berdiri pada tanggal 25 September 1997. Awal mula terbentuknya, Jurusan Sosiologi FISIP Unsri dimulai sejak kepemimpinan H. Gustam Idris, S.H., M.Hum (Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Politik / Prosisipol). Lalu, Program Studi mengajukan proses penyusunan kurikulum dan pembentukan Jurusan Sosiologi dengan Ketua yaitu Drs. Tri Agus Susanto, MS dan Sekretaris Drs. Ridhah Taqwa, serta anggotanya dosen-dosen Sosiologi lainnya, yaitu: Drs. Yoyok Hendarso, Dra. Dyah Hapsari ENH, Dra. Rogayah, Drs. Mulyanto, Dra. Eva Lidya, Dra. Yusnaini, Drs. Martinus Legowo, Drs. Dadang H. Purnama, Dra. Retna Mahriani, dan Drs. Zulfikri Suleman. Selain itu, terdapat juga staf administrasi yang turut membantu dalam persiapan pembentukan Jurusan Sosiologi, yaitu; Johansyah, S.H., Yules Hartman, S.Sos., Erizal Novansyah, S.Sos (saat ini bertugas di KPA Unsri), Arfan Syukri (saat ini bertugas di FE Unsri), Alm. Zubairi, Syarifuddin, Ibrahim Effendi, S.Sos, dan Ibu Halimah. Saat itu, proses pembentukan Jurusan Sosiologi, dilakukan melalui dua tahap yaitu diajukan ke rektor dan kemudian diproses langsung ke pusat.

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah sebagai institusi yang bergerak dalam bidang keilmuan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang bertanggungjawab dalam perkembangan dan analisis dinamika persoalan sosial kontemporer di masyarakat. Tentunya tanggungjawab tersebut sesuai dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) terus maju dan mengembangkan kurikulum untuk mewujudkan lulusan yang berkualitas. Disamping itu juga didukung oleh dosen-dosen bertalenta lulusan dalam negeri dan luar negeri yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi kualitas. Dosen-dosen tersebut tentunya memiliki kualitas keilmuan yang sesuai dengan bidang kajian sosiologi, yaitu; perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat, sosiologi politik, sosiologi gender, sosiologi konflik, kewirausahaan, pemetaan sosial, modal sosial, dan lain -lain.

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sriwijaya untuk pertama kali terakreditasi C oleh BAN-PT. Namun berkat kerja keras dan semakin meningkatnya kualitas maka akreditasi jurusan Sosiologi mengalami beberapa kali perubahan. Tahun 2003 sampai 2008 terakreditasi C oleh BAN-PT. Selama dua periode dari tahun 2008 hingga tahun 2013 mendapatkan akreditasi B oleh BAN-PT dengan 2 (dua) konsentrasi yaitu perencanaan sosial dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2019 hingga 2023 Jurusan Sosiologi mendapatkan akreditasi A oleh BAN-PT dengan 2 (dua) konsentrasi yaitu perencanaan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan dosen, mahasiswa, maupun *stakeholder* sangat berperan dalam keberhasilan mendapatkan akreditasi A oleh BAN-PT, sehingga akreditasi ini nantinya akan berguna untuk mahasiswa lulusan Sosiologi dan dapat bersaing secara global.

Dalam struktur kepemimpinan, Jurusan Sosiologi pertama kali dipimpin oleh masing-masing ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan yaitu Drs. Yoyok Hendarso, MA (Periode 1998- 2000); Kedua, Drs. Ridhah Taqwa dan Dra. Dyah Hapsari ENH (Periode 2000-2002); Ketiga, Dra. Yusnaini, M.Si dan Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si

(Periode 2002-2006); Keempat, Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si dan Yunindyawati, S.Sos., M.Si serta Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si yang sempat menjadi PAW menggantikan Yunindyawati, S.Sos., M.Si (Periode 2006-2010); Kelima, Dr. Zulfikri Suleman, MA dan Mery Yanti, S.Sos., M.A (Periode 2010-2014); Keenam, Dr. Dadang H. Purnama, M.Hum dan Rudi Kurniawan, S.Th.I (Periode 2014-2018), M.Si; Ketujuh, Dr. Yunindyawati, M.Si dan Safira Soraida, S.Sos., M.Sos (Periode 2018-2022); dan kedelapan, Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si dan Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A (Periode 2022-2026).

Adapun dosen tetap PNS yang pernah ber-*homebase* di Sosiologi yaitu Dr. Zulfikri Suleman, M.A (saat ini dosen Jurusan Hubungan Internasional); Dr. Mulyanto, M.A (Purna tugas tahun 2021/dosen Jurusan Hubungan Internasional); Prof. Alfitri (saat ini dosen Ilmu Hubungan Internasional); Dra. Rogaiyah, M.Si (Purna tugas tahun 2020/dosen Jurusan Ilmu Komunikasi); Dr. Retna Mahriani, M.Si (saat ini dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi) dan Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si (saat ini dosen Ilmu Komunikasi).

Saat ini, Jurusan Sosiologi memiliki dosen tetap sebanyak 20 orang yang semuanya berstatus PNS dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya. Semua, dosen Sosiologi memiliki jenjang pendidikan minimal S2. Tata kerja dan keorganisasian di Jurusan Sosiologi berlandaskan pada aturan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur tentang tata kerja keorganisasian di Universitas Sriwijaya. Tata kerja tersebut mengatur mengenai jabatan fungsional dari dosen yang tugasnya adalah sebagai penyebarluas, pengembang ilmu pengetahuan dengan cara melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sriwijaya mengintegrasikan antara aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terjadinya sinergitas. Di samping itu juga jurusan Sosiologi telah melakukan dan mengembangkan kerangka substansi, konsep, teori, praktik dan metodologi yang berdasarkan pada *output* penelitian staff pengajar. Keahlian dalam pemberdayaan masyarakat dan perencanaan sosial

dilakukan melalui transfer ilmu pengetahuan yang ditekankan pada hasil kajian mendalam oleh para dosen. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sriwijaya.

Visi Jurusan Sosiologi adalah “*menjadi program studi terkemuka dan unggul dalam penguasaan teori Sosiologi, analisis, dan penerapannya untuk pengembangan masyarakat global berbasis riset*”. Sedangkan misi Jurusan Sosiologi, antara lain: 1). Mewujudkan program studi yang unggul dan terkemuka dalam penguasaan teori, metode dan analisis Sosiologi, khususnya bidang kajian masalah sosial, perencanaan sosial dan pemberdayaan masyarakat; 2). Mewujudkan fungsi dan tata kelola program studi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkompetensi, dan berdaya saing tingkat nasional; 3). Mengoptimalkan sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan adaptif dengan memperhatikan tata nilai yang berlaku dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing; dan 4). Mengembangkan jaringan kemitraan dengan *stakeholders* dalam mengkaji masalah-masalah sosial, perencanaan sosial dan menerapkan program-program pemberdayaan masyarakat.

Setelah berjalan selama kurang lebih 14 tahun, pada tahun 2011 Program Magister Sosiologi terbentuk. Koordinator Magister Sosiologi pertama kali yaitu Dr. Ridhah Taqwa dari tahun 2011-2019 (dua periode) dan Dr. Dadang H. Purnama, M.Hum dari tahun 2019-2023. Terdapat 5 (lima) Bidang Keahlian Utama (BKU) pada Program Magister Sosiologi, yaitu: BKU Sosiologi Pendidikan, BKU Pemberdayaan Masyarakat, BKU Sosiologi Perkotaan, BKU Sosiologi Lingkungan dan BKU Pengelolaan Konflik.

SEJARAH JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Ferdiansyah Rivai, Nur Aslamiah Supli, Sari Mutiara Aisyah

Sejarah Pendirian Jurusan Ilmu Hubungan Internasional:

The Untold Story

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional merupakan bungsu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya. Secara resmi Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai pendirian jurusan ini ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016. Di semester ganjil pada tahun yang sama, untuk pertama kali Jurusan Ilmu Hubungan Internasional menerima mahasiswa baru yang juga sekaligus mahasiswa angkatan pertamanya. Berdirinya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional tidak lepas dari peran Dekan FISIP masa itu, yaitu Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si, yang merupakan inisiator dimulainya kerja pendirian jurusan ini. Awal mulanya ketika Sari Mutiara Aisyah yang baru saja lulus dari S2 Diplomasi Perdagangan Global Universitas Gadjah Mada (UGM), pulang ke kampung halamannya Sumatera Selatan untuk mencari tempat pengabdian sebagai Dosen. Kebetulan Sari menempuh pendidikan magisternya dengan Beasiswa Unggulan Calon Dosen Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, yang mensyaratkan lulusan untuk mengabdikan sebagai dosen ketika ia lulus nanti.

Pertengahan tahun 2014, Sari datang ke FISIP Universitas Sriwijaya menemui Dekan, dan mengutarakannya niatnya untuk mengabdikan dirinya pada salah satu jurusan yang telah ada yaitu Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi atau Ilmu Komunikasi. Sari berasumsi dia bisa mengajar satu atau dua mata kuliah umum di sana yang juga sebelumnya diajarkan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, seperti Pengantar Ilmu Politik, Studi Globalisasi atau Teori Pembangunan. Akan tetapi Dekan menginginkan hal yang lebih dari itu, ia menawarkan *“Bagaimana kalau kita mendirikan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional? Masih ada kan teman-teman lain yang bisa diajak mendirikan Jurusan ini?”*

Di saat yang sama, Ferdiansyah Rivai sedang mengalami stagnasi dalam pengerjaan tesisnya. Pembimbing yang harus diganti, lalu keresahan menjawab pertanyaan harus mengabdikan di mana pasca kuliah magister, membuatnya kehilangan semangat dalam mengerjakan tesis. Ferdi merupakan senior Sari di saat S1 dan teman satu angkatan di S2 Diplomasi Perdagangan Global UGM, serta sama-sama penerima Beasiswa Unggulan Calon Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sebuah panggilan telepon dari Sari memecah stagnasi tersebut. Ia diajak untuk bergabung mendirikan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di FISIP Universitas Sriwijaya. Alhasil, tesisnya mampu diselesaikan dalam waktu satu bulan, dan Ia diwisuda bulan Oktober 2014. Akhir November 2014, Ia berangkat ke Palembang untuk bergabung dengan Tim Pembentukan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya.

Lain lagi cerita dengan Nur Aslamiah Supli (Mia). Ketika ada inisiasi mengenai pendirian Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, ia sedang sibuk menjadi jurnalis di salah satu media massa ternama di Sumatera Selatan. Ia juga belum lama menyelesaikan studi

masternya di Jurusan *Strategic Studies* Universiti Utara Malaysia. Dari sebuah percakapan dengan Wakil Dekan III FISIP waktu itu Dr. Andries Lionardo, Mia tertarik untuk ikut bergabung ke dalam Tim Pembentukan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Akhir November 2014, Surat Keputusan Dekan Mengenai Tim Pembentukan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional ditandatangani. Ditunjuk sebagai Ketua Tim adalah Dr. Andy Al-Fatih, MPA, Sari Mutiara Aisyah sebagai Sekretaris, serta Ferdiansyah Rivai dan Nur Aslamiah Supli sebagai Anggota. Selama kira-kira satu bulan tim ini bekerja Senin sampai Jumat untuk menyusun proposal pembentukan jurusan yang akan diajukan ke Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu Senat Universitas Sriwijaya, dan kemudian dikirimkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ruang Rapat Kampus FISIP Bukit menjadi saksi pendirian Jurusan ini, yang hari ini telah berubah menjadi Ruang Dekan.

Di pertengahan bulan Desember, pengerjaan proposal yang sudah mencapai delapan puluh persen (hanya tinggal menambahkan deskripsi mata kuliah dan melengkapi beberapa lampiran) terpaksa harus dirombak karena ada perubahan *outline* proposal pendirian jurusan dari Dirjen DIKTI. Proposal yang semula hanya berisikan 6 Bab, berubah menjadi 9 Bab. Tim terpaksa harus merombak proposal dan menambahkan beberapa hal yang sebelumnya tidak diminta. Beruntung tim selalu *update* website Dirjen DIKTI, sehingga perubahan ini cepat diketahui. Dalam menyusun proposal ini, tim mencoba membaca seluruh kurikulum Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang ada di Indonesia dan juga kurikulum Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang ada di Malaysia. Waktu itu Tim menyimpulkan bahwa tidak ada kurikulum yang seragam pada jurusan-jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang ada di Indonesia. Keseragaman tersebut hanya dalam kajian-kajian pokok seperti Organisasi dan Administrasi Internasional, Ekonomi Politik

Internasional, serta Diplomasi. Hampir setiap jurusan memiliki konsentrasi yang berisikan mata kuliah unik yang tidak ada di kampus lain. Seperti di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, ada mata kuliah Diplomasi Minangkabau. Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, banyak mata kuliah yang terkait dengan Kejahatan Transnasional.

Pendirian jurusan baru diharuskan untuk menyertakan keunggulan dan keunikan jurusan tersebut dari jurusan-jurusan sama yang sudah ada. Terkait dengan keunggulan, tim tidak terlalu pusing karena Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unsri akan menjadi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pertama di Sumatera Selatan. Bahkan di beberapa provinsi tetangga juga tidak terdapat jurusan ini, seperti di Bengkulu, Jambi, serta Bangka Belitung. Oleh karena itu, dari sisi pangsa pasar mahasiswa, jurusan ini pasti akan memiliki peminat yang cukup luas.

Dari sisi keunikan, Tim cukup panjang berdiskusi, terutama untuk menemukan apa kajian unik yang akan ditawarkan, dan bagaimana justifikasinya. Setelah menjalani serangkaian perdebatan, akhirnya tim memutuskan untuk mengambil Diplomasi Perdagangan Internasional serta Kajian Strategi dan Keamanan Internasional sebagai dua konsentrasi yang akan ditawarkan. Secara sederhana, dua konsentrasi ini sebenarnya adalah gambaran latar belakang pendidikan anggota tim penyusun. Akan tetapi, pemilihan dua konsentrasi ini sebenarnya sangat rasional dan memiliki justifikasi ilmiah yang sangat kuat. Dalam 10 tahun ke depan (sejak 2014), Ilmu Hubungan Internasional diprediksi akan terus mengalami perkembangan dalam isu perdagangan dan keamanan. Hal yang melatarbelakangi ini adalah semakin intensnya interaksi antar negara beserta komponennya (birokrasi, masyarakat sipil, dan bisnis), yang juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Inilah fase yang seringkali digaungkan sebagai "Era Globalisasi". Dalam era Globalisasi, sekat-sekat/batas-batas

negara semakin longgar, dan pergerakan manusia juga semakin leluasa ditandai banyak negara yang telah mencabut pembayaran visa kedatangan bagi warga negara asing.

Dalam aktivitas ekonomi, saat itu telah terbentuk beragam bentuk blok-blok perdagangan bebas baik secara Bilateral (*IJEPA-Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, Chile-Indonesia Free Trade Agreement*) atau Multilateral (WTO, NAFTA, ACFTA, *ASEAN Economic Community*). Dalam kerangka kerja sama ini, semua hambatan (*barrier*) dalam perdagangan barang diminimalisir, mulai dari hambatan *tarrif* (pajak/cukai masuk), hingga *quota* (pembatasan volume). Penyedia layanan jasa juga mengalami hal yang sama. Dalam skema *ASEAN Economic Community* misalkan, ada bagian *free movement of professional service*, di mana para profesional (dokter, *lawyer*, dll) bebas untuk membuka layanan jasanya di negara lain. Selain yang sudah disebutkan di atas, fenomena membiasnya batasan-batasan negara ini juga membawa implikasi yang tidak kalah rumit, yaitu semakin kompleksnya persoalan keamanan negara. Walaupun batas-batas negara mulai memudar, namun institusi “negara” masih tetap ada, dan identitas kewarganegaraan masih terus dipertahankan. Dengan begini, negara akan memasuki fase rentan, karena peluang kejahatan-kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba akan semakin melebar. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman baru bagi kajian keamanan internasional.

Atas dasar semua ini, ke depannya, Ilmu Hubungan Internasional memiliki dua tantangan besar, yaitu bagaimana menjawab tantangan dan peluang integrasi ekonomi pasar bebas, serta bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan keamanan transnasional akibat rezim perdagangan bebas. Oleh karena itu, untuk merespon perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional ini, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang akan dibuka di FISIP Universitas Sriwijaya fokus pada dua kajian: Diplomasi

Perdagangan Internasional, serta Kajian Strategi dan Keamanan Internasional. Semua justifikasi itu kemudian diletakkan dalam konteks Palembang dan Sumatera Selatan yang kebetulan sekali sedang gencar-gencarnya melakukan Internasionalisasi. Hal yang paling mencolok tentu saja beragamnya pagelaran acara-acara olahraga skala internasional: *Sea Games 2010*, *Islamic Solidarity Games 2013*, *Asian Games* yang akan digelar tahun 2018, serta beberapa acara olahraga internasional cabang-cabang tertentu. Internasionalisasi ini juga didukung infrastruktur transportasi seperti Bandara Internasional yang tentunya kemudian berimbas dengan banyaknya wisatawan ataupun pebisnis lintas negara yang singgah ke Palembang dan Sumatera Selatan.

Selain itu dari sisi historis, masyarakat luas juga sudah mengetahui bahwa Palembang memiliki riwayat panjang sebagai kota perdagangan internasional. Sejak era Srwijaya, Kesultanan Palembang Darusalam, bahkan hingga hari ini, Palembang masih aktif menjadi kota yang memiliki sumbangsih dalam geliat perdagangan internasional berbagai komoditi: mulai dari hasil perkebunan, pertambangan, kerajinan hingga produk-produk industri. Jurusan ini nantinya diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan sekaligus memelihara visi internasional tersebut. Proposal pendirian ini berhasil dirampungkan di awal tahun 2015, dan kemudian melewati serangkaian diskusi di Senat Fakultas dan Universitas. Alhamdulillah, sekitar bulan maret 2015, proposal ini dinyatakan layak untuk diajukan ke Dirjen DIKTI. Sekitar bulan Oktober 2015, tim mendapatkan kabar dari dekan bahwa Jurusan Ilmu Hubungan FISIP Unsri diizinkan untuk berdiri pada tahun ajaran berikutnya. Kabar ini kemudian terbukti dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15/KPT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 mengenai izin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S-1) FISIP Universitas Sriwijaya.

Hari ini di tahun 2022, 8 tahun sejak tahun 2014 dan 6 tahun sejak berdiri secara resmi di tahun 2016, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional telah tumbuh menjadi Jurusan dengan beragam pengalaman, dinamika, serta prestasi. Dalam catatan Pangkalan Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saat ini tercatat 22 Nama Staf Pengajar. Jurusan ini juga didukung oleh 3 Tenaga Kependidikan Jurusan, jumlah mahasiswa yang terdaftar lebih dari 1000 orang, serta ratusan lulusan yang sudah berkiprah di berbagai bidang pekerjaan. Staf pengajarnya terlibat dalam banyak kegiatan baik skala lokal, nasional atau internasional. Semua ini diharapkan akan terus meningkat progresinya, agar dapat mendukung visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga visi Universitas Sriwijaya.

BAB III

Dinamika Isu-isu Sosial Politik Kontemporer Ilmu Administrasi Publik

NEGARA GAGAL VS NEGARA BERHASIL

M. Nur Budiyo

Negara Gagal (*Failed State*)

Pada pertemuan negara G-20 di Meksiko 9 Oktober 2012, Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah selesai mempresentasikan kemajuan ekonomi Indonesia dengan bangganya dikagetkan oleh munculnya publikasi yang dirilis oleh lembaga riset nirlaba *The Fund for Peace (FFP)* yang berkerja sama dengan majalah *Foreign Policy* menyatakan Indonesia *warning* atau beresiko menjadi negara gagal. Indonesia beresiko menjadi negara gagal karena peringkatnya 63 dari 177 oleh organisasi riset nirlaba FFP. Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam siaran pers yang diterima detik.com pada Kamis 21 Juni 2012, mengindikasikan bahwa skor Indonesia meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2012, nilai indeks negara gagal Indonesia di tahun 2012 adalah 80,6%. Nilai indeks Indonesia mengalami naik turun sejak tahun 2005. Pada tahun 2007, peringkat indeks untuk Indonesia meningkat menjadi 84,4 dari 89,2 pada tahun 2006. Pada tahun 2008 menjadi 83,3 dan tahun 2009 menjadi 84,1. Kemudian pada tahun 2010 menjadi 83,1, tahun 2011 menjadi 81,6, dan menjadi 80,6 pada tahun 2012. Berdasarkan data tersebut sangat tidak adil menilai Indonesia sebagai negara gagal hanya berdasarkan peringkatnya, yang turun hanya satu poin pada 2012, terlepas dari apakah nilai indeks terus meningkat sejak 2005.

FFP mengeluarkan versi lain dari hasil perbandingan negara gagal, posisi Indonesia pada tahun 2012 adalah peringkat ke 63 dari 177 negara, kemudian pada tahun 2011, peringkat ke-64 dari 177 negara, lalu pada tahun 2010 peringkat ke 61 dari 177 negara dan pada tahun 2009 peringkat ke 62 dari 177 negara. Dalam posisi Indeks Negara Gagal (*Failed State Index/FSI*), Indonesia termasuk dalam kategori negara dalam bahaya (*in danger*) menuju negara gagal. Mengacu pada hasil perbandingan negara gagal versi FFP tersebut, indikator yang digunakan oleh FFP antara lain adalah negara yang pemerintah pusatnya sangat lemah atau tidak efektif untuk mengontrol seluruh wilayahnya, kurangnya penyediaan layanan publik, korupsi dan kriminalitas, pengungsi dan gerakan spontan dari populasi, penurunan ekonomi yang tajam. Perlu diketahui, sejak tahun 2005, *FSI of the United States* sebagai *think-tank*nya FFP bekerja sama dengan majalah *Foreign Policy*. *FSI* tersebut diterbitkan setiap tahunnya. Indikator negara gagal yang digunakan oleh FFP untuk memastikan status suatu negara terdiri dari: (1) tekanan sosial demografis; (2) perpindahan besar pengungsi; (3) menciptakan keadaan darurat kemanusiaan; (4) meluasnya pembalasan kelompok minoritas atau tertindas; (5) tergesurnya rakyat karena masalah lingkungan; (6) penciptaan daerah miskin dan kumuh; (7) pembangunan ekonomi yang tidak merata; (8) perekonomian menurun drastis; (9) kriminalisasi politik dan delegitimisasi negara; penurunan pelayanan publik; (10) meluasnya pelanggaran HAM dan carut-marutnya penegakan hukum; (11) aparat keamanan bertindak sebagai negara dalam negara; (12) meningkatnya perpecahan elit politik; (13) intervensi politik pelayan publik. Menyimak dari 13 indikator yang menyebabkan suatu negara mengalami kegagalan maka pemerintah maupun rakyatnya harus pandai menyikapi suatu masalah.

Jika masyarakat keliru atau salah menyikapi, pakar politik dan media massa salah menganalisis atau mengomentari serta para politikus ikut bicara seolah-olah Indonesia diambang kehancuran sebagai negara gagal. Hal ini akan berdampak negatif bagi masyarakat, sehingga akan menimbulkan sifat apatis dan

arogansi terhadap pemerintah. Selain itu, berdasarkan hasil survei *FFP* tersebut ada tiga hal yang membuat posisi Indonesia semakin memburuk, Pertama, adalah tekanan demografis yang terjadi disebabkan oleh adanya masalah degradasi lahan dan tergusurnya rakyat karena masalah lingkungan. Kedua, karena ketidakpuasan kelompok yang terjadi karena di Indonesia bergulir banyak aksi demonstrasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Dan yang ketiga adalah masalah tekanan sosial akibat melebarnya jurang antara si kaya dan si miskin.

Selanjutnya, hal ini juga diperparah dengan situasi dan kondisi keseharian di lingkungan kita. Mulai dari rasa kian tidak aman dan tidak nyaman, begitu setapak kaki melangkah, meninggalkan "surga duniawi". Sepanjang melintas jalan negara, juga terasa kian disesaki beragam mesin besi berlari, debu asap pun mengepul bertanda polusi. Di tengah hiruk pikuk arus kemacetan lalin, kian marak kehadiran warga bangsa yang fakir, miskin dan tuna, saling beradu mengais rezeki. Secara konstitusional, kaum fakir, miskin dan tuna tersebut yang paling berhak dipelihara dan dimuliakan oleh negara. Namun apa yang terjadi? negara sebagai institusi paling sempurna dan mulia, malah disesaki oleh gerombolan para "gayus mania" yang saling berpacu untuk melakukan "koalisi eksploitatif", sehingga negeri ini terpenjara oleh aneka praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kenyataan sekarang, gerakan memperkaya diri sendiri, kini merajalela dan menimbulkan problem aktual tersendiri pada diri aparat, pejabat dan pemimpin negeri. Demi menjaga kehormatan diri, pencitraan publik, dukungan dan legitimasinya, fenomena *hyper-pathologis* yang bernama "kebohongan publik" pun menjadi hal yang berurat-akar dan mentradisi. Untung saja, masih ada 'alim ulama' yang masih peduli untuk menyuarakan kebohongan ini. Padahal negara ini, sejak merdeka hingga kini masih sangat kecil mengemban tanggungjawabnya untuk menjalankan fungsi-fungsi mendasar yang seharusnya dilakukan institusi negara. Suddaby (2006) menyatakan aneka fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara, mulai dari ragam minimal hingga ragam maksimal fungsi

yang seharusnya dilakukan oleh negara, diperankan dengan sangat aktif.

Terjadinya 'mega krisis' yang disebut Chomsky et al., (2005) adalah negara gagal. Artinya, negara telah gagal dalam menjalankan tugas dan kewajiban mulianya yaitu menjamin terpenuhinya aneka hak-hak dasar warganya baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum demi terwujudnya penghidupan yang layak dari segenap warga negara maupun tumbuhnya peradaban politik pemerintahan yang demokratis, beradab dan amanah. Sebenarnya negara gagal, jelas sangat bertentangan dengan konstitusi. Negara menurut Hegel adalah sebuah institusi paling mulia (sempurna) yang kehadirannya tidak bisa ditolak di tengah masyarakat modern atau moderat. Kehidupan masyarakat, akan selalu ditandai adanya berbagai kepentingan individu dan kelompok, masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Kalau warga dari sebuah negara dibiarkan untuk memperjuangkan kepentingan atau mengatur dirinya sendiri, maka akan terjadilah kekacauan luar biasa. Hal ini merupakan tesis dan antitesisnya ditemukan dalam perwujudan hadirnya sebuah institusi yang disebut negara (*state*).

Hegel tentang negara menyatakan suatu institusi yang lebih sempurna daripada masyarakat. Kesempurnaan dan kekuatan terletak dalam kesatuan dari tujuan yang bersifat universal yaitu merepresentasikan dan memperjuangkan kepentingan umum (*public interest*) (Wibowo & Pratomo, 2021). Demi terwujudnya kepentingan umum ini, Weber dalam Yasa et al., (2021) menyatakan negara dilengkapi dengan keabsahan memonopoli penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk memaksa termasuk penggunaan kekuatan secara fisik. (*the legitimate used of physical force*). Masalah negara gagal bukan hanya sekedar bersifat individual, akan tetapi justru lebih merupakan masalah bersifat institusional. Sebagaimana dinyatakan oleh Bach & Jann, (2010):

“Problem linked with poor performance, lack of professionalism and corruption in the public service are not the problem of individuals, i.e. cannot be solved on an individual basis, but have to do with the public service as an institution. Public servant cannot be expected to be

efficiently, effective and reliable, and perform within inappropriated institutions, structures and system. Appropriated institutional frameworks have to be in place and effective to constantly shape behavior of public and leaders and to ensure that they behave and act in a way that meets government's and people expectations. Institutions are the basis for the human factor in capacity building development, citizen's trust and legitimacy."

Pernyataan tersebut mengandung makna, urgensi dan relevansi pendekatan institusional dalam rangka memperkuat pelebagaan pemerintahan yang baik, amanah dan efektif (*good governance*). Tanpa kemampuan untuk melakukan institusionalisasi (melembagakan), maka reformasi justru hanya akan berbalik menjadi bagian dari sebuah masalah besar (bumerang). Sehingga semakin memperbesar masalah yang sesungguhnya sudah sangat besar.

Negara Berhasil (*Strong State*)

Indikator negara berhasil (*strong state*) merupakan lawan atau versus dari negara gagal (*failed state*). Intinya, (1) tidak ada tekanan sosial demografis; (2) terpolanya perpindahan penduduk; (3) stabilitas keamanan terjamin; (4) hubungan harmonis antara kelompok mayoritas dengan minoritas/tertindas; (5) kurangnya pengrusakan rakyat dengan kekerasan atau anarkhi karena masalah lingkungan; (6) penciptaan daerah maju dan modern; (7) pembangunan ekonomi yang merata; (8) perekonomian baik dan merata; (9) pelayanan publik yang prima; (10) tidak meluasnya pelanggaran HAM dan penegakan hukum yang adil; (11) aparat keamanan bertindak sebagai pelayan publik; (12) meningkatnya harmonisasi antar elit politik; (13) tidak adanya intervensi politik bagi pelayan publik. Bukan itu saja tingkat keberhasilan dari suatu negara, bisa juga ditinjau dari kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada saat ini. Apakah proses demokrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Meski sebenarnya, jika ditilik secara seksama, penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, banyak ketidakberesan yang membuat nilai legitimasi demokrasi defisit. Demokrasi sangat luas cakupannya.

Ada variabel lain yang memungkinkan nilai dari sistem demokrasi terjadi *deficit democracy*, seperti terjadinya kekerasan atau arogansi antar umat beragama, hasil sistem pemilu dan pilkada yang memicu raja-raja baru di daerah, ketidakterediaan bahan pangan murah dan banyak lagi. Padahal landasan negara Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi memberikan pedoman bagi rakyat Indonesia terdiri dari 4 (empat) hal pokok yaitu; keamanan, kesejahteraan, pendidikan, dan politik. Negara Indonesia sebagai pemegang tampuk kekuasaan tidak mampu lagi menyejahterakan rakyatnya, memberikan rasa aman, merajalelanya korupsi yang tidak juga teratasi, dan masih tingginya angka anak putus sekolah. Catatan Organisasi Buruh Dunia (ILO) mencapai 5,5 juta anak Indonesia usia sekolah putus sekolah hingga tahun 2012.

Selain itu, masalah kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia. Sebuah studi *World Bank* tajuk *Making The New Indonesia Work For The Poor* menempatkan negara Indonesia ada sekitar 39,1 juta orang atau 17,75 populasi rakyat miskin. Hal ini berarti angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini belum membaik, sedangkan data dari *Institut for Development of Economic And Finance* (INDEF), kesejahteraan bisa ditinjau dari tiga variabel: *Pertama*, *income* (penghasilan), *Kedua*, beban hidup, dan *Ketiga*, ada tidaknya program anti-kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah.

Penyebab Indonesia beresiko sebagai negara gagal bisa diangkat sebagai peringatan positif bagi pemerintah sebagai bentuk kewaspadaan dan amanat rakyat untuk segera menjalankan perannya seperti termaktub dalam UUD 1945 pada alinea ke-IV yang berbunyi: “..... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” Kemudian Bab-bab dalam UUD 1945 sudah kita pahami mengandung amanat untuk memberi hak dan pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; model perekonomian yang berasas usaha bersama dan kekeluargaan; bumi dan air serta

kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Solusi yang Harus Ditempuh

Selama ini "pembangunan" yang berjalan merupakan hasil reduksi dari "pembangunan nasional" menjadi "pembangunan ekonomi" semata, padahal tidak sesederhana dalam pelaksanaannya (*pure and simple*). Selama itu pula, pembangunan berjalan ke arah yang salah karena hanya mengarahkan pada pembangunan ekonomi semata. Indonesia dituntut menetapkan satu paradigma baru pembangunan secara nasional. Hal yang paling utama diubah adalah pemberdayaan diri manusia beserta mentalnya, bukan ekonomi saja untuk manusia bertahan hidup, melainkan dengan menetapkan satu paradigma baru pembangunan secara nasional. Ibarat sebuah kapal besar sebagai tempat kita semua mengapung di samudra yang maha luas. Lembaga yang berwenang dalam membuat Masterplan Percepatan Pembangunan Negara-Bangsa adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Oleh karena itu dalam hal pembangunan nasional ke depan harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, mengutamakan pembangunan nasional yang holistik di atas pembangunan ekonomi sektoral. Karena keberadaan negara dan bangsa lebih penting daripada ekonomi. Sektor ekonomi merupakan sektor prioritas dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, gagasan ekonomi pertumbuhan harus juga melibatkan realitas budaya sebagai pijakan dari dinamika sosial pada revolusi ke 45 yang melahirkan Indonesia sebagai negara.

Kedua, memperlakukan setiap suku, kelompok dan etnis yang berbeda dengan rasa hormat dan toleransi yang tinggi dengan tujuan untuk membangun koordinasi dan partisipasi untuk membangun masa depan bersama. Dengan begitu, Indonesia berkomitmen untuk memanusiakan manusia dari mana mereka berasal. Ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk tujuan masa depan. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam tentulah harus dikelola dengan baik. Sumber daya alam merupakan warisan oleh para pendahulu yang mana kita tidak boleh serakah

dan egois dalam pengelolaannya, agar anak cucu kita dapat dapat menikmati di masa yang akan datang.

Keempat, memprioritaskan pemberian pendidikan formal bagi semua generasi. Berdasarkan sejarah, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang telah memiliki sistem pendidikan jauh sebelum merdeka. Sistem ini yang membuat Indonesia dapat lepas dari kekuasaan kolonial asing. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia diciptakan untuk menumbuhkan semangat dan sikap mandiri bagi siswanya. Kelima, Pancasila merupakan landasan yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) di Indonesia. Oleh karena itu, rencana strategis harus disusun berdasarkan konsep nilai-nilai Pancasila dan mengesampingkan unsur politis agar negara tidak jatuh atau gagal.

Saat ini rakyat Indonesia menunggu regulasi demi regulasi yang baik di masa mendatang. Harapannya, semoga regulasi “pro rakyat” menjadi kenyataan bukan impian semata. Janji pemerintah atau pemimpin bangsa bukan hanya menjadi retorika pengelabuan rakyat atau kebohongan publik semata. Rakyat sekarang belum tahu apakah ini sebuah retorika pemerintah atau pemimpin bangsa seperti yang kerap dilakukannya selama ini? Atau ini hanya sebuah sandiwara politik? Rakyat akan melihat hasilnya nanti. Selamat berharap-harap cemas rakyatku! Salam Bhinneka Tunggal Ika.

Daftar Pustaka

- Bach, T., & Jann, W. (2010). Animals in The Administrative Zoo: Organizational Change and Agency Autonomy in Germany. *International Review of Administrative Sciences*, 76(3). <https://doi.org/10.1177/0020852310372448>
- Chomsky, N., Barsamian, D., & Interview of Noam Chomsky with David, B. (2005). Imperial Ambitions [Conversations on the post-9/11 world]. In *The American Empire Project* (Issue ART 793 Audio Renaissance).

- Suddaby, R. O. Y. (2006). From the Editors. *Academy of Management Journal*, 49(4).
- Wibowo, A. A., & Pratomo, S. (2021). Inovasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Era Masyarakat Informasi. *Jurnal Media Administrasi*, 3(1).
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>

KONSEP CAPACITY BUILDING: Dalam Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa

Rahmat Rafinzar

Pendahuluan

Desa merupakan struktur organisasi negara yang paling rendah, yaitu garis pelayanan pertama yang berinteraksi langsung dengan penduduk. Oleh karena itu, kapabilitas dan kapabilitas aparatur pengelola pertanian memegang peranan yang sangat penting. Aparatur pemerintahan desa harus menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa desa diartikan sebagai desa, adat istiadat yang menjadi bagian dari satu kesatuan hukum yang ada di masyarakat, yang memiliki batas-batas wilayah, dan mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara urusan bernegara, serta berkewajiban mengurus kepentingan, hak asal usul, hak tradisional penduduk desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Otonomi pedesaan yang merupakan seperangkat dari sistem sosial memiliki peran yang krusial dalam mengelola modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat lokal (Sururi, 2017). Nilai tradisional, kearifan lokal, dan kerja sama sosial menjadi modal sosial bagi masyarakat yang dapat menjadi langkah pemecahan masalah dan langkah dalam menghadapi dinamika dan perubahan dalam globalisasi. Kemampuan peningkatan taraf sejahtera masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan

sistem pemerintahan, termasuk dalam pemberian layanan kepada masyarakat desa dan kemampuan peningkatan desa untuk berdaya saing (LAN-RI, 2009). Oleh karena itu, kemampuan mesin pedesaan untuk mengelola otonomi pedesaan menjadi sangat penting. Dalam hal ini aparat pengelola desa harus berupaya untuk mengikuti pelatihan terkait peningkatan kapasitas aparatur desa.

Perangkat desa sebagai pelaksana dari sistem pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam otonomi desa. Perangkat desa meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab menjalankan pemerintah desa perangkat desa bertugas atau berperan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pemerintah desa merupakan unit terpenting yang terlibat langsung dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta merupakan tonggak penting dalam keberhasilan semua program pemerintah. Penguatan desa merupakan upaya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berupaya meningkatkan kemampuan melayani masyarakat, selain menyelaraskan desa dengan urusan negara yang diselenggarakan oleh desa, menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta tersedianya sumber daya manusia. Kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah kemampuan memiliki banyak arti, Johnson dalam (Mohi, 2021) menyatakan bahwa *"Kemampuan adalah perilaku rasional dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan"*. Sedangkan menurut Kartono dalam (Mohi, 2021), kapasitas adalah semua kekuatan, kemampuan, kekuatan, keterampilan teknis dan sosial yang dianggap lebih unggul daripada anggota biasa. Selain itu, Syarif dalam (Mohi, 2021) memiliki beberapa jenis keterampilan yang meliputi: kecerdasan, analisis, pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan/masyarakat, dan pengetahuan profesional. Merujuk pada pengertian dan jenis-jenis keterampilan tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri selalu diperlukan potensi, keterampilan, dan pengetahuan praktis untuk memenuhi tugas dan fungsi masing-

masing perangkat desa. Pengarang adalah suatu kemampuan yang dapat dinilai dari hasil karyanya atau kemampuan karyanya. Kapasitas berbicara tentang tingkat pendidikan, pelatihan dan kesehatan yang buruk.

Sementara itu, menurut Steers (2015), sebenarnya kapasitas aparatur negara tidak lepas dari pembahasan tingkat kematangan aparatur yang mencakup keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, tingkat pengetahuan aparatur desa dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki berdasarkan dari pelatihan dan pengalaman yang didapat. Sebagaimana yang disampaikan Steers yang mengemukakan bahwa dalam penentuan tindakan di dalam berorganisasi dapat mencapai tujuan. Salah satu unsur penting dalam pencapaian tujuan organisasi adalah aparatur desa atau anggota organisasi. Aparatur desa tersebut yang menjadi penggerak roda organisasi.

Otonomi pedesaan berperan penting dalam mengelola proses sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah desa adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis dan member layanan sosial kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan layanan bermutu. Dalam melakukan tugas tersebut pemerintah desa perlu melakukan perbaikan dalam aspek kepemimpinan dan pemerintah desa harus melakukan perubahan dalam hal kepemimpinan dan birokrasi yang berfokus pada memberikan layanan yang memiliki kualitas dan arah yang jelas sehingga kegiatan tersebut dapat terselenggara *good local governance*, bukan *bad management*.

Pembahasan

Kapasitas didefinisikan secara sederhana sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dengan solusi yang lebih baik. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sekarang, karena masyarakat akan terus berkembang dan masyarakat akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Secara umum, kegiatan

pembangunan diartikan sebagai konsep yang erat kaitannya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia (Yamoah, 2013). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam arti yang lebih luas dapat mengacu pada peningkatan kemampuan seluruh sumber daya manusia untuk melakukan tugas-tugas yang memenuhi standar kinerja yang lebih luas.

Dampak implementasi kebijakan desa khususnya terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan menyusun rencana pembangunan untuk pelaksanaannya. Pemerintah daerah harus mampu merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial yang mendesak. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan perencanaan keuangan dengan mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang tepat. Perubahan proses pembangunan di era demokrasi dan Aksi mogok masyarakat dari pusat ke partisipasi memberikan lebih banyak peluang partisipasi masyarakat di tingkat lokal, dimulai dari proses perencanaan (Sulaiman et al., 2015).

Finn & Checkoway dalam (Yunus, 2017) menjelaskan konsep pengembangan kapasitas yang berfokus pada tiga aspek penting, yaitu kapasitas individu, organisasi dan masyarakat (Gunawan, 2014). Lusaka dalam (Gunawan 2014) memberikan penjelasan lain membangun kapasitas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan dan program pembangunan secara efektif. Ferrero (2016: 620) mendefinisikan *capacity building* secara umum dipahami sebagai proses membantu pemerintah, masyarakat dan individu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Program peningkatan kapasitas seringkali dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta untuk menilai pilihan kebijakan mereka dan menerapkan keputusan secara efektif, yang dapat mencakup pendidikan dan pelatihan, reformasi kelembagaan dan hukum, peralatan ilmiah dan teknologi, dan bantuan keuangan.

Memahami Karakteristik *capacity building* Menurut Milen dalam (Sukrisno, 2018) yang mengatakan bahwa *capacity building* tentunya merupakan proses yang progresif dan bukan proses satu

kali bagi individu, organisasi atau perusahaan. Ini adalah proses internal yang dapat diaktifkan dan dipercepat hanya dengan bantuan dari luar, misalnya dalam kasus donor. Menurut Eko et. al., (2014), menjabarkan ada dua untaian utama yang terkait dengan kewenangan desa. Pertama, potensi desa dan efektivitasnya dalam pemetaan dan perencanaan pembangunan desa. Kedua, kekuasaan dan fungsi desa adalah mengelola dan mendistribusikan anggaran desa untuk kepentingan bersama. Organisasi perlu berkembang, meningkatkan, dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kelincahan organisasi (Grindle, 1997). Efisiensi mengacu pada penggunaan waktu dan sumber daya yang efisien yang diperlukan untuk mencapai hasil, efisiensi dalam hal koordinasi upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan kelincahan mengacu pada bagaimana kebutuhan dan kemampuan diselaraskan. Lebih lanjut, Grindle (2004) berpendapat bahwa suatu organisasi dapat menjadi efisien, efisien, dan kooperatif jika digunakan secara efektif.

Kriteria kinerja, menurut (Grindle, 1997), ada tiga: pertama, pengembangan sumber daya manusia, yang berfokus pada ketersediaan tenaga kerja profesional dan teknis, yang dapat dicapai melalui pelatihan, gaji, kondisi kerja yang baik, dan proses rekrutmen yang penting. Kekuatan individu kedua, memperkuat sistem manajemen organisasi yang berorientasi, untuk meningkatkan keberhasilan peran dan kinerja struktur mikro, yang dapat dilakukan melalui sistem insentif, pendayagunaan personel, kepemimpinan, budaya organisasi, sistem komunikasi dan manajemen; Ketiga, reformasi industri berfokus pada institusi dan sistem yang memiliki sistem koheren yang dapat diimplementasikan melalui undang-undang ekonomi, permainan politik, perubahan kebijakan, prosedur, dan reformasi konstitusi. Secara teori definisi kinerja berarti upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya mendorong organisasi untuk bertindak sesuai dengan fungsinya, dan upaya menciptakan kondisi lingkungan yang dibutuhkan organisasi. Bekerjalah yang baik. Berdasarkan informasi pengembangan kapasitas, dapat dibedakan tiga aspek utama, yaitu

pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Masing-masing derajat tersebut memiliki fokus dan jenis kegiatan yang berbeda.

Dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Sikula (2011) pengembangan dimaknai sebagai proses pengembangan dalam jangka panjang yang melalui proses yang direncanakan dan diorganisir di mana manajerial mempelajari pengetahuan baik secara konsep dan teori untuk mencapai tujuan. Menurut Suprihanto, pengembangan adalah suatu kegiatan yang memberdayakan karyawan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pengetahuan dan pengetahuan umum, termasuk perolehan teori dan pengambilan keputusan tentang masalah organisasi.

Tujuan utama dari upaya pembangunan adalah untuk menanamkan dalam masyarakat nilai-nilai dan sikap yang paling kondusif untuk pembaruan, pembangunan dan pembangunan negara. Ini termasuk mengembangkan insentif promosi yang efektif untuk bisnis. Upaya peningkatan peralatan modal dan keterampilan dalam perekonomian agar semua dapat saling mendukung dalam upaya peningkatan pendapatan perkapita dan produktivitas individu. Proses pembangunan bangsa pada dasarnya adalah perjuangan suatu negara untuk mengatasi keterbelakangan dan hambatan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia: a. pengetahuan karyawan b. keterampilan karyawan c. Kedudukan pegawai dan tanggung jawab atas tugasnya. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia menjadi penting karena perencanaan mengetahui apa itu sumber daya manusia dan bagaimana caranya. Sumber Daya Manusia atau *Workforce* dari *Human Resources and People Skills*. Tegasnya, kemampuan setiap orang ditentukan oleh kekuatan pikiran dan kekuatan tubuh. Sumber daya manusia adalah komponen pertama dan penting dari setiap kegiatan. Peralatan yang andal atau canggih tidak ada artinya tanpa peran efektif sumber daya manusia.

Aspek pengembangan sumber daya manusia pedesaan berkisar pada bagaimana membangun atau meningkatkan kapasitas kelembagaan pedesaan untuk mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014. Birokrasi yang tidak responsif serta prosedur dan struktur yang tidak memadai dapat merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi dan menyebabkan resistensi publik terhadap kebijakan publik (Baharuddin, 2015). Dimensi penguatan organisasi menjelaskan bagaimana organisasi pedesaan beroperasi dan berfungsi. Namun, desa yang kuat akan dapat bekerja lebih baik. Dimensi reformasi kelembagaan menjelaskan bagaimana desa memberikan dukungan kelembagaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, seperti peraturan daerah atau aturan yang jelas. Selain itu, HRD berfokus pada peningkatan perolehan bakat profesional dan keterampilan teknis seperti pelatihan atau promosi, melahirkan anak, kondisi kerja dan proses rekrutmen berbasis tindakan, dengan memprioritaskan kompetensi individu.

Proses pengembangan sumber daya manusia erat kaitannya dengan konsep pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk mencapai pembangunan. Pembangunan tidak terlepas dari pendidikan dan pelatihan. Pengembangan ini dapat berfungsi dengan baik jika dilakukan secara sistematis, konkrit dan sistematis. Sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Menurut Sastradipoera, pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman tentang lingkungan secara umum, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan untuk melakukan keterampilan tertentu. Pendidikan SDM fungsional adalah proses pengembangan jangka panjang yang mencakup pembelajaran dan praktik yang sistematis, dengan penekanan pada teori dan konsep abstrak. Di sisi lain, pelatihan (*retraining*) adalah proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan,

diterapkan dalam waktu yang relatif singkat dalam pendekatan yang mengutamakan praktik daripada teori.

b. Non-akademik

Banyak kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan secara mandiri atau oleh lembaga kelembagaan atau oleh pihak di luar lembaga. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia mandiri meliputi:

- 1) Pemerintah mewajibkan perangkat desa untuk membaca buku pelajaran, buku referensi, dan bahan tertulis lainnya
- 2) Penyajian program pendidikan dan pelatihan di televisi, video dan sarana penyajian lainnya.
- 3) Menghadiri seminar dan lokakarya secara teratur
- 4) Studi banding dengan kota pedesaan yang sukses dan maju.

c. Tugas Belajar

Dalam mengembangkan karyawan yang kompeten, setiap individu harus meningkatkan keterampilan dan kualitas sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan profesional tersebut adalah dengan belajar tugas, mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang diakui. Ini bisa menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan administrasi publik.

Dimensi Penguatan Organisasi

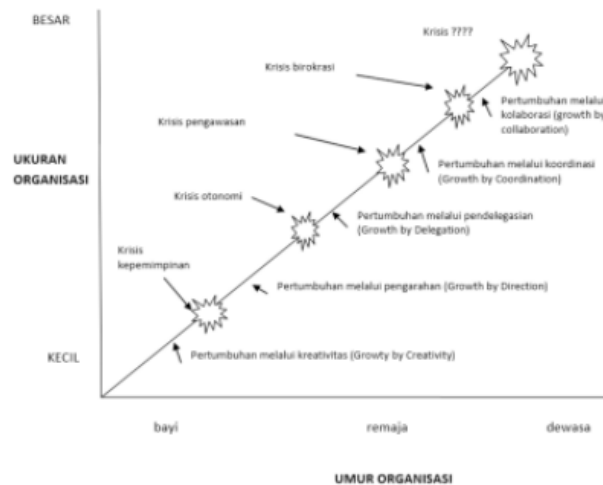
Dimensi penguatan organisasi terfokus pada pengembangan organisasi dalam hal pembelajaran. White dalam (Irawan, 2016) mengungkapkan bahwa pembelajaran organisasi dapat dianggap sebagai alat kunci untuk mencapai pembaruan strategis. Konsep ini menegaskan bahwa proses pembelajaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar pembaruan strategi *Fiol and Lyles* dalam (Irawan, 2016) *Organizational Learning*. Pembelajaran organisasi mengacu pada proses meningkatkan perilaku melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Penjelasan ini berfokus pada proses meningkatkan aktivitas melalui pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik. DiBella dan Nevis dalam (Irawan, 2016) memberikan

gambaran dari pembelajaran organisasi sebagai tindakan atau proses dari sebuah organisasi untuk dapat bertahan dan meningkatkan kualitas capaian kinerja melalui pengalaman.

Banyak pendapat ahli telah dipublikasikan tentang organisasi pembelajaran dan fenomena ini dibagi menjadi dua bidang: 1) proses pembelajaran (organisasi pembelajaran) dan 2) struktur organisasi formal (organisasi pembelajaran) (Ortenblad, 2002). Secara umum perbedaan praktis adalah antara studi tentang organisasi sebagai cita-cita dan studi tentang organisasi sebagai prosedur menuju cita-cita. (Ortenblad, 2002). Bell et. al., (2002) menetapkan kategori pembelajaran organisasi, yaitu proses pendidikan yang mengarah pada pembelajaran organisasi. Dua jenis upaya untuk membedakan antara teori yang berbeda. Proses pembelajaran organisasi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis (Bell et. al., (2002). Kategori yang menjanjikan: ekonomi, pengembangan, manajemen, dan operasi. Ini dapat digunakan dalam aspek lain dari penyediaan layanan, di mana pun sekolah itu berada. Meskipun ada banyak cara untuk memahami pembelajaran organisasi, ada lima prinsip, beberapa di antaranya umum bagi banyak orang (Burnes, 2009). 1) Kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk belajar pada tingkat yang sama atau lebih cepat dari perubahan lingkungan. 2) Belajar harus menjadi proses kelompok, bukan proses individu. 3) Harus ada perubahan mendasar dalam sistem berpikir (atau siklus tripartit) anggota organisasi. 4) Dengan menerapkan pembelajaran organisasi, organisasi mampu beradaptasi dengan cepat dan akurat terhadap kondisi yang berubah, serta perubahan yang diperlukan. 5) Organisasi tidak hanya dapat berubah, tetapi juga dapat beradaptasi, mempengaruhi bahkan mengubah lingkungannya. Dengan kata lain, kelangsungan hidup organisasi tergantung pada kemampuannya untuk belajar melampaui kecepatan perubahan lingkungan.

Salah satu model pertumbuhan organisasi. Greiner dalam (Irawan, 2016:56) mempelajari pertumbuhan organisasi untuk menentukan hal-hal penting yang harus diwarisi dari pertumbuhan itu. Greiner juga menyatakan jika struktur organisasi tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan, organisasi akan menghadapi kesulitan.

Greiner menyebut periode sebelum dan sesudah setiap titik kritis pertumbuhan melalui tahap kreativitas pertumbuhan arah melalui delegasi, pertumbuhan melalui koordinasi, dan pertumbuhan melalui kerja sama (pertumbuhan melalui kolaborasi). Urutan tahapan pertumbuhan dan titik kritis yang dilalui organisasi dalam proses pertumbuhan ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Tahapan Urutan Pertumbuhan dan Krisis yang Dilalui dalam Pertumbuhan Organisasi
Sumber: Greiner dalam Irawan (2016:57)

Pertumbuhan di tingkat organisasi harus didukung oleh pengembangan kapasitas organisasi yang paralel. Terutama ketika menghadapi krisis yang mempengaruhi organisasi, keterampilan organisasi akan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dimensi Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan berfokus pada kajian budaya kerja yang mendukung peningkatan kapasitas. Struktur dan budaya kelembagaan untuk mendukung program, organisasi dan sistem pengembangan kapasitas; mereka perlu dikelola dengan baik untuk fokus pada struktur mikro; yang penting harus bermanfaat. Dimensi ini mengubah aturan permainan ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan peraturan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti reformasi konstitusi. Birokrasi desa merupakan organisasi pelayanan pemerintah daerah yang bertanggung jawab

kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang bermuara pada *good governance*. Pemerintahan sendiri lokal di desa berdasarkan piagam. Menurut peraturan hukum, sektor jasa terutama bertanggung jawab atas urusan pemerintah daerah, dan langkah-langkah organisasi mencakup tanggung jawab berikut: a) perlengkapan desa; b) peningkatan jaminan sosial penduduk pedesaan; c) mempercepat kualitas pelayanan publik; d) meningkatkan kualitas pengelolaan pertanian; e) meningkatkan daya saing desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan daerah masing-masing. Mengelola organisasi yang efektif dan efisien, melalui koordinasi gabungan sinkronisasi. Menyederhanakan hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah. Sebelumnya, tidak didirikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pejabat daerah dituntut untuk menata kembali rencana organisasi yang sangat ketat dan padat agar pembagian kerja lebih fleksibel. Perencanaan organisasi desa merupakan proses pelebagaan tanpa akhir sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan makro dan mikro.

Pemerintahan desa sendiri bekerja dengan struktur organisasi desa untuk mencapai tujuan desa. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan seluruh mesin pedesaan. Pusat dari komponen utama adalah peralatan desa, yang meliputi komponen dari departemen eksekutif dan distrik. Setelah organisasi didesentralisasi, pelaksanaan tugas akan menjadi lebih jelas, karena dalam konteks organisasi yang berani, dualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar departemen masih terlihat jelas. Bagaimanapun, mereka memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sama. Akibatnya, tujuan organisasi tidak dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang besar dengan tingkat organisasi yang dibutuhkan paling sedikit untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Mengadaptasi model pengembangan kelembagaan global yang dikembangkan oleh Esman dalam (Lestari, 2019), proses pengembangan pelayanan publik sebagai berikut:

a. Kepemimpinan

Merupakan sekelompok orang yang secara aktif terlibat dalam pengembangan kebijakan dan program organisasi. mengarahkan kegiatan organisasi dan menciptakan serta memelihara hubungan dengan lingkungan; Dalam hal pengembangan filosofi dan budaya manajemen, kepemimpinan terutama mengacu (dan pada tingkat lebih rendah) pada karakter atau karakter pemimpin lokal. Kualitas mengemudi sangat penting; Hal ini perlu menjadi contoh, terutama di negara kita yang rawan dengan faktor keturunan.

b. Keyakinan

Berfokus tentang nilai/tujuan/niat/cara tindakan yang mendukung tindakan sosial. Prinsip dasar pengelolaan adalah nilai-nilai tata kelola yang baik; Ini berarti partisipasi dalam pelayanan publik; Efisiensi, efisiensi, keadilan, akuntabilitas, prinsip-prinsip dasar seperti transparansi (Dwiyanto, 2021).

c. Program

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau hasil dari kegiatan suatu perusahaan. Program adalah tindakan/kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan barang dan jasa publik yang menghormati hak asasi manusia. Maka dari itu, penyusunan konten program/kebijakan harus beretika dengan mempertimbangkan aspek manfaat, pemberdayaan, dan pelayanan/keberlanjutan pelayanan publik yang mengacu kepada beberapa indikator berikut: 1) efektivitas program; 2) Menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat; 3) efisiensi dan kepuasan (Ratminto dan Atik, 2005).

d. Struktur Internal

Kajian organisasi berfokus pada otoritas formal dan informal; pembagian kerja; Ini mewakili saluran dan proses komunikasi yang dibuat atau direstrukturisasi sedemikian rupa sehingga organisasi dapat mempertahankan dan mempertahankan pekerjaannya. Hal yang dimaksud dengan struktur internal ini adalah bentuk hubungan antar instansi pemerintah untuk pelaksanaan program pelayanan publik

yang dikelola oleh instansi tersebut. Struktur internal ini harus diubah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program yang efektif di masyarakat. Akibatnya, organisasi tidak boleh berada dalam formal yang kaku, tetapi dalam struktur atau mekanisme organisasi yang informal, fleksibel dan sementara; Bahkan mungkin dalam bentuk prosedur dan jaringan (Dwiyanto, 2021).

Kesimpulan

Masyarakat memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan layanan publik yang baik dengan kualitas yang tinggi dari petugas pemberi pelayanan, namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak yang tidak sesuai dengan kehendak atau harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan layanan publik yang ada saat ini cenderung membuat masyarakat bingung, lambat dalam proses, berbiaya mahal, dan tidak menyenangkan. Kondisi ini muncul karena adanya pandangan yang menempatkan masyarakat masih sebagai pihak yang “melayani” dan bukan justru sebagai yang harusnya “dilayani”. Sehingga dari kondisi tersebut tampaknya perlu dilakukan perubahan dalam pelayanan publik dengan adanya reformasi dengan upaya pengembalian dan penyesuaian kembali peran yang harus menjadi “pelayan” dan “dilayani” dalam arti yang sebenarnya.

Keberadaan negara pada dasarnya ada untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat harus dilakukan dengan upaya yang benar-benar memberikan layanan bukan sekedar pelaksanaan yang bersifat formalitas saja. Keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga dalam memberikan layanan untuk pencapaian tujuan akan berhasil jika kapasitas organisasi dilakukan dengan baik melalui penyediaan dan sumber daya manusia yang di dalam menjalankan organisasi dengan tantangan yang akan dihadapi dalam memberikan pelayanan. Kapasitas organisasi menjadi penting yang akan berpengaruh pada keberlangsungan kinerja organisasi. Kapasitas organisasi mencakup sumber daya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Peningkatan kapasitas pemerintah desa menjadi tantangan dalam upaya pemenuhan aspek pelayanan publik yang menjadi

tanggungjawab institusi pemerintah desa. Pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa harus dibenahi, karena kapasitas aparat desa yang berkualitas harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal. Termasuk tersedianya SDM sebagai salah satu usru utama dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang akan menentukan tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas organisasi dalam pemberian pelayanan publik, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. *Capacity building* menjadi langkah penting yang perlu dikembangkan pemerintah desa sebagai upaya peningkatan kualitas dan pengembangan lembaga pemerintah desa dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Baharuddin, B. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31 (2), 263-270.
- Bell, S. J., Whitwell, G. J., & Lukas, B. A. (2002). Schools of Thought in Organizational Learning. *Journal of the academy of marketing science*, 30 (1), 70-86.
- Burnes, B., 2009. *Managing Change. A Strategic Approach to Organisational Dynamics. 5th Ed.* Harlow, Essex: Pearson.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di INDONESIA*. UGM PRESS.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., & Aksa, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. *FPPD. Yogyakarta*.
- Ferrero, G., Setty, K., Rickert, B., George, S., Rinehold, A., DeFrance, J., & Bartram, J. (2019). Capacity Building and Training Approaches for Water Safety Plans: A Comprehensive Literature Review. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(4), 615-627.

- Grindle, M.S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17 (4), 525- 548.
- Gunawan, J., & Rose, E. L. (2014). Absorptive Capacity Development in Indonesian Exporting Firms: How do Institutions Matter?. *International Business Review*, 23 (1), 45-54.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publica.
- Lestari, A. W., & Wicaksono, D. B. (2019). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/kppn Kudus). *Reformasi*, 9 (1), 76-81.
- Mohi, W. K., & Akbar, M. F. (2021). Capacity Building of Village Apparatus in Ulapato A Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 1(1), 19-25.
- Ortenblad, A. (2002). Organizational Learning: a Radical Perspective. *International Journal of Management Reviews*, 4(1), 71-85.
- Pusat Kajian Manajemen Layanan Deput II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negar, Standar Pelayanan Publik, Jakarta: LAN, 2009.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan, Disertai dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Richard M. Steers, 2015, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Sikula, A. E. (2011). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Erlangga.
- Sukrisno, H. (2018). Level Capacity Building in Higher Education: Toward Global Competitiveness. *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (4.28), 327-332.

- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31 (2), 367-378.
- Sururi, A., & Rahmi, M. (2017). Engagement. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kopertais IV Surabaya*, e-ISSN, 2579-8391.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yamoah, E. E. (2013). Capacity Building and Employee Performance. *Canadian Social Science*, 9 (3), 42-45. <https://doi.org/10.3968/j.css.1923669720130903.1160>
- Yunus, M., & Sani, K. R. (2017). *The Capacity Building of Local Government in Sanjai Village, Sinjai Regency*. Bandung Islamic University.

CORE BELIEFS DALAM ADVOCATION COALITION FRAMEWORK KONFLIK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGUNAAN ALAT TANGKAP CANTRANG

Dimes Akbar Perdana, Sena Putra Prabujaya

Pendahuluan

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015 telah memutuskan dan menetapkan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*cantrang*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Peraturan yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 ini membuat seluruh nelayan di Indonesia tidak bisa mencari ikan lagi menggunakan pukat hela dan pukat tarik (*cantrang*). Kebijakan tersebut membuat nelayan merasa dirugikan karena pemerintah dianggap melihatnya dari satu sisi dan kurang solutif. Alat tangkap *cantrang* dianggap kurang ramah dengan kondisi laut, karena ikan besar sekaligus ikan kecil semua ikut masuk dalam jaring. Tidak hanya itu, ketika nelayan mengoperasikan *cantrang* terumbu karang juga ikut terangkat yang menyebabkan ekosistem laut terancam.

Dampak dari pelarangan *cantrang* membuat 5000-6000 kapal nelayan mangkrak, akibatnya muncul protes dari ribuan nelayan yang ada di Indonesia. Harian Kompas, Rabu (17/1/18) memberitakan ribuan nelayan melakukan aksi demo di istana negara. Ribuan nelayan melakukan aksi masa penolakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sekitar 25.000 nelayan yang terdiri dari seluruh nelayan di Indonesia, seperti nelayan Makassar, Lampung, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain.

Kebijakan pelarangan kapal cantrang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, keberlangsungan habitat ikan, meningkatkan potensi sumber daya ikan dan melindungi wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dari kerusakan. Tujuan dan maksud kebijakan permen KP nomor 2/Permen KP/2015 belum dapat diterima nelayan. Alat tangkap cantrang yang termasuk dalam pukot hela dan pukot tarik bersifat merusak, tetapi nelayan tidak mengakuinya. Cantrang telah menjadi sumber penghidupan nelayan seperti cangkulnya nelayan. Analoginya adalah cangkul tidak diperbolehkan, petani tidak bisa makan. Fenomena demo di Istana negara merupakan perlawanan nelayan cantrang menolak kebijakan pelarangan, dan menuntut jika memang benar dilarang mereka menginginkan solusi terbaik. Secara sosial dan kultural aksi demo terjadi karena negara dan masyarakat belum menemukan titik terang yang dapat menyelesaikan suatu problematika.

Dalam memahami fenomena konflik dan perubahan kebijakan dapat dilakukan melalui analisis kebijakan (Weible & Sabatier, 2009). Konflik dan perubahan kebijakan juga dipengaruhi oleh perilaku para aktor-aktor atau stakeholder yang terlibat (Weible & Heikkila, 2017). Tulisan ini tidak hanya menekankan pada konfliknya saja, akan tetapi juga tertuju pada nilai-nilai keyakinan atau *belief system* yang dipegang oleh masing-masing koalisi dalam konflik larangan kebijakan cantrang. Dalam mengkaji dan memahami dinamika dan perubahan kebijakan, berbagai kerangka kerja dan metodologi telah dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah teori keseimbangan, teori pilihan rasional, teori pilihan rasional institusional, aliran kebijakan, dan pendekatan inkrementalisme (C.E. Lindblom, 1959; J. Kingdon, 1984; Ostrom, 2007; Baumgartner, Jones, & Mortensen, 2007) serta Kerangka Koalisi Advokasi (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994; Weible & Sabatier, 2009; Weible et al., 2011).

Advocacy Coalition Framework juga dikenal sebagai ACF, menekankan pada bagaimana aktor kebijakan berperilaku, nilai-nilai dan keyakinan yang mengatur proses pembelajaran kebijakan, lokus kebijakan dan perubahan kebijakan selama proses panjang pembentukan kebijakan publik (Weible & Sabatier, 2009). Di banyak negara dengan berbagai jenis sistem kebijakan, ACF adalah metode yang paling sering dipakai dalam mengatasi masalah kebijakan. ACF telah digunakan di negara berkembang, terutama yang memiliki

kepedulian terhadap lingkungan, termasuk Indonesia (Elliott & Schlaepfer, 2001), Kenya (Kingiri, 2014), Ghana (Ainuson, 2009), dan bahkan di negara otoriter seperti China (Henry et al., 2014) & (Han et al., 2014).

Advocation Coalition Framework

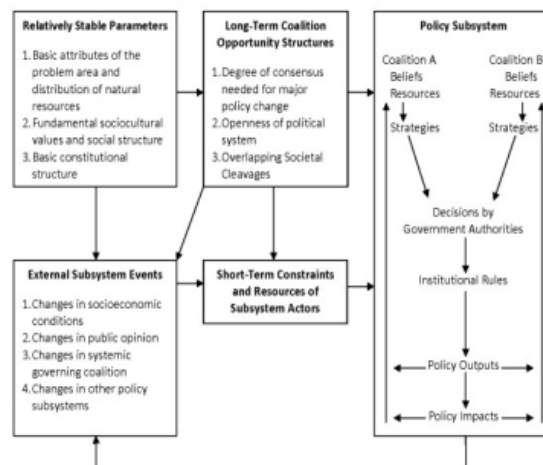
Advocation Coalition Framework (ACF) telah berkembang dalam 15 tahun terakhir, sejumlah besar literatur telah muncul tentang penerapan Kerangka Kerja Koalisi Advokasi (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier & Jenkins-Smith (1999) ke berbagai wilayah di dunia dan ke berbagai domain kebijakan publik. Kerangka tersebut telah terbukti bermanfaat untuk menjelaskan proses dan perubahan kebijakan misalnya, Fenger & Klok (2001). Mereka berpendapat bahwa, para aktor bertindak atas dasar keyakinan dan membentuk koalisi dalam mempengaruhi kebijakan publik. Lebih lanjut, menurut Sabatier dan Jenkins-Smith (1999), ACF adalah kerangka teoritis muda yang masih dalam pengembangan. Mereka telah membuat perubahan pada kerangka teori, merevisi beberapa hipotesis, dan menambahkan beberapa hipotesis baru untuk penilaian dan gambaran umum tentang perubahan (Sabatier & Weible 2007). Selain itu, mereka menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian empiris yang secara sistematis menghubungkan variabel inti ACF dengan perubahan kebijakan yang aktual.

Inti dari ACF adalah koalisi advokasi, yang penulis definisikan sebagai terdiri dari orang-orang dari berbagai posisi (pejabat terpilih dan lembaga, pemimpin kelompok kepentingan, peneliti, dll.) yang memiliki *belief system* atau sistem kepercayaan tertentu yaitu, seperangkat nilai-nilai dasar, asumsi kausal, dan persepsi akan suatu masalah. (Sabatier & Jenkins-Smith 1993). Dalam upaya mereka untuk berhasil mencapai tujuan kebijakan mereka, anggota koalisi advokasi mengkoordinasikan kegiatan mereka dan mengembangkan strategi dari waktu ke waktu yang berusaha untuk membuat lembaga pemerintah berperilaku sesuai dengan keyakinan kebijakan mereka (Sabatier dan Jenkins-Smith 1999).

Perspektif waktu, subsistem kebijakan, mekanisme desentralisasi, dan ideologi pelaku kebijakan merupakan empat prinsip dasar ACF (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Pertama,

perspektif tentang faktor-faktor yang membentuk proses kebijakan dari waktu-waktu. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa akan ada evaluasi setelah implementasi kebijakan mencapai tahap yang matang, karena tolak ukur dari tingkat kematangan kebijakan adalah adanya *outcome* atau dampak dan tidak sekedar *output* atau keluaran. Prinsip kedua adalah subsistem kebijakan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, seperti keputusan masyarakat, pemangku kepentingan kebijakan dan organisasi (Weible et al., 2011). Ketiga, proses pembuatan kebijakan perlu melibatkan semua lapisan atau level pemerintahan. Dalam hal ini titik tekan terhadap pemberian wewenang desentralisasi yang memungkinkan tanggung jawab pemerintah daerah atas pengambilan keputusan.

Keempat, perilaku kelompok atau kolektif banyak mewarnai proses kebijakan publik. Dalam konteks ini, istilah “kolektif” tertuju pada peran publik dalam hubungan para pemangku kepentingan. Keyakinan kolektif pemangku kepentingan terhubung dengan sistem kepercayaan terstruktur (*structured belief system*). Keyakinan atau pandangan dari para pelaku tersebut merupakan pertimbangan penting yang dimasukkan dalam kebijakan publik. Karena sistem keyakinan dan kepercayaan para aktor inilah yang akan mempengaruhi kebijakan.



Gambar 3.2 *Advocacy Coalition Framework*

Sumber : Weible et. al., (2011)

Belief System dalam Koalisi Adokasi Konflik Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Advocacy coalitions merupakan aliansi atau koalisi antar aktor kebijakan yang berpegang teguh atau memiliki keyakinan yang sama. Para aktor atau pelaku tersebut saling bekerja sama untuk merubah dan mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kehendak mereka. Terdapat tiga kelompok dalam koalisi aktor dalam konflik cantrang, koalisi pertama adalah koalisi aktor yang setuju atau mendukung kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang atau biasa disebut “Tolak Cantrang”, koalisi aktor yang menolak adanya kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang atau “Pro Cantrang”, dan terakhir adalah koalisi aktor yang netral atau yang cenderung tidak memiliki keberpihakan.

Keyakinan atau kepercayaan merupakan hal yang mendasari setiap koalisi untuk membentuk *belief system*. Sistem kepercayaan ini menjadi nilai inti yang mempengaruhi cara pandang dan pola pikir dalam mengambil keputusan. Jenkins-Smith & Sabatier (1994) menjelaskan bahwa ideologi para aktor kebijakan adalah nama lain dari *belief system*. Berikut ini adalah beberapa nilai yang diyakini atau dipegang oleh koalisi masyarakat “Pro Cantrang” dan “Tolak Cantrang”, nilai-nilai tersebut bersumber dari beberapa literatur mengenai konflik larangan penggunaan cantrang di Indonesia yang telah dianalisis sebelumnya.

Nilai-Nilai Pro Cantrang

Pertama, Alat tangkap cantrang tidak merusak lingkungan ataupun ekosistem karena pengoperasiannya tidak sampai dasar laut, bahkan pengoperasian cantrang di atas 16 mil di mana sudah tidak ada terumbu karang yang hidup dilautan, sehingga pengoperasian alat tangkap tidak merusak ekosistem (Kuwado, 2018).

Kedua, Menurut Hendrayana (2018) adanya penurunan pendapatan nelayan akibat hasil tangkapan dengan alat pengganti yang di rekomendasikan pemerintah tidak seproduktif cantrang, selain itu harga alat tangkap cantrang lebih murah dibandingkan

alat tangkap lain yang harganya lebih mahal tetapi dengan hasil tangkapan yang sama.

Ketiga, Laporan Intitut Pertanian Bogor (2018) mengenai kebijakan pelarangan penggunaan cantrang menggambarkan bahwa keberadaan kapal-kapal cantrang memberikan pengaruh ekonomi kepada masyarakat di sekitar pantai, di mana dalam sekali melaut kapal kapal cantrang dapat menyerap 15-20 orang untuk awak kapal.

Keempat, Pemerintah dinilai tidak begitu paham terkait penggunaan cantrang di lapangan, cantrang diyakini tidak merusak terumbu karang karena hanya bekerja di kolong air tanpa menyentuh dasar laut (Rahardian, 2018).

Kelima, Hilangnya pendapatan dari usaha penangkapan secara keseluruhan dan hilangnya mata pencaharian yang menyokong kebutuhan ekonomi keluarga (Ermawati & Zuliyati, 2015).

Nilai-Nilai Tolak Cantrang

Di lain sisi ada beberapa nilai yang diyakini oleh koalisi yang menolak cantrang. Sama seperti nilai yang menjadi dasar bagi masyarakat pro, nilai-nilai ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap penggunaan cantrang yaitu, **Pertama**, Alat tangkap cantrang mengancam ekosistem laut, karena, ikan besar sekaligus ikan kecil semua ikut masuk dalam jaring, bahkan terumbu karang pun ikut terangkat. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, Indonesia merupakan negara dengan kerusakan ekosistem laut yang tertinggi (Ambari M, 2019).

Kedua, Rohayati (2018) dalam penelitiannya mengenai Cantrang dan Kemiskinan, menjelaskan bahwa alat tangkap cantrang bukan berasal dari nelayan itu sendiri melainkan dari juragan kapal yang memiliki modal besar.

Ketiga, laporan KKP (2018) menyatakan bahwa hasil tangkapan cantrang di dominasi ikan berukuran kecil. Hal ini tentu saja menunjukkan indeks keragaman tidak sehat karena akan menyebabkan penurunan sumber daya perikanan yang juga

akan berdampak pada tangkapan nelayan tradisional yang tidak menggunakan alat tangkap cantrang

Keempat, adanya praktek *markdown*, atau kegiatan memanipulasi ukuran kapal, sehingga memudahkan nelayan dalam proses surat perizinan pengoperasian penangkapan ikan, tanpa harus ke pusat (Kahfi, 2018).

Kelima, menurut laporan WWF dalam Kahfi (2018) dari total hasil tangkapan keseluruhan trawl dan cantrang, hanya sekitar 18-40 persen yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi, sedangkan, 60-82 persen lainnya adalah tangkapan sampingan yang tidak dimanfaatkan (*discard*). Sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati.

Keenam, pemerintah telah menyiapkan skema perpindahan dari alat tangkap cantrang ke alat yang lebih ramah lingkungan seperti *Gillnet*, bubu lipat untuk ikan dan rajungan, trammel net, rawai dasar dan *Handline*, sehingga tidak ada alasan para nelayan untuk menolak (KKP, 2018).

ACF memiliki beberapa level atau tingkatan dalam sistem kepercayaannya, tingkatan pertama adalah *deep core beliefs* atau keyakinan atas pandangan terhadap dunia yang sulit untuk diubah. (Weible & Sabatier, 2009). Level selanjutnya adalah strategi dan posisi aktor di dalam subsistem kebijakan ketika mereka memegang keyakinan pada kebijakan yang fundamental (*policycore belief*). Lebih lanjut, Weible & Sabatier (2006) menjelaskan level tersebut secara signifikan mempengaruhi subsistem kebijakan yang sangat sulit untuk diubah. Pada level ketiga adalah elemen pendukung dari isu yang menjadi target.

Berdasarkan kerangka tersebut maka dapat diketahui bahwa, bagi koalisi Tolak Cantrang keyakinan inti (*core beliefs*) adalah keyakinan bahwa penggunaan alat tangkap cantrang mengancam ekosistem laut karena mengeruk hasil laut secara berlebihan. Dari total tangkapan keseluruhan, hanya 18-40 persen hasil tangkapan cantrang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, sisa tangkapan yang tidak dapat dimanfaatkan dibuang kembali

kelaut dalam keadaan mati, hal ini tentu saja merupakan tindakan pemborosan sumber daya laut. Sementara itu kebijakan terhadap inti kebijakan (*policycore beliefs*), meyakini bahwa melalui kebijakan pelarangan penggunaan cantrang pemerintah telah menyiapkan skema perpindahan dari alat tangkap cantrang ke alat yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak ada alasan para nelayan untuk menolak.

Sedangkan bagi koalisi masyarakat yang Pro Cantrang, keyakinan intinya (*core beliefs*) adalah keyakinan bahwa keberadaan kapal-kapal cantrang memberikan pengaruh ekonomi kepada masyarakat, di mana dalam sekali melaut kapal kapal cantrang dapat menyerap 15-20 orang untuk awak kapal serta hasil yang didapatkan lebih banyak dari penggunaan alat tangkap lain. Dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang, maka hilanglah pendapatan dari usaha penangkapan ikan dan hilangnya mata pencaharian yang menyokong kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, untuk kepercayaan terhadap inti kebijakan (*policy core beliefs*), meyakini bahwa alternatif alat tangkap yang disarankan oleh pemerintah tidak seproduktif cantrang. Hal tersebut menyebabkan ketidakpercayaan atau *distrust* kepada pemerintah.

Kesimpulan

Belief system menjadi dasar bagi koalisi advokasi untuk mempertahankan kepentingan dan berupaya mempengaruhi kebijakan. Tulisan ini hanya berfokus pada nilai-nilai keyakinan inti (*Core Beliefs*) yang dipegang oleh masing-masing koalisi dalam konflik larangan kebijakan cantrang. Sangat menarik dalam tulisan selanjutnya untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat berdasarkan pengaruh dan kepentingannya (Schmeer, 2000).

Advokasi koalisi Pro Cantrang memiliki keyakinan inti (*Core Beliefs*) bahwa keberadaan kapal-kapal cantrang memberikan pengaruh ekonomi kepada masyarakat, di mana dalam sekali melaut kapal kapal cantrang dapat menyerap 15-20 orang untuk awak kapal serta hasil yang didapatkan lebih banyak dari penggunaan alat tangkap lain. Sedangkan bagi koalisi Tolak Cantrang keyakinan

intinya (*Core Beliefs*) adalah bahwa penggunaan alat tangkap cantrang mengancam ekosistem laut karena mengeruk hasil laut secara berlebihan.

Daftar Pustaka

- Ainuson, K. (2009). An Advocacy Coalition Approach to Water Policy Change in Ghana: a Look at Belief Systems and Policy Oriented Learning. *Journal of African Studies and Development*, 1 (2), 16–27.
- Ambari M. (2019). Edhy Prabowo Harus Batalkan Rencana Revisi Pelarangan Cantrang, Kenapa? *Mongabay*. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2019/11/14/edhy-prabowo-harus-batalkan-rencanarevisi-pelarangan-cantrang-kenapa/>
- C.E.Lindblom. (1959). The Science of Muddling Through. *Public Administration Review*, 19 (2), 79–82.
- Edusainstek, S. N., Hartanti, N. U., Tegal, U. P., & Tegal, U. P. (2018). Dampak Pelarangan Penggunaan Cantrang terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tegal. 69–73.
- Elliott, C., & Schlaepfer, R. (2001). The Advocacy Coalition Framework: Application to The Policy Process for The Development of Forest Certification in Sweden. *Journal of European Public Policy*, 8 (4), 642–661. <https://doi.org/10.1080/13501760110064438>.
- Ermawati, N., & Zuliyati. (2015). Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, (1), 978–979. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Han, H., Swedlow, B., & Unger, D. (2014). Policy Advocacy Coalitions as Causes of Policy Change in China? Analyzing Evidence from Contemporary Environmental Politics. *Journal*

- of *Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16 (4), 313–334. <https://doi.org/10.1080/13876988.2013.857065>.
- Heikkila, T., & Weible, C. M. (2017). Unpacking the Intensity of Policy Conflict: a Study of Colorado's Oil and Gas Subsystem. *Policy Sciences*, 50 (2), 179–193. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9285-1>.
- Henry, A. D., Ingold, K., Nohrstedt, D., & Weible, C. M. (2014). Policy Change in Comparative Contexts: Applying the Advocacy Coalition Framework Outside of Western Europe and North America. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16 (4), 299–312. <https://doi.org/10.1080/13876988.2014.941200>.
- IPB, Y. S. K. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa. *Indonesia Marine Fellows Program – Mfp*, 80. J.Kingdom. (1984). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston: Little Brown.
- Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1994). Evaluating the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 14 (2), 175–203. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00007431>.
- Kahfi, M. A. (2018). 4 Alasan Jaring Cantrang Dilarang Digunakan untuk Menangkap Ikan. *Tribunnews*. Diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2018/09/03/4alasan-jaring-cantrang-dilarangdigunakan-untuk-menangkap-ikan>.
- Kingiri, A. N. (2014). Comparative Strategic Behavior of Advocacy Coalitions and Policy Brokers: The Case of Kenya's Biosafety Regulatory Policy. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16 (4), 373–395. <https://doi.org/10.1080/13876988.2014.942569>.
- KKP. (2018a). *FAQ Kebijakan Pelarangan Cantrang*. Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/1236-faq-kebijakan-pelarangan-cantrang>.
- KKP. (2018b). Ini Alasan Mengapa Cantrang Dilarang. *KKP.Go.Id*. Diakses dari <https://news.kkp.go.id/index.php/12320/>.

- Kuwado, F. J. (2018). Jokowi Terima Nelayan Penolak Cantrang. *Kompas Online*. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/13383061/pukul-1400-wib_jokowiterima-nelayan-penolak-cantrang.
- March, James G & Simon, H. A. (1958). *Organizations*. New York: University of Illinois.
- Pressman, J., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland: or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at all, This being A Saga of The Economic Development Administration as Told by Two sympathetic Observers Who Seek to Build Morals*. California: University California Press.
- Rahardian, L. (2018). Demo Cantrang: Nelayan Temui Perwakilan Istana. *Tirto.Id*. Diakses dari <https://tirto.id/demo-cantrang-nelayan-temui-perwakilan-istanacDnG>.
- Rohayati, Kinseng, R. A., & Satria, A. (2018). Cantrang dan kemiskinan nelayan di kota tegal jawa tengah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6 (3), 204–211.
- Schmeer, K. (2000). Stakeholder Analysis Guidelines - Section 2. *Stakeholder Analysis Guidelines*, 15, 338–345. <https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.338>.
- Weible, C. M., & Heikkila, T. (2017). Policy Conflict Framework. *Policy Sciences*, 50 (1), 23–40. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9280-6>.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2009). Coalitions, Science and Belief Change: Adversarial and Collaborative Subsystems. *Policy Studies Journal*, 37 (2), 195– 212.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & deLeon, P. (2011). A Quarter Century of The Advocacy Coalition Framework: An Introduction to The Special Issue. *Policy Studies Journal*, 39 (3), 349–360. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00412.x>.

BAB IV

Dinamika Isu-isu Sosial Politik Kontemporer Sosiologi

TEORI PRAKTIK DALAM STUDI TENTANG KEJAHATAN

Diana Dewi Sartika, Dadang Hikmah Purnama

Pendahuluan

Memahami perilaku dan tindakan tidak cukup melalui studi deskriptif saja, melainkan diperlukan adanya analisis mendalam terhadap fenomena yang dikaji, begitupun dalam memahami studi-studi spesifik terkait kejahatan. Perspektif sosiologis melihat munculnya kejahatan disebabkan oleh berbagai aspek sosial dengan segenap kompleksitasnya. Kemunculan perspektif sosiologis dimaksudkan pula untuk menolak asumsi individualitas (aspek internal individu) sebagai penyebab kejahatan, seperti dalam perspektif biologis dan psikologis.

Teori-teori dalam perspektif Sosiologis untuk menganalisis kejahatan cukup banyak ditemukan. Beberapa teori bahkan terlupakan atau tidak begitu sering dikutip dan digunakan. Perspektif sosiologis banyak melahirkan teori-teori terkait kejahatan dari *Chicago School*. Teori-teori ini telah berkembang cukup lama di Amerika, yaitu pada awal-awal tahun 1990an hingga saat ini, (Lilly et al., 2015). Beberapa teori dalam perspektif Sosiologis yang cukup sering digunakan dalam penelitian dengan tema kejahatan, antara lain: *Social Bond Theory*, *Control Theory*, *Labeling Theory of Delinquency*, *General Strain Theory*, *Cultural Transmission Theory*, dan *Differential Association Theory*.

Social Bond Theory (Teori Ikatan Sosial): teori ini mengemukakan bahwa ikatan-ikatan dan jaringan yang dikembangkan oleh seseorang selama masa tumbuh kembangnya akan mencegahnya untuk terlihat dalam kejahatan. Menurut Hirschi (2017), inti utama dari teori ini terdiri dari empat bagian yaitu: keterikatan, kepercayaan, komitmen, dan keterlibatan. Keempat komponen tersebut terkait dengan berbagai institusi sosial yang juga turut membangun stabilitas dalam masyarakat seperti keluarga, agama (masjid/gereja), kegiatan-kegiatan sekolah dan kemasyarakatan lainnya yang positif akan mendukung dan menciptakan lingkungan positif sehingga tidak ada ruang bagi anak untuk mengembangkan aktivitas atau perilaku yang merugikan kelak (Lilly et al., 2015).

Control Theory (Teori Kontrol): teori ini mengasumsikan bahwa kontrol diri adalah faktor penting dalam perkembangan perilaku dan kepribadian anak-anak dalam mengendalikan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak nantinya. Teori ini menekankan bahwa jika semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan, lalu terdapat sekelompok orang yang tidak melakukan kejahatan, maka ada sesuatu dalam konteks ini, yaitu penahan godaan (kontrol diri), yang sudah pasti tertanam sejak masa kanak-kanak (Lilly et al., 2015).

Labeling Theory of Delinquency (Teori Labeling): teori ini menganggap bahwa tingkah laku menyimpang adalah tingkah laku yang dicap demikian oleh masyarakat (Mustofa, 2010). Orang-orang yang distigmatisasi sebagai penjahat seringkali diputus dari relasi sosial yang sebelumnya sudah terjalin. Reputasinya sebagai penjahat dengan sangat cepat menyebar, tereklusi dari kehidupan sosial, bahkan terputus dari relasi kekerabatan dan lingkungan pertemanan. Pada akhirnya orang-orang yang menerima stigma sebagai pelaku kejahatan secara serius, terus menerus dan konsisten akhirnya membentuk citra diri dan merekam hal tersebut dalam kognisi dan alam bawah sadar mereka, bahkan sampai di kehidupan mendatang mereka kelak. Salah satu solusi bagi orang yang secara sosial jatuh ke dalam kondisi ini adalah dengan mencari orang-orang yang senasib. Akhirnya orang-orang yang dicap kriminal

ini semakin mengukuhkan asosiasinya dengan sesama kriminal lainnya, sehingga menciptakan kelompok subkultur kriminal (Lilly et al., 2015).

General Strain Theory (Teori Ketegangan Umum): Ketegangan (*strain*) menyebabkan frustrasi, kegagalan dan stress sehingga hal ini mendorong individu melakukan tindak kejahatan. Menurut Agnew ada empat sumber ketegangan (*strain*) yang kemudian mengarahkan pemuda pada tindak kejahatan. *Pertama: failure to achieve positively valued stimuli. Kedua: "disjunction of expectation and Achievement. Ketiga: removal of positively valued stimuli, dan Keempat: presentation of negative stimuli.* *Strain* merujuk pada kurangnya kemampuan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan sehingga menjadi semacam "ketegangan" tersendiri bagi para pelaku dan akhirnya melakukan tindak kriminal (Browne, 2013).

Cultural Transmission Theory (Teori Transmisi Kebudayaan): teori ini dikemukakan oleh Shaw dan McKay (1942) dalam (Mustofa, 2010) (Lilly et al., 2015). Teori ini dirumuskan melalui studi tentang anak muda yang diwawancarai dan disusun autobiografinya, yang bermukim di wilayah kumuh, di perkotaan. Teori ini mengasumsikan bahwa di dalam wilayah perkotaan yang *disorganized* atau semrawut, kejahatan menjadi suatu tradisi yang ditransmisikan (diwariskan) dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sama seperti pewarisan nilai-nilai lainnya secara umum, seperti bahasa, karakter, filosofi hidup, dan bentuk-bentuk sosial lainnya. Di sini, para penjahat tidak segan-segan memamerkan kesuksesan atau kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan dengan gaya hidup yang "*wah*". Kondisi ini kemudian menjadi "*role model*" bagi anak muda di lingkungan sekitar. Aksi kejahatan juga diperoleh melalui asosiasi dengan saudara yang lebih tua atau mereka yang tergabung dengan anggota geng.

Differential Association Theory (Teori Asosiasi Differential): teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland (1924). Menurut Friedrichs (2017), Sutherland merupakan kriminolog yang paling berpengaruh dalam sejarah. Teori dan asumsi-asumsinya banyak dibahas, baik yang pro maupun kontra. Karenanya, tidak mengherankan jika

Sutherland merupakan kriminolog yang paling banyak disitasi karyanya. Sementara itu, menurut Rebellon (2012), teori Asosiasi *Differential* yang diusung oleh Sutherland disebut-sebut sebagai *“the most influential perspectives in modern criminology, serving as the foundation for more recent versions of social learning theory”*. Teori ini berasumsi bahwa perilaku kriminal adalah sesuatu yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sesuatu yang dipelajari selama proses interaksi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidup, seperti keluarga, sekolah, teman dan juga teman sepermainan. Sutherland (1960) mengemukakan 9 (sembilan) prinsip dalam teorinya, yaitu: 1). Perilaku kriminal itu dipelajari. 2). Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. 3). Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/akrab. 4). Ketika perilaku kriminal dipelajari, proses belajar tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, yang terkadang rumit, terkadang sederhana; dan (b) arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi dan sikap. 5). Arah spesifik dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai. 6). Seseorang yang menjadi delikuen karena pengaruh aturan tingkah laku yang condong melanggar hukum lebih kuat daripada pengaruh aturan tingkah laku yang tunduk hukum. 7). Asosiasi deferensial itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. 8). Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. 9). Walaupun perilaku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Menurut Tibbetts (2015) salah satu prinsip yang paling menarik dari sembilan prinsip yang dikemukakan oleh Sutherland

adalah yang pertama bahwa perilaku kriminal itu dipelajari. Artinya proses belajar merupakan basis perilaku kriminal.

Terkait teori-teori dalam tradisi Chicago School tersebut, *Pertama*: terlalu spesifik berfokus pada satu aspek penyebab anak menjadi pelaku kejahatan saja. Misalnya, teori *Differential Association* dari Sutherland, yang memfokuskan bahwa orang menjadi pelaku kejahatan karena adanya proses belajar. Contoh lain, yaitu Teori Kontrol Diri yang menyatakan bahwa anak menjadi pelaku kejahatan disebabkan karena lemahnya kontrol diri dari anak, untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Artinya, perspektif ini juga diarahkan untuk mencari hubungan sebab akibat antara kejahatan dengan lingkungan sosial (Mustofa 2010:119). *Kedua*: teori-teori dalam tradisi *Chicago School*, menurut penulis terlalu deterministik, misalnya dengan mengatakan bahwa lingkungan sosial sebagai faktor dominan dalam tindak kejahatan. Pada Teori Ikatan Sosial, mengatakan bahwa lemahnya ikatan-ikatan sosial pada individu dan masyarakat, seringkali merupakan penyebab munculnya perilaku kejahatan. Determinasi aspek-aspek yang muncul sebagai penyebab munculnya kejahatan dalam sejumlah teori-teori pada perspektif *Chicago School* ini, memiliki kecenderungan mengabaikan sejumlah faktor (aspek) lainnya dalam melakukan tindak kejahatan. Padahal kehidupan agen dilingkupi oleh kompleksitas, variasi, dan keunikan pengalaman hidup yang tidak dapat direduksi menjadi satu atau beberapa aspek determinan saja.

Berdasarkan beberapa keterbatasan dari beberapa perspektif teori-teori terkait kejahatan yang telah diulas tersebut, di sini penulis menawarkan pemikiran Bourdieu melalui Teori Praktik sebagai *tool of analysis* sebagai alternatif dalam melihat cara dan bagaimana tindakan sosial terjadi, termasuk tindakan atau perilaku kejahatan. Teori Praktik berupaya untuk menganalisis kehidupan dan perilaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh agen. Selain itu, Teori Praktik dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat realitas sosial, melalui dialektika antara habitus, kapital dan arena. Konsep ini lebih dimungkinkan untuk mengelaborasi berbagai kemungkinan, kompleksitas dan dinamika

dalam memahami kehidupan agen (ABH), tanpa harus memberikan justifikasi (determinasi) terlebih dahulu terhadap faktor penyebab munculnya ABH.

Telaah Literatur

Teori Praktik dari Bourdieu berusaha untuk memahami realitas sosial sebagai relasi dialektik antara individu (agen, struktur subjektif) dengan struktur objektif. Dalam relasi dialektik inilah Bourdieu memunculkan konsep habitus, kapital dan arena (Swartz, 1997). Ketiga konsep tersebut saling terkait serta merupakan instrumen dalam mempelajari cara dan bagaimana tindakan sosial terjadi. Praktik mengacu pada konsep Bourdieu (1984) yang terkait dengan “apa yang orang lakukan”, atau bagaimana masyarakat bertindak (tindakan sosial dalam masyarakat), serta bagaimana individu menampilkan diri mereka dalam kesehariannya.

Terdapat beberapa studi relevan yang menggunakan Teori Praktik untuk menganalisis fenomena kejahatan dan juga perilaku menyimpang. Salah satunya dilakukan oleh Lunnay, Ward, & Borlagdan (2011). Penelitian ini menganggap penggunaan Teori Praktik merupakan cara pandang baru dalam melihat fenomena perilaku mengkonsumsi alkohol remaja putri (usia 14-17 tahun). Penelitian ini mengkritisi pendekatan biomedik yang seringkali digunakan dalam penelitian dengan tema tersebut. Pendekatan biomedik hanya berfokus pada aspek personal (individual) pelaku, untuk kemudian memberikan label atau stigmatisasi kepada pelaku, dan mengabaikan konteks sosial dari munculnya perilaku tersebut.

Studi lainnya oleh Moyle & Coomber (2017) yang mengeksplorasi kehidupan para pengedar heroin dan kokain dalam arena kejahatan pasar narkoba di Inggris Barat Daya. Awalnya para pengedar menyadari bahwa pekerjaan mereka sangatlah berisiko. Akan tetapi, lambat laun, pekerjaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar, dan diibaratkan seperti kebiasaan “minum teh” yang rutin dilakukan tiap pagi. Jika dilihat berdasarkan gender, para pengedar narkoba dalam penelitian ini tidak hanya laki-laki, melainkan juga perempuan, yang lebih memilih menjadi

pedagang narkoba daripada mencuri ataupun terjun ke dunia prostitusi (menjual diri) untuk menghasilkan uang. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan para pedagang narkoba yang sebagian besar berasal dari kelas menengah bawah, mengalami kesulitan ekonomi (kemiskinan) dan juga marginalisasi.

Jika studi Moyle & Coomber berfokus di arena pasar narkoba di Inggris Barat Daya, berbeda dengan studi Macit pada arena pasar narkoba di Turki. Studi Macit (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan agen sebagai pedagang narkoba disebabkan karena kesulitan finansial dan keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sekaligus untuk mendapatkan pengakuan (*respect*) dari orang lain. Agen menyadari bahwa latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sebelum menjadi pedagang narkoba, tidak akan mampu menjawab mimpi-mimpi mereka untuk bergaya dan menikmati hidup layaknya masyarakat kelas menengah atas. Oleh karena itu, jalan pintas untuk mewujudkan sejumlah impian mereka tentang kehidupan yang layak adalah dengan menjadi pedagang narkoba. Jika kesulitan finansial bisa di atasi dan mampu menjalani kehidupan yang layak, maka selanjutnya agen akan mendapatkan pengakuan atau *respect* sebagai orang yang penting dan dihormati. Aspek ini dapat meningkatkan gengsi, kekuasaan dan posisi agen menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga aspek ini menjadi salah satu alasan para pedagang tetap menjadi pedagang narkoba. Adapun, pintu masuk agen terlibat sebagai pedagang narkoba sangat dipengaruhi oleh habitus dan sejumlah kapital sosial yang dimiliki, yaitu hubungan kekerabatan, lingkungan, ikatan persahabatan, bahkan juga asal daerah yang sama. *Role model* kesuksesan para pedagang senior, di lingkungan terdekat, juga berperan penting memunculkan wajah-wajah baru di arena pasar narkoba.

Hasil penelitian juga menunjukkan, meskipun menjadi pedagang narkoba merupakan jalan pintas bagi agen untuk meraih kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, namun tidak demikian jika mereka kemudian tertangkap dan harus mendekam di penjara. Menjadi 'pesakitan' justru memperparah kondisi hidup mereka.

Namun hal ini sedikit berbeda bagi pengedar narkoba yang berada di level atas dan sudah lama 'malang melintang' di arena pasar narkoba. Pengedar narkoba pada level atas ini, telah memiliki banyak kapital, jika dibandingkan pengedar narkoba "kelas teri", sehingga kapital tersebut, dapat digunakan untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Studi lainnya yang juga menggunakan Teori Praktik dalam kaitannya dengan kejahatan dilakukan oleh Ilan & Sandberg (2019). Secara spesifik, studi ini mengelaborasi bagaimana para "gangster" dan aktor-aktor yang dulunya terlibat dengan tindak kejahatan (kriminalitas), kemudian tergabung dalam kelompok-kelompok jihadis ISIS. Studi-studi terkait ini, biasanya selalu direlasikan dengan studi dalam bidang Ilmu Politik dan Agama. Namun, studi Ilan & Sandberg justru melihat tema ini dalam kaitannya dengan studi kriminalitas/kejahatan.

Studi Ilan & Sandberg memperlihatkan bahwa sebelum bergabung dalam kelompok jihad, para jihadis ini memiliki latar belakang kehidupan terpinggirkan, yang sangat akrab dengan dunia kejahatan (dalam studi ini disebut "budaya jalanan"). Kondisi "budaya jalanan" ini merupakan habitus keseharian mereka. Studi ini melihat terjadi perubahan aktivitas dan perpindahan arena, dari yang sebelumnya merupakan aktivitas dan arena "kriminal jalanan" menjadi aktivitas dan arena yang terkait dengan kejahatan politik dan agama. Karenanya aktivitas "kriminal jalanan" yang menjadi habitus dan berelasi dengan kapital yang dimiliki para agen ini, kemudian beralih menjadi aksi-aksi jihad yang juga akrab dengan kekerasan. Habitus kekerasan yang mengemuka ini, merupakan habitus yang telah ada sebelumnya dalam diri agen, yang saat ini dibalut dengan pembenaran kognitif agama.

Relasi sosial dan juga pertemanan agen yang lebih dulu masuk ke kelompok jihadis, kemudian menarik lebih banyak anggota dari para pelaku kriminal lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa arena kejahatan memiliki andil bagi munculnya radikalisme di Eropa saat ini. Pada bagian akhir, studi ini turut pula menjelaskan bahwa kecenderungan fenomena ini tidak hanya terjadi pada konteks penelitian ini saja, namun muncul pula pada fenomena

perekrutan aktivis politik di Paramiliter Irlandia Utara dan sejumlah organisasi politik lainnya yang akrab dengan kekerasan, di mana para anggotanya sebagian besar merupakan para agen yang aktif di dunia kejahatan/kriminal. Hanya saja, studi ini memang masih menfokuskan pada para kriminal yang kemudian menjadi jihadis (*from the street to jihad*).

Metode

Tulisan ini merupakan penelusuran literatur terkait penggunaan Teori Praktik dalam studi-studi tentang kejahatan, termasuk pula perilaku menyimpang. Studi ini diawali dengan menelusuri beberapa teori terkemuka yang lazim digunakan dalam studi terkait kejahatan. Mengemukakan asumsi dasar, kekuatan dan juga kelemahan dari teori-teori tersebut, hingga kemudian mengusulkan Teori Praktik sebagai alternatif dalam menganalisis tindak kejahatan. Kemudian, mengelaborasi komponen inti dari Teori Praktik yang berupa dialektika habitus, kapital dan arena, serta beberapa hasil studi yang mengoperasionisasikan Teori Praktik tersebut dalam studi kejahatan dan perilaku menyimpang.

Hasil dan Pembahasan

Dalam memahami bagaimana praktik tindak kejahatan, maka terlebih dulu akan dielaborasi konsep: habitus, kapital dan juga arena, sebagai komponen dari Teori Praktik, sebagai seperangkat instrumen berfikir dalam melihat dunia sosial (Grenfell & James, 2004).

Habitus

Istilah habitus yang saat ini berkembang, menjadi konsep yang sangat populer, sangat penting dan menjadi pusat dalam pemikiran Bourdieu (France, Bottrell, & Haddon 2013). Menurut Jenkins (2005b) dalam (Ritzer, 2012), habitus adalah konsep yang kemudian membuat Bourdieu sangat terkenal. Habitus merupakan sesuatu yang mendasari tindakan seseorang, yang terkait dengan pengalaman masa lalu, melalui pola asuh sejak kecil, dan juga hasil

dialektika dengan lingkungan sekitarnya. Habitus juga seringkali tidak disadari, dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah yang berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus juga menunjukkan pada cara kita melihat dan membawa diri kita sendiri (Jenkins, 1992), sehingga menjadi dasar kepribadian. Habitus ini tereksresi dalam bahasa, komunikasi nonverbal, selera, persepsi, nilai, dan juga cara berpikir (Swartz, 1997). "Habitus merupakan produk sejarah, serta menghasilkan praktik-praktik individu dan kolektif..." (Bourdieu, 1977). Dengan demikian, habitus dapat juga menjadi fenomena kolektif. Pada *Distinction*, Bourdieu (1984) mengeksplorasi bagaimana habitus memberikan input pada perbedaan kelas terkait selera dan gaya hidup (Swartz 1997). Bagi Bourdieu, habitus mengindikasikan sesuatu yang lebih kompleks dan rumit.

"Systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles which generate and organize practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary in order to attain them. Objectively 'regulated' and 'regular' without being in any way the product of obedience to rules, they can be collectively orchestrated without being the product of the organizing action of a conductor." (Bourdieu, 1977, 1990).

Adapun menurut (Johnson, 2016) disposisi-disposisi yang direpresentasikan oleh habitus ini paling tidak memiliki empat sifat berikut: (1). Bertahan lama: bertahan di sepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan seorang agen. Habitus dalam setiap individu, diperoleh selama sejarah rangkaian hidup seseorang dan bersifat langgeng. (2). Bisa dialihpindahkan: sanggup melahirkan praktik-praktik di berbagai arena aktivitas yang beragam. Ritzer (2012) memberikan penjelasan terkait hal ini dengan mengatakan bahwa habitus seseorang dapat dipindahkan dari suatu arena ke arena lainnya. Artinya, dengan arena yang berbeda seseorang dapat tetap memiliki habitus yang sama (*transposable*). (3). Merupakan struktur yang distrukturkan dalam arti mengikutsertakan kondisi-

kondisi sosial objektif pembentukannya. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemiripan habitus pada diri agen-agen yang berasal dari kelas sosial yang sama dan menjadi justifikasi bagi pembicaraan tentang habitus sebuah kelas (di dalam *Distinction* contohnya, Bourdieu menunjukkan secara statistik bagaimana habitus kelas pekerja melahirkan preferensi-preferensi yang hampir semuanya analog di sejumlah besar praktik kultural mereka di kota atau wilayah manapun mereka tinggal). Dengan demikian, habitus dalam konteks ini adalah struktur yang menyusun dunia sosial agen atau struktur yang terinternalisasi. (4). Merupakan 'struktur-struktur yang menstrukturkan', artinya mampu melahirkan praktik-praktik yang sesuai dengan situasi-situasi khusus dan tertentu. Struktur- struktur yang dibentuk, nantinya juga berfungsi sebagai struktur yang membentuk. Jadi habitus merupakan gerak timbal balik. Menurut Ritzer (2012) dalam hal ini, habitus tidak sepenuhnya sebagai struktur tetap yang tidak bisa berubah. Akan tetapi, habitus secara terus-menerus disesuaikan oleh para individu yang berubah menghadapi situasi dan kondisi lingkungan sosial tertentu. Struktur yang dibentuk ini, sekaligus juga menjadi struktur yang membentuk (dihasilkan dan menghasilkan). Habitus sendiri merupakan hasil dari proses panjang pencekokan individu (*process of inculcation*), dimulai sejak masa kanak-kanak, yang kemudian menjadi semacam 'penginderaan kedua' (*second sense*) atau hakikat alamiah kedua (*second nature*) (Johnson 2016).

Dalam bidang kejahatan, telah pula dikembangkan konsep "habitus jalanan", yang pertama kali digunakan oleh Wacquant (2002) dalam (Shammas & Sandberg, 2016) untuk menunjukkan disposisi fisik dan kognitif orang kulit hitam Amerika yang tinggal di lingkungan perkotaan yang terpinggirkan yang dikenal dengan istilah "ghetto". Berdasarkan penjabaran konseptualisasi habitus tersebut, artinya tindakan kita di masa sekarang, merupakan peran serta aktif atas apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian individu dalam cara generatif dan kreatif juga mengembangkan strategi untuk memaksimal keuntungan, baik itu dalam hal ekonomi maupun simbolik. Hal ini seringkali secara tidak sadar dilakukan

untuk meningkatkan atau mempertahankan posisi sosial atau ekonomi (France, Bottrell, & Haddon 2013). Dengan demikian, habitus memberikan ruang bagi agen untuk memiliki serta memperhitungkan kemampuan kreatif dan strategisnya. Jadi, habitus mencoba untuk menolak determinisme dan keluar dari perspektif struktural. Konteks ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa terdapat kelompok-kelompok tertentu, yang terlibat dalam suatu perilaku, sementara di sisi lainnya, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang sama sekali tidak terlibat, padahal realitas sosial yang dihadapi adalah sama. Habitus juga terkait dengan sejumlah kapital yang dimiliki, serta bagaimana kemudian agen tersebut merefleksikan keadaan dan situasi yang dihadapinya.

Kapital (Modal)

Konsep kunci lainnya dalam memahami bagaimana tindak kejahatan yang dilakukan ABH yaitu: modal atau kapital. Konsep kapital sendiri memang awalnya lebih dekat dengan khasanah ilmu ekonomi, namun kemudian mengalami perluasan makna, sehingga tidak hanya terkait dengan khasanah ilmu ekonomi saja. Bourdieu sendiri menjelaskan konsep kapital dalam kaitannya dengan relasi dan dominasi kekuasaan. Bourdieu dalam Moyle & Coomber (2017) mendefinisikan kapital sebagai sumber daya yang dapat mengamankan posisi seseorang dalam tatanan sosial. Kapital juga merujuk pada sumber daya atau kualitas yang dimiliki oleh individu yang mempunyai nilai atau pengaruh sosial (Seidman, 2013). Kepemilikan kapital oleh agen merupakan manifestasi dari adanya ketimpangan dalam masyarakat. Menurut Bourdieu, komposisi serta kuantitas kapital yang dimiliki oleh masing-masing agen tidaklah sama. Seorang intelektual yang kaya akan kapital kultural, namun relatif miskin dalam hal kapital ekonomi, begitu sebaliknya:

“ada sebuah struktur yang bersilangan yang homolog dengan struktur arena kuasa di mana, seperti yang kita ketahui, para intelektual, yang kaya dengan kapital kultural dan (relatif) miskin dalam kapital ekonominya, dan para pemilik industri dan pebisnis, yang kaya dengan kapital ekonomi namun relatif

miskin dalam kapital kultural, berada dalam oposisi satu sama lain” (Bourdieu, 2010).

Bourdieu mengidentifikasi kapital ke dalam empat kategori yaitu: kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya dan kapital simbolik (Bourdieu, 1986; Gilleard, 2020; Swartz, 1997). Kategorisasi kapital menurut Bourdieu ini, berbeda dengan yang dikemukakan oleh Marx yang memang lebih terfokus pada kapital ekonomi saja. Bourdieu mengelaborasi varian lainnya dari kapital, yaitu: kapital sosial, kapital budaya dan kapital simbolik, selain kapital ekonomi.

Kapital ekonomi adalah jenis kapital yang paling lazim diketahui dan paling mudah dikonversikan, yaitu berupa harta kekayaan, uang, pendapatan atau sarana finansial, serta sumber-sumber dan sarana produksi yang menghasilkan uang. Sementara kapital sosial meliputi sejumlah jejaring dan relasi sosial yang dimiliki agen. Melalui relasi yang erat antar jejaring dan relasi sosial ini, kemudian melahirkan *trust* (kepercayaan). Adapun kapital budaya dapat berupa keseluruhan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas intelektual agen. Sedangkan, kapital simbolik mencakup pengakuan dari simbol-simbol status, prestise, otoritas, legitimasi (pengakuan), jabatan, posisi/kedudukan agen (Seidman, 2013).

Beragam jenis kapital yang dikemukakan oleh Bourdieu inilah yang diperjuangkan oleh agen dalam arena. Bourdieu berpendapat bahwa dalam arena yang berbeda, nilai kapital juga berbeda. Kapital budaya, misalnya, adalah kekayaan kunci dalam arena intelektual, sedangkan kapital ekonomi adalah kekayaan kunci dalam arena bisnis (Swartz, 1997). Kemudian, tidak semua jenis kapital, efektif digunakan dalam semua arena. Kapital ekonomi memang seringkali masih dianggap sebagai kekuatan sentral, akan tetapi beberapa hasil studi justru memperlihatkan, dalam situasi dan arena yang berbeda, kapital budaya, kapital sosial dan kapital simbolik justru berperan lebih banyak. Konteks ini cukup terlihat dalam studi-studi tentang kriminalitas dengan arena kejahatan. Meskipun kapital ekonomi dianggap paling lazim diketahui dan paling mudah dikonversi,

namun dalam studi dan arena kejahatan, kapital ekonomi justru tidak banyak disinggung.

Studi Macit (2018) memperlihatkan bahwa kapital sosial dan habitus berperan penting dalam studinya terkait pengedar narkoba. Menurut Macit (2018) pada tahanan awal, para pengedar narkoba dalam penelitiannya sangat bergantung dengan kapital sosial yang digunakan untuk memasuki pasar narkoba. Jejaring yang digunakan adalah melalui hubungan kekerabatan, ikatan lingkungan, pertemanan, kota asal yang sama, hingga kemudian membangun kepercayaan secara bersama. Sementara, studi Moyle & Coomber (2017) menemukan kapital sosial dan kapital budaya-lah yang banyak muncul dalam studi tentang kejahatan bandar heroin dan kokain. Studi ini menyebutkan bahwa modal sosial ini berupa jaringan sosial dan juga kepercayaan antar jaringan yang mempermudah agen dalam mempertahankan posisi sosialnya sebagai bandar. Sementara modal budaya, mencakup reputasi, pengetahuan tentang sesuatu hal, kemampuan berbicara dan menulis, dan juga pengaruh dalam lingkungan sosial tertentu. Artinya, reputasi dan pengaruh sebagai bandar sudah tidak diragukan lagi. Pengembangan dari aspek ini juga secara spesifik menyebutkan adanya 'modal jalanan' (*street capital*) dalam studi bandar narkoba pada penelitian Sandberg & Fleetwood (2017) dan juga Shammas & Sandberg (2016).

Di sisi lain, studi Lunnay, Ward, & Borlagdan (2011) justru memperlihatkan modal simbolik-lah yang berperan pada perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol pada remaja putri. Modal simbolik ini terkait dengan prestise, status tinggi yang dihargai dan diterima, kehormatan, juga mencakup otoritas dan legitimasi. Oleh karena itu, perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol ini tetap terus berlangsung karena bagian dari penerimaan dan penghargaan diri terhadap seorang remaja putri di mata teman-teman satu kelompoknya. Dalam realitasnya kepemilikan kapital ini tidak merata dimiliki oleh masyarakat. Hal inilah yang memicu munculnya ketidaksetaraan, ketidakseimbangan dan juga distingsi (pembedaan). Oleh karena itu, praktik dominasi yang terjadi juga sangat dipengaruhi pada kepemilikan kapital oleh agen. Kepemilikan

kapital oleh sejumlah pihak tertentu, mengakibatkan ada pihak lain yang lebih unggul, di sisi lain, terdapat juga pihak lain yang tersingkirkan (Karnanta, 2013; Ulya, 2016). Melalui kepemilikan kapital, dapat memungkinkan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan nasib orang lain (Ritzer, 2012).

Arena

Habitus dan modal juga terkait erat dengan konsep arena (*field, champ*). Arena merupakan tempat di mana habitus dan kapital bekerja. Menurut Bourdieu & Wacquant (1992), arena dimaksudkan sebagai:

“In analytic terms, a field may be defined as a network, or a configuration, of objective relation between position. Those positions are objectively defined, in their existence and in the determinations they impose upon their occupants, agents or institutions, by their present and potential situation (situs) in the structure of the distribution of species of power (or capital) whose possession commands access to the specific profits that are at stake in the field, as well as by their objective relation to other positions (domination, subordination, homology, etc)” (Bourdieu & Wacquant, 1992).

Konsep arena terkait dengan bagaimana dunia sosial beroperasi. Arena merupakan ruang terstruktur di mana praktik berlangsung, juga merupakan tempat di mana hubungan kekuasaan bekerja dalam berbagai aspek (termasuk akses individu ke berbagai bidang dan juga modal) serta habitus (Moyle & Coomber, 2017). Jadi arena dalam konteks ini adalah ruang yang menjadi lokus bagi agen dengan beragam interaksi. Di sini terdapat pula relasi kuasa, perlawanan, dominasi, dan serangkaian hirarki, sehingga konsep arena menurut Bourdieu sebagai *field of struggle for power*, di mana konsep ini melampaui pendapat konsep fungsionalist (pemikir fungsional) tentang institusi (Swartz, 1997). Pada kenyataannya, elaborasi terkait relasi kuasa, hirarki dan juga posisi agen ini seringkali tidak dapat dilihat ataupun disadari oleh para agen itu sendiri (Shammas & Sandberg, 2016).

Arena menjadi tempat pergulatan dan pertarungan guna mempertahankan serta memperebutkan posisi, kekuasaan serta legitimasi, dan berujung agar struktur dominasi berubah atau tetap

langgeng. Di sini agen bertarung dengan segenab sumber daya (modal) dan strategi yang dimiliki, dalam mempertahankan dan mengambil posisi mereka. Pertarungan ini juga berupaya untuk memperebutkan pengaruh serta mempertahankan sumber daya. Pergulatan, persaingan serta pertarungan di dalam arena bukanlah pertarungan dan pergulatan dalam arti fisik, melainkan pergulatan simbolik. Adanya interaksi dan pergulatan serta pertarungan ini menyebabkan arena menjadi sesuatu yang dinamis. Dalam arena, agen menempati posisi tertentu, sesuai dengan volume dan kuantitas modal yang dimiliki agen (Swartz, 1997). Karenanya, modal dan arena sangat terkait erat. Modal tidak akan berfungsi, jika tidak ada arena (Bourdieu & Wacquant, 1992).

Arena bisa muncul dalam ruang lingkup manapun, seperti arena sastra, arena pendidikan, arena politik, dan lain-lain. Hal ini mengingatkan akan apa yang dibayangkan Weber tentang masyarakat yang berisi ruang-ruang sosial (agama, hukum, ekonomi politik), masing-masing dengan logika otonomi relatifnya (Seidman, 2013). Artinya setiap arena memiliki aturan mainnya (*rule of the game*) sendiri-sendiri. Suatu arena akan terkait dengan arena lainnya, agen dan kapital dapat pindah dari satu arena ke arena lainnya. Selain itu, suatu arena dapat mengintervensi cara kerja arena lainnya (Shammas & Sandberg, 2016). Arena yang dimaksud dalam konteks penelitian ini, yaitu arena kejahatan, di mana agen terlibat di dalamnya. Melalui konsep arena dapat dielaborasi hierarki dan posisi agen dalam arena kejahatan yang terkait dengan kepemilikan kapital. Elaborasi terkait hirarki dan posisi agen ini, sangat memungkinkan munculnya hubungan dominasi, yang kemudian mengarah pada kekerasan simbolik. Arena merupakan medan perjuangan untuk mendapatkan legitimasi, menurut Bourdieu, arena sebagai hak untuk memonopoli terjadinya kekerasan simbolik (Swartz, 1997).

Kesimpulan

Dunia sosial tidak dapat dipahami hanya semata-mata sebagai kumpulan perilaku dan tindakan saja. Melalui Teori Praktik, Bourdieu menjelaskan dan menganalisis pilihan tindakan dan perilaku agen dalam tautan antara habitus, kapital dan arena. Dalam konteks tulisan ini, Bourdieu memberikan nuansa baru dalam studi dengan tema-tema kejahatan. Konseptualisasi Bourdieu dalam Teori

Praktik melalui dialektika habitus, kapital dan arena, memberikan kekuatan kerangka konseptual untuk memahami pengalaman hidup, sekaligus juga membongkar adanya kekuasaan dan juga ketidakberdayaan (Fraser, 2013). Jadi, praktik kejahatan yang dilakukan agen didasari dari habitus yang menjadi disposisi tindakan kejahatan. Habitus tersebut juga terkait dengan kepemilikan kapital, yang dipakai agen dalam arena kejahatan. Lalu, kapital dan arena juga secara terus-menerus turut mewarnai kehidupan agen hingga kemudian membentuk habitus kembali. Konsep kapital dan arena Bourdieu mengindikasikan adanya hirarki, kelas dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat, mengingat kepemilikan, komposisi serta kuantitas kapital yang dimiliki oleh masing-masing agen tidak sama. Sehingga, melalui kerangka berfikir ini pula, dapat dielaborasi sekaligus juga membongkar hirarki, dominasi kekuasaan, serta relasi-relasi terselubung, yang seringkali berujung pada kekerasan simbolik. Di mana hal ini diasumsikan selalu ada dalam masyarakat (Krisdianto, 2014). Bagi Bourdieu, kekuasaan bukan merupakan domain terpisah untuk dipelajari tetapi merupakan jantung dari semua kehidupan sosial (Swartz, 1997).

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1977). *Outline Of A Theory Of Practice*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction*. USA: Harvard College and Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York, USA: Greenwood.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. California, USA: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural*. Yogyakarta, Indonesia: PUSTAKA PELAJAR.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge, UK: Polity Press.

- Browne, G. E. (2013). a Qualitative Study of Selected Juvenile Offenders Living in Sedgwick County Kansas, (December).
- France, A., Bottrell, D., & Haddon, E. (2013). The Role of Habitus and Reflexivity in Young People Managing Pathways Out of Crime. *International Journal on School Desaffection*, 10 (1), 11–27.
- Fraser, A. (2013). Street Habitus: Gangs, Territorialism and Social Change in Glasgow. *Journal of Youth Studies*, 16 (8), 970–985. <https://doi.org/10.1080/13676261.2013.793791>
- Friedrichs, D. O. (2017). Edwin H. Sutherland: An Improbable Criminological Key Thinker—For Critical Criminologists and for Mainstream Criminologists. *Critical Criminology*, 25 (1), 55–69. <https://doi.org/10.1007/s10612-016-9320-0>
- Gilleard, C. (2020). Bourdieu TMs Forms of Capital and The Stratification of Later Life. *Journal of Aging Studies*, 53 (May), 100851. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100851>
- Grenfell, M., & James, D. (2004). Change in the Field: Bourdieu and The Methodological Practice of Educational Research. *British Journal of Sociology of Education*, 25 (4). <https://doi.org/10.1080/0142569042000236989>
- Hirschi, T. (2017). *Causes Of Delinquency*. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Ilan, J., & Sandberg, S. (2019). How “Gangsters” become Jihadists: Bourdieu , Criminology and The Crime – Terrorism Nexus. *European Journal of Criminology*, 16 (3). <https://doi.org/10.1177/1477370819828936>
- Jenkins, R. (1992). *Key Sociologist: Pierre Bourdieu*. London: Routledge.
- Johnson, R. (2016). Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra dan Budaya. In I. R. Muzir (Ed.), *Pierre Bourdieu: Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya* (4th ed.). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- Karnanta, K. (2013). Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu. *Jurnal Poetika*, 1 (1), 3–15.
- Krisdianto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL*, 2 (2), 107–206.

- Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lunnay, B., Ward, P., & Borlagdan, J. (2011). International Journal of Drug Policy The Practise and Practice of Bourdieu: The Application of Social Theory to Youth Alcohol Research. *International Journal of Drug Policy*, 22 (6), 428–436. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2011.07.013>
- Macit, R. (2018). Becoming a Drug Dealer in Turkey. *Journal of Drug Issues*, 48 (1). <https://doi.org/10.1177/0022042617731871>
- Moyle, L., & Coomber, R. (2017). Bourdieu on Supply : Utilizing The “ Theory of Practice ” to Understand Complexity and Culpability in Heroin and Crack Cocaine User-Dealing. *European Journal of Criminology*, 14 (3), 309–328. <https://doi.org/10.1177/1477370816652916>
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi* (2nd ed.). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Poloma, M. (2002). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta-Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Rebllon, C. J. (2012). Differential Association and Substance Use: Assessing the Roles of Discriminant Validity, Socialization, and Selection in Traditional Empirical Tests. *European Journal of Criminology*, 9 (1), 73–96. <https://doi.org/10.1177/1477370811421647>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sandberg, S., & Fleetwood, J. (2017). Street Talk and Bourdieusian Criminology : Bringing Narrative to Field Theory. *Criminology & Criminal Justice*, 17 (4). <https://doi.org/10.1177/1748895816672909>
- Seidman, S. (2013). *Contested Knowledge, Social Theory Today* (fifth Edit). West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
- Shammas, V. L. (2018). Bourdieu ' s Five Lessons for Criminology. *Law and Critique*, 29(2), 201–219. <https://doi.org/10.1007/s10978-017-9218-3>
- Shammas, V. L., & Sandberg, S. (2016). Habitus, Capital, and Conflict : Bringing Bourdieusian field Theory to

Criminology. *Criminology & Criminal Justice*, 16 (2). <https://doi.org/10.1177/1748895815603774>

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). *Principles of Criminology* (Sixth Edit). Chicago: J.B. Lippincott Company.

Swartz, D. (1997). *Culture and Power, The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago, USA: University of Chichago Press.

Ulya. (2016). Mewaspadai Kekerasan Simbolik dalam Relasi Orang Tua dan Anak. *Palastren*, 9 (2), 233–252.

KONSEP PENGGUNA INTERNET

Mery Yanti, Yusnaini

Pendahuluan

Tulisan ini di buat di akhir tahun 2020, tepatnya di antara bulan Oktober–November, di saat Indonesia dan mayoritas negara-negara di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Tanpa dinarasikan lebih jauh, Gambar 1 menunjukkan betapa seriusnya persoalan COVID-19 bagi seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebab, COVID-19 melahirkan beragam dampak (positif dan negatif) psikologis, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang kompleks dan saling berhubungan satu sama lain. Dampak awal ini dipicu oleh beragam kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, misalnya *physical & social distancing* dan *lockdown* yang membuat pergerakan barang, manusia, dan jasa menjadi berkurang dan roda perekonomian melambat.

Global	Indonesia
Negara	Positif
216	368.842
Terkonfirmasi	Sembuh
17.660.523	293.653
Meninggal	Meninggal
680.894	12.734
Update Terakhir: 02-08-2020 Sumber: WHO	Update Terakhir: 20-10-2020

Gambar 1. Sebaran Korban COVID-19 di Level Global dan Indonesia
Sumber: <https://covid19.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2020

Dalam situasi *lockdown*, Pemerintah Pusat mendorong agar sebagian lapisan penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal mengadopsi pola bekerja dari rumah (*working from home* atau WFH). Sedangkan bagi mereka yang tidak bisa menerapkan WFH, aktivitas sehari-hari harus memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di antara protokol tersebut, di antaranya, menjaga jarak fisik, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Ide WFH sangat mungkin dilaksanakan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah memungkinkan transmisi data berbentuk audiovisual (gambar dan suara). Beragam kegiatan yang melibatkan komunikasi dua arah dan melibatkan banyak orang bisa dilaksanakan secara daring melalui beragam platform berbasis internet, misalnya, konferensi, webinar, perkuliahan daring, rapat-rapat daring, dan sebagainya. Tanpa dukungan beragam dukungan TIK berbasis internet, ide WFH mungkin tidak akan pernah terlaksana.

Sejarah Perkembangan Internet

Secara sederhana, internet dapat didefinisikan sebagai sistem komunikasi global yang menghubungkan perangkat keras berdasarkan alamat tertentu yang merupakan turunan dari teknologi *Internet Protocol* dan *Transmission Control Protocol*. Sebagai teknologi komunikasi modern, internet memiliki beberapa karakteristik dasar, yakni (Cohen-Almagor, 2015):

- a. Internet adalah fenomena komunikasi karena mengandung komponen dasar proses komunikasi: ada pengirim, ada pesan, ada saluran komunikasi, ada penerima, dan ada umpan balik;
- b. Internet merupakan pengembangan lebih jauh dari teknologi *packet switching* (teknologi yang memungkinkan dua perangkat teknologi saling bertukar sumber daya) yang dikembangkan Bolt Beranek and Newman di *Advanced Research Projects Agency* (ARPA);

- c. Lalu lintas pesan di Internet berbentuk digital yang mudah dimanipulasi. Misalnya, seseorang bisa mengubah warna dan bentuk gambar, memodifikasi teks, mengedit musik dan film, dan sebagainya;
- d. Volume dan jenis informasi digital yang dikirimkan/diterima melalui Internet masif. Sebab, objek digital bisa diperbanyak tanpa batas dan tanpa harus kehilangan kualitas aslinya;
- e. Internet mendesentralisasikan kekuasaan sepenuhnya kepada para penggunanya. Tidak ada kekuasaan terpusat yang mampu mengatur Internet. Para pengguna memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan Internet baik untuk kebaikan maupun kejahatan;
- f. Internet bersifat tanpa batas atau tidak mengenal batas-batas wilayah administratif. Semua orang dari penjuru dunia bisa berkomunikasi melalui Internet meski berbeda latar sosial-ekonomi, budaya, dan politik;

Internet lahir dari ide para ilmuwan untuk membangun sistem komunikasi yang mampu menghubungkan dua lokasi yang berjauhan meski jalur listrik mati atau tidak berfungsi. Ide ini mengalami percepatan ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di awal 60-an, mendirikan *the Advanced Research Projects Agency* (ARPA) sebagai respons strategis atas peluncuran satelit SPUTNIK pada 4 Oktober 1957. Meskipun misi utama ARPA adalah memenangkan perlombaan teknologi canggih dengan Uni Sovyet, tetapi salah satu divisi ARPA, *the Information Processing Techniques Office* (IPTO), diberi tugas memobilisasi perguruan tinggi dan lembaga riset di Amerika Serikat untuk membangun sistem dan jaringan komunikasi strategis (Cohen-Almagor, 2015).

Pada 1969, dari rahim IPTO, lahir jaringan internet pertama di dunia, ARPANet, yang menghubungkan komputer dengan sistem operasi berbeda di empat lokasi, yakni: Universitas California Los Angeles, Stanford Research Institute, Universitas California Santa Barbara, dan Universitas Utah. Jaringan komputer semakin berekspansi dengan bergabungnya Universitas Harvard, MIT, Carnegie Mellon, Case Western Reserve, dan Universitas Illionis at

Urbana. Dalam rentang waktu 16 bulan, ARPANet sudah memiliki 10 situs dan 2000 pengguna. Di tahun 1970-an, ARPANet kemudian berkembang menjadi jaringan komputer berbasis satelit, disebut SATNET. Pada 1973, ketika teknologi TCP (*Transmission Control Protocol*) dan IP (*Internet Protocol*) ditemukan Vint Cerf dan Robert Kahn, beberapa universitas di Norwegia dan Inggris ikut bergabung ke jaringan ARPANet (Cohen-Almagor, 2015).

Pada 1995, perkembangan Internet menjadi *booming* ketika penyediaan jasa internet diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Di era ini, masalah utama bukan konektivitas/jaringan, tetapi bagaimana mencari informasi dengan mudah ditengah tumpukan informasi yang sangat besar di Internet. Masalah ini memicu lahirnya Google dan Yahoo! sebagai mesin pencari. Pertumbuhan Internet yang semakin pesat juga memicu tindakan kriminalitas di dunia maya. Untuk merespons situasi ini, pada 2001, negara-negara di Eropa meratifikasi konvensi penanggulangan tindakan kriminal di dunia siber (Cohen-Almagor, 2015).

Jika di awal perkembangannya Internet hanya didesain untuk menghubungkan komputer, kini Internet dapat memfasilitasi ribuan pengguna internet melalui beragam aplikasi media sosial (misalnya, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya) yang bisa diakses dengan menggunakan telepon seluler. Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari inovasi teknologi dan pembangunan infrastruktur telepon seluler yang memungkinkan lalu lintas data menjadi lebih baik. Sejak 1960-an, jaringan telepon seluler mulai berkembang dari jaringan 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G, dan 5G. Ketersediaan jaringan 3G diikuti dengan produksi telepon seluler berbasis 3G oleh korporasi telekomunikasi global (Nokia, Samsung, Apple, Lenovo, dan sebagainya).

Ketika tulisan ini dibuat, teknologi Internet sudah melahirkan apa yang disebut dengan *Internet of Things* (IoT). Istilah IoT merujuk jaringan internet yang menghubungkan beragam perangkat dalam kehidupan sehari-hari manusia dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan (Xia et.al, 2012) IoT merupakan konvergensi beragam teknologi, mulai dari teknologi *sensor nirkabel, barcode, intelligent*

sensing, cloud computing, artificial intelligence. IoT memungkinkan manusia mengakses beragam perlengkapan dan peralatan yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa diakses melalui Internet (Li, Xu, & Zhao, 2015). Beberapa produsen kulkas, sudah mulai memanfaatkan teknologi IoT untuk membuat kulkas cerdas yang memiliki beberapa fitur canggih dan terhubung dengan ponsel cerdas.

Tipologi Pengguna Internet

Pengguna internet adalah orang yang memiliki akses internet. Tipologi internet bisa dijelaskan dari usia ketika pertama kali mengakses internet. Berdasarkan usianya, ada dua tipe pengguna internet, yakni: *digital native* dan *digital immigrant* (Prensky, 2001). *Digital native* adalah mereka yang sejak usia pra-sekolah sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan internet. Karena akses internet di Indonesia mulai merata di seluruh tanah awal 2000-an, maka sebagian populasi penduduk tergolong sebagai *digital native*, khususnya mereka yang lahir di atas tahun 2000. Sebaliknya, *digital immigrant* adalah mereka yang baru mengenal akses internet di usia 35 tahun. Jika dihitung dari tahun 2000 sebagai tonggak masifnya penetrasi internet di Indonesia, maka *digital immigrant* adalah mereka yang lahir pada 1965 di tahun 2000.

Dilihat dari kompetensi yang dimiliki seseorang, pengguna internet dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, yakni (Law et.al, 2018):

a. Internet sebagai sumber informasi

Akses internet merupakan pintu masuk bagi seseorang untuk membaca miliaran informasi digital yang tersedia dunia internet, baik dalam bentuk web resmi organisasi, personal blog, koran digital, kanal YouTube, dan sebagainya. Pencarian informasi melalui internet dengan menggunakan mesin pencari (*browser*), misalnya Google Chrome™, Microsoft Edge™, Mozilla™, bisa dilakukan dengan sangat cepat dan sangat efisien. Tetapi, jika tidak hati-hati, para pengguna internet akan tersesat dalam hutan informasi.

Sebagian orang mungkin hanya memanfaatkan internet sekedar untuk mencari informasi digital di dunia maya. Informasi itu sangat beragam, mulai dari menu makanan, jadwal pesawat terbang, lokasi, artikel ilmiah, tempat olahraga, tempat rekreasi, berita daring, dan sebagainya.

b. Internet sebagai sumber komunikasi dan kolaborasi

Tipe kedua ini tidak hanya memanfaatkan internet sebagai sumber informasi, tetapi sebagai alat komunikasi dan kolaborasi. Sebagai alat komunikasi, internet memungkinkan seseorang mengirim surat elektronik (surel) disertai dengan lampiran digital (teks, gambar, suara, dan video) ke seluruh dunia. Penemuan surel menyebabkan pengiriman surat konvensional melalui kantor pos semakin ditinggalkan orang. Surel tidak hanya mengubah cara orang berkomunikasi melalui surat, tetapi juga melahirkan masalah baru berupa email sampah (*spam*) yang dikirimkan pihak-pihak yang berusaha menawarkan produk mereka.

Internet juga memungkinkan sekelompok orang untuk berkolaborasi secara virtual. Di era COVID-19, beberapa aplikasi kolaborasi daring, misalnya Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Cisco Webex, Skype, semakin populer di kalangan para pengguna internet di Indonesia. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan para pengguna internet dari beragam penjuru dunia dapat berkomunikasi dengan banyak orang melalui video secara *real time*. Beberapa aplikasi lainnya, misalnya, Microsoft 365, Dropbox, Basecamp, memungkinkan para pengguna internet untuk berkolaborasi secara daring.

c. Internet sebagai sumber kreativitas digital

Internet adalah sumber informasi. Sebagian informasi ini diproduksi dan didistribusikan oleh korporasi media global, nasional, dan lokal. Sebagian lagi dibuat dan disebar oleh para pengguna internet, misalnya kanal You Tube, berita dan video amatir yang disebar melalui beragam platform media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp,

Telegram dan sebagainya), atau personal blog yang menysasar kelompok tertentu di masyarakat (misalnya, blog kumpulan dongeng, blog kumpulan menu makanan, blog travelling, dan sebagainya). Selain informasi dan video, konten digital itu bisa berbentuk buku digital, sticker, aplikasi telepon pintar yang diletakkan di Play Store, dan sebagainya.

Internet telah melahirkan profesi baru di masyarakat, yakni para pekerja digital yang mendapatkan keuntungan sosial-ekonomi dari aktivitas mereka di dunia digital. Yang paling fenomenal, tentu saja, adalah Youtubers (sebutan bagi para pengguna internet yang membuat video kreatif untuk diunggah di YouTube). Menurut catatan Kompas (Djumena, 2020), para Youtubers di Indonesia bisa memiliki penghasilan antara 59.300 dolar AS hingga 949.100 dolar AS per bulan. Tidak mengherankan jika Generasi Z lebih mengidamkan menjadi Youtubers ketimbang profesi lainnya.

- d. Mereka yang memanfaatkan internet sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

Kelompok terakhir ini merupakan tipe pengguna internet yang melihat potensi internet sebagai alat untuk membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Pekerjaan ini bisa berupa pekerjaan sederhana (misalnya, mencari menu makan siang) atau pekerjaan yang sangat kompleks (misalnya, bagaimana mengoperasikan bus kota tanpa sopir dengan memanfaatkan internet). Para penggiat *Internet of Things (IoT)* masuk dalam kategori ini. *IoT* adalah sebuah visi tentang masa depan di mana beragam peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sehari-hari terkoneksi satu sama lain melalui jaringan internet dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) (Xia et.al, 2012).

Pengguna internet juga bisa dibedakan berdasarkan akses internet yang digunakan, mulai dari *fixed broadband*, *mobile broadband*, *narrow band*. Berdasarkan tujuan penggunaan internet, pengguna internet bisa dibedakan menjadi: mengirim/menerima surel, mencari

informasi berita, mencari informasi barang/jasa, mencari informasi lembaga pemerintahan, dan menyediakan pelayanan bagi pelanggan dan dengan penggunaan media sosial. Bisa juga, pengguna internet dibedakan atas jumlah biaya akses internet yang dikeluarkan per bulan (misalnya, Rp500 ribu – Rp1 juta atau di atas Rp1 juta) (APJII, 2013). Tipologi pengguna internet lainnya bisa dibangun kasus per kasus. Sebagai contoh, dalam konteks institusi pendidikan pesantren, sikap pesantren terhadap internet juga mengindikasikan adanya tipe pengguna internet. Mengacu ke temuan empiris Setiawan (Setiawan, 2012), sikap pengelola pondok pesantren terhadap internet bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni:

- a. Pondok pesantren memanfaatkan internet sepenuhnya untuk menunjang aktivitas pondok pesantren, baik keperluan administratif maupun keperluan belajar-mengajar;
- b. Pondok pesantren memanfaatkan internet secara sebagian, yaitu hanya untuk keperluan administratif saja, sedangkan santri secara umum tidak diperkenankan untuk memanfaatkan internet dengan alasan tertentu. Jika santri ingin menggunakan internet harus dengan proses perizinan yang ketat;
- c. Pondok pesantren tidak menyediakan fasilitas internet dan tidak memanfaatkan internet sama sekali dalam segala kegiatan operasional, baik administratif maupun untuk kegiatan;

Tipologi lainnya misalnya dalam konteks pembelajaran daring. Sebagian institusi pendidikan tinggi di Indonesia mungkin sudah mengaplikasikan sepenuhnya sistem *e-learning* secara total. Sebagian lagi mungkin mengadopsi sistem campuran (*blended learning*): separuh perkuliahan daring dan separuhnya perkuliahan konvensional. Terakhir adalah institusi pendidikan tinggi yang memang tidak menerapkan *e-learning* sama sekali karena beragam pertimbangan (misalnya, ketersediaan jaringan internet, kualitas sumber daya manusia, pendanaan, dan sebagainya).

Meskipun tidak ada tipologi standar yang bisa diterima semua kalangan, tetapi kehadiran tipologi pengguna internet yang esensinya adalah mengklasifikasikan objek merupakan titik awal untuk memahami perilaku penggunaan internet yang sangat variatif dan dinamis. Para pembaca sangat didorong untuk menemukan dan membangun tipologi pengguna internet mereka sendiri yang sesuai dengan perspektif teoretis yang digunakan sebagai kaca mata untuk memahami fenomena sosial.

Profil dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia

Profil dan perilaku pengguna internet di Indonesia sangat dinamis karena dipengaruhi perubahan populasi penduduk, perkembangan teknologi, pembangunan ekonomi, situasi sosial-politik, kebijakan dan regulasi pemerintah, dan sebagainya. Karena dinamis, ia harus dipotret secara rutin dalam periode tertentu. Di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) setiap melakukan survei pemetaan profil dan perilaku internet di Indonesia sejak 2013. Di sektor bisnis, ujar APJII (APJII, 2013), hasil survei APJII pada 2013 menunjukkan perhotelan merupakan sektor bisnis dengan persentase penggunaan internet terbesar. Ada 71,06% hotel menggunakan internet, sedangkan industri pengolahan mencapai 68,9% dan restoran atau rumah makan sebesar 57,77%. Potensi penyediaan jasa koneksi internet terbesar adalah restoran/rumah makan sebesar 11,15%, disusul industri pengolahan 8,65% dan hotel 3,53%. Dari sisi penggunaan server untuk kegiatan utama, peluang terbesar ada di sektor restoran/rumah makan yang mencapai 10,71%, industri pengolahan di posisi ke dua dengan 9,93% dan hotel sebesar 7,65%. Di level perorangan, jumlah pengguna internet pada 2013 71.19 juta pengguna internet. Dengan jumlah tersebut, penetrasi internet di Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 28%.

Pada 2014, penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 34.9%. Meski angka penetrasi internet meningkat, namun sebarannya tidak merata secara geografis. Para pengguna internet tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan usia pengguna, mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia 18-25 tahun,

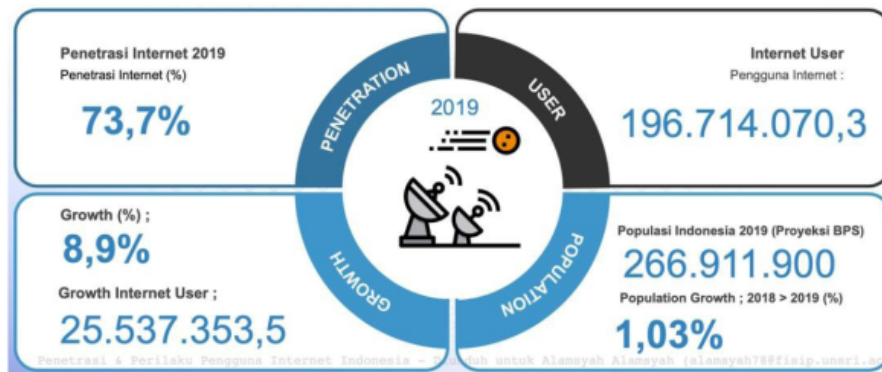
yaitu sebesar hampir setengah dari total jumlah pengguna internet di Indonesia (49%). Terkait dengan teknologi berbasis internet, 85% dari total pengguna internet di Indonesia mengakses internet dengan menggunakan *mobile phone*. Sementara bila dilihat dari kategori usia, *mobile phone* paling tinggi digunakan oleh mereka yang berusia 18-25 tahun. Sebanyak 60% pengguna internet dari kategori usia ini mengakses internet dari telepon seluler (APJII, 2014).

Pada 2016, survei APJII menunjukkan angka penetrasi mencapai 51%. Dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 256,2 juta orang, pengguna internet mencapai 132,7 juta. Pulau Jawa tetap memiliki skor penetrasi tertinggi (65%), diikuti Pulau Sumatra (15,7%), Sulawesi (6,3%), Kalimantan (5,8%), Bali dan Nusa (4,7%), serta Maluku & Papua (2,5%). Berdasarkan usianya, pengguna internet di tahun 2016 didominasi kelompok umur 35-44 tahun (29,2 persen atau 38,7 juta), diikuti kelompok umur 25-34 tahun (24,4% atau 32,3 juta), kelompok umur 10-24 tahun atau 24,4 juta), kelompok umur 45-54 tahun (18% atau 23,8 juta), dan kelompok umur >55 tahun (10% atau 13,2 juta). Pada 2016, alasan utama pengguna internet mengakses internet adalah memutakhirkan informasi (25,3%), membantu pekerjaan (20,8%), mengisi waktu luang (13,5%), sosialisasi (10,3%), pendidikan (9,2%), hiburan (8,8%), dan bisnis, berdagang, atau cari barang/jasa (8,5%) (APJII, 2016).

Pada 2017, dari total populasi penduduk Indonesia (262 juta orang), jumlah pengguna internet mencapai 143,26 orang atau 54,68% (tingkat penetrasi internet). Mayoritas pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan chatting (89,35%). Sisanya adalah mereka yang memanfaatkan internet untuk media sosial (87,13%), search engine (74,84%), melihat gambar/foto (72,79%), melihat video (69,64%), mengunduh video (20,23%), mengunduh gambar (56,777%), membaca/mengunduh artikel (55,30%), mengunggah file (35,99%), berkirim/menerima email (33,58%), membeli barang (32,19%), pendaftaran (16,97%), menjual barang (8,12%), dan transaksi perbankan (7,39%). Dari sisi usia, kelompok umur 19-34 tahun tetap merupakan pengguna internet terbanyak di Indonesia,

Di susul oleh kelompok umur 35-54 tahun (29,55%), kelompok umur 13-18 tahun (16,68%), dan kelompok umur >54 tahun (4,24%) (APJII, 2017).

Pada 2019, angka penetrasi internet di Indonesia, seperti ditunjukkan Gambar 2, sudah mencapai 73,7% dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,9%. Dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 266 juta orang, ada 196 juta penduduk yang menggunakan internet. Dari total ini, 97,1% pengguna internet mengakses internet melalui paket data yang disediakan operator telepon seluler. Produk telepon seluler dari Samsung dan simcard dari Telkomsel adalah dua komoditas yang paling banyak digunakan pengguna internet di Indonesia. Sedangkan penetrasi internet berdasarkan pulau masing-masing mencapai: 56,4% (Jawa), 22,1% (Sumatera), 7,0% (Sulawesi), 6,3% (Kalimatan), 5,2% (Bali dan Nusa Tenggara), 3,0% (Maluku).



Gambar 2 Profil pengguna internet di Indonesia, 2019
Sumber: APJII, 2020, *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2019*

Selain alat komunikasi dan kolaborasi, para pengguna internet di Indonesia juga mulai memanfaatkan internet untuk membeli barang dan jasa secara daring. Pada 2019, menurut survei APJII (APJII, 2020), 43,2% pengguna internet tidak pernah melakukan pembelian secara daring. Beberapa toko daring yang sering dikunjungi para pengguna internet di Tanah Air adalah: Shopee (27,4%), Lazada (14,2%), Tokopedia (5,2%), Bukalapak (3,8%), Facebook (2,4%), dan Traveloka (1,3%). Data ini mengindikasikan geliat perubahan perilaku pengguna internet dan berkembangnya industri *e-commerce* di Indonesia.

Kesimpulan

Risalah singkat ini menunjukkan bahwa pertemuan antara teknologi internet dengan beragam aktivitas sosial-ekonomi manusia melahirkan fenomena sosial yang kompleks. Karena teknologi informasi dan komunikasi berkembang secara eksponensial, maka imbasnya ke masyarakat juga akan bersifat eksponensial. Kelahiran teknologi baru akan menyalpkan teknologi lama. Di level masyarakat, teknologi baru melahirkan profesi baru dan menyalpkan profesi lama yang bertahan dengan teknologi lama. Kemampuan beradaptasi adalah kata kunci untuk menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis yang dipicu beragam penemuan teknologi baru.

Naskah singkat ini diharapkan dapat menarik minat mahasiswa dan para peneliti untuk mengelaborasi lebih jauh beragam fenomena sosial di dunia maya. Beragam tindak kriminal di dunia maya, misalnya perilaku menyebarkan berita bohong, kekerasan virtual, pornografi, *buzzer*, dan *phising*, menuntut penjelasan ilmiah lebih detail dari kalangan perguruan tinggi, baik mahasiswa, dosen, dan para peneliti. Partisipasi sosial dalam grup-grup daring, baik di WhatsApp dan Facebook, juga menuntut penjelasan secara ilmiah.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2013). *Penggunaan Internet di Sektor Bisnis 2013*. Jakarta, Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2014). *Profil Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2014*. Jakarta, Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2016). *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta, Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2017. *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia Tahun*

2017. Jakarta, Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2020. *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta, Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- Cohen-Almagor, R. (2015). *Technological Framework in Confronting the Internet's Dark Side*, R. Cohen-Almagor, Ed. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 49–83.
- Djumena, E. (2020). Ini 10 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi. *www.kompas.com*, Jakarta, Indonesia, Jun. 22, 2020.
- Law, N, et.al. (2018). *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*. Quebec, Canda, 51, 2018. [Online]. Available: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf>.
- Li, S., Xu, L. Da., & Zhao, S.. (2015). The Internet of Things: a survey. *Inf. Syst. Front.*, vol. 17, no. 2, pp. 243–259, Apr, doi: 10.1007/s10796-014-9492-7.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. *Horiz*, vol. 9, no. 5, pp. 1–6, Sep, doi: 10.1108/10748120110424816.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 2: Do They Really Think Differently?. *Horiz*, vol. 9, no. 6, pp. 1–6, Nov. doi: 10.1108/10748120110424843.
- Setiawan, A. B. (2012). Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet di Pondok Pesantren melalui Program Internet Sehat. *J. Penelit. Komun*, vol. 15, no. 1, pp. 93–108, doi: 10.20422/jpk.v15i1.706.
- Xia F., et.al. (2012). Internet of Things. *Int. J. Commun. Syst.*, vol. 25, no. 9, pp. 1101–1102, Sep. doi: 10.1002/dac.2417.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Dyah Hapsari Eko Nugraheni, Yoyok Hendarso

Pendahuluan

Kekerasan terhadap persoalan global. Menurut *World Health Organization* (WHO, 2013), secara global, sebanyak 38% dari kasus pembunuhan wanita yang dilaporkan ke aparat penegak hukum dilakukan oleh pasangan intim. Selain itu, 42% perempuan yang mengalami pelecehan fisik dan/atau seksual oleh pasangan mengalami luka-luka akibat praktik kekerasan tersebut. Perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan intim memiliki tingkat risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan dan perilaku berisiko dibandingkan dengan wanita yang belum mengalami kekerasan pasangan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki peluang 16 persen lebih besar untuk memiliki bayi berat lahir rendah, melakukan aborsi, dan mengalami depresi. Mereka juga memiliki peluang 1.5 kali lebih besar tertular HIV, 1,6 kali lebih mungkin menderita sifilis dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami KTP.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan isu keadilan gender sebagai salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Seperti ditunjukkan Tabel 1, PBB menargetkan untuk memberantas semua bentuk KTP dan anak perempuan, termasuk perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi seksual lainnya dalam domain publik dan pribadi. Target ini memiliki dua indikator. *Pertama*,

mengurangi proporsi perempuan dan anak perempuan berusia 15 tahun ke atas yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau psikologis oleh pasangan intim yang ada atau mantan pasangan intim dalam 12 bulan sebelumnya. *Kedua*, mengurangi proporsi perempuan dan anak perempuan berusia 15 tahun ke atas yang mengalami kekerasan seksual oleh orang-orang selain pasangan intim dalam 12 bulan.

Tabel 1. Tujuan, Target, dan Indikator Keadilan Gender Sebagai Tujuan SDGs

Tujuan	Target	Indikator
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	<p>5.1 Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja</p> <p>5.2 Menghapus semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual lainnya.</p> <p>5.3 Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita</p>	<p>5.1.1 Ada atau tidaknya kerangka hukum untuk mempromosikan, menegakkan, dan memantau kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan seks</p> <p>5.2.1 Menghapus semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual lainnya.</p> <p>5.2.2 Proporsi perempuan dan anak perempuan berusia 15 tahun ke atas yang mengalami kekerasan seksual oleh selain pasangan intim dalam 12 bulan sebelumnya, berdasarkan usia dan tempat kejadian</p> <p>5.3.1 Proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 15 dan sebelum usia 18 tahun</p> <p>5.3.2 Proporsi anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang mengalami pemotongan/ pemotongan genital perempuan, berdasarkan usia</p>

Tujuan	Target	Indikator
Mencapai kesetaraan gender membedakan semua perempuan dan anak perempuan	5.4 Mengakui dan menghargai pekerjaan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana layak secara nasional	5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan yang tidak dibayar, berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lokasi
	5.5 Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan peluang yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1 Proporsi kursi yang dipegang oleh perempuan di (a) parlemen nasional dan (b) pemerintah daerah
	5.6 Memastikan akses universal ke kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sesuai kesepakatan setelah the Program of Action of the International Conference on Population and Development dan the Beijing Platform for Action dan dokumen hasil konferensi peninjauan mereka	5.5.2 Proporsi perempuan yang menempati posisi manajerial 5.6.1 Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri tentang hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan perawatan kesehatan reproduksi
		5.6.2 Jumlah negara dengan undang-undang dan peraturan yang menjamin akses penuh dan setara terhadap perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun ke atas untuk layanan kesehatan, informasi dan pendidikan seksual dan reproduksi

Tujuan	Target	Indikator
	5.a Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, mengikuti hukum nasional	5.a.1 (a) Proporsi total populasi pertanian dengan kepemilikan atau hak terjamin atas lahan pertanian, berdasarkan jenis kelamin; dan (b) bagian perempuan di antara pemilik atau pemegang hak atas tanah pertanian, berdasarkan jenis kepemilikan
	5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan	5.b.1 Proporsi individu yang memiliki ponsel, berdasarkan jenis kelamin
	5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan	5.c.1 Proporsi negara dengan sistem untuk melacak dan membuat alokasi publik untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan

Sumber: *United Nations, 2019, Annex: Global Indicator Framework for the Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development.*

Indonesia juga memiliki banyak kasus terhadap perempuan. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2018), jumlah kasus KTP mencapai 348.446 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 259.150 kasus. Jenis KTP yang paling menonjol adalah: kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal (KDRT/RP) (9.609 kasus/71%); KTP di ranah komunitas/publik (KTP/P) (3.528 kasus/ 26%). Dari total kasus KTP/P, 76% berbentuk kekerasan seksual yaitu pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (704 kasus), perkosaan (699 kasus), serta persetubuhan (343 kasus). Sedangkan KTP di ranah negara (KTP/N) mencapai 217 kasus (1,8 persen).

Di ranah KDRT/RP, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), kekerasan seksual 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Jika mengacu ke konteks relasi sosialnya, maka KDRT/RP yang banyak terjadi adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 5.167 kasus (54 persen), kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus (19 persen), kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23 persen), dan sisanya adalah kekerasan mantan suami, mantan pacar, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah fenomena *incest* sebesar 1.210 kasus di mana pelaku adalah ayah kandung mencapai 425 kasus (Komnas Perempuan, 2018). Situasi ini mengindikasikan institusi rumah tangga tidak lagi menjadi surga bagi para penghuninya sebagaimana terkandung dalam ungkapan “rumahku adalah surgaku” (*baiti jannati*) yang populer di kalangan muslim di Indonesia.

Bab ini akan mengajak para pembaca untuk memahami lebih jauh pengetahuan ilmiah yang berhasil dikonstruksi para ilmuwan dalam memahami fenomena KTP. Secara sistematis, uraian akan diawali dengan mengungkapkan batasan, makna dan ruang lingkup konsep KTP. Setelah itu, penjelasan dilanjutkan dengan memetakan beberapa teori yang berusaha memahami fenomena KTP dalam sudut pandang tertentu. Terakhir, bab ini akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya KTP dan dampak KTP yang berhasil diidentifikasi para ilmuwan.

Makna dan Ruang Lingkup Kekerasan terhadap Perempuan

Secara leksikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring (KBBI, 2018) memberikan beberapa terhadap istilah kekerasan, yakni: (a) perih (yang bersifat, berciri) keras; (b) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; dan (c) paksaan. Makna poin (b) lebih menggambarkan konsep kekerasan karena mengandung subyek, obyek, dan predikat. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan (*violence*) sebagai: penggunaan **kekuasaan** atau kekuatan fisik yang disengaja, aktual, dan akan mengancam, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang menghasilkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, cedera psikis, atau keterbelakangan (WHO, 2002). Istilah **kekuasaan** (*power*) sengaja ditebalkan untuk menunjukkan bahwa fenomena KTP lahir dari proses relasi kuasa (*power of relationship*) dalam sistem sosial yang sangat kompleks. Setiap institusi sosial, baik di ranah politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya, dapat mempraktikkan KTP.

Sementara itu, dalam resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/48/104 tentang *Declaration on the Elimination of Violence against Women* pada 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan KTP sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang dapat membahayakan, atau berpotensi menimbulkan, penderitaan, ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan fisik, seksual, psikologis bagi perempuan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan pribadi maupun di ranah publik (UN, 1994).

Dua definisi di atas menunjukkan luasnya ruang lingkup KTP. WHO memetakan ruang lingkungan KTP berdasarkan jenis kekerasan dan satuan analisis faktor risiko penyebab kekerasan tersebut. Jenis kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni: kekerasan terhadap remaja, kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan terhadap pasangan, kekerasan terhadap orang tua, kekerasan seksual, kekerasan terhadap diri sendiri, dan kekerasan kolektif. Sementara itu,

penyebab KTP dapat berada di level individu, relasi sosial, komunitas, dan masyarakat.

Perspektif Teoritis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Dari mana asal muasal tindakan KTP ini? Paling tidak, ada tiga teori yang mencoba menjelaskan hal ini, yakni: teori pembelajaran sosial, teori gender dan maskulinitas, dan teori feminisme (Jhonson, Ollus, & Nevala, 2008). Menurut teori pembelajaran sosial, tindakan KTP merupakan hasil meniru tindakan orang lain dalam latar sosial tertentu. Sumber belajarnya bisa anggota keluarga atau individual dalam lingkungan sosial yang lebih luas (misalnya, komunitas, organisasi, masyarakat). Ketika seseorang terpapar KTP di masa kecil (misalnya, hanya sekedar melihat atau menjadi korban), maka ia cenderung akan menggunakan tindakan kekerasan dalam setiap perkembangan usianya.

Mirip dengan teori pembelajaran sosial, teori gender dan maskulinitas berargumen bahwa tindakan KTP merupakan produk sosialisasi tentang peran gender dalam kultur tertentu yang terjadi masa anak-anak dan mendukung dominasi dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. TKP adalah wahana bagi laki-laki untuk mengekspresikan hegemoni maskulinitas terhadap perempuan yang terperangkap dalam pembagian kerja yang bias gender. Teori ini juga melihat TKP sebagai kompetisi status sosial antar laki-laki dalam mengekspresikan maskulinitasnya. Karena perbedaan akses ke sumber daya antar laki-laki, maka tidak semua laki-laki mampu menunjukkan maskulinitasnya. Dalam situasi ini, laki-laki marginal akan mengonstruksi kekerasan secara berbeda dengan laki-laki yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi. Laki-laki marginal yang tidak mampu mengekspresikan maskulinitasnya dengan cara-cara yang absah cenderung akan mengonstruksi bentuk-bentuk kekerasan secara agresif.

Berbeda dengan dua teori di atas, teori feminisme melihat KTP merupakan produk sistem patriarki yang menciptakan dan melanggengkan ketidakadilan gender (relasi kuasa yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan) dalam semua aspek kehidupan sosial. Sistem patriarki ini memiliki dua komponen, yakni struktur

sosial dan ideologi. Struktur sosial merujuk ke relasi-relasi sosial yang melembaga dalam beragam institusi sosial misalnya keluarga, hukum, agama, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan ideologi merujuk ke keyakinan dan pandangan banyak orang yang menerima dan mendukung sistem patriarki sebagai sesuatu yang alami dan baik bagi keseluruhan masyarakat.

Determinan Kekerasan Terhadap Perempuan

Penyebab kekerasan sangat variatif dan tergantung satuan analisis yang digunakan (misalnya, individu, relasi sosial, komunitas, masyarakat dan relasi sosial). Tabel 2 menyederhanakan argumentasi WHO (WHO, 2002) tentang penyebab kekerasan berdasarkan klasifikasi jenis kekerasan. Meskipun WHO (WHO, 2002) tidak secara spesifik menyebutkan istilah KTP, tetapi Tabel 2 juga bisa diaplikasikan untuk memahami fenomena KTP. Sebab, perempuan selalu hadir sebagai korban dalam setiap jenis dan level kekerasan. Mengacu ke Tabel 2, KTP disebut kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika kekerasan terhadap remaja, anak, pasangan, orang tua, seksual dan diri sendiri terjadi di institusi rumah tangga.

Bertolak dari fakta bahwa realitas sosial selalu disebabkan banyak faktor, maka sangat mungkin faktor-faktor penyebab yang termaktub dalam Tabel 2 memiliki hubungan satu sama lain. Artinya, KTP bisa disebabkan oleh faktor di level individu, hubungan sosial, komunitas, atau masyarakat. Argumentasi ini dikuatkan oleh beberapa hasil riset yang dilakukan peneliti (Li et.al, 2010), misalnya, menemukan bahwa instabilitas lingkungan tempat tinggal dan komposisi rumah tangga berasosiasi secara statistik dengan KTP pasangan di kalangan perempuan hamil berpenghasilan rendah. Jalinan faktor di beragam level juga ditunjukkan hasil riset Heise (Heise & Kotsadam, 2015) yang menemukan bahwa faktor-faktor di tingkat nasional dan daerah (misalnya, norma-norma yang berkaitan dengan otoritas laki-laki atas perilaku perempuan, norma yang membenarkan pemukulan istri, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan PDRB) membantu memprediksi prevalensi kekerasan fisik dan seksual pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Tabel 2. Penyebab Kekerasan

<i>Faktor risiko</i>	Jenis kekerasan		
	Remaja	Anak	Pasangan
<i>Individu</i>	Karakteristik biologis, kepribadian	Umur, jenis kelamin, karakter spesial anak,	Umur, pemabuk, depresi, kepribadian, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pengalaman kekerasan di masa anak-anak
<i>Hubungan sosial</i>	Pengaruh teman sepermainan dan anggota keluarga	Struktur, sumber daya, ukuran, dan komposisi keluarga, kepribadian orang tua, sejarah kekerasan dalam keluarga, isolasi sosial, kekerasan terhadap pasangan	Konflik dan instabilitas pernikahan, dominasi lelaki dalam keluarga, tekanan ekonomi, dan kemiskinan keluarga
<i>Komunitas</i>	Gang, narkoba, senjata api, dan integrasi sosial	Kemiskinan dan modal sosial	Lemahnya sanksi komunitas, kemiskinan, dan modal sosial
<i>Masyarakat</i>	Perubahan sosial dan demografis, ketimpangan pendapatan, struktur politik, dan faktor budaya	Nilai-nilai kultural, kekuatan-kekuatan ekonomi, ketidakadilan seks dan pendapatan, kebijakan publik tentang anak dan keluarga, sistem kesejahteraan sosial, perang dan konflik sosial.	Norma-norma gender tradisional dan norma-norma sosial yang mendukung kekerasan

Sumber: WHO. 2002. World Report on Violence and Health

Lanjutan Tabel 2.

Faktor risiko	Jenis kekerasan		
	Orang tua	Seksual	Diri sendiri
Individu	Faktor kepribadian, alkohol, kesehatan mental	Umur, alkohol dan narkoba, trauma masa lalu, banyak pasangannya, seks, tingkat pendidikan, kemiskinan	Kondisi psikologis dan status pernikahan
Relasi sosial	Rendahahnya perhatian anak terhadap orang tua, migrasi ke daerah lain, depresi pengasuh, perilaku destruktif dan agresif pengasuh, rendahnya <i>privacy</i> .	Sikap agresif pasangan, ingkungan keluarga, relasi patriarki, dan harga diri keluarga	Faktor genetika, sejarah
Komunitas	Isolasi sosial, tradisi dan norma-norma kultural, sistem matrilineal dan patrilineal, kondisi ekonomi keluarga	Kemiskinan, lapangan kerja, hukum dan kebijakan, toleransi dan sanksi komunitas terhadap pelaku ekonomi	Ketersediaan alat bunuh diri, tempat tinggal, pengangguran, status imigrasi, agama, dan kondisi ekonomi
Masyarakat	Isolasi sosial, tradisi dan sistem matrilineal dan patrilineal, kondisi ekonomi keluarga	Norma-norma hukum dan kebijakan tentang kekerasan seksual dan keadilan gender, dan kriminalitas	Demokratisasi, akses ke kekuasaan dan sumber daya, fanatisme kelompok, kepemilikan senjata api, perubahan demografis.

Sumber: WHO. 2002. *World Report on Violence and Health*

Riset-riset sebelumnya sudah mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap praktik KTP, yakni: modal sosial (Noaparast, 2011)-(Daoud et.al., 2017), keamanan lingkungan (Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997)-(Lockie, 2011), faktor ekonomi (Farmer & Tiefenthaler, 1997)-(Babu & Kar, 2009), religiositas (Eidhamar, 2018)-(Nur, 2012), akses listrik (Sievert, 2015)(Fernández-Baldor, Lillo, & Boni, 2015). Di Indonesia, temuan para peneliti sebelumnya tentang KDRT juga variatif dan tidak jauh berbeda dengan dokumentasi WHO (WHO, 2002). Seperti ditunjukkan Tabel 3, penyebab KTP di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi empat faktor, yakni: *pertama*, faktor pelaku meliputi tingkat pendidikan yang rendah, judi dan hutang, narkoba, poligami, alkohol, cemburu, akses ke senjata api, depresi, keterlibatan dalam gang, perkelahian dengan senjata, dan jenis pekerjaan. *Kedua*, faktor korban terdiri atas cemburu, menstruasi, mempertanyakan otoritas/tindakan laki-laki, diskriminasi sosial dan hukum. *Ketiga*, faktor relasi sosial antara pelaku dan korban yang meliputi kualitas relasi sosial, waktu bersama keluarga, tipe pernikahan, relasi berbasis gender. *Keempat*, faktor konteks rumah tangga yang terdiri atas budaya patriarki, keuangan dan perekonomian rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya lokal, norma institusi keluarga, internalisasi norma-norma gender, dan lingkungan tempat tinggal.

Hasil-hasil riset ini menegaskan fenomena KTP sebagai realitas yang kompleks. Tidak ada jalan pintas dalam upaya menurunkan prevalensi KTP di dunia, khususnya Indonesia. KTP ada di setiap sektor pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, dan sebagainya. Ia juga terjadi tanpa memandang batasan umur. Perempuan yang masih anak-anak, remaja, dewasa, atau lanjut usia memiliki peluang masing-masing untuk menjadi korban KTP, baik di ranah personal, relasi sosial, komunitas, atau negara. Oleh karena itu, komitmen dan kolaborasi beragam pemangku, baik pada level rumah tangga, komunitas, organisasi sosial, para pelaku pasar, institusi sosial, maupun institusi pemerintah merupakan prasyarat utama dalam rangka mewujudkan keadilan gender di Tanah Air.

Tabel 3. Penyebab KTP di Indonesia

No.	Peneliti	Penyebab KTP
1.	Aisyah (Aisyah, 2012) dan Aisyah & Parker (Aisyah & Parker, 2014)	Upaya perempuan mempertanyakan atau menantang kekuasaan atau otoritas laki-laki, poligami, pembagian kerja berbasis gender, isi finansial, dan alkohol
2.	Arifianti et al. (Arifianti et al, 2017)	Pekerjaan pelaku, kualitas relasi sosial pelaku, pengalaman masa lalu, perekonomian rumah tangga, dan waktu bersama keluarga
3.	Asal & Brown (Asal & Brown, 2010)	Kualitas demokrasi dan ketidakadilan ekonomi
4.	Asmarany (Asmarany, 2007)	Bias gender
5.	Blackburn (Blackburn, 1999)	Krisis ekonomi dan politik
6.	Fulu et al. (Fulu et al, 2013)	Relasi berbasis gender, pengalaman traumatis di masa lalu, depresi, alkohol, pendidikan yang rendah, kemiskinan, keterlibatan dalam gang, perkelahian dengan senjata
7.	Gusliana (Gusliana, 2010)	Budaya patriarki, himpitan ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan jenis pekerjaan.
8.	Hayati et al. (Hayati, 2014)	Perspektif lelaki tentang maskulinitas
9.	Hayati et al. (Hayati, 2011)	Karakteristik demografis suami, karakter personal suami, dan ketergantungan ekonomi perempuan
10.	Misa (Misa, 2013)	Faktor ekonomi, cemburu, dan minuman keras
11.	Nilan et al. (Nilan et al, 2014)	Tekanan ekonomi dan pandangan agama yang konservatif
12.	Nur Hayati et al. (Nur Hayati et al, 2013)	Internalisasi norma-norma gender
13.	Rofiah (Rofiah, 2016) & Parker (Parker, 2016)	Budaya patriarki, ideologi keluarga
14.	Venning (Venning, 2010)	Gender <i>stereotype</i> , norma budaya dan institusi keluarga, diskriminasi hukum dan sosial, kemiskinan, dan faktor ekonomi

Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Dampak KTP dapat dijelaskan dari beberapa aspek. *Pertama*, aspek kesehatan, baik fisik maupun psikis. KTP dapat menyebabkan fisik perempuan mengalami memar, luka, gegar otak, patah tulang, organ yang terluka seperti mata atau telinga, keguguran sampai mati (bunuh diri atau pembunuhan). Sedangkan dampak psikis bagi perempuan dapat berupa stres, kecemasan, depresi, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, dan percobaan bunuh diri. Pelecehan seksual di masa kecil dapat menyebabkan perilaku seksual pada masa remaja/dewasa memiliki risiko tinggi tertular penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual menempatkan wanita pada risiko infeksi termasuk AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infertilitas, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dan bahkan kematian (Bhatti, 2011), (Johnson, Ollus, & Nevala, 2008).

Kedua, aspek sosial-ekonomi. Ketika perempuan sakit, maka ia tidak bisa melakukan banyak aktivitas positif, misalnya bekerja, sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan sebagainya. Riset Browne, Salomon, & Bassuk (Browne, Salomon, & Bassuk, 1999) menunjukkan bahwa wanita yang mengalami agresi fisik/kekerasan oleh pasangan pria dalam periode 12 bulan hanya memiliki peluang 33 persen untuk mempertahankan pekerjaan selama setidaknya 30 jam per minggu selama 6 bulan atau lebih selama tahun berikutnya jika dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami kekerasan. Jadi, dalam aspek sosial-ekonomi, KTP berimbas ke tingkat partisipasi sosial dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan.

Ketiga, ketika perempuan sakit, minim partisipasi sosial, dan terabaikan hak-hak asasinya, maka yang terancam bukan hanya institusi rumah tangga, tetapi juga institusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti diungkapkan Bung Karno, Proklamator Republik Indonesia: *jika perempuan itu baik, maka jayalah negara itu. Tetapi kalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara itu.* Ungkapan ini menempatkan peran dan posisi strategis perempuan sebagai tiang negara yang akan sangat menentukan keberlanjutan Indonesia

sebagai sebuah bangsa dan negara modern yang berdaulat dan beradab. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan gender di segala sektor pembangunan merupakan salah satu strategi untuk memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Bab ini menunjukkan bahwa KTP merupakan persoalan, baik bagi seluruh bangsa di dunia maupun bagi Indonesia, yang tidak mudah diintervensi. Dampak KTP terhadap kesehatan fisik perempuan mungkin bisa disembuhkan dengan cepat. Tetapi, dampak kesehatan psikis dan dampak sosial-ekonomi membutuhkan proses penyembuhan yang cukup lama. Di sisi lain, fenomena KTP akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Untuk konteks Indonesia, narasi KTP mungkin saja muncul dalam relasi sosial di ranah digital, misalnya dalam bentuk *bullying*. Pengetahuan dalam bab ini dapat menjadi modal awal untuk memahami dan mengantisipasi beragam KTP di masa mendatang.

Sesuai judulnya, bab ini hanya fokus ke KTP. Faktanya, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan. Dalam kitab suci agama samawi, khususnya Alkitab dan Alquran, Tuhan mengabarkan bagaimana *Yusuf* (versi Islam) atau *Joseph* (versi Kristen) menjadi korban kecemburuan sosial di level rumah tangga (QS. Yusuf [12]: 8-10; Kejadian [37]: 3-4), korban perdagangan manusia (QS. Yusuf [12]: 20; Kejadian [37]: 36), korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang perempuan (QS. Yusuf [12]: 23; Kejadian [39]: 7, 12), dan korban penegakkan hukum yang diskriminatif (QS. Yusuf [12]: 35; Kejadian [39]: 20). Perlu kajian tersendiri untuk memetakan seperti apa bentuk kekerasan terhadap laki-laki dalam kehidupan sosial.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. (2012). Rereading Patriarchal Interpretations on the Quran from Hadith Perspective in the Eve of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. *J. Indones. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 48–75, Jun.
- Aisyah, S & Parker, L. (2014). Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia. *Asian Stud. Rev.*, vol. 38, no. 2, pp. 205–223.
- Arifianti, L. A. A., Jayanegara, K., Gandhiadi, G. K., & Kencana, E. N. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar. *E-Jurnal Mat.*, vol. 6, no. 1, pp. 83–89.
- Asal, V & Brown, M. (2010). A Cross-National Exploration of The Conditions that Produce Interpersonal Violence. *Polit. Policy*, vol. 38, no. 2, pp. 175–192.
- Asmarany, A. I. (2007). Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *J. Psikol.*, vol. 35, no. 1, pp. 1–20.
- Babu, B. V & Kar, S. K. (2009). Domestic Violence Against Women in Eastern India: a Population-Based Study on Prevalence and Related Issues. *BMC Public Health*, vol. 9, no. 129, pp. 1–15.
- Babu, B. V & Kar, S. K. (2010). Domestic violence in Eastern India : Factors Associated with Victimization and Perpetration. *Public Health*, vol. 124, no. 3, pp. 136–148.
- Benavides, M., León, J., M. Etesse, Espezúa, L., & Stuart, J. (2019). Exploring the Association between Segregation and Physical Intimate Partner Violence in Lima, Peru: The Mediating Role of Gender Norms and Social Capital. *SSM - Popul. Heal.*, vol. 7, p. 100338.
- Benson, M. L., Fox, G. L., De Maris, A., & Van Wyk, J. (2003). Neighborhood Disadvantage, Individual Economic Distress and Violence Against Women in Intimate Relationship. *J. Quant. Criminol.*, vol. 19, no. 3, pp. 207–235.
- Bhatti, A.M.. (2011). Violence against women is a public health problem. *Med. Forum Mon.*, vol. 22, no. 4, pp. 1–2.
- Blackburn, S. (1999). Gender violence and the Indonesian political transition," *Asian Stud. Rev.*, vol. 23, no. 4, pp. 433–448.

- Browne, A., Salomon, A., & S. Bassuk, S. (1999). The Impact of Recent Partner Violence on Poor Women's Capacity to Maintain Work. *Violence Against Women*, vol. 5, no. 4, pp. 393–426, Apr.
- Bruederle, A., Delany-Moretlwe, S., Mmari, K., & Brahmhatt, H. (2019). Social Support and Its Effects on Adolescent Sexual Risk Taking: A Look at Vulnerable Populations in Baltimore and Johannesburg. *J. Adolesc. Heal.*, vol. 64, no. 1, pp. 56–62.
- Daoud, N., Sergienko, R., O'Campo, P., & Shoham-Vardi, I. (2017). Disorganization Theory, Neighborhood Social Capital, and Ethnic Inequalities in Intimate Partner Violence between Arab and Jewish Women Citizens of Israel. *J. Urban Heal.*, vol. 94, no. 5, pp. 648–665, Oct.
- Eidhamar, L.G. (2018). 'My Husband is My Key to Paradise.' Attitudes of Muslims in Indonesia and Norway to Spousal Roles and Wife-Beating. *Islam Christ. Relations*, vol. 29, no. 2, pp. 241–264.
- Everingham, C. (2002). Engendering Time workplace flexibility. *Time Soc.*, vol. 11, no. 2, pp. 335–351.
- Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal*, vol. 6, no. 2, pp. 113–128.
- Farmer, A & Tiefenthaler, J. (1997). An Economic Analysis of Domestic Violence. *Rev. Soc. Econ.*, vol. 55, no. 3, pp. 337–358, Sep.
- Fatmariza, F. (2012). Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga (Pandangan Mubalig). *Humanus*, vol. 12, no. 2, pp. 172–180, Dec.
- Fernández-Baldor, Á., Lillo, P., & Boni, A. (2015). Gender, Energy, and Inequalities: A Capabilities Approach Analysis of Renewable Electrification Projects in Peru. In *Sustainable Access to Energy in the Global South*, S. Hostettler, A. Gadgil, and E. Hazboun, Eds. Cham: Springer International Publishing, pp. 193–204.
- Flood, M & Pease, B. (2009). Factors Influencing Attitudes to Violence Against Women. *Trauma, Violence, Abus.*, vol. 10, no. 2, pp. 125–142, Apr.
- Fulu, E., Jewkes, R., Roselli, T., & Garcia-Moreno, C. (2013). Prevalence of and factors associated with male perpetration of intimate partner violence: Findings from the UN multi-country cross-

- sectional study on men and violence in Asia and the Pacific," *Lancet Glob. Heal.*, vol. 1, no. 4, pp. e187–e207.
- Gusliana, H. (2010). Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Isteri di Kota Pekanbaru," *J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 80–93.
- Hayati, E. N., Emmeli, M., & Eriksson, M. (2014). 'We no Longer Live in The Old Days': a Qualitative Study on The Role of Masculinity and Religion for Men's Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia. *BMC Womens. Health*, vol. 14, no. 1, pp. 1–13, Dec.
- Hayati, E. N., Högberg, U., Hakimi, M., Ellsberg, M. C., & Emmelin, M. (2011). Behind the Silence of Harmony: Risk Factors for Physical and Sexual Violence among Women in Rural Indonesia. *BMC Womens. Health*, vol. 11, p. 52.
- Hayati, E. N., Högberg, U., Hakimi, M., Ellsberg, M. C., & Emmelin, M. (2013). 'Elastic band strategy': Women's Lived Experience of Coping with Domestic Violence in Rural Indonesia. *Glob. Health Action*, vol. 6, no. 1, p. 18894, Dec.
- Heise, L. L. & Kotsadam, A. (2015). Cross-National and Multilevel Correlates of Partner Violence: An Analysis of Data from Population-Based Surveys. *Lancet Glob. Heal.*, vol. 3, no. 6, pp. e332–e340.
- Johnson, H., Ollus, N., & Nevala, S. (2008). *Violence Against Women: An International Perspective*. New York, USA: Springer.
- Komnas Perempuan. (2018). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2019). "Makna Kata Keras," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
- Li, Q., R. Kirby, S., Sigler, R. T., Hwang, S.-S., LaGory, M. E., & Goldenberg, R. L., (2010). A Multilevel Analysis of Individual, Household, and Neighborhood Correlates of Intimate Partner Violence Among Low-Income Pregnant Women in Jefferson County, Alabama. *Am. J. Public Health*, vol. 100, no. 3, pp. 531–539, Mar.
- Lockie, S. (2011). Intimate partner abuse and women's health in rural and mining communities. *Rural Soc.*, vol. 20, no. 2, pp. 198–215, Apr.

- Miles-Doan, R. (1998). Violence between Spouses and Intimates: Does Neighborhood Context Matter?. *Soc. Forces*, vol. 77, no. 2, pp. 623–645.
- Misa, L. (2013). Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. *KANUN J. Ilmu Huk.*, vol. 60, no. 15, pp. 297–312.
- Nilan, P., Demartoto, A., Broom, A., & Germov, J. (2014). Indonesian Men's Perceptions of Violence Against Women. *Violence Against Women*, vol. 20, no. 7, pp. 869–888, Jul.
- Noaparast, E. B. (2011). Social Capital, Family Supports and Mental Health among a Female Group in Tehran. *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 30, pp. 2449–2451.
- Nur, R. (2012). Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. *Humaniora*, vol. 24, no. 1, pp. 37–49, Jun.
- Parker, L. (2016). The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia. *Indones. Malay World*, vol. 44, no. 128, pp. 7–26, Jan.
- Pinchevsky, G.M & Wright, E.M. (2012). The Impact of Neighborhoods on Intimate Partner Violence and Victimization," *Trauma, Violence, Abus.*, vol. 13, no. 2, pp. 112–132.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 31–44.
- Rojas, Y & Stickley, A. (2014). Informal Social Capital in Childhood and Suicide among Adolescent and Young Adult Women: A Cross-Sectional Analysis with 30 Countries. *Womens. Stud. Int. Forum*, vol. 42, pp. 1–8.
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. *Science (80)*, vol. 277, pp. 918–924, Aug. USA: the United Nations Statistical Commission.
- Sievert, M. (2015). Rural Electrification and Domestic Violence in Sub-Saharan Africa. Essen, Germany, 570.
- United Nations. (1994). *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. New York. USA: United Nations.

- United Nations. (2019). *Annex: Global Indicator Framework for the Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Washington D.C.
- Venning, P. (2010). Marrying Contested Approaches: Empowerment and the Imposition of International Principles: Domestic Violence Case Resolution in Indonesia. *J. Dev. Stud.*, vol. 46, no. 3, pp. 397–416, Mar.
- Wahyuni, S. (2008). Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh. *Al-Ahwal*, vol. 1, no. 1, pp. 17–30.
- World Health Organization. (2002) *World report on violence and health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
- World Health Organization. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. Geneva. Switzerland: World Health Organization.

PERKEMBANGAN URBANISASI DI ASIA: Tinjauan Sosiologi Kependudukan (*Urbanization Development in Asia: Overview of Population Sociology*)

Muhammad Izzudin, Ridha Taqwa

Pendahuluan

Banyak perubahan yang sangat besar telah terjadi di Asia selama satu setengah abad ini dan telah mencapai proporsi populasi yang berlipat-lipat di mana sebagian besar tinggal di area perkotaan (Kusno, 2017; Hori et al., 2019). Pada tahun 1950, 231 juta penduduk Asia tinggal di area perkotaan dan pada tahun 2000 telah naik hingga lima kali lipat menjadi 1,22 milyar sementara total proporsi penduduknya meningkat dari 17,1 menjadi 34,9 persen (Satterthwaite, 2005). Lebih jauh lagi, selama dua decade kedepan penduduk Asia yang akan tinggal di perkotaan lebih dari setengah penduduk negaranya (Small et al., 2018). Sementara masih terdapat variasi yang cukup besar antara Negara–Negara pada level urbanisasi dan kemudian pertumbuhan kota mengindikasikan perubahan substansi ekonomi, sosial dan demografi suatu wilayah.

Pertimbangan isu penduduk kota di Asia yang terpenting adalah sulitnya konseptualisasi, definisi dan deliniasi area perkotaan di suatu wilayah. Salah satu hal menarik dari area perkotaan adalah kompleks dan hubungan yang kuat dengan perdesaan serta tingginya mobilitas penduduk yang terjadi pada hubungan desa – kota tersebut

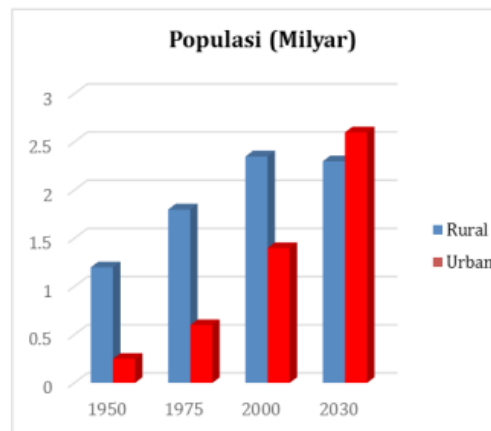
(Reimer et al., 2019). Pola pergerakan ini telah mengaburkan jarak antara desa dengan kota di mana banyak penduduk bekerja di area perkotaan sementara keluarga menghabiskan periode waktunya di area perdesaan (Hugo, 1982; Solé et al., 2016). Terlebih lagi, definisi dan deliniasi batas kota pada suatu wilayah tidak jelas karena criteria yang dipakai adalah batas administrasi yang tentunya tidak efektif untuk membedakan penduduk di kota dan di desa (Alvioli, 2020; Wineman et al., 2020).

Paper ini menjelaskan (1) bagaimana tren perkembangan urbanisasi di perkotaan di Asia yang menjadi dasar dalam teori sosiologi kependudukan, (2) mobilitas penduduk dan urbanisasi di Asia dan (3) kemiskinan kota di Asia Tenggara.

Pembahasan dan Diskusi

Tren Urbanisasi

United Nation dalam kurun waktu sekali selama dua tahun mengestimasi penduduk kota dan desa yang digunakan untuk menjelaskan kondisi saat ini dan meramalkan tren dari urbanisasi di Asia dan pertumbuhan perkotaan (Jiang & O'Neill, 2017; Ritchie & Roser, 2018). Hal pertama yang terpenting untuk ditekankan adalah tentang perubahan angka penduduk sejak hal ini mengindikasikan pergeseran permintaan dan kebutuhan perdagangan dan jasa (Shatkin, 2016). Gambar 1 mengindikasikan pertumbuhan yang masif terjadi di sektor perkotaan Asia antara tahun 1950–2000 (dari awalnya 250 juta menjadi hampir 1,5 milyar orang), sementara penduduk perdesaan naik dari 1,2 menjadi 2,3 milyar.



Gambar 1 Penduduk desa dan kota Asia, 1950 – 2030
Sumber: (Zlotnik, 2017)

Di sisi yang lain, penduduk perdesaan Asia diperkirakan akan mengalami penurunan pada tiga decade ke depan sementara penduduk perkotaan akan naik dua kali lipat. Namun, gambaran tersebut bervariasi antara masing-masing Negara di Asia. Tabel 1 menunjukkan bahwa Asia Selatan dan Asia Tengah adalah Negara dengan tingkat urbanisasi terendah yaitu kurang dari tiga (29,8 persen) dari penduduk yang tinggal di kota, sementara Asia Timur merupakan Negara di Asia dengan tingkat urbanisasi tertinggi yaitu 41,6 persen. Pada tahun 203, dua pertiga penduduk di Asia Timur akan tinggal di kota sementara proporsi perkotaan di Asia Selatan dan Tengah mencapai 44 persen dan Asia Tenggara mencapai 56,5 persen. Variasi tingkat urbanisasi ini akan semakin besar antar Negara dan pada *Lampiran 1*, United nation telah mengestimasi dan memproyeksikan angka persentase dari total penduduk tiap Negara di area perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat urbanisasi berbeda, mulai dari kota Hongkong dan Singapura hingga Negara dengan seluruhnya masih desa seperti Timur Leste (7,5 persen tinggal di kota) dan Myanmar (7,1 persen). Hal khusus yang terpenting adalah mempertimbangkan tren dari 10 negara terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 100 juta orang pada tahun 2000, 9 negara tersebut ada di Asia. Tabel 2 menjelaskan tren dari pertumbuhan penduduk perkotaan di tiap Negara.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Perkotaan Asia Tahun 1950 – 2000 dan 2030

<i>Region</i>	1950		2000		2030	
	No. ('000)	%	No. ('000)	%	No. ('000)	%
Eastren Asia	121.250	18,0	616.845	41,6	1.064.756	62,7
South Central Asia	82.882	16,6	440.879	29,8	968.944	44,0
Southeastern Asia	26.305	14,8	196.029	37,5	407.174	56,5
Asia	230.437	16,5	1.253.753	36,3	2.440.874	54,4

Sumber: United Nation, 2019

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Perkotaan Negara Besar di Asia Tahun 1950 – 2000 dan 2030

<i>Country</i>	1950			2000			2030		
	No. ('000)	%	% Growth (1950-2000)	No. ('000)	%	% Growth (2000-2030)	No. ('000)	%	
China	69.528	12,5	556,3	456.340	35,8	93,6	883.421	59,5	
India	61.695	17,3	352,3	279.045	27,7	106,3	575.684	40,9	
Indonesia	9.863	12,4	781,5	86.943	41,0	107,1	180.019	63,7	
Pakistan	6.949	17,5	572,9	46.757	33,1	184,9	133.226	48,9	
Bangladesh	1.774	4,2	1.836,5	34.354	25,0	186,9	98.554	44,3	
Japan	42.065	50,3	137,9	100.089	78,8	2,7	102.819	84,8	

Sumber: United Nation, 2019

Secara jelas dapat dilihat pada table di atas bahwa pertumbuhan kota yang masif selama periode tahun 1950–2000 dan dua kali lipat terus naik kecuali Jepang dan Cina. Hanya Jepang saja yang setengah penduduknya tinggal di perkotaan pada tahun 2000 namun pada tahun 2030, kondisi ini dapat terjadi di Cina dan Indonesia. Hal penting lain yang harus menjadi pertimbangan adalah perubahan tempo urbanisasi dan pertumbuhan kota. Tabel 1.3 menjelaskan secara singkat tren utama yaitu pada periode tahun 1950 – 2000, penduduk perkotaan di Asia tumbuh hingga 3,46 persen per tahun.

Tabel 3 Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Tahun 1950 – 2030

Major Area	Population (Millions)				Growth rate (percentage)		Doubling time (Years)	
	1950	1975	2000	2030	1950-2000	2000-2030	1950-2000	2000-2030
<i>Total Population</i>								
Northern America	172	243	314	396	1,21	0,77	57	89
Latin America and the Caribbean	167	322	519	723	2,27	1,11	31	63
Oceania	13	21	31	42	1,77	1,05	39	66
Europe	548	676	727	670	0,57	-0,27	123	NA
Asia	1399	2397	3672	4950	1,93	0,99	36	70
Africa	221	406	794	1489	2,56	2,1	27	33
<i>Urban Population</i>								
Northern America	110	180	243	335	1,59	1,07	44	65
Latin America and the Caribbean	70	198	391	608	3,44	1,47	20	47
Oceania	8	15	23	32	2,14	1,19	32	58
Europe	287	455	534	540	1,24	0,04	56	1947
Asia	244	592	1376	3672	3,46	2,22	20	31
Africa	32	102	295	794	4,42	3,27	16	21
<i>Rural Population</i>								
Northern America	62	64	71	61	0,28	-0,49	251	
Latin America and the Caribbean	97	124	127	116	0,55	-0,33	127	
Oceania	5	6	8	10	0,98	0,61	71	114
Europe	261	221	193	131	-0,6	-1,31		
Asia	1155	1805	2297	2271	1,37	-0,04	60	
Africa	188	304	498	702	1,94	1,14	36	61

Sumber: United Nation, 2019

Tabel 4. Rata – rata Urbanisasi Penduduk Perkotaan Tahun 1950 – 2030

Major Area	Percentage Urban				Urbanization rate (percentage)		Doubling time (years)	
	1950	1975	2000	2030	1950-2000	2000-2030	1950-2000	2000-2030
Northern America	63,9	73,8	77,4	84,5	0,38	0,3	-	-
Latin America and the Caribbean	41,9	61,4	75,4	84	1,18	0,36	-	-
Oceania	61,6	72,2	74,1	77,3	0,37	0,14	-	-
Europe	52,4	67,3	73,4	80,5	0,68	0,31	-	-
Asia	17,4	24,7	37,5	54,1	1,53	1,23	45	57
Africa	14,7	25,2	37,2	52,9	1,86	1,17	37	59

Sumber: United Nation, 2019

Meskipun demikian, hal ini dapat diantisipasi di mana rata-rata kenaikan ini akan turun sebesar 2,22 persen per tahun selama periode 2000–2030 serta penduduk perdesaan akan mengalami penurunan sebesar 0,04 persen. Oleh sebab itu, pada abad ini pertumbuhan penduduk total di Asia akan terserap di pusat kota. Seperti yang akan dijelaskan pada paragraf yang selanjutnya bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota serta ekspansi wilayah permukiman perkotaan. Karakteristik penting dari urbanisasi di Asia adalah munculnya kota megapolitan (*megacities*) yaitu penggabungan aglomerasi kota-kota inti dengan penduduk lebih dari 10 juta. Tabel 4 menunjukkan tidak adanya aglomerasi pada tahun 1950 namun pada tahun 1975 mulai terjadi aglomerasi dan 11 dari 17 kota megapolitan dunia adalah Negara Asia.

Tabel 5. Penduduk Perkotaan (Lebih dari 10 juta) tahun 1950, 1975, 2001 dan 2015

1950		1975		2001		2015	
City	Population	City	Population	City	Population	City	Population
1. New York	12,3	1. Tokyo	19,8	1. Tokyo	26,5	1. Tokyo	27,2
		2. New York	15,9	2. Sao Paulo	18,3	2. Dhaka	22,8

3. Shanghai	11,4	3. Mexico City	18,3	3. Mumbai	22,6
4. Mexico City	10,7	4. New York	16,8	4. Sao Paulo	21,2
5. Sao Paulo	10,3	5. Mumbai	16,5	5. Delhi	20,9
		6. Los Angeles	13,3	6. Mexico City	20,4
		7. Calcuta	13,3	7. New York	17,9
		8. Dhaka	13,2	8. Jakarta	17,3
		9. Delhi	13,0	9. Calcuta	16,7
		10. Shanghai	12,8	10. Karachi	16,2
		11. Buenos Aires	12,1	11. Lagos	16,0
		12. Jakarta	11,4	12. Los Angeles	14,5
		13. Osaka	11,0	13. Shanghai	13,6
		14. Beijing	10,8	14. Buenos Aires	13,2
		15. Rio de Janeiro	10,8	15. Metro Manila	12,6
		16. Karachi	10,4	16. Beijing	11,7
		17. Metro Manila	10,1	17. Rio de Janeiro	11,5
				18. Cairo	11,5
				19. Istanbul	11,4
				20. Osaka	11,0
				21. Tianjin	10,3

Sumber: United Nation, 2019

Pada tahun 2015, tercipta 21 kota megapolitan di seluruh dunia yang ke-12 kota tersebut ada di Asia serta termasuk 7 dari 10 negara terbesar di dunia. Namun, masih terdapat masalah terkait subtansi definisi dan criteria kota megapolitan seperti contoh area kota metropolitan Jakarta (*The Greater Jakarta Metropolitan Area*)

di Indonesia di mana sekarang merupakan pusat kota terbesar di dunia. Gambar 1.2 menunjukkan keberlanjutan pembangunan kota di Jakarta telah melampaui batas secara administrasi dan meluas hingga daerah sekitarnya yang telah menjadi kekotaan. Pada tahun 1995, sebanyak 9,1 juta penduduk tinggal di DKI Jakarta, sebanyak 15,4 juta tinggal di area terbangun perkotaan dan 20,2 juta penduduk tinggal di kawasan Jabotabek yang merupakan gabungan dari Kabupaten Bogor, kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi.



Gambar 2. Fungsional Perkotaan Jakarta Raya

Antara tahun 1990 dan 1995, penduduk Jabodetabek naik menjadi 18 persen atau mencapai 20,2 juta orang. Kebanyakan dari penduduk tersebut tinggal dan bekerja dengan afiliasi pekerjaan di Jakarta. Dapat di lihat pada Tabel 4. namun demikian, UN mengestimasi penduduk Jakarta pada tahun 2001 hanya 11,4 juta penduduk. Hal ini secara substansi lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di area terbangun perkotaan di Jakarta pada tahun 1995. Meskipun pada table 5 data menunjukkan penurunan rata-rata pertumbuhan penduduk kota megapolitan pada 15 tahun mendatang, namun ukuran penduduk di beberapa Negara perlu dipertanyakan cara perhitungannya. Tingkat signifikansi kawasan megapolitan di dunia ditunjukkan oleh Jones (2002) yang mengstimasi 11 persen dari total penduduk Asia Tenggara tinggal di wilayah tersebut.

Tabel 6. Penduduk dan Rata – rata Pertumbuhan Aglomerasi Kota (Lebih dari 10 juta) tahun 2011, 1975 - 2015

City	Population (Millions)				Growth rate (%)	
	1975	2000	2001	2015	1975-2000	2000-2015
Tokyo	19,8	26,4	26,5	27,2	1,16	0,19
Mumbai	7,3	16,1	16,5	22,6	2,13	2,26
Calcuta	7,9	13,1	13,3	16,7	2,02	1,66
Dhaka	2,2	12,5	13,2	22,8	7,00	3,99
Delhi	4,4	12,4	13,0	20,9	4,13	3,45
Shanghai	11,4	12,9	12,8	13,6	0,48	0,36
Jakarta	4,8	11,0	11,4	17,3	3,31	3,00
Osaka	9,8	11,0	11,0	11,0	0,45	0,00
Beijing	8,5	10,8	10,8	11,7	0,95	0,49
Karachi	4,0	10,0	10,4	16,2	2,69	3,19
Metro Manila	5,0	10,0	10,1	12,6	2,75	1,56

Sumber: United Nation, 2019

Mobilitas Penduduk dan Urbanisasi di Asia

Pergerakan (mobilitas) penduduk adalah salah satu kunci untuk mengidentifikasi tidak hanya pertumbuhan pusat perkotaan di Asia namun juga dapat mempengaruhi struktur sosial, ekonomi dan demografi dan pembangunan di pusat perkotaan. Apabila dilihat dari perspektif pertumbuhan pusat kota akan memunculkan migrasi internal bersih dari penduduk area perdesaan. Sementara pengklasifikasian area perdesaan sebagai kota karena adanya perluasan lahan perkotaan adalah penting, migrasi desa-kota menjadi pendorong utama adanya pertumbuhan urbanisasi di Asia. Seperti contohnya adalah Jakarta di Indonesia menurut sensus tahun 2000, Jakarta dan provinsi tetangganya yaitu Banten, Jawa Barat terhitung terdapat 8,6 juta penduduk dari 20,2 juta migrant dari 30 provinsi lainnya masuk menuju Jakarta dan sekitarnya 42,3 persen). Pada Tabel 1.7, United nation (2019) mengestimasi komponen pertumbuhan di area perkotaan pada tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an telah menunjukkan peranan yang penting dari migrasi neto.

Tabel 7. Persentase Pertumbuhan Atribut Kota ke Kenaikan Alami dan Migrasi Neto Tahun 1960, 1970 dan 1980

Country	1960s		1970s		1980s	
	Natural Increase	Net Migration	Natural Increase	Net Migration	Natural Increase	Net Migration
China					28,1	71,9
Republic of Korea	39,7	60,3	43,7	56,3	45	55
Indonesia	68,5	31,5	49,4	50,6	41,2	58,8
Malaysia			45,2	54,8		
Philippines			59,8	40,2	47,6	52,4
Thailand			42,2	57,8	55,5	44,5
Bangladesh	41,4	58,6	34,4	65,6		
india	68,7	31,3	54,9	45,1		
Iran			56,8	43,2	70,4	29,6
Nepal	67,1	32,9	39,1	60,9		
Pakistan			82,9	17,1		
Sri Lanka	50,2	49,5	118	-18		

**components od Urban by Country (percentage)*

Sumber: United Nation, 2019

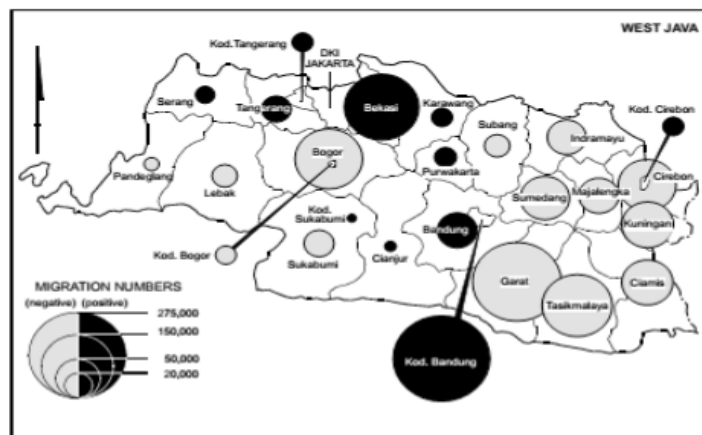
Fokus kepada satu Negara yang menunjukkan pergerakan penduduk yang signifikan seperti Indonesia. Indonesia adalah Negara dengan penduduk perkotaan yang terus mengalami kenaikan hingga empat kali lipat antara tahun 1961 dan 1995 dan proporsi penduduk perkotaan naik dari 14,8 persen menjadi 35,9 persen. Pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 5 persen per tahun dalam kurun waktu tiga decade, sementara rata-rata pertumbuhan penduduk perdesaan turun dari awalnya 1,63 per tahun pada tahun 1970-an menjadi 0,16 persen pada awal tahun 1990-an. Baik migrasi desa-kota dan reklasifikasi mempunyai peranan penting dalam proses ekonomi dan sosial dikarenakan adanya pergerakan arus perdagangan dan barang dari pasar kerja satu ke lainnya di mana perpindahan ini ditandai dengan naiknya kebutuhan pasar kerja non-pertanian dan perginya tenaga produktif dari sektor pertanian. Substansi penting dari kenaikan urbanisasi di Indonesia dikarenakan adanya reklasifikasi desa mejadi kota. Oey-Gardiner & Sjahrir (1991) melaporkan bahwa jumlah desa yang berubah secara administrasi

dari desa menjadi kota hampir berlipat ganda pada tahun 1980 dan 1990 yaitu sekitar 3.500 naik menjadi sekitar 6.700. Hal ini terjadi tidak hanya dikarenakan adanya penambahan penduduk yang masif selama tahun 1980-an, namun juga disebabkan oleh adanya kenaikan perluasan lahan perkotaan.

Perluasan area perkotaan di Indonesia biasanya terjadi di koridor sepanjang jalur transportasi utama yang menghubungkan dua kota utama (T. McGee, 2022). Sebagai tambahan pula, klasifikasi penduduk sebagai penduduk perkotaan di sensus, kenyataannya banyak dijumpai penduduk yang tinggal di perdesaan seperti di Jawa yang bekerja di sektor non-pertanian dan biasanya berada di kota atau peri – peri kota akibat adanya migrasi sirkuler dan komuter. Tidak jelasnya batasan antara kota dan desa di Indonesia seperti di Jawa, terlihat nyata pada awal tahun 1970-an (G. Hugo, 1997) dan semakin nyata pada dua decade terakhir. Namun, McGee (2016) telah menciptakan istilah kotadesasi untuk menjelaskan proses perluasan area perkotaan di Indonesia yang mencampur kompleksitas aktivitas kota dan desa.

Beberapa indikasi penting tentang migrasi desa/kota antar propinsi dapat dibuktikan dengan adanya SUPAS 1995. Meskipun survey ini jauh dari masalah kecilnya kluster sampel untuk indentifikasi pola migrasi (G. J. Hugo, 1982), survey ini memberi gambaran yang menarik tentang migrasi antar propinsi. Data yang ada tidak mendeteksi secara menyeluruh pergerakan antar propinsi karena hanya menghitung pergerakan antar kabupaten dan kebanyakan mobilitas penduduk terjadi dalam batas kabupaten. Gambar 3 menunjukkan pola mobilitas antar kabupaten di Propinsi Jawa Barat (Wahyuni, 2000).

Figure 3: Intraprovincial Migration in West Java, 1995
Source: Wahyuni 2000



Gambar 3. Migrasi Inter-Provinsi di Jawa Barat Tahun 1995
Sumber: Wahyuni, 2000

Pada gambar di atas dapat dilihat secara jelas jarak secara geografi daerah dengan pertambahan penerima migrasi neto dan daerah dengan migrasi neto yang berkurang. Pertambahan migrasi neto secara jelas terkonsentrasi di area perkotaan. Limpahan dari pembangunan perkotaan Jakarta terjadi di daerah hinterlandnya yaitu Bogor, Bekasi, Tangerang dan kabupaten dengan migrasi keluar terbanyak adalah Serang, Karawang dan Purwakarta. Sementara pusat ibukota Jawa Barat yaitu Bandung meluas hingga kabupaten disekitarnya.

Wahyuni (2000) menganalisis mobilitas penduduk di Jawa Barat yakni 68,5 persen mobilitas antara kabupaten langsung mengarah menuju kota sementara hanya 31,1 persen darai penduduk non-migran yang tinggal di area perkotaan. Sedangkan 62,5 persen. Urbanisasi ini dipicu tidak hanya oleh perpindahan penduduk desa menuju kota secara permanen seperti yang terjadi dalam pembangunan kota di Asia beberapa dekade terakhir. Namun juga dipicu oleh semakin banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota akibat komuter jarak jauh atau migrasi sirkuler. Mobilitas sirkuler ini semakin banyak mengingat fasilitas transportasi semakin modern. Studi kasus yang dilakukan awal tahun 1970-an. Hugo (1982) menjelaskan bagaimana persebaran dan migrasi sirkuler

akibat sosial ekonomi secara signifikan. Beberapa survei tentang desa tahun 1970-an juga mengemukakan adanya kenaikan secara substansial mobiltas non permanen (G. Hugo, 1997) dan menemukan bahwa perubahan fundamental pada kondisi eonomi di perdesaan akibat arus remiten.

Tingginya angka migrasi permanen dan non-permanen kota-kota Asia penting untuk peningkatan hubungan yang kuat antara desa sebagai hinterland dan kepada dunia. Hubungan ini penting tidak hanya untuk memperjelas karakteristik sosial, ekonomi dan demografi kota, namun juga penting untuk desa akibat adanya uang yang mengalir ke desa (remiten). Terlebih lagi pada saat krisis financial akhir tahun 1990-an di beberapa Negara, ekonomi perkotaan kolaps dan untuk sementara waktu, penduduk di kota kembali ke desa asal.

Kemiskinan Kota

Urbanisasi yang cepat dapat memindah kemiskinan dari desa ke kota (Tannerfeldt & Ljung, 2012). Beberapa studi terakhir menemukan bukti bahwa kemiskinan akibat perluasan urbanisasi menyebar antar satu daerah ke daerah lainnya. Wilayah tersebut antara lain Kamboja, Indonesia, Laos, Mongolia, Pilipina, Thailand dan Vietnam memiliki pendapatan rendah. Lebih dari 33 juta orang menjadi miskin selama tahun 1993 – 2002 yang terbagi atas 28 juta di desa dan 5,5 juta di kota. Kemiskinan di desa turun dari 26,4 persen sementara kemiskinan kota turun menjadi 30,8 persen (Ravallion et al., 2009). Pendapatan penduduk miskin perkotaan mungkin tidak akan naik namun ketidakmerataan pendapatan menjadi isu utama. Informasi yang dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah menunjukkan Koefisien Gini untuk kota – kota di Negara Asia Tenggara di atas 0,40.

Kemiskinan dan ketidaksamaan tidak hanya pada pendapatan. Penduduk miskin kota juga sangat terbatas akan akses kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, rumah, pendidikan dan kesehatan) dan ketidakberdayaan mengambil suatu keputusan. Keterbatasan mengakses kebutuhan dasar berdampak kapasitas mereka

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, memperoleh kesempatan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan kurangnya produktivitas untuk mendapatkan pendapatan yang layak.

Tabel 8. Koefisien Gini Beberapa Kota Asia Tenggara

<i>Country Name</i>	<i>Year</i>	<i>Gini Index</i>
Thailand	2018	36,4
Indonesia	2018	38,4
Malaysia	2015	41,1
Brunei Darussalam	-	-
Vietnam	2018	35,7
Lao PDR	2018	38,8
Singapore	-	-
Myanmar	2017	30,7
Philippines	2018	42,3
Cambodia	-	-
Timor-Leste	2014	28,7

Sumber: World Development Indicators, 2022

Kebanyakan tempat tinggal perkotaan di Asia Tenggara mempunyai akses untuk meningkatkan sumber air bersih (Marcotullio, 2007), dari sambungan rumah tangga hingga pipa publik, namun hal tersebut tidak berarti banyak terkait kuantitas dan kualitas air bersih. Air bersih didapatkan dari air hujan dan telah terkontaminasi sampah yang masuk ke pipa. Air juga terkadang disimpan pada kondisi tanpa sanitasi sehingga membuat wanita harus membersihkan sebelum menggunakan air bersih tersebut dan waktu untuk bekerja dan sekolah tidak maksimal.

Pertumbuhan ekonomi berkontribusi untuk meningkatkan kondisi rumah penduduk kota (Tannerfeldt & Ljung, 2012). Kombinasi antara pendapatan tinggi, munculnya pengembang swasta dalam sektor financial rumah telah meningkatkan dan mengefektifkan kebutuhan dan ketersediaan rumah untuk

penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah. Namun, masih banyak penduduk miskin perkotaan masih menyewa rumah di rumah rusak (kumuh) atau berada pada lahan publik maupun privat yang tidak mempunyai izin tinggal dan kepemilikan lahan. Pemerintah telah menggunakan berbagai cara mengatasi masalah perumahan perkotaan. Singapura adalah contoh sukses namun sulit untuk diterapkan di negara Asia Tenggara lain karena Singapura mempunyai riwayat dan sejarah yang unik.

Tabel 9. Penduduk Kawasan Kumuh di Asia Tenggara

Country	Slum Population (x 1000)	Urban population (x1000)	Percentage of urban population living in slums
Cambodia	2.309	2.926	78,9
Indonesia	28.159	107.068	26,3
Lao PDR	969	1.222	79,3
Myanmar	7.062	15.487	45,6
Philippines	22.768	52.101	43,7
Thailand	2.061	7.927	26,0
Viet Nam	9.192	22.257	41,3
<i>South East Asia</i>	72.520	208.988	34,7

Sumber: UN-Habitat, 2019

Pemerintah di beberapa Negara menginisiasi program peningkatan kondisi hidup penduduk miskin perkotaan di permukiman informal. Program berbasis komunitas untuk pembangunan kota untuk mengamankan kepemilikan lahan, menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kualitas rumah. Seperti contoh *Community Mortgage Programme* di Pilipina (Ballesteros et al., 2016), *Kampung Improvement Programme* (KIP) di Indonesia (Silas, 1992) dan *Baan Mankong Programme* di Thailand (Boonyabancha, 2005).

Kesimpulan

Area perkotaan akan menjadi tempat tinggal setengah penduduk Asia yang pada dua generasi sebelumnya hanya satu dari sepuluh penduduk yang tinggal di kota. Hal ini menjelaskan perubahan dalam segala hal terait kehidupan di Asia. Namun, masih banyak tantangan bagi urbanisasi di Asia bagi pengambil kebijakan, perencana dan peneliti. Salah yang sangat krusial adalah masalah data dan penelitian karena perencanaan yang efisien dan seimbang di kota-kota Asia membutuhkan data antar tahun dan penelitian yang relevan.

Area perkotaan adalah mesin bagi pertumbuhan ekonomi, dan negara – negara Asia Tenggara pada masa yang akan datang akan bergantung pada area perkotaan ini. Pembangunan ekonomi suatu negara akan berdampak pada aspek lokal, nasional dan lingkungan (pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi lingkungan global). Bagaimana keuntungan ekonomi dapat dipergunakan dan dibagi secara merata akan berdampak pada hubungan sosial dan politik antara penduduk kaya dengan miskin, antara penduduk desa dengan kota.

Daftar Pustaka

- Alvioli, M. (2020). Administrative boundaries and urban areas in Italy: A perspective from Scaling Laws. *Landscape and Urban Planning*, 204, 103906.
- Ballesteros, M. M., Ramos, T. P., & Magtibay, J. E. (2016). *Is the Community Mortgage Program Propoor?*
- Boonyabancha, S. (2005). Baan Mankong: Going to Scale with “Slum” and Squatter Upgrading in Thailand. *Environment and Urbanization*, 17(1), 21–46.
- Hori, T., Hitaka, K., Hagishima, S., & Ikaruga, S. (2019). Characteristics and Problems of Asian Urbanisation from the Viewpoint of City Planning. In *Urban Growth and Development in Asia* (pp. 337–350). Routledge.

- Hugo, G. (1997). Changing Patterns and Processes in Population Mobility. *Indonesia Assessment: Population and Human Resources*, 68–100.
- Hugo, G. J. (1982). Circular Migration in Indonesia. *Population and Development Review*, 59–83.
- Jiang, L., & O'Neill, B. C. (2017). Global Urbanization Projections for the Shared Socioeconomic Pathways. *Global Environmental Change*, 42, 193–199.
- Jones, G. W. (2002). Southeast Asian Urbanization and The Growth of Mega-urban Regions. *Journal of Population Research*, 19(2), 119–136.
- Kusno, A. (2017). Postcolonial Southeast Asia. In *The Routledge Handbook of Planning History* (pp. 230–243). Routledge.
- Marcotullio, P. J. (2007). Urban Water-related Environmental Transitions in Southeast Asia. *Sustainability Science*, 2(1), 27–54.
- McGee, T. (2022). 1991. In *The Horizontal Metropolis* (pp. 393–413). Springer.
- McGee, T. G. (2016). Desakota. *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology: People, the Earth, Environment and Technology*, 1–2.
- Oey–Gardiner, M., & Sjahrir, K. (1991). A Commentary from an Indonesian Perspective. *Asian Studies Review*, 15(1), 100–107.
- Ravallion, M., Chen, S., & Sangraula, P. (2009). Dollar a Day Revisited. *The World Bank Economic Review*, 23(2), 163–184.
- Reimer, B., Barrett, J., Vodden, K., & Bisson, L. (2019). Rural–urban Interactions and Interdependence. In *The Theory, Practice, and Potential of Regional Development* (pp. 149–182). Routledge.
- Ritchie, H., & Roser, M. (2018). Urbanization. *Our World in Data*.
- Satterthwaite, D. (2005). *The Scale of Urban Change Worldwide 1950-2000 and Its Underpinnings* (Issue 1). Iied.
- Shatkin, G. (2016). The Real Estate Turn in Policy and Planning: Land Monetization and The political Economy of Peri-Urbanization in Asia. *Cities*, 53, 141–149.

- Silas, J. (1992). Government-community Partnerships in Kampung Improvement Programmes in Surabaya. *Environment and Urbanization*, 4(2), 33–41.
- Small, C., Sousa, D., Yetman, G., Elvidge, C., & MacManus, K. (2018). Decades of urban growth and development on the Asian megadeltas. *Global and Planetary Change*, 165, 62–89.
- Solé, C., Parella, S., Martí, T. S., & Nita, S. (2016). *Impact of Circular Migration on Human, Political and Civil Rights: A Global Perspective* (Vol. 12). Springer.
- Tannerfeldt, G., & Ljung, P. (2012). *More Urban Less Poor: An Introduction to Urban Development and Management*. Routledge.
- Wahyuni, E. S. (2000). *The Impact of Migration upon Family Structure and Functioning in Java*.
- Wineman, A., Alia, D. Y., & Anderson, C. L. (2020). Definitions of “Rural” and “Urban” and Understandings of Economic Transformation: Evidence from Tanzania. *Journal of Rural Studies*, 79, 254–268.
- Zlotnik, H. (2017). World urbanization: Trends and Prospects. In *New forms of Urbanization* (pp. 43–64). Routledge.

TANTANGAN DAN MASA DEPAN SOSIOLOGI: Studi Bibliometrik dan Visualisasi

Vieronica Varbi Sununianti, Tri Agus Susanto

Pendahuluan

Sosiologi telah berkembang dari ilmu positivisme menjadi disiplin ilmu yang berbeda. Perdebatan berawal dari penentuan metode dalam ilmu-ilmu sosial sejak akhir abad ke-18 di Jerman. Awalnya filosof menentukan status keilmuan dan metodologi bagi disiplin Ekonomi, apakah harus bekerja menurut metode “eksakta” atau “historis”, metode “deduktif” atau “induktif”, serta metode “abstrak” atau “empiris” (Nugroho, 2011). Maksudnya hendak mengkategorikan disiplin ilmu ekonomi apakah termasuk pengetahuan *nomotetik* ataukah *ideografik*. Bagi Burawoy (2016), Sosiolog perlu tetap menjaga sudut pandang kritis masyarakat sipil atas bekerjanya ekspansi pasar dan kuasa negara. Sosiologi global merupakan tawaran sebagai medan perjuangan internal, sekaligus secara eksternal melawan dominasi ilmu ekonomi dan politik itu sendiri. Untuk itu, sosiolog perlu melakukan studi lintas disiplin dan lintas batas teritorial, serta tetap mendengarkan suara-suara pinggiran. Hal ini menjadikan keistimewaan sosiologi secara ilmu juga moral dan politik.

Michael Burawoy (2005) memetakan pembagian kerja sosiologi menjadi empat jenis pengetahuan, yakni profesional, kritis, kebijakan, dan publik. Sosiologi publik berperan membawa sosiologi ke dalam percakapan dengan publik. Ia dapat berupa sosiologi publik tradisional seperti sosiolog yang menulis di opini surat

kabar, atau pun sosiolog publik organik yang terlibat erat dengan gerakan atau komunitas. Sosiologi kebijakan cenderung melakukan pelayanan yang ditentukan oleh klien guna memberi solusi atas suatu masalah, misalnya menjadi saksi ahli layanan masyarakat. Meski sering kali sosiologi publik dan kebijakan sering kali sulit dibedakan. Sosiologi profesional menyediakan metode yang benar dan teruji, akumulasi pengetahuan, serta kerangka konseptual.

Sosiologi profesional berperan memberi legitimasi dan keahlian untuk kebijakan dan sosiologi publik melalui beberapa bidang penelitian. Sementara, peran sosiologi kritis memeriksa dasar-dasar eksplisit maupun implisit, normatif juga deskriptif dari program penelitian sosiologi profesional. Pandangannya bukan tanpa kritik, seperti peran kritis tidak dapat hanya dilekatkan pada satu jenis sosiologi atau pun pengkategorian ini justru menunjukkan hierarki pembagian kerja di antara bentuk-bentuk sosiologi itu sendiri (Holmwood, 2007). Namun, intinya keempat jenis ini bukan untuk saling meniadakan atau mengancam, melainkan melengkapi. Karena pada dasarnya sosiologi bertujuan untuk menghasilkan dunia yang lebih baik.

Guna menghasilkan dunia atau masa depan yang lebih baik, kita perlu melihat kondisi yang terjadi pada saat ini. Sosiolog perlu mengetahui dan menghadapi berbagai kendala di masa depan yang harus dicari dan dipikirkan sejak sekarang dalam rupa visi dan rencana. Tersedianya sejumlah fakta masa lalu menjadi perhitungan dalam memproyeksikan kemungkinan di masa depan. Hal ini memungkinkan kita untuk mengarahkan perhatian dan menawarkan sejumlah kemungkinan untuk bertindak. Wendel Bell menyelidiki masa depan Sosiologi sebagai masa depan yang dibayangkan, diproyeksikan, dan dibentuk ternyata menghasilkan kendala berarti bagi sosiologi kontemporer. Tujuan dan tugas keahlian sosiologi terkait masa depan diantaranya mengejar kemajuan, pertumbuhan, inovasi, juga rekayasa sosial. Perlu komitmen untuk melakukan perubahan dan inovasi, bukan paksaan. Tantangan sosiologi membutuhkan keterampilan baru untuk melengkapi ilmu pengetahuan tentang kompleksitas dan saling ketergantungan

sistem, serta melakukan pembaruan konseptual dan metodologi (Adam, 2011).

Sosiolog perlu mempertimbangkan celah menghadapi perubahan dan praktik pengetahuan. Masa depan tidak terhindarkan dan peneliti perlu bertanggung jawab atas dampak dari pilihan dan masa depan praktik pengetahuannya. Di satu sisi, pendidikan tinggi perlu tetap dipertimbangkan posisinya sebagai situs utama dalam produksi, diseminasi, juga transfer pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang produktif pun secara ekonomi (Carnoy dalam Naidoo, 2003). Maka dari itu, artikel ini hendak turut berkontribusi dalam menyongsong tantangan dan masa depan Sosiologi dengan melakukan pemetaan studi literatur. Pertanyaan yang hendak dijawab: Bagaimanakah perkembangan studi ini di *database* Scopus? Siapa sajakah yang termasuk kategori penulis yang berpengaruh? Di mana saja jurnal berpengaruh tersebut dan apa saja dokumen berpengaruhnya? Negara mana saja yang berperan penting? Topik apa saja yang menjadi pembahasan para penulis? serta apa saja peluang topik studi selanjutnya?

Metode

Kami melakukan proses penelitian ini diawali dengan menentukan kata kunci penelitian. Selanjutnya, kata kunci tersebut diaplikasikan dalam pencarian di seluruh dokumen di *database* Scopus pada Senin, 17 Oktober 2022. Melalui pencarian di judul, abstrak, dan kata kunci "*challenge*" and "*future*" and "*sociology*" didapatkan 1.094 dokumen. Kami selanjutnya membatasi area subjek publikasi ini hanya pada tiga bidang, yakni *Social Science*, *Art and Humanities*, dan *Computer Science*. Kami juga hanya menggunakan publikasi berbahasa Inggris. Hasilnya didapatkan 494 dokumen yang selanjutnya diolah menggunakan *software* VOSviewer.

Perangkat lunak VOSviewer berguna dalam menampilkan jaringan bibliometrik. Tampilannya berupa visualisasi jaringan, visualisasi densitas, juga visualisasi *overlay*. Tampilan visualisasinya berdasarkan kesamaan (*Visualization of Similarity*, VOS) (van Eck & Waltman, 2014). Program ini juga dapat membantu menganalisis dengan menampilkan *co-authorship* atau kolaborasi antar penulis, *co-occurrence* atau kejadian kata kunci, juga *citation*. Tampilan visualisasi

ini memberikan sejumlah kegunaan, seperti lebih efektif dan praktis dalam menyampaikan pesan (van Eck & Waltman, 2014) serta lebih melekat diingatan pembaca (Ranjbar-Sahraei & Negenborn, 2017).

Temuan dan Diskusi

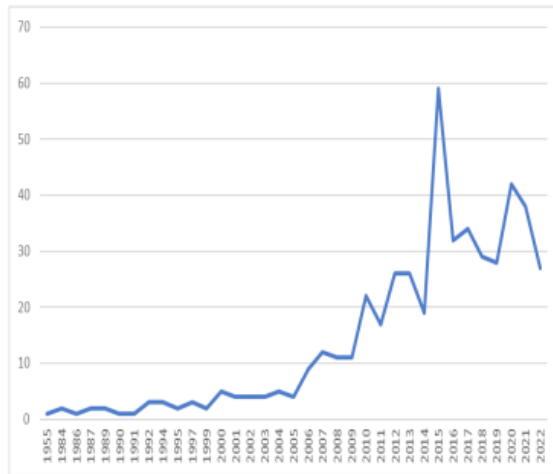
Temuan dan pembahasan studi bibliometrik dengan topik tantangan dan masa depan Sosiologi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pembahasan tentang perkembangan publikasi yang akan memuat publikasi ini dari tahun ke tahun, lalu dilanjutkan perkembangan jenis publikasinya. Bagian kedua akan menggambarkan kontribusi dari para penulis, negara, sumber, juga artikel yang berkaitan erat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan isu utama yang menjadi diskusi selama ini serta kontribusi untuk peluang studi selanjutnya.

Tren publikasi

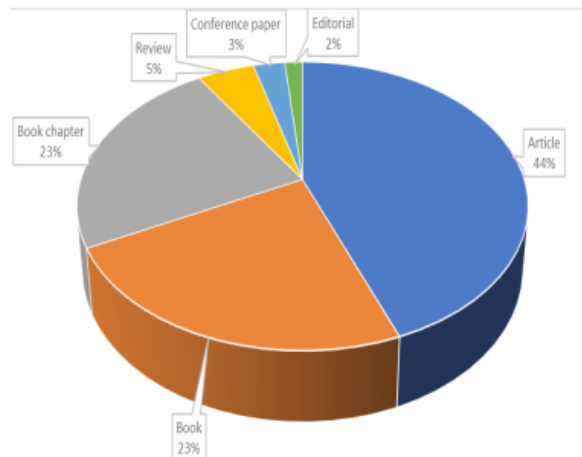
Publikasi dengan topik ini mempunyai sejarah panjang dalam database Scopus. Tercatat publikasi pertama melalui karya Morton B. King, Jr (1955) dengan judul "*Some comments on concepts*". Artikel ini membahas pendekatan dan konsep Sosiologi sebagai "*on the spot*" yang valid dan berguna mengenai interaksi manusia. Menurut sosiolog perlu tajam dan efisien dalam menggunakan konsep sebagai alat utamanya. Sedangkan, publikasi terakhir tercatat di tahun 2022 sebanyak 27 dokumen. Secara umum perkembangan publikasi dengan topik ini mengalami peningkatan, meski fluktuasi publikasi tidak terelakkan. Jumlah publikasi paling banyak terjadi di tahun 2015 sebanyak 59 dokumen (lihat **Gambar 1.**) Perkembangan publikasi isu ini tidak berjalan lancar. Terlihat sejak publikasi pertama (1955) perlu waktu hampir tiga dekade untuk publikasi selanjutnya. Begitu pun perlu sejumlah waktu untuk menjadikan isu ini sebagai perdebatan dominan di Scopus.

Mengenai tipe publikasi, artikel ilmiah (n=262) mendominasi publikasi diikuti buku (n=139), *book chapter* (n=39), *review* (n=29), *conference paper* (n=16), dan *editorial* (9) (lihat **Gambar 2.**). Artikel menjadi pilihan utama publikasi dimungkinkan karena waktu penulisan dan publikasinya lebih cepat dibandingkan penulisan sebuah buku ilmiah. Selain itu, artikel lebih memungkinkan

pembaca untuk lebih cepat menangkap pesan dan kebaruan yang disampaikan.



Gambar 1. Perkembangan Publikasi
Sumber: Diolah Penulis



Gambar 2. Infografis Tipe Publikasi
Sumber: Diolah Penulis

Penulis Berpengaruh

Terdapat 870 penulis yang mempublikasikan topik tantangan dan masa depan Sosiologi ini. Kita dapat mengetahui penulis yang berpengaruh melalui jumlah dokumen yang dipublikasi serta jumlah sitasi. Kami memeringkatkan 10 penulis berpengaruh, baik dalam hal jumlah dokumen maupun tingkat sitasi. Carmi E., Rice R.E., dan Yates

S.J. merupakan tiga penulis teratas dalam menghasilkan publikasi dengan masing-masing 3 dokumen, hanya saja ketiganya tidak mempunyai sitasi (lihat **Tabel 1.**). Tidak adanya keterangan sitasi ini kemungkinan dikarenakan yang mensitasinya tidak mempublikasikan di jurnal berindeks Scopus. Sedangkan, Zhou M. (n=2; 676 sitasi), Pescosolido B.A. (n=2; 160 sitasi), dan Freudenburg W.R (n=2; 128 sitasi) merupakan tiga penulis teratas yang paling banyak disitasi (lihat **Tabel 2.**). Selain itu, penulis Freudenburg W.R. dan Ferreira C.M. (n=2; 21 sitasi) masuk dalam 10 besar penulis berpengaruh berdasarkan jumlah dokumen dan jumlah sitasi. Berdasarkan penulis berpengaruh ini kita dapat mengetahui bahwa jumlah dokumen yang dihasilkan penulis masih terbatas, yakni di kisaran tiga atau dua dokumen per penulis. Selain itu, jumlah total jaringan juga kecil dengan maksimal hanya enam jaringan per penulis.

Tabel 1. Penulis Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Dokumen

<i>Rank</i>	<i>Author</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>C/A</i>	<i>Link</i>
1	Carmi E.	3	0	0	6
2	Rice R.E.	3	0	0	6
3	Yates S.J.	3	0	0	6
4	Baier M.	2	11	5,5	0
5	D'andrea V.	2	1	0,5	6
6	Davidson D.J.	2	13	6,5	0
7	De Paoli S.	2	1	0,5	6
8	Dedek H.	2	7	3,5	2
9	Ferreira C.M.	2	21	10,5	2
10	Freudenburg W.R.	2	128	64	0

Sumber: Diolah Penulis¹

Tabel 4.14 Penulis Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Sitasi

<i>Rank</i>	<i>Author</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>C/A</i>	<i>Link</i>
1	Zhou M.	2	676	338	0
2	Pescosolido B.A.	2	160	80	0
3	Freudenburg W.R.	2	128	64	0

¹ Keterangan: A merupakan singkatan dari artikel (*article*) atau dokumen, sedangkan C merupakan singkatan dari sitasi (*citation*). C/A adalah rata-rata untuk mengetahui kualitas dokumen dengan melakukan pembagian sitasi terhadap artikel.

4	Lynch M.J.	2	116	58	2
5	Mcconatha D.	2	116	58	2
6	Worrall A.	2	106	53	0
7	Threadgold S.	2	69	34,5	0
8	Ferreira C.M.	2	21	10,5	2
9	Serpa S.	2	21	10,5	2
10	Holmwood J.	2	18	9	0

Sumber: Diolah Penulis

Negara Berpengaruh

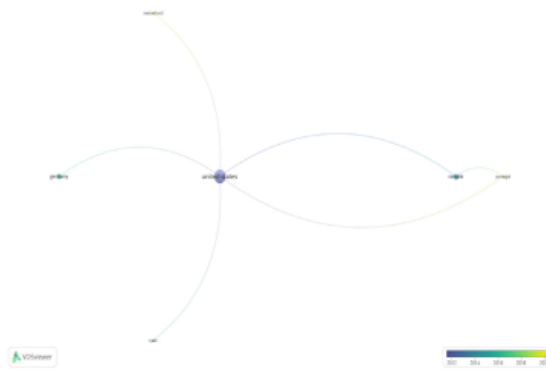
Negara berpengaruh dapat diketahui secara lebih spesifik melalui jumlah dokumen dan jumlah sitasinya. Negara United States (n=157; 3.773 sitasi), United Kingdom (n=109; 2.665 sitasi), Australia (n=37; 729 sitasi); Kanada (n=35; 486 sitasi), dan Jerman (n=30; 379 sitasi) diketahui menempati posisi lima teratas dalam hal jumlah dokumen terbanyak dan tingkat sitasi tertinggi (lihat **Tabel 3.**). Negara yang berpengaruh ini dapat diketahui juga dari negara asal dari sepuluh jurnal bereputasi berdasarkan tingkat sitasi. Pada **Tabel 4.** diketahui bahwa mayoritas jurnal berpengaruh tersebut berasal dari negara-negara *global north* seperti Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada.

Tabel 3. Negara Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Dokumen

No	Negara	Dokumen	Sitasi	Total Jaringan
1	United States	157	3773	52
2	United Kingdom	109	2665	50
3	Australia	37	729	18
4	Canada	35	486	11
5	Germany	30	379	24
6	Italy	18	57	22
7	France	14	161	10
8	Netherlands	14	73	16
9	Denmark	12	98	14
10	India	12	22	8

Sumber: Diolah Penulis

Agar dapat mengetahui negara berpengaruh, kita juga dapat melihatnya dari jejaring negara kolaborator dalam penulisan ini. Terdapat 71 negara yang menghasilkan topik ini. Kami membatasinya minimal 5 dokumen per negara, hasilnya diketahui 23 item memenuhi ambang batas dan ternyata tidak semua negara saling berjejaring. Hanya jaringan terbesar yang terdiri dari 6 negara saling berhubungan atau saling mensitasi ditampilkan dalam visualisasi ini (lihat **Gambar 3.**) United States ditampilkan dengan *node* terbesar yang berarti mempunyai pengaruh dan nilai terbesar dibandingkan lainnya. Penulis dari United States berjejaring dengan negara lainnya, seperti Kanada, Portugal, Spanyol, Jerman, dan Switzerland. Begitu pun dengan Kanada yang berjejaring dengan United States dan Portugas. Namun, tidak halnya dengan negara lainnya.



Gambar 3. Negara Berpengaruh Berdasarkan Sitasi dalam Jaringan Terbanyak
Sumber: Diolah Penulis

Sumber Berpengaruh

Berdasarkan sumbernya, jurnal ilmiah mendominasi dalam hal publikasi mengenai tantangan dan masa depan Sosiologi ini (lihat **Tabel 4.**). Semua jurnalnya diketahui mempunyai tingkat reputasi yang tinggi melalui perolehan peringkat *Quartile* (Q) 1 dan *Quartile* 2 menurut indeks *Scimago Journal and Country Rank* (SJR). Tingkat H-index dari masing-masing jurnal yang tinggi juga menunjukkan kualitas dari jurnal itu sendiri. Jika ditelusuri lebih jauh, jurnal

tersebut diproduksi oleh *publisher* ternama seperti Sage Publications, Elsevier, Wiley-Blackwell, juga Taylor And Francis.

Jurnal *Annual Review of Sociology* merupakan jurnal dengan tingkat sitasi terbanyak sebanyak 1.048 sitasi. Selanjutnya diikuti Jurnal *International Review for The Sociology of Sport* (512 sitasi) dan *Social Science and Medicine* (369 sitasi). Sementara, jurnal berpengaruh berdasarkan jumlah dokumennya secara berturut-turut ditempati oleh jurnal *International Review for The Sociology of Sport* (41 dokumen; 512 sitasi), Jurnal *Sociology Compass* (8 dokumen, 49 sitasi), dan Jurnal *Annual Review of Sociology* (6 dokumen, 1.048 sitasi). Akan tetapi, semua jurnal berpengaruh tersebut uniknya tidak mempunyai jaringan. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena literatur yang mensitasinya tidak dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus. Dengan demikian, jaringan tersebut tidak muncul dalam software VOSviewer ini.

Tabel 4. Sepuluh Besar Jurnal Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Sitasi

No	Jurnal	Q	H-Index	Penerbit	Negara	A	C	C/A
1	Annual Review of Sociology	Q1	H-186	Annual Review	United States	6	1048	174,67
2	International Review for The Sociology of Sport	Q1	H-61	Sage Publications	United Kingdom	41	512	12,49
3	Social Science and Medicine	Q1	H-255	Elsevier	United Kingdom	6	369	61,50
4	Sociological Theory	Q1	H-79	Sage Publications	United Kingdom	4	347	86,75
5	Sociology	Q1	H-117	Sage Publications	United Kingdom	4	187	46,75
6	Sociological Review	Q1	H-91	Sage Publications	United Kingdom	5	110	22,00
7	British Journal of Sociology	Q1	H-99	Wiley-Blackwell Publishing	United Kingdom	3	105	35,00
8	Canadian Journal of Sociology	Q2	H-35	University of Toronto Press	Canada	3	91	30,33
9	Health Sociology Review	Q1	H-33	Taylor And Francis	United Kingdom	3	82	27,33
10	Current Sociology	Q1	H-71	Sage Publications	United Kingdom	5	68	13,60

Sumber: Diolah Penulis

Dokumen Berpengaruh

Stephen J. Ball (2007) dengan judul *“Education PLC: Understanding Private Sector Participation in Public Sector Education”* merupakan buku terbitan Routledge yang paling berpengaruh dalam topik ini karena mempunyai tingkat sitasi terbanyak, yakni 729 sitasi. Buku lainnya yang masuk sepuluh besar dokumen yang berpengaruh adalah karya Barnett R (2011) dengan judul *“Being university”* (lihat **Tabel 5.**). Selebihnya dokumen yang berpengaruh masih didominasi oleh artikel ilmiah. Hal ini cukup menarik karena biasanya artikel ilmiah menjadi dokumen yang paling berpengaruh. Untuk memahami dan menjelaskan tantangan dan masa depan Sosiologi tampaknya akan lebih mendalam jika disampaikan melalui penjelasan berupa buku, dibandingkan publikasi lainnya.

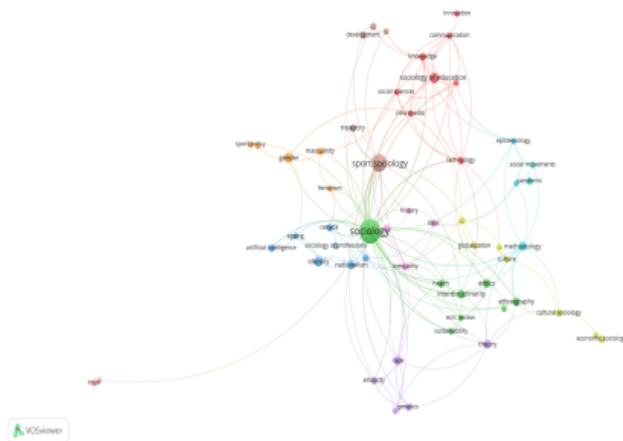
Tabel 5. Sepuluh Besar Dokumen Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Sitasi

No	Dokumen	Judul	Sitasi
1	Ball (2007)	Education PLC: Understanding Private Sector Participation in Public Sector Education	729
2	Zhou (1997)	Growing up American: The challenge confronting immigrant children and children immigrants	676
3	Thistlethwaite (2012)	Interprofessional education a review of context, learning and the research agenda	332
4	Lamont & Swidler (2014)	Methodological pluralism and the possibilities and limits of interviewing	292
5	Steelman et al. (2002)	Reconsidering the effect of sibling configuration - Recent advances & challenges	277
6	Jansen (2011)	Populist mobilization a new theoretical approach to populism	236
7	Barnett (2011)	Being university	178
8	Naidoo (2003)	Repositioning higher education as a global commodity opportunities and challenges for future sociology of education work	162
9	Pescosolido & Rubin (2000)	The web of group affiliations revisited social life, postmodernism, and sociology	157
10	Acevedo-Garcia et al. (2012)	Integrating social epidemiology into immigrant health research: A cross-national framework	140

Sumber: Diolah Penulis

Isu utama

Software VOSviewer membantu menampilkan klasifikasi kata kunci yang digunakan para penulis ini. Terdapat 1.158 kata kunci, tetapi hanya 57 diantaranya yang memenuhi ambang batas setelah dilakukan pembatasan minimal 3 kejadian kata kunci tersebut. Tampilannya dapat dilihat dalam **Gambar 4.** berikut ini. Visualisasi menggambarkan terdapat 10 kluster kata kunci penulis. Kluster dengan kesamaan warna ini menunjukkan eratnya topik kajian diantara kata kunci tersebut. Pada kluster hijau mengandung 8 nodes dengan kata “*sociology*” sebagai topik dominan. Pada kluster merah terdapat 8 nodes, topik “*sociology of education*” dan “*science*” sebagai kata kunci yang paling signifikan. Lalu pada kluster coklat terdapat kata “*sport sociology*” yang paling menonjol.



Gambar 4. Jaringan Visualisasi Kata Kunci Penulis

Sumber: Diolah Penulis

Overlay visualisasi bertujuan untuk menampilkan perbedaan topik kajian berdasarkan tahun (lihat **Gambar 5.**). Kita dapat mengetahui perkembangan topik tantangan dan masa depan Sosiologi dari tahun 1955 hingga 2022. Untuk lebih jelasnya kami mengkategorikannya menjadi tiga periode dalam mengetahui kata kunci yang menjadi tren juga dokumen yang menjadi acuan utama di setiap periodenya (lihat **Tabel 6.**)



Gambar 5. Overlay visualisasi kata kunci
Sumber: Diolah Penulis

Kita dapat mengetahui dokumen yang menjadi acuan terbanyak berdasarkan periodisasi. Karya Eitzen (1991) menjadi *leading* di sekitar periode 1990-an, sementara Frank (2015) menjadi rujukan terkini. Sebenarnya topik kajian di saat ini (2011-2022) masih berkaitan dengan topik kajian periode 1955-2000, khususnya tentang ras manusia. Frank (2015) menjelaskan masalah studi sosiologi saat ini beserta peran ilmuwannya adalah mengenai perdebatan ras dan genetika di bidang ilmu biomedis dan ilmu sosial. Menurutnya studi terkini menantang dan mempertanyakan gagasan “ras sebagai konstruksi sosial” sebagai konsekuensi dari ilmu genetika bagi masyarakat. Sosiologi tetap berkontribusi untuk memahami ras, rasisme, juga ketidaksetaraan ras secara utuh.

Tabel 6. Topik Kajian dan Dokumen yang Berpengaruh di Setiap Periode

Area studi "challenge and future of sociology"											
1955-2000				2001-2010				2011-2022			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	5	adaptation/ asimilation, immigrant children, inter- generational relations, race/ ethnicity, the second generation	Eitzen (1991)	1	2	ethics dan sociology	Barnett (2011)	1	3	ethno- graphy, inter- disciplin- arity, method- ology	Frank (2015)
				2	1	sociology of education		2	3	neo- liberalism, race. sport sociology	
				3	1	theory		3	2	identity dan nationalism	
								4	2	sociology dan sociology of education	

Sumber: Diolah Penulis

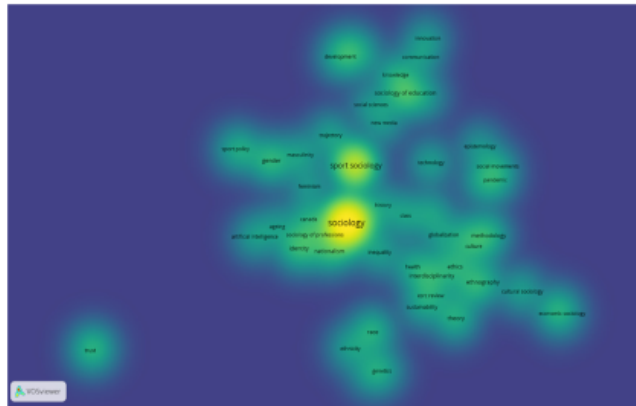
Keterangan:

A: klaster; B: jumlah nodes; C: fokus area kajian; D: dokumen utama berdasarkan total jaringan.

Berdasarkan jaringan kata kunci, kita dapat mengetahui topik dominan dan topik yang masih terbatas kajiannya. Topik dominan dapat dilihat dari tingkat kejadian (*occurrences*) yang ditampilkan dengan *node* yang lebih besar dan warna yang lebih terkonsentrasi atau lebih berwarna kuning terang dibandingkan kata kunci lainnya (lihat **Gambar 6.**). Topik "*sociology*" dan "*sport sociology*" tampak mendominasi kajian ini.

Topik "*pandemic*" diketahui hanya berhubungan dengan "*capitalism*". Kedua topik tersebut juga masih relatif sedikit dibahas dalam studi ini. Efek pandemi Covid-19 yang melanda di hampir seluruh dunia sekitar tahun 2020 turut menjadi salah satu fokus kajian tantangan dan masa depan sosiologi. Studi selanjutnya dapat melanjutkan diskusi ini dengan tema "masyarakat post-

pandemi covid-19” di berbagai ranah kajian. Selain itu, topik “*artificial intelligence*” juga masih terbatas berhubungan dengan “*ageing*” dan “*sociology*”. Begitu pula isu kata “*future*” yang hanya berhubungan dengan kata kunci “*sociology*”, “*social change*”, dan “*knowledge*”. Masih terbuka peluang bagi penulis dan penelitian selanjutnya untuk membahas isu-isu yang masih terbatas, seperti “*ageing*”, “*culture*”, “*environmental sociology*”, “*new media*”, “*sociology of profession*”, “*violence*”, atau pun gabungan diantaranya. Tampak topik yang dibahas masih dalam aspek makro, bahkan lokus studi seperti negara Indonesia atau negara lainnya di *global south* juga belum menjadi diskusi yang menonjol diantara ilmuwan ini.



Gambar 6. Visualisasi densitas kata kunci
Sumber: Diolah Penulis

Kesimpulan

Studi ini hendak menunjukkan perkembangan studi literatur sejak 1955 hingga 2022 mengenai tantangan dan masa depan Sosiologi. Publikasi Scopus mengenai isu ini menunjukkan terjadinya fluktuasi, meski kecenderungannya terus terjadi peningkatan publikasi. Kami memeringkat sepuluh penulis berpengaruh berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan dan tingkat sitasinya. Freudenburg dan Ferreira merupakan penulis berpengaruh dalam kedua kategori tersebut. Mengenai negara berpengaruh, negara-negara *global north* Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Australia, Kanada, dan Jerman menjadi lima besar negara berpengaruh dalam hal jumlah dokumen dan peringkat sitasinya.

Sementara, jurnal berpengaruh ditempati oleh *Annual Review of Sociology* dan *International Review for the Sociology of Sport* dalam hal jumlah publikasi dan sitasi. Artikel jurnal juga diketahui masih mendominasi sebagai dokumen yang berpengaruh. Temuan ini menunjukkan terdapatnya hubungan antara jurnal berpengaruh dengan negara berpengaruh. Selanjutnya, negara berpengaruh cenderung mempunyai jaringan penulis yang lebih luas, sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan kepenulisan bersama yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas penulisannya.

Studi ini merekomendasikan topik selanjutnya untuk membahas isu yang lebih spesifik dan relevan. Misalnya perkembangan masyarakat post-pandemi covid-19, *artificial intelligence*, *new media*, juga *sociology of profession*. Namun, bukan berarti isu mengenai ras, etnisitas, atau adaptasi tidak relevan dibahas lebih jauh. Begitu pula kehidupan sosial budaya masyarakat pedesaan tetap menarik menjadi kajian dengan balutan fenomenanya masing-masing yang tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem global. Kami juga merekomendasikan studi selanjutnya untuk melakukan studi literatur dengan pemahaman konteks dan konten lebih mendalam. Berbagai sumber metadata juga dapat dilakukan dengan metode pengolahan yang berbeda. Hal ini berguna untuk menjadikan Sosiologi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sebagai tempat produksi pengetahuan dan menguraikan implikasinya di masa depan.

Daftar Pustaka

- Acevedo-Garcia, D., Sanchez-Vaznaugh, E. V, Viruell-Fuentes, E. A., & Almeida, J. (2012). Integrating social Epidemiology Into Immigrant Health Research : A Cross-national Framework. *Social Science & Medicine*, 75(12), 2060–2068. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.04.040>
- Adam, B. (2011). Wendell Bell and The Sociology of The Future: Challenges Past, Present and Future. *Futures*, 43(6), 590–595. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2011.04.007>

- Ball, S. J. (2007). *Education PLC: Understanding Private Sector Participation in Public Sector Education*. Routledge.
- Barnett, R. (2011). *Being a University*. Routledge.
- Burawoy, M. (2005). 2004 Presidential Address: For Public Sociology. *American Sociological Review*, 70(1), 4–28. <https://doi.org/10.1177/000312240507000102>
- Burawoy, M. (2016). The Promise of Sociology: Global Challenges for National Disciplines. *Sociology*, 50(5), 949–959. <https://doi.org/10.1177/0038038516629901>
- Eitzen, D. S. (1991). *The Prospects for Sociology Into the Twenty-First Century*.
- Frank, R. (2015). Back to the Future? The Emergence of a Geneticized Conceptualization of Race in Sociology. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 661(1), 51–64. <https://doi.org/10.1177/0002716215590775>
- Holmwood, J. (2007). Sociology as Public Discourse and Professional Practice: A Critique of Michael Burawoy. *Sociological Theory*, 25(1), 46–66. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2007.00297.x>
- Jansen, R. S. (2011). Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism. *Sociological Theory*, June.
- King, M. B. J. (1955). Some Comments on Concepts. *The Journal of Philosophy*, 55(11), 441. <https://doi.org/10.2307/2022234>
- Lamont, M., & Swidler, A. (2014). Methodological Pluralism and the Possibilities and Limits of Interviewing. *Qualitative Sociology*, 153–171. <https://doi.org/10.1007/s11133-014-9274-z>
- Naidoo, R. (2003). Repositioning Higher Education as a Global Commodity: Opportunities and Challenges for Future Sociology of Education Work. *British Journal of Sociology of Education*, 24:2, 249–259. <https://doi.org/10.1080/01425690301902>
- Nugroho, H. (2011). *Menumbuhkan Ide-ide Kritis* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Pescosolido, B. A., & Rubin, B. A. (2000). The Web of Group Affiliations Revisited: Social Life, Postmodernism, and Sociology. *American Sociological Association*, 65(1), 52–76.
- Ranjbar-Sahraei, B., & Negenborn, R. (2017). Research Positioning Trend Identification a Data-Analytics Toolbox. In *Delft*

University of Technology. <http://aida.tudelft.nl/toolbox/aida-booklet>

- Steelman, L. C., Powell, B., Werum, R., & Carter, S. (2002). Reconsidering The Effects of Sibling Configuration: Recent Advances and Challenges. *Annual Review of Sociology*, 28, 243–269. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.111301.093304>
- Thistlethwaite, J. (2012). Interprofessional education: A Review of Context, Learning and The Research Agenda. *Medical Educational*, 46, 58–70. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.04143.x>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing Bibliometric Networks. In Y. Ding, R. Rosseau, & D. Wolfram (Eds.), *Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice* (pp. 285–320). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10377-8_13
- Zhou, M. (1997). Growing up American: The Challenge Confronting Immigrant Children and Children of Immigrants. *Annual Review of Sociology*, 23, 63–95.

SOSIOLOGI MIGRASI: Pilihan Rasional Migrasi Tenaga Kerja Indonesia

Randi, Eva Lidya

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi fenomena yang selalu menarik untuk dianalisa, terutama kemiskinan di Negara berkembang. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang, dengan tingkat kemiskinannya masih tinggi. Tahun 2016 semester 1, garis kemiskinan di Indonesia (rupiah/kapita/bulan) di perkotaan sebesar 364.527, pedesaan 343.646. Kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia yang masih mengalami kesenjangan di level mikro dan makro dan persoalan kapitalisme yang diikat dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan non-ekonomi, sehingga berada dalam kerangka kapitalisme neoliberal (Tjandraningsih, 2012). Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan masih tinggi dan berbagai program diciptakan untuk mengentas kemiskinan, diantaranya program Bantuan Langsung Tunai yang disingkat BLT, Kartu Indonesia Pintar yang disingkat KIP, Kartu Indonesia Sehat yang disingkat KIS, dan lainnya. Program pemerintah tersebut memberikan output yaitu kemiskinan menunjukkan pengurangan, tetapi kemiskinan tetap menjadi perhatian dan tantangan pemerintah. Untuk mencapai kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya tidak mudah, banyak faktor yang menghambat, diantaranya permasalahan jumlah

angkatan tenaga kerja, angka pengangguran yang besar, pendidikan yang rendah, dan kesenjangan sosial.

Data terakhir tahun 2016 menunjukkan pengangguran terbuka menurut pendidikan mulai dari belum pernah sekolah sampai dengan tingkat universitas total sebesar 7.024.172 orang (Sakernas, 2016). Kondisi sosial ekonomi yang masih berada pada garis marginal, mendorong tenaga kerja Indonesia untuk bekerja keras dan melakukan mobilisasi di tingkat regional, nasional dan internasional dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian keluarga. Migrasi penduduk Indonesia sudah terjadi semenjak ratusan tahun lalu, dan meningkat drastis pada tahun 1960-an, 1970-an (IOM, 2010) hingga sekarang. Migrasi penduduk Indonesia diidentikan dengan migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI)², alasan utama TKI melakukan migrasi dengan alasan kurangnya lapangan kerja, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan perbedaan *salary* antara Indonesia dan Negara tujuan (IOM, 2010). Mobilitas penduduk Indonesia sangat berkembang seiring dengan globalisasi. Data menunjukkan TKI tersebar di 115 negara dan 25 Negara tujuan utama (BNP2TKI, 2016). Adapun 25 Negara tujuan tersebut yaitu; Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Singapura, Korea, Taiwan (RRC), Arab Saudi, Jepang, Kuwait, Bahrain, Oman, Amerika Serikat, Itali, Jerman, Selendia Baru, Fiji Island, Uni Emirat Arab, Zambia, Qatar, Maladewa, Uruguay, Australia, Yordania, Brazil, lainnya. Namun arus migrasi ke Malaysia lebih besar dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya.

Malaysia memiliki daya tarik bagi para migran tenaga kerja Indonesia yang didominasi tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* dan yang memiliki *skill* (IOM, 2010). Keberadaan TKI ini sangat dibutuhkan berbagai sektor ekonomi di Malaysia terutama di Kuala Lumpur (Maksum, 2015). Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia, kota metropolitan yang mengalami perkembangan cukup

² Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang dalam tulisan ini selanjutnya akan disingkat dengan TKI.

pesat di Malaysia. Fisik bangunan di kota Kuala Lumpur semakin menunjukkan perkembangan (Shuid, 2004). Perkembangan terjadi karena adanya dorongan dan daya tarik kota Kuala Lumpur itu sendiri. Tingkat upah yang tinggi, geografis, bahasa, dan pasar kerja di Kuala Lumpur menjadi alasan tenaga kerja Indonesia semakin banyak melakukan migrasi ke Kuala Lumpur baik secara legal maupun tidak resmi. Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia sudah terjalin semenjak tahun 1957 hingga sekarang (Maksum, 2015). Dengan terjalinnya hubungan diplomatik tersebut semakin menguatkan kerja sama antar kedua negara, terutama bidang ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, sebagian besar migran tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia memiliki keterampilan yang rendah atau semi terampil, yang umumnya menempati pekerjaan yang kotor dan berbahaya (IOM, 2010), khususnya di sektor konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan merupakan pekerjaan berbahaya dan berisiko tinggi, bahkan jika terjadi kecelakaan menyebabkan hilangnya nyawa pekerja. Mengingat pekerja konstruksi bangunan adalah faktor utama penentu penyelesaian proyek dan pertumbuhan bangunan di kota-kota besar (Rinil & Tenriajeng, 2014). Tenaga kerja konstruksi merupakan aset paling penting dalam perusahaan sehingga perlu dilindungi dengan baik tanpa ada kecelakaan kerja atau *zero accident*. Berkaitan dengan hal tersebut pilihan untuk bekerja di sektor formal konstruksi bangunan di negara Malaysia adalah satu pilihan yang rasional, sebab bekerja di Negara orang, dengan pendidikan yang rendah, beban kerja yang lebih besar, berisiko tinggi, dan lemahnya perlindungan bukanlah pilihan yang diinginkan individu.

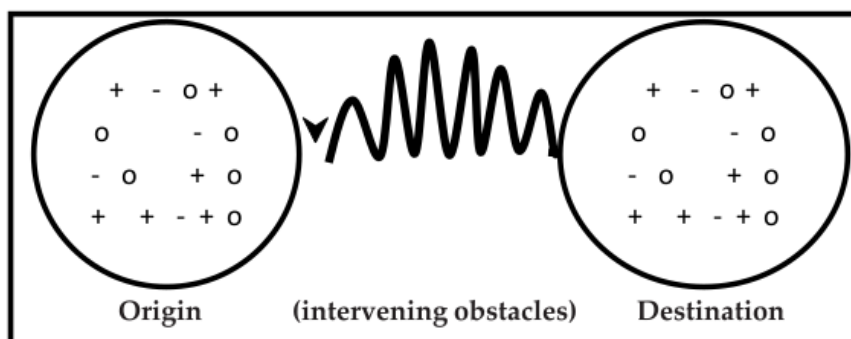
Peneliti melihat belum adanya penelitian mengenai pilihan rasional migrasi TKI di Kuala Lumpur terutama TKI yang bekerja di sektor konstruksi dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional. Mengingat "Orang Indonesia itu berani-berani, berani kerja kotor, berani memanjat gedung, berani kerja di ketinggian, sementara orang Malaysia sendiri takut" (Kompasiana, 2017). dari pernyataan tersebut bahwa orang Malaysia takut memanjat ketinggian tidak suka bekerja berat dan memilih-milih pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti yaitu mengkaji proses rasional migrasi TKI, yang dirasa memiliki

sumber daya yang lebih di bidang konstruksi bangunan. Peneliti memfokuskan pada penelitian tentang pilihan rasional migrasi tenaga kerja Indonesia di Kuala Lumpur, dengan menggunakan perspektif teori pilihan rasional. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis proses pilihan rasional migrasi TKI konstruksi bangunan tersebut yaitu proses migrasi yang terjadi secara rasional, sehingga aspek manfaatnya bagi kehidupan masyarakat dan dapat diketahui secara umum.

Sosiologi Migrasi

Kamus sosiologi (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010) migrasi (*migration*) merupakan konsekuensi sebagai faktor pendorong (*negative*) dan faktor penarik (*positive*), yang tindakan tersebut dilakukan sukarela dan rasional. Migrasi adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang menyeberangi batas politik atau batas administrasi dalam waktu yang tidak terbatas atau sementara di daerah tujuan (IOM, 2010). Lee (1966) mendefinisikan *migration is defined broadly as a permanent or semipermanent change of residence*. Berikut adalah empat faktor penting dalam studi migrasi penduduk (Everett S. Lee (1966), yaitu:

1. Faktor daerah asal.
2. Faktor yang terdapat di daerah tujuan.
3. Rintangan antara (penghambat)
4. Faktor individual



Bagan 1. Proses migrasi
Sumber: Mantra, 2003

Keterangan :

- + = Faktor penarik individu untuk tidak pindah
- = Faktor pendorong individu untuk pindah
- O = Faktor yang netral

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke Kuala Lumpur merupakan migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu negara ke negara lain. Dalam hal ini terjadi migrasi tenaga kerja Indonesia (migrasi Internasional) ke Malaysia yang aktif secara ekonomi, bekerja dan menetap dalam kegiatan menyumbang devisa untuk negara Indonesia. Jika melihat situasi ekonomi, politik saat ini migrasi internasional akan semakin meningkat pesat. Hal ini dilakukan untuk perlindungan, pekerjaan dan untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun perlu dilakukan kontrol migrasi yang ketat untuk migrasi internasional, karena akan mengganggu keamanan dan pertumbuhan jumlah penduduk di negara tujuan. ILO melihat tantangan yang semakin besar mendorong untuk membuat kebijakan untuk mengelola migrasi secara lebih baik, ILO memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan negara asal dan negara tujuan (ILO, 2007).

Pendekatan Sosiologi dalam migrasi telah dilakukan oleh ilmuwan sosiologi seperti yang diungkapkan dalam kamus sosiologi Soerjono Soekanto (1983) mengatakan bahwa migrasi (*migration*) yaitu 1) perpindahan secara permanen yang melewati batas suatu negara, 2) perpindahan atau gerak dengan jarak tertentu. Ekonomi Marxis melihat migrasi sebagai mobilisasi migrasi tenaga kerja yang murah yang dapat dimanfaatkan oleh kapitalisme (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010). Sosiologi adalah bidang ilmu yang menganalisis berbagai macam persoalan sosial, tidak lepas persoalan migrasi. Sosiologi sebagai ilmu sosial memiliki peran dalam mengkaji isu kontemporer yaitu isu migrasi internasional oleh tenaga kerja ilegal Indonesia yang masuk dalam bidang kajian ilmu sosial, tentunya disertai dengan dinamika masyarakat yang semakin modern.

Paradigma perilaku sosial, *behavior sociology* adalah sejarah tingkah laku aktor yang terjadi hingga sekarang (Ritzer, 2009) sama halnya dengan tingkah laku migrasi individu yang berada pada level

mikro yang akan berdampak pada level makro di kemudian hari. Telah diketahui bahwa didalam fenomena di tingkat makro, maka terdiri dari tiga hubungan jenis, yaitu makro-ke-mikro, tindakan purposif individu, dan peralihan mikro-ke-makro (Coleman, 2009). Kajian dalam penelitian ini lebih kepada hubungan peralihan mikro-ke-makro. Bagaimana tindakan individu yang kemudian mempengaruhi fenomena di tingkat makro. Tindakan individu (migrasi) secara tidak langsung "berorientasi kepada ekonomi" (*economically oriented*) selama tindakan (migrasi) tersebut masih dalam makna yang subyektif yang dihadapkan kepada pemenuhan kebutuhan. Tindakan yang dilakukan oleh aktor masih dalam keadaan aman selagi masih dalam kontrol aktor atas sumber daya, yang berorientasi kepada ekonomi. Peneliti ingin memfokuskan tulisan pada proses deduksi teori pilihan rasional, yaitu tindakan migrasi yang dilakukan oleh individu yang mengandung makna yang subjektif dan bukan merupakan tindakan yang objektif dari tindakan tersebut.

Pilihan rasional dalam mengkaji isu ini dipakai oleh peneliti untuk menganalisis tindakan individu yang memanfaatkan segala bentuk sarana atau sumber yang menjadi dasar individu melakukan tindakan migrasi. Migrasi adalah hasil dari keputusan individu yang kekuatan individu terletak pada sumber-sumber yang tersedia yang kemudian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut peneliti memasukkan beberapa teori yang relevan dengan penelitian dan menjelaskan tindakan individu atau tindakan sosial yang rasional dalam konteks migrasi. Teori pertukaran akan menjadi teori pendukung dalam penelitian ini. Walaupun tidak dalam satu lingkup yang sama, tetapi saling keterkaitan yaitu teori pilihan rasional akan menentukan perkembangan teori pertukaran, khususnya kecenderungan mengasumsikan seorang aktor rasional (Ritzer, 2012).

Teori pertukaran Peter M. Blau (1952) mendorong pertukaran antarpribadi dalam perubahan sosial yaitu transaksi pertukaran pribadi di antara orang lain yang akan menimbulkan dampak tertentu, adanya diferensiasi status dan kekuasaan, adanya legitimasi

dan organisasi, dan adanya perlawanan dan perubahan. Hal ini tergambar dari proses pertukaran yang telah terjadi antara migran-migran asal Indonesia. Blau melihat bahwa proses perubahan sosial terjadi pada tindakan sementara yang bergantung pada tindakan orang lain dan jika tindakan tersebut tidak memberikan penghargaan maka tindakan tersebut akan berhenti dan tidak ada lagi tindakan. Jika yang diberikan tidak sebanding maka akan tersedia alternatif. Pertama, adanya paksaan orang lain untuk membantunya. Kedua, mencari sumber lain, Ketiga, berusaha secara mandiri, memposisikan dirinya di bawah orang lain yang kemudian dia akan memberikan kepada orang lain. Migrasi secara kolektif tentunya tidak terlepas dari aktor utama yang menjadi migran. Peneliti melihat terjadi sebuah pertukaran yang cukup besar dalam proses migrasi. Menurut teori pertukaran George C. Homans (1984) terjadi pertukaran materi maupun non materi dalam hal ini ketika menjadi migran di luar negeri, khususnya TKI di Malaysia.

Proses migrasi terjadi proposisi dan proses dalam mencapai tujuan dan saling berhubungan yaitu: pertama; proposisi sukses, ketika tindakan sering dilakukan maka akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. TKI mempengaruhi individu di daerah asal dalam melakukan tindakannya, hal ini terjadi ketika migran sukses di negara Malaysia. Kedua; proposisi stimulus, ketika seseorang mendapatkan keuntungan dengan tindakan yang didapat yang kemudian akan memberikan stimulus kepada individu di daerah asal. Stimulus yang diberikan tidak jauh beda dengan stimulus yang telah dilakukan. Ketiga; proposisi nilai yaitu nilai yang didapat akan semakin berarti jika nilai diberikan semakin tinggi. Nilai yang didapat oleh TKI tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga secara terus nilai itu dipertahankan. Nilai yang sama akan membuat kejenuhan kepada actor untuk melakukan tindakan yang sama. Keempat; proposisi deprivasi-satiasi, semakin sering tindakan dilakukan maka tindakan tersebut semakin tidak memiliki nilai. Proposisi ini TKI, ada TKI yang tidak mau melakukan hal sama atau merasa jenuh dengan menjadi TKI di luar negeri, dan memutuskan untuk pulang ke daerah asal, dan melakukan pembangunan, atau

membuka usaha seperti berdagang, membeli tanah dan membuka usaha makanan. Kelima; proposisi restu-agresi (Approval-Aggression) tidak semua tindakan dalam hal positif tetapi juga dalam hal negatif seperti marah.

Pendekatan sosiologi dalam migrasi tersebut bahwa telah terjadi migrasi yang diinginkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Di mana dibalik tindakan tersebut, ada perencanaan sebelum dilakukan migrasi ke Kuala Lumpur, yang sampai saat ini belum terjawab oleh peneliti. Pertanyaan inti peneliti bagaimana pilihan rasional migran yang bekerja di konstruksi bangunan yang pada dasarnya pilihan rasional adalah tindakan yang memiliki tujuan dan maksud. Kemudian untuk menganalisis masalah tersebut adalah dengan melakukan analisis pada level mikro atau individu itu sendiri. Sehingga akan dimunculkan alasan-alasan individu melalui serangkaian penelitian lapangan, kuesioner dan wawancara mendalam.

Pilihan Rasional (James S. Coleman) Migrasi Tenaga Kerja Indonesia

Pilihan rasional ini, merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis migran tenaga kerja Indonesia di Kuala Lumpur. Secara tidak langsung teori ini, membantu peneliti dalam mengkaji para TKI di sektor konstruksi bangunan yang dihadapkan oleh pilihan-pilihan berdasarkan kemampuannya untuk dapat melakukan migrasi ke luar negeri yang kemudian melakukan pilihan untuk dapat bekerja di sektor konstruksi bangunan. Setiap aktor TKI melakukan migrasi mengarah kepada keuntungan yang ingin didapat dan pertimbangan kemampuan aktor. Kemampuan aktor akan mampu memenuhi kebutuhan dan menaikkan status sosial para aktor TKI yang bekerja di sektor konstruksi bangunan itu sendiri.

Teori pilihan rasional menjadi teori yang populer dalam sosiologi kontemporer dalam analisis berbagai fenomena. Dalam hal ini fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke Kuala Lumpur. Coleman menjelaskan bahwa teori pilihan rasional ini didasarkan atas tindakan individualisme yang berada di level mikro dan untuk

menjelaskan fenomena di level makro (Ritzer, 2012). Coleman juga menjelaskan bahwa tindakan seseorang individu dilakukan secara sengaja, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan tujuan yang telah ditentukan yang dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan secara rasional yang bersumber pada ekonomi, dan secara konseptual tindakan yang diberikan oleh aktor sebagai tindakan untuk memaksimalkan manfaat dan pemenuhan kebutuhan mereka (Ritzer, 2012). Tujuan adalah sebuah pilihan rasional untuk pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh aktor dan tujuan tersebut dipandang memiliki pilihan atau nilai, keperluan yang penting untuk mencapai tujuan sesuai dengan tingkatan pilihannya.

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan...terlibat dalam sistem tindakan...selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka (Upe, 2010).

Ada dua unsur dalam teori pilihan rasional dalam mempengaruhi tindakan individu yaitu;

- a. Aktor, aktor yang mengendalikan sumber-sumber daya yang dilirik oleh aktor lain. Adapun faktor tersebut diantaranya lembaga sosial yang keberadaannya sebagai penghambat dalam tindakan yang dilakukan oleh aktor pertama dalam pencapaian tujuan. Lembaga sosial tersebut dapat berupa instansi pemerintah. Dalam hal ini kantor imigrasi dan BNP2TKI adalah salah satu lembaga yang memuat aturan-aturan yang terkait dengan migrasi tenaga kerja Indonesia.
- b. Sumber-sumber daya adalah hal-hal tindakan yang dikontrol dan dikendalikan oleh para aktor yang memiliki kepentingan terhadapnya. Setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda dan semakin banyak sumber daya maka semakin

besar peluang aktor untuk dapat mencapai tujuan, namun jika sumber daya yang tersedia sedikit maka kesempatan semakin kecil dan memungkinkan tujuan tidak akan tercapai. Dalam mencapai tujuan aktor melakukan pilihan yang di mana tindakan tersebut tidak merugikan aktor. Sebab aktor menyadari bahwa sumber daya tersebut terbatas, kemungkinan tidak ingin mencapai tujuan tersebut, sehingga akan berdampak terhadap pencapaian tujuan selanjutnya.

Perhatian Coleman terhadap isu makro ke mikro menjadi daya tarik tersendiri dalam analisis migrasi tenaga kerja Indonesia di Kuala Lumpur. Aktor yang melakukan migrasi tentunya memiliki pandangan tersendiri atas tindakannya. Seperti apa yang konsep di atas bahwa tindakan migrasi tersebut sebagai wujud dari memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia, yaitu lapangan kerja di sektor konstruksi bangunan. Tindakan aktor sebagai tindakan individu yang berada pada level makro yang menimbulkan kesan fenomena di tingkat makro, kesan inilah yang kemudian dijadikan Coleman sebagai dasar munculnya teori pilihan rasional. Agar dapat menganalisis isu di tingkat makro maka Coleman membagi beberapa unsur yang dipandang sangat penting, adapun unsur tersebut sebagai berikut:

a. Perilaku kolektif

Perilaku kolektif merupakan fenomena yang berada pada level makro adalah wujud dari perilaku individu yang kolektif. Karena sifat dari perilaku yang kolektif ini karakternya sering berubah-ubah dan tidak teratur maka dalam mengkajinya membutuhkan waktu dan penelitian lebih dalam. Tetapi Coleman menjelaskan bahwa pilihan rasional dapat menjelaskan semua fenomena di level makro dan tidak hanya yang bersifat stabil dan teratur (Ritzer, 2012). Perspektif pilihan rasional aktor akan melakukan pemindahan tindakan secara sepihak atas tindakannya kepada orang lain, tindakan itu sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan yang dilakukan secara sepihak atau dikendalikan sendiri oleh aktor maka bukan bagian dari sebuah pertukaran.

b. Norma-Norma

Norma sebagai salah satu unsur yang menjadi perhatian Coleman dalam penelitian. Coleman melihat bagaimana norma dipertahankan oleh sekelompok aktor yang memiliki rasional. Norma-norma yang dipelihara untuk mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari kepatuhan norma dan kerugian yang akibat dari pelanggaran terhadap norma tersebut. Orang bersedia untuk melepaskan kendali atas perilaku mereka namun proses mendapatkan kendali melalui norma atas perilaku orang lain. Jika pemindahan kendali secara tidak sepihak maka akan terjadi keseimbangan dalam norma-norma (Ritzer, 2012). Hal yang paling penting dari pilihan rasional yang diungkapkan oleh Coleman bahwa untuk melihat norma-norma tersebut melalui tiga sudut pandang berikut sudut pandang tersebut mikro ke mikro, tindakan yang memiliki tujuan pada level mikro, dan dari level makro ke level mikro. Norma-norma adalah sebuah isu yang berada pada level makro yang menjadi dasar tindakan bertujuan mikro, dengan adanya aturan maka menimbulkan sanksi-sanksi yang mempengaruhi tindakan para individu, di mana tindakan tersebut bisa saja didukung, sementara tindakan lain dikurangi (Ritzer, 2012).

c. Aktor Korporat

Coleman dalam melanjutkan analisisnya ke level makro dengan tujuan agar dapat membahas aktor kolektif. Aktor tidak bisa melakukan tindakan atas kepentingan pribadi aktor, tetapi aktor bertindak atas kepentingan kolektivitas. Aktor kolektif maupun aktor individu memiliki tujuan. Seperti organisasi, struktur sosial dan aktor individu untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan keuntungan pribadi masing-masing yang berbeda dengan tujuan aktor secara kolektif, dari kondisi tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan sehingga membantu dalam memahami sumber pemberontakan terhadap pemilik modal atau korporat. Modern ini aktor korporat memiliki kedudukan yang sangat

penting di mana aktor dapat bertindak menguntungkan bahkan membahayakan individu. Peran aktor secara konseptual dapat dinilai sebagai hak-hak individu yang dapat diwujudkan dalam sistem sosial, sehingga kinerja para aktor kolektif dapat diketahui jika sistem sosial kepentingan utama dari individu-individu dapat memahaminya.

Kesimpulan

Faktor pendorong dan penarik menjadi alasan migran melakukan migrasi ke Kuala Lumpur yaitu tekanan ekonomi, pengangguran dan sempitnya lapangan kerja menjadi faktor pendorong yang ada di daerah asal dan daya tarik kota Kuala Lumpur sebagai faktor penarik. Melakukan migrasi internasional adalah pilihan rasional individu, pilihan-pilihan tersebut tentunya dipengaruhi oleh stimulus yang diberikan oleh aktor lain. Pilihan rasional aktor migran memiliki tujuan dan maksud tersendiri di level mikro yang kemudian berdampak pada level makro. Adanya proses yang sangat panjang yang harus dilalui oleh para migran, mulai dari melihat peluang-peluang keuntungan yang didapat hingga melalui proses administrasi yang cukup sulit untuk dilalui.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. S. (2010). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- BNP2TKI. (2016). *Data Penempatan dan Perlindungan TKI*. Jakarta: BNP2TKI.
- Butt, L. (2014). Migration, Mobility and Transnational. *CAPI Working*, 1.
- Coleman, J. S. (2009). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- ILO. (2007). *Sekilas Tentang ILO*. Jakarta: Department of Communication dan Public Information.

- IOM. (2010). *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia (Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah)*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, Vol. 3, No. 1. (1966), pp. 47-57.
- Mantra, I. B. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mirsel, R. (2004). *Toori Peregerakan Sosial*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Pahroji, D., & Singadimedja, H. N. (2012, September-Oktober). Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia Dan Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, pp. ISSN 1412-86676 Vol. 11 No. 24.
- Ritzer, G. (2009). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kompasiana. Indonesia Bakal di Capslock Malaysia. http://www.kompasiana.com/nurtjahjadi/indonesia-bakal-di-caps-lock-malaysia_5500a769a333118d735114ef, diakses 07/03/2017, pukul 20:01 WIB
- Maksum, A. (2015). *Politik Internasional dan Sumber Masalah Hubungan Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mei, L. (2006). *Indonesian Labor Migrants in Malaysia: A Study from China*. Kuala Lumpur: ICS Working Paper No. 2006-11.
- Rinil, I. P., & Tenriajeng, A. T. (2014). Analisis Risiko Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kinerja Waktu Proyek Pada Bangunan Bertingkat. *Jurnal Desain Konstruksi*, Volume 13 No 2.
- Sakernas. (2016). *Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 - 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Shuid, S. (2004). Urbanization and Housing in Kuala Lumpur City Centre :Issues and Future Challenges. *19th EAROPH World Planning and Housing Congress* (pp. 1-12). Melbourne Australia: EAROPH World Planning and Housing Congress.

- Tjandraningsih, I. (2012). Kebijakan Pembangunan dan Kaum Marjinal di Indonesia: Menuju Agenda Penelitian dan Kebijakan. *Jurnal Analisis Sosial*, Volume 17 no. 2.
- Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran dalam Sosiologi* . Jakarta: PT Raja Grafindo.

URGENSI PENGAJARAN SOSIOLOGI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI

Ridhah Taqwa

Pengantar

Pembelajaran Sosiologi Islam merupakan sebuah keniscayaan di Perguruan tinggi, khususnya di negara yang berpenduduk mayoritas ummat Islam. Sekalipun selama ini sudah ada Sosiologi Agama yang mengaji relasi atau pengaruh agama dan paham keagamaan dan praktik kehidupan, namun ada perbedaan signifikan antara sosiologi agama dan sosiologi Islam. Sosiologi agama sangat empiris, berbicara tentang fenomena keagamaan, sedangkan dalam Sosiologi Islam, tidak hanya mengaji fenomena masyarakat yang dipengaruhi oleh agama Islam, melainkan juga bagaimana menjadikan nilai-norma dalam Islam dapat dilaksanakan oleh ummat Islam. Jadi sosiologi Islam menekankan pada sosiologi terapan (*applied science*), bukan hanya (*view science*) seperti sosiologi agama. Basis sosiologi agama merujuk pada masyarakat Eropa, sedangkan Sosiologi Islam pada Negara bangsa yang mayoritas beragama Islam. Kajian Sosiologi Islam sudah dimulai oleh Ibnu Khaldun sampai Ali Syariati dan sejumlah teoritikus Ilmu sosial di berbagai negara seperti Ilyas Ba-Yunus di The State University New York USA, di Australia oleh Bryan S. Tunner dan di Indonesia oleh Kuntowijoyo dengan model Ilmu Sosial Profetik.

Salvatore (2016) seorang penulis buku Sosiologi Islam yang juga menulis Disertasi dengan tema tersebut pada tahun 1990 mencoba mempublikasikan Islam dengan perspektif sosiologis. Selain itu ia juga menulis Wacana Politik Modernitas pada tahun 1997. Atas usahanya tersebut sosiologi Islam mulai mendapatkan panggung wacana keilmuan yang bertujuan untuk membantu sosiologi untuk membebaskan dirinya dari 'dosa asal' yang sangat berat, yaitu keengganan untuk mengakui dinamisme sosial dan sipil dari artikulasi agama (Islam) non-Barat. Menurut Salvatore, Sosiologi Islam sudah lebih awal lahir melalui tangan Bryan Turner yang hampir sendirian dan menghubungkan studi sejarah Islam (Salvatore, 2016). Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu argument perlunya pembelajaran Sosiologi Islam di Perguruan Tinggi, khususnya di Indonesia. Karena itu, kita memandang bahwa sosiologi Islam penting dijadikan sebagai media pendidikan Islam dan tentang masyarakat Islam.

Sosiologi Islam bisa jadi merupakan mata kuliah yang baru, tetapi bisa pula merupakan materi kuliah yang telah lama, sekalipun tidak disadari oleh para pengajar atau penyelenggara pendidikan. Hal ini sangat tergantung dengan persepsi kita tentang apa yang dimaksud sosiologi Islam. Jika kita memposisikan Sosiologi Islam sebagai suatu mata kuliah yang harus berdiri sendiri, maka sangat boleh jadi mata kuliah ini menjadi asing bagi mahasiswa. Jika yang dimaksudkan sosiologi Islam adalah segala penjelasan teoritis terhadap masyarakat yang menganut Islam sebagai agamanya, maka sesungguhnya telah banyak hasil-hasil kajian yang telah menjelaskan hal itu. Pandangan yang kedua ini lebih memposisikan Sosiologi Islam sebagai apa adanya atau sesuai dengan praktik sosial (*posisvis*). Dengan demikian yang dimaksud adalah konteks ini berupa sosiologi masyarakat Islam, sebagaimana yang telah dirintis oleh Ibn Khaldun.

Dalam konteks artikel ini, suatu hal yang pasti dan memang penting artinya adalah adanya proses pembelajaran yang menempatkan sosiologi Islam ini sebagai mata kuliah yang bersifat mandiri, sehingga tidak menjadi pelengkap penderita, apalagi

materinya hanya digabungkan dengan mata kuliah lain yang sudah mapan. Persolannya, mata kuliah ini akan sulit diterapkan dalam pengajaran di perguruan tinggi jika ada pihak yang menganggap sebagai misi ideologis. Di Indonesia, seringkali pendidikan yang berbasis nilai agama (Islam) mendapat respon yang keliru (apriori) dari non-muslim, apalagi kalau usaha tersebut dipandang akan meneguhkan Islam sebagai praktik kehidupan berpolitik (berbangsa). Hal yang sama pernah terjadi dalam pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terutama pasal yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara pendidikan untuk mengajarkan dan menyediakan guru agama bagi peserta didik (siswa dan mahasiswa), sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik tersebut.

Pengajaran Sosiologi Islam pada umumnya berlaku bagi sekolah atau perguruan tinggi Islam, sedangkan perguruan tinggi umum sangat kurang.³ Kecenderungan ini tidak mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan bagaimana persentuhan antara kebudayaan yang lama (pengaruh Hindu) dan budaya Barat saling bersentuhan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks masyarakat Jawa, Islam datang tidak dengan sendirinya menggantikan budaya yang telah ada tetapi justru terintegrasi menjadi praktik keagamaan yang kemudian melahirkan kebudayaan Jawa Islam. Hal yang sama juga berlaku dengan kebudayaan lain, seperti Melayu, Sunda, Bugis-Makassar dan Aceh, Ambon dan Madura. Realitas empiris ini salah satu yang memberi justifikasi pentingnya Sosiologi Islam dijadikan sebagai materi pembelajaran di Perguruan Tinggi.

³ Mata kuliah sosiologi Islam sudah ada di Unsri sejak awal berdirinya Jurusan Sosiologi pada tahun 1998. Sedangkan di Program Studi Magister Sosiologi Unimal baru ada tahun 2021. Juga ada Pengajaran Sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/46063/>

Alasan Urgensi Pembelajaran Sosiologi Islam

Pengajaran Sosiologi Islam di Perguruan Tinggi sangat urgen, setidaknya dengan dua argumen sebagai berikut:

1. Argumen Sosiologis

Mayoritas umat Islam di Indonesia (sejumlah negara serantau jumlah umat Islamnya juga cukup banyak). Pengaruhnya Islam terhadap sistem sosial, budaya dan politik cukup signifikan, karena Islam telah menyentuh pada aspek politik, ekonomi dan kebudayaan. Sentuhan aspek struktur dan kultur serta organisasi sosial itu, telah menjadi kekuatan sosial tersendiri bagi perubahan sosial masyarakat, baik dalam konteks ideologi, pemikiran dan bahkan pembentukan teori-teori ilmu-ilmu sosial. Clifford Geertz misalnya telah melahirkan dan mempopulerkan Tri-kotomi perilaku sosial politik Ummat Islam di Indonesia, yakni Priyayi, Santri dan Abangan. Betapa pun teori tersebut masih menimbulkan kontroversi atau pertentangan sampai sekarang, tetapi polarisasi itu telah menggugah ilmuan sosial lain untuk mengkaji perilaku sosial politik di Indonesia.

Dalam masyarakat Jawa misalnya, praktik kehidupan sosialnya, tidak ada konsistensi antara perilaku abangan, priyayi atau santri. Untuk mendapatkan keturunan misalnya, semua cara dapat ditempuh, baik mendatangi dukun (ciri abangan), memeriksa kesuburan dan disfungsi seksual di dokter (perilaku priyayi), dan juga meminta bantuan pada kyai atau jamaah haji untuk mendoakannya di Tanah Suci Mekkah (perilaku santri). Dengan demikian praktik kehidupan tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Jawa memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, baik pada kebudayaan Barat, Hindu dan Islam, tetapi juga masih tetap mempercayai kebudayaan nenek moyang mereka.

2. Argumentasi Historis

Sosiologi Islam, sebenarnya telah memiliki sejarah yang panjang, telah dirintis oleh sosiolog sebelumnya khususnya

oleh Ibn Khaldun, jauh sebelum Bangsa Eropa menggagas konsep dan penelitian sosiologi, seperti A. Comte dan E. Durkheim. Spirit Ibn Khaldun dan karya-karyanya telah banyak diakui oleh para pemikir sejarah, sosiolog bahkan ahli politik. Belum lama ini di sejumlah Perguruan Tinggi di Amerika, karya-karya Khaldun banyak dibahas dan bahkan kelahirannya diperingati secara khusus. Sekalipun pada waktu yang hampir bersamaan pengagum dan penerus pemikiran Khaldun di Mesir justru diperlakukan tidak terhormat. Ia terusir dari negaranya dan institusinya yang berusaha mengembangkan ilmu sosial ala Khaldun dibubarkan (Fauzi, 2010). Sebagai bahan komparasi patutlah kita mengenal karya Khaldun yang tersohor, yaitu *Muqaddimah*. Berikut gambaran tentang Ibn Khaldun yang diringkas dari tulisan Zaldy Munir (2010).

Muqaddimah adalah buah karya dari cita-cita besar Ibn Khaldun yang diselesaikan pada November 1377. *Muqaddimah* secara harfiah berarti 'pembukaan' atau 'introduksi' dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah, yang secara bebas diterjemahkan ke dalam buku "The Book of Lessons and the Record of Cause and Effect in the History of Arabs, Persians and Berbers and Their Powerful Contemporaries." Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar adalah karena karyanya "Muqaddimah". Rasanya memang aneh ia terkenal justru karena *muqaddimah*nya bukan karena karyanya yang pokok (*al-'Ibar*), namun pengantar *al-'Ibar*nyalah yang telah membuat namanya diagung-agungkan dalam sejarah intelektualisme. Karya monumentalnya itu telah membuat para sarjana baik di Barat maupun di Timur begitu mengaguminya. Sampai-sampai Windellband dalam filsafat sejarahnya menyebutnya sebagai "Tokoh ajaib yang sama sekali lepas, baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang".

Muqaddimah mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (*daulah*) dan peradaban (*'umran*). Bukan hanya itu yang dibahas, *Muqaddimah* juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Ia juga layak mendapatkan penghargaan atas

formula dan ekspresinya yang lebih jelas dan elegan dari hasil karya pendahulunya atau hasil karya ilmuwan yang sejamin dengannya.

Khaldun menggambarkan tanda-tanda kemunduran Islam dan jatuh banggunya kekhalfahan melalui pengalamannya selama mengembara ke Andalusia dan Afrika utara. Ia mulai menyadari pula, walaupun secara kultural Islam masih berada dalam zaman keemasan, basis material dari hegemoni Islam ketika itu telah melemah. Misalnya, wilayah-wilayah Islam di Afrika utara menghadapi tantangan dari suku-suku nomaden tradisional serta persaingan antara penguasa di satu sisi dan kekuatan Kristen di sebelah utara yang menguasai alur Mediterania di sisi lain. Invasi Mongol dari timur juga menggerogoti struktur yang telah terbangun dan kota-kota peradaban Islam.

Kemashuran Ibn Khaldun masih berlaku sampai sekarang. Misalnya, dalam Ulang Tahun ke-600 kematian Ibn Khaldun (2006) dirayakan di New York University dengan seminar tentang sumbangannya pada dunia ilmu-ilmu sosial. Tahun itu, jurnal-jurnal sosiologi terkemuka, seperti *Current Sociology*, *International Sociology*, *Contemporary Sociology*, memuat artikel-artikel khusus tentangnya. Sebelumnya, sudah ada Ibn Khaldun Chair di George Washington University yang diduduki Akbar S Ahmed, antropolog muslim terkemuka (Fauzi, 2010).

Kelemahan Teori Barat dan Resistensi Timur

Teori-teori Barat atau yang lahir dan berkembang di masyarakat Eropa dan juga Amerika, tidak semuanya relevan dijadikan sebagai alat analisis terhadap mayoritas penganut Islam. Teori konflik dan struktural yang populer selama tahun 1970-an sampai 1990-an ini semakin menunjukkan ketidakrelevansinya dengan kenyataan masyarakat Islam dewasa ini. Meskipun demikian, kita harus diakui bahwa para teoritis asinglah yang memulai tradisi ilmiah bagi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda seperti Snouck Hurgronje, namun harus lebih disadari pula bahwa mereka tidaklah sepenuhnya *disinterested* meminjam pandangan Kuntowijoyo (2001:105). Hal yang sama juga bisa berlaku bagi ilmuwan sosial belakangan seperti Geertz, Anderson, Lindle, dan lain-lain. Melalui

teori relasi kekuasaan Foucault, bisa dijadikan referensi bahwa dengan pengetahuan tentang Timur dan atau Islam, maka relasi kekuasaan akan semakin timpang atau tidak seimbang, di mana Barat semakin dominan, sedangkan negara berkembang di Timur semakin didominasi.

Kelesuan dan ketidakmampuan Ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena sosial, tidak terlepas dari konteks perkembangan dan perubahan sosial masyarakat yang semakin pesat, dan pengaruh atau implikasi dari teknologi informasi yang disatu sisi menggerogoti nilai dan perubahan umat manusia. Tidak hanya itu, ilmu sosial modern bahkan juga posmodern belum mampu meletakkan posisi yang tepat, relasi antara agama dan sains. Pertentangan keduanya justru menjadikan sains berkembang pesat, sementara agama mengalami degradasi legitimasi dan justifikasi dalam masyarakat. Sementara dalam sejarah Islam, justru pada saat sains dan agama berjalan seiring yang menjadi dasar bagi kemajuan dan perkembangan peradaban. Akhir-akhir ini memang ada usaha yang cukup memadai untuk mengurai perjumpaan sains dan agama yang tidak dalam posisi konflik atau saling bertentangan tetapi kearah dialog seperti yang dikembangkan oleh John F. Haught (2004).⁴ Dengan usaha tersebut diharapkan peradaban manusia semakin transenden dan tetap berpijak pada nilai-nilai moral keagamaan (teologis).

Pembelajaran Sosiologi Islam memungkinkan digunakan sebagai alternatif basis perlawanan terhadap *mainstream* sosiologi positivis Barat dan posmodern yang liar. Kedua perpektif teoritis itu, tidak punya arah yang jelas untuk mengantarkan bangunan peradaban ummat manusia. Sosiologi Barat yang sangat materialistis dan dominatif, bekerja melalui mekanisme dan strategi kekuasaan (meminjam konsep Foucault) yang halus dan beroperasi di semua aspek kehidupan, ekonomi politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Hal ini diakui oleh Said

⁴ Karya Haught yang judul aslinya *Science and religion: from conflict to conversation* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Perjumpaan Sains dan Agama: dari konflik ke dialog*. Mizan bekerja sama dengan CRCs UGM dan ICAS Jakarta. 2004.

bahwa dunia Barat mendominasi dunia Timur melalui teorinya yang terkenal *orientalism*, yaitu tentang bagaimana Barat memandang dan memposisikan Timur. Dalam banyak kasus wacana kekuasaan Barat lebih memandang Timur obyek kekuasaan politik ekonomi melalui lembaga orientalis, penjajahan komersial, diplomatik dan invasi militer (Said, 2003). Praktik dominasi kekuasaan terhadap dunia Timur itu masih terus berlangsung, seperti di kawasan Timur Tengah (Irak) dan Asia Tengah (Afghanistan).

Sosiologi Islam: Sosiologi Profetik

Orientasi pada sosiologi terapan (*applied science*), bagaimana Islam di terapkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini sosiologi Islam diposisikan sebagai ilmu terapan atau ilmu sosial profetik. Kuntowijoyo telah merumuskan bagaimana sebuah ilmu sosial profetik dikembangkan dalam masyarakat. Prinsip yang dibangun dalam ilmu sosial profetik berasal dari tafsir kreatif terhadap teks Al Qur'an surah Ali Imran Ayat 110, yaitu "*kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah*" (Ali Imran-3, ayat 110). Ada sejumlah term filosofis dalam ayat tersebut, yaitu masyarakat utama (*khairu ummah*), kesadaran sosio-historis (*ukhrijat linnas*), liberasi (*amr ma'ruf*), emansipasi (*nahy mungkar*), dan transendensi (*al iman billah*). Penerjemahan proposisi pada teks ayat tersebut disesuaikan oleh Kuntowijoyo dalam konteks keilmuan/keilmiahannya. Sosiologi profetik ingin membangun sebuah komunitas atau masyarakat ideal, atau masyarakat utama (*khairu ummatin*), atau mirip dengan negara utama menurut konsep Al Farabi, *al madinah al fadhilah*- (Susanto, 2003).

Dalam Islam, Qur'an juga tersedia konsep tentang masyarakat, perubahan sosial, baik pada masa lalu dan pada masa mendatang. Bahkan Islam dapat diposisikan sebagai suatu ideologi, kemudian menjadi ide dan selanjutnya sebagai sebuah teori untuk menjelaskan fenomena sosial. Menurut Kuntowijoyo setiap ayat Al-Qur'an dapat dirumuskan menjadi ideologi, tetapi juga dapat dirumuskan menjadi teori-teori ilmu pengetahuan Islam. Dia mencontohkan ayat yang

menyatakan bahwa seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Menurutnya ayat tersebut adalah *grand theory* yang masih perlu diterjemahkan dalam *middle theory* yang operasional, yaitu bagaimana menerjemahkan konsekuensi-konsekuensi dari konsep keberimanan dan ketaqwaan sehingga dapat memungkinkan “terbuka”nya langit dan bumi untuk mencurahkan rizki (Kuntowijoyo, 1991).

Bisa dengan perspektif Qur’an, seperti apa pola masyarakat yang relevan dengan ajaran Islam. Penanganan konflik misalnya, dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Hujurat ayat 9. Bagi komunitas muslim pihak-pihak yang ada dalam suatu komunitas, mereka dipandang sebagai saudara antara satu dengan yang lain. Demikian pula dalam ayat 13 surah yang sama, Allah memerintahkan manusia untuk saling menegani atau berinteraksi, dan dari proses interaksi itu justru menjadi salah satu tujuan diciptakannya manusia yang bersuku-suku dan bangsa-bangsa.

Landasan Teoritis dan Kurikulum Pembelajaran

Landasan teoritis yang direkomendasikan oleh Ilyas Ba-Yunus (1989) tentang masyarakat menurut Islam, yaitu 1) teori Islam memperhatikan eksistensi material dan juga spiritual manusia, terutama asal-usul penciptaan manusia; 2) teori ini memusatkan perhatian pada penalaran dan pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang merupakan landasan pokok interaksi sosial; 3) bertolak dari perspektif makro, teori ini mampu mengembangkan diri sedemikian rupa, sehingga mencakup proses-proses yang lebih besar, seperti proses konsensus dan kerja sama di satu sisi dan proses konflik dan kompetisi di sisi lain; 4) teori ini memiliki kemampuan untuk menjelaskan pola perilaku individual dan juga tata sosial dari proses-proses internal maupun faktor eksternal; dan 5) seyogyanya teori ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam, karena itu, ia memberikan tekanan pada situasi manusia pada tingkat individual, kelompok, komunitas, bangsa dan dunia.

Ladangan teoritis Ba-Yunus tersebut dapat digunakan untuk merumuskan apa yang akan menjadi materi pembelajaran sosiologi Islam. Ada sejumlah pokok pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu:

1. Materi Sosiologi yang berbasis masyarakat Islam bisa juga dimasukkan dalam kurikulum yang telah ada dengan lebih banyak memuat materi masyarakat Islam sebagai rujukan teoritis. Namun hal ini lebih menunjukkan aspek empiris, bukan kearah profetik sebagaimana yang menjadi cita-cita diutusnya Nabi Muhammad dan diturunkannya Al Qur'an sebagai pedoman hidup, khususnya dalam bermasyarakat.
2. Selain itu, strategi yang juga tepat dengan meminjam konsep pemikiran studi kultural, khususnya yang dikembangkan oleh Edward Said yaitu teori orientalis. Dia mensinyalir bahwa teori-teori ilmu sosial yang selama ini dipakai untuk menjelaskan fenomena sosial di dunia timur terlalu berorientasi pada masyarakat Barat (Eropa). Materi pembelajaran atau kurikulum tidak hanya tentang struktur dan proses sosial masyarakat Islam, tetapi juga bagaimana struktur, proses serta perubahan sosial yang ideal untuk membangun peradaban (tamaddun) Islam.
3. Tujuan jangka panjang Sosiologi Islam adalah mengembangkan strategi untuk membangun dan mengembangkan peradaban masyarakat yang bersendikan ketauhidan (nilai-nilai keislaman), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu memelihara relasi sosial yang harmonis antar berbagai suku bangsa di Dunia, dan menjaga kelestarian relasi manusia dengan alam (sosiologi Lingkungan). Hal ini berbeda dengan umumnya teori positivis yang lebih banyak bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena masyarakat, tetapi tidak ada upaya untuk mengubah kultur dan struktur sosial yang tidak sesuai dengan Islam. Hal inilah yang secara prinsip akan membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya.

Kesimpulan

Materi sosiologi Islam tidak dibatasi dalam konteks pemahaman konsep-konsep kehidupan sosial dalam alqur'an, atau pengaruh Islam dalam praktik kehidupan masyarakat yang kemudian melahirkan struktur sosial, proses dan perubahan sosial dalam masyarakat, tetapi juga meletakkan epistemologi sosiologi Islam sebagai tradisi keilmuan yang mempertegas relasi agama dan sains, struktur sosial yang ideal dan strategi untuk mewujudkan sistem kehidupan Islam (*tamaddun*) yang diterjemahkan atau ditafsirkan dari Alqur'an. Hal ini berarti bahwa Sosiologi Islam juga mempunyai misi (aspek profetik) untuk mengkonstruksi atau membangun peradaban yang berbasis pada nilai keislaman.

Dari penjelasan tersebut diharapkan pembelajaran sosiologi Islam di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi yang dikelola organisasi sosial keagamaan dapat diterapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk mencapai tujuan itu tidak terlalu sulit jika disertai dengan *good will* dari penyelenggara pendidikan. Dengan adanya ruang untuk menyusun kurikulum berbasis pada kearifan lokal, maka materi pembelajaran tersebut bisa diwujudkan dalam penyusunan kurikulum. Pengalaman di Universitas Sriwijaya dan tentu saja dari sejumlah perguruan tinggi Islam yang juga memiliki Mata Kuliah Sosiologi Islam dapat menjadi referensi untuk saling sharing pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam jangka panjang pembelajaran sosiologi Islam (profetik) ini masih perlu dikaji secara mendalam dan meluas, baik melalui penelitian khusus maupun melalui kajian perbandingan dengan perguruan tinggi di negara-negara Eropa dan Amerika serta Timur Tengah.

Sejarah telah membuktikan bahwa Sosiologi Islam tidak asing bagi dunia Islam, karena pelopor studi sosiologi justru dimulai dari dan oleh Ibn Khaldun, jauh sebelum Comte menemukan Konsep Sosiologi. Karena itu, salah satu yang hendak ditunjukkan dalam pembelajaran sosiologi Islam adalah kita juga telah memiliki tradisi kajian terhadap proses sosial, kerja sama konflik dan kompetisi dalam masyarakat. Tradisi ilmu sosial dalam Islam tersebut telah

dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Ali Syari'ati, Ba-Yunus, Murtadha Mutahhari, selain sarjana asing seperti Bryan S. Tunner. Sedangkan materi tentang Sistem Masyarakat Islam telah dikaji secara mendalam oleh Yusuf Qordhowi. Jadi kajian sosiologi Islam kedepan memiliki prospek yang baik, jika kita memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkannya. Semoga.

Daftar Pustaka

- Ba-Yunus, Ilyas. (1989). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*. Cetakan Kedua. Mizan. Bandung.
- Capallaro, Dani. (2004). *Critical and Cultural Theory*. Niagara. Yogyakarta.
- Haught, John F. (2004). Perjumpaan Sains dan Agama: dari konflik ke dialog. Mizan bekerja sama: CRCS UGM dan ICAS Jakarta.
- Kuntowijoyo. (1991). *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Mizan. Bandung.
- Kuntowijoyo. (2004). *Muslim Tanpa Masjid*. Mizan. Bandung.
- Leaman, Oliver. (2004). *Pengantar Filsafat Islam; Sebuah Pendekatan Tematis*. Mizan. Bandung.
- Munir, Zaldy. (2010). Ibn Khaldun: Bapak Sosiologi Islam. Blog. zaldymunir.com.
- Piliang, Yasraf A. (2004). *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Jalasutra. Yogyakarta.
- Qordhowi, Yusuf. (2011). *Sistem Masyarakat Islam Dalam Qur'an dan Hadist*.
- Rahmat, Jalaluddin. (2021). *Islam Alternatif*. Cet. baru, Mizan. Bandung.
- Saefuddin, A.M. (1987). *Desekularisasi Pemikiran*. Mizan. Bandung.
- Said, Edward W. (2001). *Kekuasaan, Politik dan Kebudayaan*. Pustaka Prometheus. Jakarta.
- Salvatore, Armando. (2016). *The sociology of Islam Knowledge, Power and Civility*. Oxford: Wiley Blackwell.

- Sardar, Ziaudin & van Loon, Borin. (2010). *Cultural Studies for Beginner*. Mizan. Bandung.
- Shihab, Quraish. (2002). *Membumikan Alqur'an*. Mizan. Bandung.
- Susanto, Happy. (2003). Menggagas Sosiologi Profetik: Sebuah Tinjauan Awal. *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 1, No. 2, Juni 2003. International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Syari'ati, Ali. (1992). *Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat*. Pustaka Hidayah. Jakarta .
- Tunner, Bryan S. (1990). *Sosiologi Islam*. Rajawali. Jakarta.
- Yamani. (2002). *Antara Al Farabi dan Khomaeni, Filsafat Politik Islam*. Mizan. Bandung.

DAMPAK KONVERGENSI MEDIA DALAM PENURUNAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA REMAJA DI KOTA PALEMBANG

Febrimarani Malinda, Safira Soraida, Adi Inggit Handoko

Pendahuluan

Media merupakan suatu hal yang teramat penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun bersosialisasi. Sebagian orang beranggapan bahwa media hanya sekedar hiburan belaka, namun sebagian besarnya lagi beranggapan media merupakan suatu kebutuhan. Perkembangan teknologi memberikan andil dalam perubahan peran media sebagai alat merefleksikan bermacam peristiwa yang terjadi pada ruang publik dan masyarakat dunia. Oleh karena itu suatu media terbentuk sebagian besarnya terjadi dari adanya peristiwa yang ada di masyarakat, sehingga media dapat dipercaya dan diterima oleh khalayak masyarakat juga. Perkembangan dari media ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi pengintegrasian media sebagai alat penyampaian informasi sebagai penyaring atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak, di mana media tersebut senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konten berita yang lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pengelola media tersebut. Jadi, media tidak selalu lahir dari peristiwa yang ada di masyarakat saja tapi media dapat diseleksi sesuai kebutuhan yang terpopuler atau aktual di masyarakat saat itu. Jika dilihat dari kedua

hal tersebut maka media tersebut sebenarnya mempunyai kedua sisi yang menguntungkan dan ada juga merugikan, tergantung dari pola pengguna media itu sendiri nantinya. Mengkaji pola kebutuhan dalam suatu media berarti akan membahas terkait sikap atau perilaku seseorang terhadap penggunaan media yang bijak.

Penggunaan media yang bijak itu dapat lahir dari suatu kebiasaan yang secara terus-menerus tergantung pada kepribadian yang dilakukannya. Pola kepribadian dalam suatu media yang akan digunakan bahkan diterapkannya tersebut, dapat terlihat berbeda-beda. Hal itu dikarenakan substansi yang merupakan isi dari pemahaman serta perasaan pribadi individu itu berlainan dengan pribadi orang lain, hingga masing-masing orang itu sesungguhnya ada perilaku yang berlainan. Sehingga dapat diketahui bahwa kepribadian seseorang terhadap suatu penerimaan informasi media tergantung pada pola perilaku yang dibutuhkannya dengan tujuan yang dikehendaknya. Beragam kepribadian seseorang terhadap media, maka beragam juga media yang akan diinginkan. Dengan beragam media yang ingin diperoleh oleh penggunanya, maka lahir istilah kompetisi media. Kompetisi media terkait juga dengan istilah dunia media. Industri media adalah industri yang sangat dekat dengan komersialisme kapitalistik, hal ini didukung juga ketika media digital baru bermunculan di internet, media massa khususnya media cetak mengalami pertumbuhan yang cenderung negatif sebagai akibat dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Dengan adanya kompetisi media ini diharapkan dapat melakukan persaingan antar media secara sehat, walaupun dalam pelaksanaannya sering terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sebagian besar masyarakat lebih memilih media internet guna mendapatkan informasi dan bahkan fitur-fitur yang lebih menarik dari media konvensional atau media cetak yang telah hadir lebih dahulu, di mana hal itu akan berdampak pada perkembangan sistem informasi dari media itu sendiri apabila media tersebut tidak mengubah pola kebutuhan industri media yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat global.

Pada perkembangannya banyak industri media yang mencoba untuk mengubah atau bahkan mengintegrasikan berbagai bentuk media kedalam suatu teknologi digital sebagai bentuk usaha dalam membawa perubahan pada pola dan perilaku masyarakat. Usaha dalam penggabungan atau pengintegrasian beberapa jenis media ini biasa disebut dengan istilah konvergensi media, bentuk dari informasi yang dikomunikasikan media akan lebih dominan hadir menggunakan platform digital. Pada dasarnya konvergensi dilakukan oleh media biasanya merujuk pada perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi digital yang memungkinkan dengan adanya penggunaan dari beberapa alat komunikasi kedalam satu sistem konvergensi jaringan secara tunggal, di mana konvergensi jaringan ini akan lebih memberikan kenyamanan serta fleksibel dalam penggunaan media secara konsisten dan efisien sebagai alat komunikasi data dalam satu jaringan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa akan ada beberapa dampak konvergensi media terhadap pola perilaku masyarakat terutama pada ruang lingkup kehidupan remaja saat ini. Sehingga perlu adanya upaya pengendalian pola perilaku bagi remaja sebagai khalayak yang menerima dan menjadi sasaran atas konvergensi media tersebut, agar terhindar dari pegeseran nilai ideologi negara Republik Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila.

Kelompok remaja yang diklasifikasikan dalam penelitian ini adalah anak berusia 15 tahun sampai usia 20 tahun yang berada di kota Palembang dan sangat rentan dengan hal-hal baru yang bersifat global dan populer di masyarakat dunia. Seperti yang telah diketahui bahwa di Indonesia dalam pembentukan karakter generasi penerusnya harus berlandaskan pada ideologi Pancasila sebagai landasan hidup bagi masyarakat. Di mana dasar pemikiran Pancasila ini mengacu pada nilai-nilai kepribadian bangsa seperti religiusitas, kemanusiaan, kerukunan, sistem demokrasi, dan penegakkan nilai hukum atau keadilan ke dalam diri setiap rakyat Indonesia tidak terkecuali pada remaja. Diharapkan kepada kaum remaja saat ini dapat terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konvergensi media sebagai bentuk dari perkembangan era

digitalisasi dalam perubahan perilaku dan interaksi masyarakat modern. Walaupun sesungguhnya dampak negatif dari konvergensi media sangat berbahaya dalam pembentukan kesadaran dan pengidentitasan atas kepribadian dari kaum remaja jika hal tersebut tidak segera ditanggulangi. Penerimaan yang ditunjukkan oleh kaum remaja terhadap perkembangan konvergensi media masih dinilai perlu untuk dilakukan pengawasan serta pendampingan secara intensif oleh semua pihak terkait, agar remaja tersebut jauh dari perilaku menyimpang atas nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi, diharapkan pula remaja juga harus dapat melakukan pembentukan identitasnya sendiri, agar mencegah penggunaan media digital yang terlampau berlebihan. Dalam pembentukan identitas seseorang dapat terjadi saat berlangsungnya interaksi yang dilakukan secara berulang sebagai sifat general dalam lingkungan sosial yang harus dipertahankan. Oleh karenanya, remaja pun harus dapat memperlihatkan identitas dirinya sebagai anak bangsa dengan cara menerapkan pola perilaku yang berkaedah hukum dengan berlandaskan nilai sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap dua kajian permasalahan yang ada, yaitu:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan konvergensi media terhadap penurunan nilai-nilai Pancasila pada remaja di kota Palembang?
2. Bagaimana pengendalian konvergensi media sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri remaja di kota Palembang?

Tujuan dari mengetahui dampak dan upaya pengendalian pola perilaku terhadap kaum remaja tersebut adalah sebagai pembentengan diri atau batasan bagi remaja dalam melakukan tindakan di luar kontrol sosial terhadap penggunaan media digital secara cerdas dan tepat sasaran serta tidak melanggar nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia khususnya di kota Palembang. Penelitian ini dilakukan atas dasar keresahan yang terjadi dalam konflik ideologi masyarakat sebagai akibat dari perkembangan

industri media digital khususnya di kalangan remaja yang menggunakan berbagai macam media digital secara berlebihan sehingga memberikan dampak negatif seperti berita bohong (*hoax*), ujaran-ujaran kebencian, egosentrisme, bahkan sampai melakukan tindak-tanduk di luar batas nilai-nilai Pancasila.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Media

Pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi dalam media baru yang berdampak sangat pesat berlangsung selama ini menimbulkan keinginan publik atas informasi yang menuntut kita untuk mengerjakan pendefinisian ulang atas prinsip mengenai media yang telah hadir saat ini (Suciati, 2017). Jadi media itu sendiri sangatlah penting sebagai penyampaian informasi dan juga merupakan alat komunikasi yang baik untuk digunakan dalam keadaan apapun. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi linear dengan laju informasi berita dan pesan silih berganti laksana gelombang ombak, maka pegiat komunikasi melalui kanal-kanal media yang tersedia (Prasetyo, 2017). Oleh sebab itulah kanal-kanal media yang dimaksudkan tersebut sampai saat ini menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat sebagai media dalam berkomunikasi.

Kata media secara epistemologi ilmu berasal dari bahasa Latin "Medium" yang memiliki makna berarti "perantara" atau "alat untuk mengalihkan atau mencapai sesuatu". Dengan kata lain, media merupakan perantara dari sumber pesan (*a source*) dengan penerima pesan (*a receiver*) (Universitas Lampung, 2019). Jadi media itu sendiri merupakan perantara dalam penyampaian pesan baik dari sumber pesan maupun yang berasal dari penerima pesannya.

Berdasarkan pengertian media tersebut, maka peneliti juga dapat membagi teori dalam media itu sebagai berikut:

1. Teori media klasik. Dalam perkembangan teori ini memiliki karakteristik yang muncul dalam pemanfaatan sebaran massa historis, pengikat waktu dan ruang (Prasetyo, 2017).

2. Teori media baru. Dalam teori ini menunjukkan apabila media bukan dicerminkan dalam bentuk informasi, interaksi, ataupun masalah dalam penyebarannya, melainkan dalam bentuk kegiatan penyampaian informasi berdasarkan sumbernya, hal tersebut dimaksudkan bahwa manusia menggunakan media sebagai usaha dalam menciptakan masyarakat lewat kesepakatan serta rasa saling memiliki (Prasetyo, 2017). Akibatnya, media baru adalah sebuah konsep yang menjelaskan keterampilan media dengan dukungan berupa perangkat *digital* mampu mengakses konten apa saja, di mana saja sampai memberikan kemungkinan untuk siapa saja baik sebagai penerima atau pengguna untuk berpartisipasi secara aktif, interaktif, dan kreatif terhadap umpan balik pesan yang pada gilirannya dapat mewujudkan komunitas masyarakat “terkini” lewat isi dari media tersebut (Liliweri, 2015).

Apabila kita kaji dari segi kemajuan dalam suatu media, maka kedua teori di atas tersebut mempunyai peranan masing-masing yang tergantung dari sikap atau pola perilaku manusianya, dalam melakukan penerapan terhadap media itu sendiri. Perkembangan suatu media dapat lebih pesat seiring kemajuan teknologi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam kalangan apapun di masyarakat. Karena media dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tanpa media masyarakat seolah kehilangan sesuatu hal yang berarti dalam kehidupannya. Walaupun terkadang kajian suatu media itu sendiri untuk kebenaran wajib dipertanyakan dalam faktor kenyataannya. Media dapat diminati dan ditumbuh kembangkan dari berbagai aspek dan berbagai teknologi informasi yang telah memadai. Dahulu media itu hanya terbagi menjadi dua aspek yaitu media cetak dan media elektronik saja. Seiringnya waktu dan perkembangan pembangunan, media pun terbagi kembali dalam beberapa bagian yang lebih konkret yaitu: media cetak, media visual, dan media digital.

Pengelolaan media yang seiring waktu terus bergulir mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang berkembang

di masa yang akan datang. Diharapkan hadirnya media baru akan memperlengkap dan mempermudah akses informasi yang didapatkan oleh khalayak masyarakat, maka hendaknya masyarakat bisa lebih selektif lagi dalam menghadapi dan menerima setiap pengaruh dari perubahan pola perkembangan sikap masyarakat. Hal itu seperti yang tertera dalam teori disonansi kognitif *Festinger*, di mana salah satu teori pendekatan konsistensi kognitif yang berasumsi bahwa individu senantiasa mencari konsistensi di antara kognisi mereka, dengan melakukan perubahan sikap serta keyakinan demi mempertahankan konsistensi perilaku nyata (Hutagalung, 2018). Sehingga seseorang yang pernah menggunakan media itu sendiri baik cetak, visual maupun digital, akan lebih terbiasa secara sendirinya dalam hal perubahan pola interaksi di dalam masyarakat.

Konvergensi Media

Pemahaman terhadap konvergensi media merupakan salah satu bentuk perkembangan media massa yang melibatkan banyak faktor teknologi di dalamnya, sebagaimana Terry Flew dalam *An introduction to New Media* menyatakan bahwa konvergensi media ialah hasil dari pembagian tiga unsur *new media* yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi, serta konten media (Supadiyanto, 2020). Maka dalam hal ini, makna konvergensi memberikan dampak pada penyatuan beberapa saluran media melalui perkembangan teknologi seperti internet atau jejaring sosial, sementara itu multimedia menganggap penggunaan dari penggabungan beberapa media dalam aplikasi atau dokumen komputer yang sama juga dampak dari konvergensi media tersebut. Dalam hal ini secara umum penggabungan media ini menjadi manifestasi dari dua bentuk konvergensi: satu anantara teknologi informasi dan penyatuan saluran media konvergensi, dan konvergensi jejaring sosial (Supadiyanto, 2020). Berdasarkan terjadinya hal tersebut, maka masyarakat atau publik diberikan sebuah pilihan untuk menggunakan kajian media yang klasik atau kajian media yang baru.

Kajian media klasik yang dimaksud adalah kajian media yang pernah disampaikan pada media cetak seperti: majalah, koran bahkan media visual yang berupa televisi dan radio yang dahulunya sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia terutama di kota Palembang. Sedangkan kajian media baru itu maksudnya adalah kajian media internet/ sering dikenal dengan media sosial yang meliputi *youtube, facebook, twitter, instagram, email, gmail, google*, dan lain sebagainya terkait dengan teknologi yang ada. Dengan adanya konvergensi media ini, maka kemajuan teknologi berkembang pesat seiring banyaknya pengguna media baru tersebut. Namun dengan konvergensi media tersebut, diharapkan dapat membawa pengaruh perubahan di masyarakat secara baik dan terarah tanpa mengubah eksistensi dalam ber-ideologi negara yakni nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila

Perkembangan teknologi dalam suatu peningkatan media melalui konvergensi yang ada, maka dapat mengakibatkan perubahan terhadap pengaruh perilaku pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan pendekatan perilaku menurut Hersey dan Blanchard bahwa perilaku berorientasi pada tujuan dalam arti perilaku dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu, sehingga perilaku individu dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor yang disebabkan dari dalam diri maupun faktor yang berada di luar diri individu tersebut (Ahmad, 2013). Maka dalam hal ini, pola perilaku individu dapat berubah melalui berbagai faktor yang ada baik dari dalam maupun dari luar tergantung pada orientasi yang pernah diikutinya atau diminati oleh individu tersebut.

Pengaruh perilaku dalam konvergensi media tersebut sangatlah rentan dengan pergeseran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal itu dikarenakan ada faktor psikologi dalam berkomunikasi. Berdasarkan teori yang disebutkan sebelumnya tentang teori disonansi kognitif Festinger (Hutagalung, 2018) itu, maka dapat disimpulkan bahwa individu seseorang dalam berperilaku dapat

bertahan apabila individu itu sendiri mempunyai konsistensi untuk menggunakan sikapnya terhadap hal yang baru dihadapinya. Konvergensi media ini dapat mempengaruhi perilaku karena media tersebut mempunyai daya upaya untuk memberikan suatu dampak yang sangat baik apabila digunakan dengan baik, namun dapat berdampak sebaliknya jika media itu disalahartikan atau disalahgunakan.

Setiap perubahan pola perilaku sebenarnya hal itu sah saja, sepanjang tidak merusak nilai-nilai Pancasila yang ada. Dalam hal ini, kandungan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi dasar ideologi negara meliputi sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pada butir pertama Pancasila ini mengandung makna bahwa negara dengan Tuhan adalah hubungan sebab akibat yang secara tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung pokok negara (Kaelan, 2013).
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, butir Pancasila kedua ini merupakan pemikir besar tentang negara mendeskripsikan bahwa manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya kemanusiaan tidaklah mungkin untuk dapat dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya (Kaelan, 2013).
3. Sila Persatuan Indonesia, butir Pancasila ketiga ini menjelaskan bahwa proses terbentuknya persatuan bangsa Indonesia yang menginginkan suatu bangsa yang benar – benar merdeka, mandiri, bebas menentukan nasibnya sendiri tidak tergantung pada bangsa lain (Kaelan, 2013).
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dalam hal ini mengandung arti suatu negara demokrasi dari bangsa multikultura, multi etnis serta pluralitas dalam kehidupan agama, dan berbudaya (Kaelan, 2013).
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, butir Pancasila kelima ini tak lain adalah menjelaskan istilah

umum untuk keadilan umum dan keadilan distributif bagi seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2013).

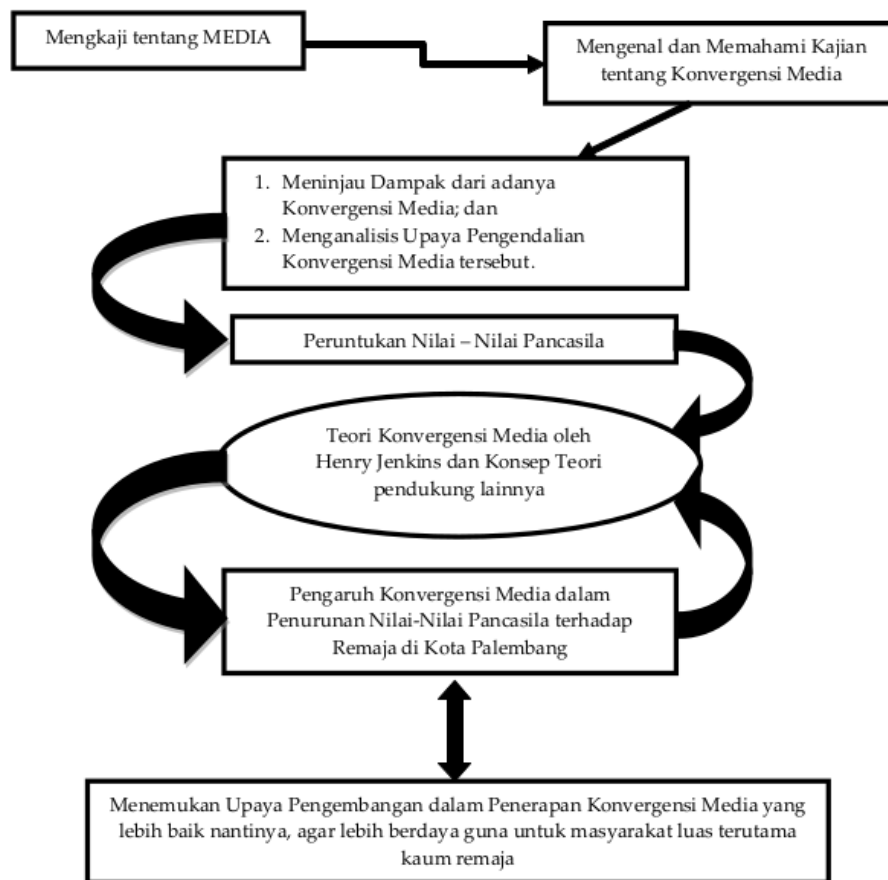
Maka dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di atas tersebut diharapkan dapat menjadi landasan atau pedoman pada pola sikap atau perilaku guna menghadapi pengaruh global dari konvergensi media yang beraneka ragam bentuk dan isinya. Menurut Sudjito dalam buku Prof. Jawahir Thontowi, memahami nilai-nilai Pancasila tersebut perlu memiliki fleksibilitas normatif dalam arti ruang lingkup hukum adat (*local*), hukum nasional, hukum internasional. Hal ini dikarenakan daya kemampuan adaptabilitasnya tidak diragukan sebagai ideologi negara dan pandangan hidup yang terbuka (Thontowi, 2016). Sehingga pemahaman nilai-nilai Pancasila ini memang harus diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya.

Remaja

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian, maka istilah remaja ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut WHO (Badan PBB untuk Kesehatan Dunia), menyatakan bahwa dikategorikan sebagai remaja adalah jika anak berusia 12 sampai dengan 24 tahun.
2. Kategori usia remaja menurut Undan –Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 adalah 10 hingga 18 Tahun.
3. Dalam buku – buku pediatri pada umumnya mendefinisikan remaja adalah apabila seorang anak telah mencapai usia 10 hingga 18 tahun untuk anak perempuan, dan usia 12 hingga 20 tahun untuk anak laki –laki.
4. Menurut Undang–Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, yang dikatakan sebagai remaja adalah individu yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum menikah.
5. Dalam Undang–Undang Ketenagakerjaan, anak dianggap remaja apabila telah mencapai umur 16 hingga 18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal.

6. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki – laki.
7. Menurut ketentuan dalam Pendidikan Nasional, anak dianggap remaja bila anak telah berumur 18 tahun, yang sesuai dengan saat lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).



Bagan 1. Alur Pemikiran

Sumber: Diolah Penulis

Metode

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data deskriptif melalui pendekatan secara studi fenomenologi. Dilakukannya penelitian ini berangkat dari

permasalahan yang terjadi dalam lingkup peristiwa yang terus berlangsung dan bisa diamati serta dieksplorasi secara nyata pada saat penelitian dilakukan. Studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam pada subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Pengertian dari fenomena adalah fakta atau peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek penelitian (Pujileksono, 2016). Dalam penelitian ini, peristiwa yang terjadi akan diamati dalam konteks kegiatan orang-orang atau kelompok yang terlibat pada penggunaan *new media* sehingga berdampak pada pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu bentuk ideologi bangsa Indonesia.

Adapun pada proses penelitian kualitatif ini juga melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data secara spesifik dari partisipan, mengumpulkan data-data lainnya yang bersumber dari berbagai informasi yang terkait dalam penelitian, mengidentifikasi secara teliti dan cermat intisari fenomena berdasarkan data yang diperoleh untuk keakuratan dan kemurnian hasil, dan menarasikan secara luas dan mendalam tentang fenomena yang diteliti sesuai dengan arti dan makna dari sudut pandang subjek penelitian (Pujileksono, 2016). Seperti halnya yang diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln dalam Mulyana (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan banyak penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan metode ini sering disebut dengan triangulasi yang dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman secara komprehensif (*holistik*) mengenai fenomena yang akan diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dari dampak konvergensi media dalam penurunan nilai-nilai Pancasila pada remaja ini dilakukan kepada beberapa siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta yang ada di kota Palembang difokuskan pada kelas 10 dan kelas 11. Hal ini dilakukan karena siswa dan siswi SMA ini merupakan generasi milenial yang paling sering menggunakan media dan dianggap paling rentan terhadap terpaan media. Sebelum dilakukan penelitian secara langsung, tim peneliti akan

melakukan observasi terlebih dahulu kepada beberapa siswa dan siswi SMA yang secara frekuensi dan kuantitas penggunaannya paling sering melalui jejaring media sosial dan media massa lainnya. Observasi daring ini dilakukan pada bulan Januari 2020, dan selanjutnya penelitian lapangan akan dilakukan pada bulan Maret-Juli 2020.

Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek di dalam penelitian adalah anak-anak usia remaja dalam rentang 15-17 tahun, dalam hal ini tergolong kategori siswa dan siswi SMA di Kota Palembang yang dipilih berdasarkan frekuensi dan kuantitas penggunaan media elektronik, sehingga paling terkena imbas dari penerimaan informasi. Selain itu, peneliti juga akan memilih sejumlah jurnalis di media cetak maupun media online yang akan memberikan informasi mengenai penerapan dari konvergensi media yang ada pada media lokal di Kota Palembang.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, baik data maupun sumber data akan diklasifikasikan menurut sifat, jenis dan sumbernya secara jelas. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (Moleong, 2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan dampak konvergensi media dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Selain itu, data primer juga di peroleh dari hasil observasi yang telah dilakukan baik sebelum maupun pada saat penelitian sedang berlangsung. Seperti halnya sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang terkait, baik dengan membaca literatur-literatur referensi terkait, pengulasan laporan-laporan penelitian, kebijakan dalam peraturan, studi perpustakaan, dan dokumen-dokumen yang berkorelasi dengan studi yang dilakukan ini. Hal ini bahwa data sekunder adalah data dari tangan kedua atau sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilakukan, seperti artikel dalam media massa, buku, teks, publikasi organisasi dan pemerintah, hasil penelitian baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Arikunto, 2002). Data sekunder seperti berbagai pendapat yang diambil melalui sumber sekunder untuk menjelaskan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal untuk menunjang penelitian ini maka dibutuhkan beberapa data yang dapat dikumpulkan melalui teknik atau cara seperti, wawancara, studi pustaka, studi lapangan, dan atau pengumpulan data-data historis. Menurut Arikunto (Arikunto, 2002) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Sama halnya dengan pendapat dari Arikunto tersebut, Krisyantono mendefenisikan metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Krisyantono, 2010). Metode pengumpulan data sangat ditentukan oleh metode penelitian, baik dalam penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Studi Pustaka (*Library Research*)** yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selain itu juga, peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi yang terkait dalam subjek penelitian di mana

dapat berupa gambar, tulisan, laporan-laporan, maupun catatan-catatan dalam media.

2. **Studi Lapangan (*Field Research*)** adalah teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 - a) Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data berdasarkan tinjauan dan pengamatan secara langsung terhadap aspek-aspek terkait. Tujuan utama pengamatan adalah untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan akibat dari konvergensi media dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada anak-anak usia remaja. Selain itu juga, dilakukan pengamatan terhadap pola tingkah laku dan ucapan dari anak-anak remaja tersebut dalam ber-media sosial.
 - b) Penyebaran angket yaitu pengumpulan data secara khusus melalui instrumen penelitian yang berupa daftar-daftar pertanyaan tertulis atau lisan (Pujileksono, 2016). Tujuan dari penyebaran angket ini adalah untuk mengetahui pendapat dari para siswa dan siswi SMA tentang dampak yang ditimbulkan dari konvergensi media di mana akses informasi masyarakat semakin luas dan tanpa ada batasan sosio-kultural didalamnya karena dianggap memberi peranan dalam penurunan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak usia remaja tersebut. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini guna menyebarkan angket adalah melalui *Probability Random Sampling* dikarena unsur dalam populasinya bersifat homogen maka teknik penentuan sampelnya dengan *Simple Random Sampling*, yaitu cara atau teknik dilakukan yang cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang ada pada setiap elemen populasi bukan hal penting bagi rencana analisisnya (Pujileksono, 2016). Dengan demikian setiap unsur populasi dalam penelitian ini mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.
 - c) Wawancara yaitu melakukan tanya – jawab langsung dengan sejumlah informan terpilih. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan tambahan informasi dan

gagasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan. Informan yang akan dipilih dan diwawancarai dalam penelitian ini akan diambil dan diseleksi dari jawaban angket yang dilakukan pada siswa dan siswi SMA dengan jawaban paling mendekati dan atau yang paling tidak mendekati pada sasaran subjek penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan wawancara pada beberapa pelaku jurnalistik di media lokal yang ada di Kota Palembang sebagai pelaku pelaksana dalam konvergensi media.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini ditentukan dengan kriteria kredibilitas. Dalam hal untuk memperoleh data yang relevan, maka peneliti melakukan uji keabsahan data hasil penelitian dengan cara berikut:

1. Melakukan pengamatan secara terus menerus pada realitas yang diteliti dalam hal ini adalah dampak dari konvergensi media sebagai sumber informasi bagi khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya situasi yang relevan dengan permasalahan penurunan nilai-nilai Pancasila bagi anak-anak usia remaja yang dalam hal ini adalah siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas IX di Kota Palembang.
2. Triangulasi data adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data tersebut (Pujileksono, 2016). Pada dasarnya, fenomena yang dicermati dalam riset ini mampu dimengerti dengan baik sehingga diperoleh data dengan kebenaran tingkat tinggi jika dilakukan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Denzin mendefinisikan triangulasi sebagai cara pengujian dalam menggabungkan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari berbagai perspektif yang berbeda (Pujileksono, 2016). Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan triangulasi sumber data.

3. Dengan menggunakan berbagai bahan referensi pendukung yang bertujuan untuk membuktikan data yang telah diperoleh dalam proses penelitian. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari wawancara akan didukung pula dengan bukti baik yang berupa transkrip wawancara, foto hasil lapangan, ataupun dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan laporan penelitian dan tema pembahasannya.

Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Pada penelitian yang dilakukan ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman (Pujileksono, 2016). Kajian data dalam studi kualitatif akan dilakukan dengan pengumpulan data berlangsung, dan setelah data diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Dalam tahapan analisis deskriptif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), Pada tahapan reduksi data, penelitian akan dimulai dengan membuat ringkasan yang telah difokuskan pada pola dan tema penelitian dengan melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dari data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahap *kedua*, dilakukan pengkodean pada setiap data yang diperoleh sehingga mudah untuk diklasifikasikan. Tahap *ketiga*, menelusuri tema dan menulis partisi pada setiap data yang dikelola sebagai sumber data.
2. Penyajian data (*Data Display*), tahapan dalam menyajikan data secara naratif yang berupa uraian data singkat, data bagan, hubungan antar kategori, dan juga kualifikasi data dengan penyesuaian antara konsep dan tema. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih memahami pada apa yang terjadi, selain itu juga dapat merencanakan kerja pada tahap selanjutnya berdasarkan pada apa yang dipahami dalam studi ini.
3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*), Tahapan akhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan dari sumber data yang telah diperoleh. Setelah semua data tersaji dan menjawab permasalahan yang

menjadi objek kajian dalam penelitian dapat dipahami dan kemudian diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan hasil dari penelitian ini dan diharapkan dapat menemukan data baru sebagai perkembangan terhadap kajian penelitian yang serupa.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini diawali dengan melakukan survei pra-kegiatan kepada remaja di Kota Palembang khususnya siswa SMA di Kota Palembang. Survei ini ditujukan untuk memetakan masalah-masalah utama yang dihadapi dalam kaitannya dengan dampak konvergensi media terhadap penurunan nilai-nilai Pancasila pada remaja di kota Palembang. Metode pelaksanaan kegiatan adalah melalui penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana dampak konvergensi media terhadap penurunan nilai-nilai Pancasila pada remaja di kota Palembang.

Tim pelaksana kegiatan akan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi kegiatan, *hand-out* yang isinya tentang materi kegiatan. Penelitian dan pengembangan teknologi mengenai dampak konvergensi media terhadap penurunan nilai-nilai Pancasila pada remaja di kota Palembang tersebut. Bentuk evaluasi adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari bahan yang dipresentasikan oleh tim pelaksana kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur respon dari peserta terhadap materi yang diberikan.

Pembahasan

Dampak yang Terjadi terhadap Konvergensi Media dalam Penurunan Nilai-nilai Pancasila pada Remaja di Kota Palembang

Kehidupan bermasyarakat semakin lama semakin maju mengikuti perkembangan pengaruh globalisasi. Ada kalanya pengaruh tersebut dapat berdampak hal yang positif namun dapat juga berdampak negatif, tergantung pada implementasi dari setiap masing-masing pihak yang menjalaninya. Dalam era digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk media massa tradisional. Hal krusial yang sering menjadi pertanyaan yakni akankah keberadaan media tradisional tergeser oleh media digital –

dalam hal ini internet (Aminuddin & Hasfi, 2020). Tidak menutup kemungkinan informasi-informasi yang selalu di dapat oleh setiap masyarakat beragam bentuk medianya, seperti halnya informasi media melalui televisi, koran dan majalah yang merupakan media lama di era sebelum teknologi berkembang dengan sangat maju. Apabila ditinjau perkembangan jaman era reformasi terhadap teknologi yang sudah mulai menunjukkan kemajuannya maka media informasi pun menjadi beragam yakni dapat melalui media internet seperti halnya: *google, facebook, instagram, whatsapp*, dan lain sebagainya.

Masyarakat yang cerdas pasti dapat memfilterisasi setiap media informasi yang hadir dalam kehidupan mereka, namun belum tentu jika masyarakat yang tertuju itu adalah kaum remaja (remaja dikategorikan sebagai khalayak paling rentan ketika berhadapan dengan media karena beberapa alasan (Herlina, 2019), di mana kaum ini selalu menginginkan hal yang baru dan penuh rasa keingintahuan yang besar sehingga tidak menutup kemungkinan banyak remaja terjerumus pada media informasi yang belum tentu benar adanya (*hoax*). *Hoax* atau sering disebut juga Hoaks adalah dunia *absurd* karena kepentingan terselubung yang dibungkus dengan sopan santun, dan mereka yang melakukan penyebaran hoaks ini juga sering mengatakan bahwa hoaks adalah fakta yang tertunda (Nurudin, 2018). Jadi apabila hoaks ini tetap dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak buruk bagi penyimak berita di dalam media tersebut. Hal itu dapat terjadi di kalangan remaja karena media khususnya media massa dapat saja menurunkan moral pemuda kita, untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana tidak ada yang mampu untuk berpikir sendiri (bertentangan dengan apa yang coba diajarkan oleh budaya) (Makow, 2017). Oleh karena itu kaum remaja dalam menghadapi informasi – informasi yang ada di setiap media massa hendaknya harus lebih selektif lagi memilih media mana yang memang kebenarannya sudah dapat terujikan dan terpercaya.

Seperti halnya bentuk-bentuk dari media massa itu sendiri beragam adanya, maka ada baiknya para remaja khususnya di kota Palembang dapat memahami hal tersebut. Media massa dapat dikategorikan sebagai berikut (Hikmat, 2018):

1. Media Cetak

Media ini merupakan media yang proses pembuatannya melalui percetakan, seperti: surat kabar, majalah, bulletin, dan sejenisnya. Jadi dalam konteksnya, media ini sangat dominan dalam kehidupan komunikasi adalah surat kabar, selain media massa lain yang posisinya tidak menonjol. Oleh karena itu pers sering disejajarkan dengan makna surat kabar.

2. Media Elektronik

Seperti halnya surat kabar, eksistensi media elektronik pun mengalami pasang surut sehingga salah satu media elektronik yang sempat merakyat adalah radio. Setelah radio ini eksis di zamannya yakni jaman orde lama, maka pada jaman orde baru sampai era reformasi sekarang ini kita telah diperkenalkan media elektronik yang bernama televisi. Jadi radio dan televisi ini merupakan media elektronik yang sangat berguna dalam penyampaian informasi berita terkini.

3. Media Sosial

Terakhir saat ini adalah media sosial, di mana media tersebut merupakan salah satu media massa dari ketiga media massa yakni media cetak dan media elektronik. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi: jejaringan sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jadi dengan adanya media elektronik ini dapat memudahkan kita untuk mendapatkan berita dari segala penjuru, dikarenakan media yang digunakan melalui jejaringan *online* yang dapat menembus batas antar negara di dunia.

Berdasarkan tiga hal di atas, maka hendaknya penggunaan media massa pun harusnya dapat lebih bijak, terutama kaum remaja yang nantinya sebagai penerus Bangsa Indonesia. Hal itu dapat disebabkan dalam konvergensi multimedia adalah digitalisasi, karena seluruh bentuk informasi maupun data diubah dari format analog ke format digital sehingga dikirim ke dalam satuan *bit* (*binary digit*), hal itu dikarenakan informasi yang dikirim merupakan format digital, konvergensi mengarah pada penciptaan produk-produk yang aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual

sekaligus komputasi (komputer dapat difungsikan sebagai pesawat televisi, atau telepon genggam dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar tiga dimensi (3G) (Supandiyanto, 2020). Sehingga masyarakat terutama kaum remaja harusnya dapat menggunakan konvergensi multimedia ini dengan sangat baik dan selektif, agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang negatif seperti halnya sebagai berikut: sejak pertengahan 2015, proliferasi dan penyebaran berita bohong atau hoaks (*hoax*), berita palsu (*fake news*), dan ujaran kebencian (*hate speech*) semakin meningkat di Indonesia, khususnya melalui situs internet dan media social (Gunawan & Ratmono, 2020). Jika ditinjau dari tiga pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh pengguna media sosial yang tidak baik tersebut, maka dapat merusak sistem tatanan budaya yang ada khususnya di Indonesia terutama kota Palembang, apabila kaum remajanya tidak dapat menfilterisasi informasi-informasi yang baik untuk di simak dan yang tidak seharusnya untuk diketahui. Setiap komunikasi yang terjadi baik itu didapatkan dari media cetak, media elektronik maupun media sosial, pastinya mempunyai pengaruh masing-masing bagi mereka yang menyimak atau menggunakan media massa tersebut.

Remaja di Indonesia khususnya di kota Palembang, sangat rentan sekali dengan istilah penggunaan media sosial. Hal itu dikarenakan, masih banyak terdapat kaum remaja yang melakukan penyebaran informasi yang terkadang tidak mengetahui juga dari mana asal usul sumber itu berada, sehingga media sosial yang mereka gunakan tersebut dapat menjadi bencana komunikasi bagi mereka sendiri di kalangan kaum remaja di kota Palembang. Bencana komunikasi ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal yakni: (Prasetyo, 2017).

a. Kebencian telah mendahului rasionalitas pesan.

Berbagai pesan yang menjadi viral dibalut dengan kebencian. Sehingga kebenaran makna sangat subyektif. Sejumlah *opinion leader* mengeluarkan pesan tanpa dibungkus kesantunan bahasa. Jadi hal ini sering kali terjadi di kaum remaja di kota Palembang, di mana kaum remaja ini suka melemparkan pesan di media sosialnya dengan bahasa mereka sehingga terkadang mengeluarkan tata bahasa yang tak patut atau tidak layak untuk disimak ataupun dibaca oleh penyimaknya

sehingga tidak jarang hal itu berdampak pada keributan di media sosial yang berujung dengan dampak ke dunia nyata.

b. Kredibilitas sumber tidak menjadi acuan.

Komunikasikan tidak lagi melihat kredibilitas sumber. Apapun yang sesuai dengan referensi dan kepentingannya, dianggap sebagai kebenaran pesan. Selanjutnya mereka bertindak sebagai *agent of viral*. Jadi bencana komunikasi yang kedua ini pun dapat juga terjadi di kaum remaja di kota Palembang, jika sering tidak menghiraukan asal-usul informasi yang didapatkan melalui media sosial.

c. Ketika argumentasi bukan sebagai solusi.

Argumentasi sebagai hak jawab (*feedback*) dalam komunikasi, dianggap sebagai lawan. Setiap hari terjadi pemutusan komunikasi (*unfriend*), hanya karena perbedaan pendapat. Jadi hal ini juga dapat terjadi di kaum remaja, apabila remaja tersebut tidak dapat melakukan argumentasi sesuai pedoman yang baik, yakni berargumentasi yang baik harus diakhiri dengan pemberian solusi atau pemecahan masalahnya.

d. Pesan hitam (*black campaign*) mendominasi pesan negatif.

Saling serang dan sikut mewarnai dua pihak. Masing-masing pihak memproduksi pesan tanpa peduli etika. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk melakukan penistaan pesan. Jadi untuk hal ke empat ini, bagi kaum remaja khususnya di kota Palembang masih jarang terjadi, hal itu dikarenakan pesan hitam (*black campaign*) dapat mengakibatkan sanksi yang berat.

Ditinjau dari empat bencana komunikasi yang ada dalam media massa terutama yang sering digunakan kaum remaja adalah media sosial, maka perlu diketahui oleh kaum remaja bahwa media sosial merupakan sarana interaksi antara sejumlah orang melalui "*sharing*" informasi dan ide-ide melalui jaringan internet untuk membentuk semacam komunitas virtual (Liliweri, 2015). Adapun dari segi aplikatif media sosial mempunyai beberapa karakteristik (Liliweri, 2015) yang dapat dipahami oleh kaum remaja di kota Palembang, yakni sebagai berikut:

1. Meliputi berbagai format konten termasuk teks, video, foto, audio, PDF dan *Power Point*, artinya para pengguna

- dapat memilih variasi media sosial dalam rangka pembentukan konten.
2. Memungkinkan interaksi yang melintasi satu atau lebih *platform* melalui *sosial sharing*, *e-mail*, dan berbagi *feed*.
 3. Melibatkan berbagai tingkat keterlibatan peserta yang dapat membuat komentar atau mengintai melalui jaringan media sosial.
 4. Memfasilitasi peningkatan kecepatan dan luasnya penyebaran informasi.
 5. Menyediakan komunikasi *one-to-one*, *one-to-many*, and *many-to-many*.
 6. Memungkinkan komunikasi dilakukan secara *real time* atau *asynchronous* dari waktu ke waktu.
 7. Sebagai "*device indifferent*" dengan bantuan komputer (termasuk laptop dan *net-book*), tablet (termasuk *iPads*, *iTouch* dll) dan Ponsel (khususnya *smartphone*).
 8. Memperluas keterlibatan pengguna untuk bersama-sama menciptakan peristiwa secara *real-time*, juga untuk memperluas interaksi *online/ offline* atau menambah acara *live online*.

Dengan adanya karakteristik di atas tersebut, maka diharapkan kaum remaja khususnya di kota Palembang dapat menggunakan media massa terutama media sosial dengan koridor atau batasan yang telah diberlakukan, sehingga terhindar dari pengaruh penurunan nilai-nilai Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan, terdapat dua macam norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yaitu norma hukum dan norma moral atau etika (Kaelan, 2013). Jadi dengan keterkaitan nilai-nilai Pancasila yang ada, maka apabila kaum remaja di kota Palembang tidak dapat mengimplementasikan media sosial tersebut dengan baik dan bijak sesuai aturan yang berlaku, maka kaum remaja itu sendiri dapat terjerumus dalam penurunan nilai-nilai Pancasila terutama nilai etika.

Upaya Pengendalian Terhadap Konvergensi Media, agar Tidak Terjadinya Penurunan Nilai-nilai Pancasila Pada Remaja Di Kota Palembang

Setelah peneliti memahami konvergensi media pada remaja di kota Palembang, maka dapat diketahui banyak terjadi pelanggaran yang berdampak pada penurunan nilai-nilai Pancasila. Padahal jika kita tinjau dalam suatu komunikasi sangatlah diperlukan karena hidup bermasyarakat perlu halnya komunikasi agar terhindar dari makna terisolasi terhadap peradaban dunia. Namun perkembangan komunikasi ini sangatlah rentan, bila tidak diimbangi dengan batasan nilai-nilai ideologi negara yakni Pancasila.

Dalam perkembangannya ideologi itu sendiri mempunyai tiga dimensi sifat ideologi yaitu (Juliardi, 2018):

1. Dimensi Realitas

Nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.

2. Dimensi Idealisme

Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.

3. Dimensi Fleksibilitas

Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

Berdasarkan perkembangan tiga dimensi ideologi di atas tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri beraneka ragam bentuknya dimulai dari nilai keagamaan sampai nilai hukum/ keadilan. Oleh karena itu komunikasi yang diterapkan dalam konvergensi media ini perlu diberikan juga batasan. Menurut teori-teori komunikasi yang ada

seperti teori pembelajaran sosial yang merupakan sebuah teori dari bidang psikologi dalam perspektif *behavioristik* yang mempelajari dampak media massa, khususnya menganalisis kemungkinan dampak kekerasan yang ditayangkan di televisi (Hutagalung, 2018), ataupun internet. Jika kita meninjau dari teori pembelajaran sosial tersebut, maka kaum remaja di kota Palembang pun seharusnya lebih berhati-hati dalam menanggapi suatu komunikasi ataupun pemberitaan di media massa terutama dari media sosial yang sering digunakan kaum remaja saat ini.

Adapun pembatasan lainnya adalah melakukan etika komunikasi terhadap penggunaan media sosial. Etika memiliki peran penting dalam komunikasi, melalui etika maka tindakan komunikasi diarahkan menjadi tindakan yang dilakukan secara otonom dan bebas, namun bertanggung jawab (Junaedi, 2019). Hal ini dapat dilakukan dengan tiga pendekatan etika (Junaedi, 2019) yang meliputi:

1. Etika Deskriptif

Adalah pendekatan yang menggambarkan tingkah laku moral, seperti halnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Jadi dalam hal ini kaum remaja hendaknya dapat melakukan suatu kebiasaan yang baik untuk dapat diikuti seperti mengikuti pola sikap penggambaran yang baik dan patut untuk ditiru atau diikuti.

2. Etika Normatif

Merupakan pemberian penilaian terhadap perilaku manusia. Jadi etika normatif ini hendaknya juga kaum remaja dalam melakukan komunikasi melalui media massa dan memberikan penilaian terhadap perilaku manusia yang sesuai kaedah sopan santun sehingga orang yang dinilai tidak mudah untuk tersinggung.

3. Meta Etika

Hal ini dianggap tingkat lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu dapat berupa ucapan-ucapan etis. Jadi dalam hal ini juga diharapkan kaum remaja khususnya di kota Palembang dapat lebih cermat menggunakan ucapan-ucapan yang

layak dan etis atau yang sangat santun sehingga dalam berkomunikasi tidak menimbulkan suatu yang buruk.

Berdasarkan pembatasan etika dalam berkomunikasi, diharapkan kaum remaja khususnya di kota Palembang dapat lebih memahami satu sama lainnya agar terhindar dari suatu bentrokan/perpecahan dalam masyarakatnya. Adapun upaya lainnya yang dapat dilakukan kaum remaja untuk menghadapi pengaruh konvergensi media ini adalah sebagai berikut (Prasetyo, 2017):

1. Setiap menerima pesan lakukan pengecekan ulang (*cross check*) terhadap kredibilitas sumber. Jika sumber memiliki akuntabilitas, maka silakan anda memutuskan, apakah menerima atau menolak pesan.
2. Kalau anda sudah mengetahui siapa pembuat pesan, langkah selanjutnya apakah sesuai dengan referensi dan peminatan? Langkah ini menjadi penting, karena akan memutuskan anda berada di pihak mana. "*Hilangkan rasa penasaranmu karena itu bukan urusanmu*". Sikap menghindari (*withdrawal*) pesan akan menempatkan anda sebagai sosok yang selektif dalam menerima pesan.
3. Asah kemampuan *nonverbal* anda dalam menangkap kebenaran makna pesan. Meskipun anda menjadi seorang prasangka (*prejudice*) namun ini akan menyelamatkan anda dari bencana komunikasi.

Apabila kaum remaja telah melakukan ke empat hal di atas tersebut, maka dapat menciptakan kaum remaja yang selektif terhadap pengaruh konvergensi media.

Konvergensi media yang baik dalam berkomunikasi hendaknya dapat memberikan pengalaman seperti:

1. Sebagai landasan penyampai informasi,
2. Sebagai komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens,
3. Sebagai penanda pemberi intruksi atau petunjuk,
4. Sebagai penyaring atau pembagi pengalaman dan fokus terhadap orang lain,
5. Sebagai cermin yang merefleksikan diri, dari penghalang yang menutupi kebenaran. (Riyadh, 2018)

Jadi apabila media dalam komunikasi ini telah terbangun dalam struktur yang baik dan benar adanya, maka penggunaanya

pun baik kaum remaja atau masyarakat akan lebih bijak untuk menjalaninya.

Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan di atas tersebut, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dampak yang terjadi terhadap Konvergensi Media dalam Penurunan Nilai-nilai Pancasila pada Remaja di Kota Palembang adalah penyebaran berita bohong atau hoaks (*hoax*), berita palsu (*fake news*), dan ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini dapat terjadi apabila kaum remaja tidak dapat melakukan selektif terhadap yang mereka gunakan dalam suatu media massa terutama media sosial.
2. Upaya Pengendalian Terhadap Konvergensi Media, agar Tidak Terjadinya Penurunan Nilai-nilai Pancasila Pada Remaja Di Kota Palembang dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni meliputi: menjaga sikap etika dalam berkomunikasi, dan memahami penggunaan media sosialnya seperti menerima pesan lakukan pengecekan ulang (*cross check*) terhadap kredibilitas sumber, sikap menghindari (*withdrawal*) pesan akan menempatkan anda sebagai sosok yang selektif dalam menerima pesan, dan Asah kemampuan *nonverbal* anda dalam menangkap kebenaran makna pesan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Syarwarni. (2013). *Ketahammalangan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Felicha.
- Aminuddin, A. Taqwim & Hasfi, N. (2020). Konvergensi Media Surat Kabar Harian Lokal Jateng Pos. *Jurnal Kajian Jurnalisme*. Volume 03 Nomor 02. <http://journal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/25070> diakses pada tanggal 30 April 2020.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit: Rineka Cipta.
- Darmastuti, Rini. (2013). *Mindfulness dalam Komunikasi antar Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Buku Litera.

- Dudi Iskandar. (2018). *Konvergensi Media; Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme*. Yogyakarta: Penerbit Andi. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/comm/article/download/881/pdf_17a diakses pada tanggal 30 Desember 2019
- Gunawan, Budi & Ratmono, B.M. (2020). *Kebohongan Di Dunia Maya (Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Hartono, Yudi, dan Esthi Puspitasari. (2013). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Sejarah Madiun Berbasis Kemandirian Belajar Mahasiswa. *Agasty: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*.
- Herlina, Dyna. (2019). *Literasi Media (Teori dan Fasilitasi)*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Hikmat, Mahi M. (2018). *Jurnalistik (Literary Journalism)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta
- Hutagalung, Inge. (2018). *Teori – Teori Komunikasi dalam Pengaruh Psikologi*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Juliardi, Budi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Disesuaikan dengan Kepdirjen Dikti No.43 Tahun 2006 tentang Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan UUU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)*, Depok : Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Junaedi, Fajar. (2019). *Etika Komunikasi Di Era Siber (Teori dan Praktik)*. Penerbit: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Krisyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Riset Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Lemhannas RI. (2013). *Materi Nilai – Nilai Ideologi Pancasila Tahun 2013 Berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas Nomor SPRIN/69/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013*.
- Liliweri, Alo. (2015). *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.

- Makow, Henry. (2017). *Hoax yang Kejam (Cara Zionisme Mengubah Perempuan Menjadi Maskulin dan Laki – Laki Menjadi Feminin dengan Tujuan Menghancurkan Identitas Kemanusiaan)*. Jakarta. Penerbit PT Ufuk Publishing House.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. (2018). *Media Sosial (Agama Baru Masyarakat Milenial)*. Malang. Penerbit: Intrans Publishing.
- Prasetyo, Catur. (2017). *Bencana Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Pranaya.
- Priatna, Tedi. (2018). *Membangun Karakter Bangsa (Internalisasi Nilai – nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional)*. Bandung: Penerbit CV. Insan Mandiri. <http://digilib.uinsgd.ac.id/16413/1/Buku%20Membangun%20Karakter%20Bangsa.pdf> diakses pada tanggal 28 Desember 2019
- Pujileksono, Sugeng. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi: Kualitatif*. Malang: Penerbit Intrans Publishing.
- Riyadh, Ahmad. (2018). *Pengantar Hukum Media*, Sidoarjo. Penerbit Indomedia Pustaka.
- Shoelhi, Mohammad. (2015). *Komunikasi Lintas Budaya dalam Dinamika Komunikasi Internasional*. Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media.
- Subiakto, Henry & Ida, Rachmah. (2015). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Suciati. (2017). *Teori Komunikasi dalam Multi Perspektif*. Yogyakarta: Penerbit Buku Litera.
- Supadiyanto. (2020). *Pengantar Jurnalisme Konvergen (Menjawab Tren Industri Media Digital)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Thontowi, Jawahir. (2016). *Pancasila dalam Perspektif Hukum (Pandangan Terhadap Ancaman “The Lost Generation”)*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Universitas Lampung. (2011). *Jurnal Universitas Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/12294/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KARET “MANTARMAS” MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK DI DESA TALANG IPUH KABUPATEN BANYUASIN

Gita Isyanawulan, Yulasteriyani, Yosi Arianti

Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Aktivitas ini berusaha untuk membuat kelompok masyarakat tersebut menjadi termotivasi, mampu memberikan kesadaran akan potensi lokal yang dimiliki yang kemudian dipraktikkan dalam sebuah tindakan yang nyata, sehingga masyarakat menjadi mandiri (Hadi, 2015). Salah satu pemberdayaan pelaku (kelompok petani karet) dilaksanakan melalui bantuan peralatan produksi, pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan dapat meningkatkan hasil panennya sehingga kebutuhan hidup para petani dapat terpenuhi.

Persebaran perkebunan karet rakyat di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Banyuasin Kecamatan Suak Tapeh. Menurut data Badan Pusat Statistik (Banyuasin Dalam Angka 2019) Kabupaten Banyuasin mencatat di tahun 2018 lalu luas wilayah perkebunan karet diangka 7.638 Ha dengan hasil produksi 6000 ton, jumlah ini terus bertambah di tahun 2019 yakni 11.856 Ha dengan jumlah produksi 7.210 ton. Kecamatan Suak Tapeh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari

sebelas desa yang salah satunya Desa Talang Ipuh dan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya merupakan pekebun/petani karet rakyat. Pada tahun 2014 mulai berdiri gapoktan karet rakyat mantarmas di Desa Talang Ipuh yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin. Hingga tahun 2021 perkembangan gapoktan karet rakyat ini sudah menyeluruh setiap Desa di Kecamatan Suka Tapeh dan bertahan sampai sekarang. Gapoktan Mantarmas Merupakan salah satu Gapoktan yang pernah mendapatkan juara pertama dalam pengelolaan usahanya yang diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.

Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang saling bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan dan juga produktivitas hasil karetnya (Sandyatma, 2012). Gabungan kelompok tani (Gapoktan) didirikan karena memiliki rasa: (1) Kebersamaan; (2) Memiliki usaha yang sama yaitu bidang perkebunan sehingga menjadi tanggungjawab bersama; (3) Gapoktan memiliki susunan pengurus yang merupakan hasil musyawarah (kesepakatan bersama); (4) Memiliki visi dan misi yang sama; (5) Memiliki kegiatan rutin, seperti pelatihan, rapat yang dilakukan minimal sebulan sekali; (6) Mendapatkan apresiasi dari aparat desa setempat dan juga tokoh masyarakat (Fidyansari & Pur, 2015). Adapun dana bantuan modal usaha bisa diberikan dalam bentuk pinjaman maupun koperasi. Pinjaman yang diberikan dapat dibayarkan dengan cara dicicil. Pinjaman ini juga diberikan secara perorangan maupun kelompok. Menurut Margolang (2018), konsep pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan kemandirian, partisipatif, perluasan kerja dan juga rasa keadilan. Secara konseptual, kata pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kekuasaan. Hal ini dikarenakan kekuasaan selalu dikaitkan dengan usaha seseorang dalam mempengaruhi orang lain, agar dapat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu mengurangi masalah sosial, seperti kemiskinan yang merupakan akar dari berbagai masalah yang ada (Arfianto & Balahmar, 2014).

Adapun beberapa model pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan usaha mengatasi masalah sosial menurut Marie Weil dan Dorothy N. Gamle, antara lain: (1) Hubungan masyarakat dengan lingkungan, di mana dalam masyarakat terdapat struktur sosial yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Hubungan ini berkaitan dengan berbagai aktivitas, seperti kepemimpinan; dan (2) Adanya proses pengembangan hubungan masyarakat, seperti mediator ataupun fasilitator pemberdayaan masyarakat. Adanya kedua model tersebut diharapkan masyarakat mampu memiliki kemandirian dalam berusaha sehingga dapat tercipta kesejahteraan sesuai yang dikehendaki (Nurmuslimah et al., 2020). Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pemberdayaan kelompok tani karet melalui penguatan modal usaha kelompok (studi pada gapoktan mantarmas di Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh).

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan dan perlu diberdayakan. Kelompok rentan di sana adalah kelompok masyarakat yang masih termasuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk lepas dari keterpurukan dan juga keterbelakangan. Adanya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan masyarakat mampu untuk berdaya, keluar dari garis kemiskinan, dan menjadi lebih sejahtera (Poncokusumo et al., 2011).

Menurut Bank Dunia, pemberdayaan masyarakat merupakan aktivitas di mana didalamnya terdapat peluang bagi kelompok rentan ataupun miskin untuk berani memberikan pendapat dalam menyampaikan suatu ide yang berguna bagi kelompok maupun diri mereka sendiri. Ide di sini bisa berasal dari pengalaman, keterampilan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain maupun salah satu dari kelompoknya. Ide atau gagasan tersebut dapat membantu keluarga ataupun kelompok rentan lainnya agar keluar dari garis kemiskinan (Haris, 2014). Pemberdayaan masyarakat dapat

dikembangkan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok agar dapat mengembangkan hasil karetnya secara partisipatif, sehingga timbullah kemandirian di diri para petani.

Penguatan Modal Usaha

Modal di sana dapat diartikan sebagai bantuan dana atau pinjaman dari pemerintah kepada kelompok masyarakat (dalam hal ini gapoktan) ataupun pinjaman yang diberikan oleh gapoktan kepada anggotanya (dalam hal petani karet). Namun bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah seringkali justru tidak merata. Ketidakmerataan ini menyebabkan para petani karet menjadi kekurangan modal, sehingga tidak dapat mengembangkan perkebunannya. Adanya permasalahan tersebut, maka gapoktan berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada para petani baik bantuan berupa materiil maupun non materiil (Gamarudin, 2009). Penguatan modal usaha dapat dikatakan berupa bantuan materiil dan non materiil. Bantuan materiil berupa bantuan modal usaha, berupa pinjaman yang diberikan oleh gapoktan kepada para anggotanya. Lalu bantuan non materiil ini dapat berupa melakukan kunjungan ke berbagai tempat, seperti dinas-dinas pertanian dan perkebunan, perusahaan dan juga pabrik-pabrik karet; dan juga memberikan pelatihan dan keterampilan untuk menambah wawasan dan juga pemahaman bagi para petani (Poncokusumo et al., 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini menurut peneliti merupakan pendekatan yang sesuai untuk melihat dan menggambarkan proses pemberdayaan petani karet melalui penguatan modal usaha kelompok tani. Data dikumpulkan dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara, yang sebelumnya telah melakukan observasi di lapangan terlebih dahulu (Chavez et al., 2007). Pengumpulan data penelitian ini digali dari *key informan* yaitu Kepala Desa, ketua gapoktan, anggota gapoktan dan stakeholder. Sementara itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Cresswell, 2000). Secara umum, analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, (2003) melalui tiga tahapan analisis data, yaitu: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lalu dalam penelitian ini akan melakukan *focus group discussion* (FGD) kepada Kepala Desa, ketua Gapoktan, anggota Gapoktan, dan *stakeholder* (perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh, di mana penentuan informan dilakukan menggunakan metode *purposive*, sehingga didapatkan 13 orang informan yang terdiri dari 3 Kepala Desa, 1 Ketua Gapoktan, 5 anggota gapoktan dan 2 *stakeholder*, dengan menitikberatkan pada aktivitas gapoktan dalam upaya melakukan pemberdayaan kepada anggotanya berkaitan dengan penguatan modal usaha. Penentuan informan tersebut dianggap representatif dan dianggap mampu menjamin kebenaran penelitian atau kesahihan data.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal untuk meningkatkan perekonomian para petani karet yang ada di Desa Talang Ipuh, maka dibentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karet. Gapoktan karet di Desa Talang Ipuh diberi nama "Mantarmas" dan berjumlah 5 kelompok, yang dibagi berdasarkan jumlah dusun. Tujuan awal dibentuknya Gapoktan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para petani di Desa Talang Ipuh dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap para petani tersebut. Adapun tujuan dari dibentuknya Gapoktan Mantarmas ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dalam hal ini pendapatan, sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup bagi para petani karet. Keberfungsian Gapoktan ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan para petani untuk menjual hasil perkebunan berupa getah karet. Hal ini dilakukan agar mendapatkan nilai jual getah karet yang lebih tinggi, apabila dilakukan secara berkelompok.

Bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para anggota Gapoktan yaitu dengan memberdayakan para anggotanya dengan cara menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait dengan kebutuhan para petani, seperti menyediakan bak-bak yang digunakan sebagai wadah penampung getah karet, membuat siring untuk pembuangan limbah kadar air yang keluar dari getah karet, pelatihan terkait pengelolaan getah karet menjadi konblok dan pembuatan bahan mentah menjadi ban mobil dengan kerja sama PT Baristand Industri Palembang. Kerja sama ini menghasilkan bantuan berupa alat yang dipergunakan untuk mengukur kadar lateks getah karet. Lalu kegiatan lainnya yaitu adanya kerja sama dengan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin di mana getah karet dipergunakan sebagai bahan aspal. Serta kerja sama dengan Perusahaan yang terletak di daerah Jambi dan Palembang terkait dengan pemasaran getah karet, terutama berkaitan dengan kenaikan harga jual. Hasil yang terlihat dari gapoktan ini adalah Juara Pertama di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Banyuasin.

Program Kerja Gapoktan Mantarmas dalam Meningkatkan Keterampilan Petani

Gapoktan merupakan salah satu bentuk kelompok yang terdiri dari para petani, yang memiliki peran untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan para petani, khususnya berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah selama ini dirasakan tidak merata, sehingga untuk meminimalisir terjadinya berbagai bentuk permasalahan yang timbul akibat ketidakmerataan ini, maka dibentuklah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan ini pada dasarnya terdirinya dari beberapa kelompok tani yang memiliki visi dan misi yang sama, misalnya Gapoktan Karet "Mantarmas", yang memiliki tujuan mensejahterahkan para petani karet yang ada di Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.

Gapoktan memiliki susunan pengurus di mana terdapat ketua, sekretaris, bendahara dan juga anggota. Gapoktan memiliki tanggungjawab mengawasi para petani dengan melakukan beberapa hal, seperti: mencatat berbagai kebutuhan para petani karet, terutama

yang berkaitan dengan keperluan perkebunan; dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani, baik yang berkaitan dengan kebutuhan materiil maupun non materiil (Adryani Moento et al., 2020). Selain itu, Pemerintah juga memiliki harapan yang cukup besar dengan adanya Gapoktan tersebut. Gapoktan diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang baru kepada para petani, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat adanya penemuan yang baru (inovasi). Pengetahuan yang diberikan diharapkan mampu mengubah pola pikir para petani yang selama ini cenderung tidak menerima adanya perubahan, misalnya selama ini petani melakukan pembakaran lahan terhadap lahan yang dianggap sudah tidak produktif, dan sekarang pemerintah melarangnya dan cukup dengan menebangnya saja.

Para petani karet yang ada di desa Talang Ipuh awalnya sulit menerima berbagai informasi yang baru terutama yang berkaitan dengan *replanting*, pola tanam yang dianggap lebih mudah dan juga menguntungkan, bibit karet yang berkualitas, dan juga pupuk serta obat-obatan untuk mengatasi hama tanaman karet. Oleh sebab itu, gapoktan secara perlahan-lahan menjelaskan dan juga mempraktekan secara langsung informasi tersebut, sehingga para petani lebih percaya. Kegiatan tersebut penting dilakukan agar mampu meyakinkan para petani karet, sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. Adanya gapoktan juga dapat memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan juga saling bertukar pengalaman yang berkaitan dengan peningkatan hasil perkebunan, sehingga dapat mengubah pola pikir para petani untuk lebih maju. Para petani juga dapat meningkatkan perekonomian dengan adanya inovasi yang baru, sehingga diharapkan petani lebih untuk dan lebih sejahtera. Adapun berbagai kegiatan yang diberikan oleh Gapoktan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani karet. Kegiatan yang diberikan diharapkan mampu memberikan motivasi sendiri bagi para petani, misalnya dengan melakukan pertemuan rutin dengan para anggota Gapoktan serta pihak terkait lainnya.

Para anggota Gapoktan rutin melakukan pertemuan dengan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti PPL (Penyuluh Pertanian

Lapangan), serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi. Pertemuan tersebut biasanya dilakukan sebulan sekali. Materi yang diberikan misalnya tentang cara menanggulangi hama daun kuning, rayap dan ulat, cara tanam karet yang baik, dimulai dari proses tanam hingga teknik menyadap yang benar sehingga tidak merusak kulit kayu dari tanaman karet tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang informasi terbaru terkait pelatihan maupun hanya sekedar berbagi pengalaman. Selain itu, dimungkinkan juga yang memberikan materi adalah anggota Gapoktan itu sendiri. Hal ini dikarenakan anggota Gapoktan tidak hanya berasal dari Desa Talang Ipuh saja, melainkan berasal dari desa lainnya, seperti Desa Terentang, Desa Pulau Rajak, Desa Petaling, dan Desa Air Senggeris.

Dalam pertemuan rutin itu juga seringkali membahas tentang berbagai persoalan yang sering dihadapi oleh para petani karet. Untuk memecahkan masalah tersebut, seringkali Gapoktan mengajak PPL untuk menyelesaikannya. Persoalan tersebut terutama yang berkaitan dengan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan keterampilan para petani.

Berbagai Usaha yang Dilakukan oleh Gapoktan dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan para Petani

1. Melakukan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Gapoktan yang biasanya dilakukan setahun sekali. Tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah menambah pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi para petani, dan diharapkan mampu untuk menerapkan inovasi dari hasil kunjungan kerja tersebut. Adapun kunjungan kerja yang pernah dilakukan oleh gapoktan mantarmas, antara lain:

- a. Tahun 2020 pernah melakukan kunjungan dan pembinaan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi
- b. Tahun 2020 pernah melakukan kunjungan ke PT Indo Acidatama Tbk
- c. Tahun 2020 pernah melakukan kunjungan dan kerja sama dengan PT Frima Grup
- d. Tahun 2019 pernah melakukan kunjungan ke BPP Lampung

- e. Tahun 2019 melakukan kunjungan kerja, diharapkan agar pengetahuan anggota gapoktan Mantarmas terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan produksi karet, serta penggunaan teknologi dalam pengolahan getah karet semakin meningkat. Selain itu dengan adanya kerja sama baik dengan Pemerintah Daerah setempat maupun dengan PT ataupun Pabrik lainnya dapat melindungi petani, terutama berkaitan dengan harga jual karet yang seringkali naik-turun, sehingga tidak merugikan para petani karet. Harga karet seringkali dipengaruhi oleh harga pasar Internasional. Apalagi kualitas getah karet Indonesia seringkali dikatakan di bawah negara-negara lainnya.

2. Memberikan Keterampilan berupa Berbagai Pelatihan

Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Gapoktan untuk merubah pola pikir para petani yang selama ini tradisional (cenderung monoton) untuk dapat menerima berbagai inovasi yang baru, dan juga memperkenalkan teknologi dalam pengolahan karet, agar kualitas karet yang dihasilkan lebih baik dan proses penyadapan getah karet juga semakin cepat tanpa merusak pohon karet tersebut (Prawoto, 2012). Adapun pelatihan yang pernah dilakukan oleh gapoktan Mantarmas, antara lain:

- a. Tahun 2019 Pelatihan hilirisasi karet, kerja sama antara Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dengan Baristand Industri Palembang.
- b. Tahun 2019 pelatihan tentang peragaan uji kadar karet kerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Tahun 2018 Pelatihan tentang pemupukan tanaman karet kerja sama antara PT Wilmar Chemical Indonesia dan CV Mitra Agro Permai

Dengan mengikuti berbagai macam pelatihan tersebut diharapkan para petani dapat meningkatkan keterampilan dan juga mampu mengubah pola pikir yang selama ini cenderung monoton serta mampu memberdayakan anggotanya sehingga menjadi petani karet yang mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Peran Gapoktan dalam Memenuhi Kebutuhan Modal Bagi Para Petani Karet

Gapoktan memiliki peran sebagai mediator (pihak ketiga) yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh para petani. Selain itu, Gapoktan Mantarmas juga berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan para anggotanya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan materiil maupun non materiil. Adapun caranya:

- a. Gapoktan melakukan koordinasi dengan para petani karet terkait dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan, misalnya cara untuk mendapatkan bibit karet yang berkualitas, serta pupuk dan juga racun hama tanaman. Koordinasi perlu dilakukan mengingat banyak persoalan yang timbul disebabkan ketidakmerataan penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah yang berkaitan dengan bibit karet bervariasi unggul, pupuk serta racun hama tanaman. Maka diperlukannya Gapoktan yang juga berperan sebagai mediator yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh para petani, terutama petani karet. Salah satunya yaitu gapoktan Mantarmas berkoordinasi dengan gapoktan lainnya yang berada ditingkat dusun untuk mencatat kebutuhan para petani supaya bantuan pemerintah dapat dinikmati petani dan juga tepat sasaran. Adapun bantuan yang diberikan berupa bibit karet varietas unggul, pupuk, cuka para yang digunakan untuk “memasak” getah karet dan juga obat-obatan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu meringankan biaya yang dikeluarkan oleh para petani karet. Selain itu, bantuan ini juga dapat memberikan signal yang positif bahwa pemerintah peduli dan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan para petani karet. Bantuan ini kemudian diawasi juga oleh PPL dari Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin.
- b. Gapoktan Mantarmas juga memiliki program kredit usaha yang diperuntukkan bagi anggotanya. Bantuan ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi para petani karet yang memerlukan modal untuk meningkatkan usahanya. Bantuan

modal usaha ini berupa pinjaman yang diberikan oleh gapoktan kepada anggotanya. Pinjaman yang diberikan ini berupa uang dengan nominal maksimal 1 juta rupiah dengan masa kreditnya selama 3 bulan. Modal pinjaman ini berasal dari iuran sukarela yang dilakukan tiap minggu dengan besaran Rp 25,00/kg dari banyaknya getah karet yang dihasilkan oleh para petani. Iuran ini dibebankan kepada anggota gapoktan untuk membayar sejumlah kegiatan, misalnya biaya jaga malam, upah panita lelang karet, dan simpanan anggota apabila ada yang membutuhkan. Jaga malam dilakukan untuk menjaga getah karet yang telah terkumpul tidak dicuri oleh orang lain.

Berbagai Usaha Gapoktan Untuk Meningkatkan Nilai Jual Karet

Gapoktan merupakan salah satu lembaga ekonomi di tingkat desa yang berfungsi membantu para petani karet di Desa Talang Ipuh untuk meningkatkan potensi lokal, yaitu dengan meningkatkan harga jual getah karet. Seringkali harga karet ditentukan berdasarkan harga pasar di tingkat internasional, menyebabkan harga tersebut sering mengalami naik-turun. Untuk menekan harga jual getah karet semakin menurun, maka Gapoktan melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga jual karet. Upaya tersebut diantaranya:

- a. Gapoktan membeli hasil perkebunan berupa getah karet dari anggota Gapoktan dengan harga yang layak. Harga karet ditentukan berdasarkan lelang yang dilakukan oleh ketua gapoktan dengan PT ataupun pabrik karet yang berada di sekitar Palembang-Jambi. Lelang karet ini dilakukan melalui telepon seluler, via whatsapp maupun panggilan lainnya, seperti *video call* dengan para calon pembeli. Lalu calon pembeli yang mampu menawar dengan harga yang paling tinggi itulah yang nantinya akan menjadi pembelinya.
- b. Gapoktan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk membeli hasil getah karet dari petani dengan harga jual yang tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para petani. Getah karet ini juga dapat diolah yang kemudian menghasilkan aspal.

Berbagai upaya di atas dilakukan oleh Gapoktan Mantarmas untuk meningkatkan produktivitas serta nilai jual getah

karet, sehingga harapan petani untuk menjadi lebih sejahtera menjadi tercapai.

Kesimpulan

Tujuan dari dibentuknya Gapoktan adalah untuk memberdayakan para petani karet agar lebih berdaya dan mandiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan membuat para petani karet lebih sejahtera. Selain itu, Gapoktan diharapkan juga dapat berperan sebagai mediator yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami oleh para petani karet, dan juga dapat melakukan koordinasi terkait dengan harga jual getah karet kepada para pengusaha. Hal ini dilakukan agar para petani karet mendapatkan harga jual getah karet yang tinggi.

Berbagai usaha dilakukan oleh Gapoktan untuk memenuhi kebutuhan para petani karet, baik kebutuhan materiil maupun non materiil. Adapun kebutuhan materiil di sana adalah bantuan modal usaha, berupa pinjaman yang diberikan oleh gapoktan kepada para anggotanya. Pinjaman ini didapatkan dari potongan yang dibebankan kepada anggota tiap minggunya. Selain itu, bantuan non materiil di sana berupa kegiatan kunjungan kerja yang telah dilakukan ke berbagai daerah, termasuk kerja sama dengan berbagai PT ataupun pabrik dari berbagai daerah. Lalu adanya pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota gapoktan untuk meningkatkan kualitas diri para anggotanya.

Daftar Pustaka

Adryani Moento, P., Kusumah, R., Betaubun, A., Oja, H., Ilmu Administrasi Negara, J., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., Musamus, U., Agroteknologi, J., & Pertanian, F. (2020). Penguatan Kelompok Usaha Tani Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(1), 25–34. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/2782>

- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Chavez, C., Manzano, J., & Creswell, J. W. (2007). *Choosing Among Five Approaches Choosing Among Five Approaches*.
- Cresswell, J. (2000). *Determining Validity in Qualitative Inquiry*. 39(3).
- Fidyansari, D., & Pur, R. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 3(1), 1–13.
- Gamarudin, O. (2009). *Analisis Manfaat Bantuan Penguatan Modal Usaha Bagi Kelompok Tani Agribisnis Kedelai di Kabupaten Keerom Provinsi Papua*.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, 1987, 1–14.
- Haris, A. (2014). *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*. XIII(2).
- Margolang, N. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2003). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE.
- Nurmuslimah, S., Saidatin, N., & Bagus, P. (2020). *International Journal of Recent Technology and Applied Science*. 2(July), 1–5. <https://scholar.archive.org/work/2jwzgzcz5nh3bpfbv7t2d55aq/access/wayback/https://lamintang.org/journal/index.php/ijortas/article/download/128/108>
- Poncokusumo, K., Malang, K., Imron, I., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2011). MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (*Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan* ,. 2(3), 485–491.
- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 121–134. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.276.2012>
- Sandyatma, Y. H. (2012). *Pangan Masyarakat di Kabupaten Bogor*. 2(3).

BAB V

DINAMIKA ISU-ISU SOSIAL POLITIK KONTEMPORER ILMU KOMUNIKASI

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN GENERASI Z

Safitri Elfandari

Pendahuluan

Komunikasi interpersonal, atau dikenal juga dengan komunikasi antar pribadi, yakni komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas menciptakan dan berbagi makna satu sama lain dalam suatu hubungan (Seiler & Biel, 2008). Komunikasi sendiri terjadi dalam semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi interpersonal dapat dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti oleh sang penerima pesan dan mendapat *feedback* dengan sebuah tindakan atau kesan yang kemudian dapat meningkatkan hubungan antar pribadi (Hardjana, 2003). Saat ini gaya komunikasi interpersonal antar generasi mengalami perkembangan. Sedikit berbeda dengan gaya komunikasi antar generasi "X", "Y", dan "Z". Di mana dalam komunikasi generasi "X" dan "Y" ini sangat patuh dan hormat pada orang yang usianya lebih tua. Selain itu rasa sosial terhadap sesama rekan pun lebih tercermin dengan rasa kekeluargaan satu sama lain.

Generasi Z merupakan kelahiran 1997-2012, dikenal dengan generasi internet. Mereka tumbuh dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan. Dengan perkembangan zaman pengertian komunikasi interpersonal juga mengalami perkembangan. Komunikasi interpersonal diartikan dengan

komunikasi dua orang secara tatap muka dan langsung kini bertambah definisinya. Komunikasi melalui alat teknologi melalui media online, atau media sosial, secara *video call* atau *room chatting* yang berhubungan langsung dengan dua orang, dan mendapatkan reaksi atau tanggapan secara langsung juga dianggap sebagai hubungan antar personal. Dalam kehidupan berkomunikasi, generasi Z memperlihatkan fenomena bahwa tidak ada jurang antara dunia maya dan nyata. Mereka melakukan komunikasi melalui layanan *chat online* setiap saat dan di mana saja, sehingga pertemuan fisik dengan orang lain semakin berkurang, bahkan dalam pertemuan secara langsung gawai tetap tidak terlepas dari gengaman. Bisa dikatakan sindrom *phubbing* tangan melanda generasi saat ini.

Selain internet dan teknologi digital, perubahan budaya di era globalisasi saat ini juga mempengaruhi gaya berkomunikasi. Generasi Z memiliki karakter bebas dan selalu senang dengan fleksibilitas. Selain itu generasi ini berani menyuarakan pendapat yang mereka anggap benar. Gaya komunikasi menurut Alo Liliweri adalah sebuah interaksi yang dilakukan seseorang secara verbal maupun non-verbal dengan ciri khas seseorang dalam mempersepsikan dirinya saat berinteraksi dengan orang lain (Liliweri, 2015). Gaya komunikasi yang santai, terbuka, dan bersahabat lebih diterima, mereka cenderung menghindari komunikasi yang dominan, serta penuh aturan. Gaya komunikasi interpersonal generasi Z lebih menekankan pada suasana santai yang memberikan ruang diskusi bagi partisipan dalam menyampaikan gagasan dan pendapat dengan suasana tanpa tekanan. Mereka tidak menyukai teguran secara langsung yang berkesan menggurui, tetapi lebih menerima masukan jika teguran disampaikan dalam dialog dan diskusi, memberikan masukan-masukan yang positif serta mengakui gagasan dan keberadaan mereka. Dalam kegiatan perkuliahan saat ini, setelah dunia disandera pandemi covid 19 tampak jelas *gap* yang terjadi dalam proses belajar. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang hanya melalui aplikasi Zoom, dan *room chatting* membuat

hubungan komunikasi interpersonal ini menjadi canggung. Kadang kala saat pembelajaran terjadi, kurangnya interaksi satu sama lain, bahkan sesama mahasiswa sendiri tidak saling kenal. Meski demikian komunikasi tetap berjalan, karena tetap ada komunikator, pesan, dan komunikan.

Pembahasan

Media baru dan teknologi komunikasi baru memberikan nilai positif dan maksimal dalam proses komunikasi, terutama yang bersifat interaktif. Hal tersebut merupakan kadar kebaruan dalam kemajuan teknologi di dunia komunikasi. Implikasi normatifnya terletak pada tingginya nilai yang diberikan pada kebaruan, perubahan, mobilitas, keanekaragaman dan individualisme. Kemajuan serta perubahan sosial terwujud dalam bentuk yang dinamai kebebasan pribadi, perubahan sosial dan kepuasan yang lebih luas. Melihat kondisi ini, dalam berkomunikasi dengan mereka harus harus didasari pandangan dan perasaan positif. Perasaan yang positif tentunya akan menimbulkan perilaku komunikasi interpersonal yang positif pula. Meski dunia digital lekat dengan kehidupan mereka, komunikasi yang paling efektif tetap komunikasi dengan cara tatap muka. Mengajak mereka berdiskusi, berkumpul dan menciptakan suasana keakraban.

Dari hal ini akan muncul kedekatan antar personal, sehingga komunikasi dapat berlangsung efektif dan meningkatkan jarak publik menuju jarak intim. Karena generasi saat ini lebih menyukai komunikasi secara terbuka, lebih senang dilibatkan dalam diskusi bersama generasi pendahulunya, *sharing* pengalaman dan berdiskusi mengenai ide-ide baru lebih membuat mereka bersemangat. Dengan memberikan *treatment* yang tepat, diharapkan mereka dapat menjadi generasi bangsa yang unggul secara digital sejak dini, memiliki *skill* dalam menggunakan teknologi dan perkembangannya, serta diharapkan pula mereka bisa menjadi generasi yang tetap memegang nilai sopan santun, simpati dan empati. Ada lima kualitas umum dalam efektivitas komunikasi interpersonal, yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*emphaty*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiviness*) dan kesetaraan (*equality*), (Devito, 1997). Keterbukaan merupakan

keinginan atau kesediaan tiap individu untuk memberitahukan segala informasi tentang dirinya (Gamble, 2005). Dalam berkomunikasi dengan generasi ini, memang harus lebih banyak mendengarkan, dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mewujudkan ide-ide mereka.

Perasaan simpati dan empati dalam proses komunikasi merupakan salah satu bentuk tanggapan atau respon yang dibutuhkan untuk mewujudkan efektivitas didalam proses komunikasi interpersonal, individu yang empatik mampu memahami dan memotivasi individu satu sama lain. Kemudian sikap mendukung dalam komunikasi interpersonal yang baiknya dilakukan dengan sikap deskriptif, bukan evaluatif. Spontan, bukan strategik, dan provisional. Kemudian sikap positif yang dianggap mengacu pada aspek komunikasi interpersonal yakni, komunikasi yang terjadi jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri dan perasaan positif terhadap lawan bicara. Di mana sikap dan perasaan positif ini sangat penting untuk interaksi yang efektif. Efektivitas komunikasi interpersonal berikutnya adalah kesetaraan. Di mana tidak membedakan dan menganggap remeh lawan bicara. Komunikasi interpersonal tentunya akan lebih efektif bila suasananya setara. Harus ada pengakuan dari kedua belah pihak bahwa mereka sama-sama bernilai dan berharga. Melihat gaya dan selera komunikasi generasi ini, mereka sangat senang dan bersemangat melakukan inovasi. Mereka lebih suka melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan *skill* dan pengalaman mereka dibanding hanya diberi "teori". Sementara aktivitas mereka di dunia maya lebih tertarik pada *meme* lucu, parodi, video youtube, tiktok, istagram, facebook, dan *gaming*. Tidak hanya itu, dalam kegiatan belajar mereka juga tidak menyukai aktivitas kelas yang monoton.

Keberadaan generasi Z di Indonesia ternyata jumlahnya melampaui generasi milenial. Dari hasil sensus penduduk (SP2020) Badan Pusat Statistik mengumumkan resmi hasil sensus, yang proporsinya generasi Z (27,94%), sedangkan generasi Milenial (25,87%), yang artinya jumlah generasi Z lebih banyak dari generasi Milenial. Generasi Z merupakan penduduk yang lahir di tahun 1997–2012, sementara milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1981–1996

(Prindonesia.co., 2021). Generasi yang lahir di tahun 1997–2012 itu berani membela dan menyuarakan pendapat yang menurut mereka dianggap benar. Digital *platform* dan media sosial adalah wadah *subculture* dari minat pribadi mereka. Oleh karena itu untuk berkomunikasi dengan generasi ini harus saling menyesuaikan agar komunikasi berjalan lancar. Karena sejatinya komunikasi adalah sesuatu yang sulit dilakukan bila tidak saling terbuka dan memahami.

Dapat disimpulkan, dalam mewujudkan efektivitas komunikasi dengan generasi Z ini tentunya harus dapat saling menghormati, tetap menjaga norma sopan santun, dan lebih banyak berinteraksi dalam bentuk diskusi dan melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Seperti halnya jiwa muda mereka, yang selalu ingin mencoba pengalaman baru dan proses mencari jati diri baiknya dibimbing dengan benar oleh generasi sebelumnya. Banyak hal dan perhatian yang harus diberikan pada generasi ini. Tidak hanya *skill* mengenai perkembangan dunia digital tetapi juga norma dan etika dalam bermedia sosial. Kerap kali warganet atau mereka yang aktif dalam komunitas maya bertindak di luar norma sopan santun, sehingga dapat menjadi contoh yang kurang baik dalam kehidupan sosial dan psikis mereka. Karena di masa ini informasi dapat mereka terima dengan bebas dan cepat. Contohnya suatu informasi yang viral bila diterima tanpa ditelaah dapat membawa pengaruh buruk dalam kehidupan.

Generasi ini tentunya menjadi harapan bangsa dan negara dalam menghadapi perubahan dunia yang tidak menentu. Harusnya dengan semakin majunya teknologi komunikasi, dapat menjadi lebih dekat dan mudah dalam berkomunikasi. Dengan inovasi dan penguasaan literasi digital yang mereka kuasai dengan baik, diharapkan dapat membawa perubahan dan perbaikan kedepannya untuk negeri ini, serta dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti kata Bung Karno “*Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku satu pemuda niscaya akan kuguncang Dunia*” (Penakisemar.wordpress.com, 2009). Di tangan generasi muda ini terpancar masa depan suatu bangsa.

Daftar Pustaka

- Hardjana, Agus. (2003). *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Devito, Joseph. (1997). *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: Professional Book.
- Fathianury. <https://eprints.umm.ac.id/35431/3/jiptumpp-gdl-fathianury-49584-3-babii.pdf>. Diakses pada 7 Oktober 2022.
- Gamble, T. Kwal. (2005). *Communication Work*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Liliweri, Alo. (2015). *Komunikasi Antarpersonal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Penakisemar. (2009). *Kata Mutiara Bung Karno*. <http://penakisemar.wordpress.com/2009/11/07/mutiara-kata-bung-karno/>. Diakses pada 7 Oktober 2022
- Prindonesia.Co. (2021). *Selera Komunikasi Gen Z: Fokus pada Inovasi dan Data*. <https://www.prindonesia.co/detail/2363/Selera-Komunikasi-Gen-Z-Fokus-pada-Inovasi-dan-Data>. Diakses pada 7 Oktober 2022.
- Seiller, William J, & Melissa L, Beall. (2008). *Communication Making Connection*. Boston: Pearson.

KOMUNIKASI INTERPERSONAL PASANGAN DARI KELUARGA *BROKEN HOME* PADA FILM “*ROMANTIK PROBLEMATIK*”

Eko Pebryan Jaya

Pendahuluan

Komunikasi, bisa dikatakan sebuah aktivitas yang terjadi tidak hanya sehari-hari. Bahkan sudah dimulai ketika manusia lahir. Menangis adalah bukti bayi yang lahir dalam keadaan normal, menangis juga merupakan satu cara bayi bernafas, dan pastinya menangis menandakan bahwa bayi itu hidup. Komunikasi tersebut tergolong pada intrapersonal yang berarti dari dalam diri kita sebagai respon yang terjadi pada tubuh. Jika stimulus datang dari luar diri dan kita meresponnya maka menjadi interpersonal. Kajian mengenai komunikasi interpersonal sangat menarik karena membicarakan tentang personal (diri). Selain itu, bagaimana komunikasi ini terjadi dengan menggunakan media, baik itu media sosial atau media masa. Salah satu media massa populer yang sering menunjukkan adanya komunikasi interpersonal yaitu film.

Selain sebagai media hiburan, film tergolong dalam karya seni. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, 2009). Sehingga film sebagai media komunikasi berarti punya posisi

dalam kehidupan kita, baik sebagai refleksi hingga memberi *impact* (dampak). Menurut (Effendy, 2003) film merupakan kumpulan dari beberapa gambar yang berada di dalam *frame*, di mana *frame* demi *frame* diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu menjadi hidup. Ini berarti film adalah wahana yang dibuat untuk menghadirkan realitas lain dari apa yang terjadi pada kehidupan. Tentunya realitas tersebut ada cerita yang di dalamnya ada tokoh untuk mencapai tujuan tertentu dengan adanya hambatan dan tantangan. Inilah yang membuat film menarik karena konflik terjadi sampai akhirnya dituntaskan dan tokoh; berakhir baik atau buruk.

Tentu saja pada ranah komunikasi, film dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Karena memang film selalu dapat menghadirkan cerita yang walaupun jenisnya ada yang fiksi ataupun non-fiksi, tetap saja punya keterkaitan pada kehidupan kita. Karena merupakan bagian dari media komunikasi, tentunya film selalu menghantarkan pesan tertentu oleh pembuatnya. Pesan itu bisa saja menginspirasi, menyadarkan, atau bahkan mengkritik penontonya. Pesan film dapat terbaca jelas melalui dialog, atau tersembunyi melalui *gesture* (gerak tubuh tokohnya). Film Indonesia saat ini memiliki latar dan cerita yang sangat beragam. Baik itu tentang percintaan, anak-anak, laga ataupun komedi hingga horor. Pada dasarnya keberagaman itu menandakan bahwa begitu banyak cerita yang dieksplorasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Tema percintaan adalah salah satu yang masih sangat diminati berbagai kalangan penonton. Judul-judul seperti *Ada Apa dengan Cinta* (2001) dan *Ayat-Ayat Cinta* (2008) adalah contoh tema paling populer dalam film dengan raihan penonton yang banyak. Sehingga sampai saat ini tema tersebut masih sangat menjanjikan untuk diproduksi menjadi sebuah film. Tetapi kembali lagi bahwa film tidak hanya sebuah media hiburan, ia media seni juga komunikasi, tentu akan menarik manakala film menjadi sebuah bahan kajian, baik untuk melihat dampak, pesan, atau makna tersembunyi dibalikinya.

Pembahasan

Salah satu film Indonesia dengan tema percintaan yaitu *Romantik Problematic*. Film besutan sutradara BW Purbanegara ini rilis tahun 2022 secara streaming, berkisah tentang Alisha (Lania Fira) dan Ricky (Bisma Karisma) yang menjalin hubungan yang “kompleks”. Kata kompleks di sini juga merujuk dari judulnya yang terdapat kata *Problematic*. Alisha digambarkan sebagai sosok dingin, ketus, dan mandiri. Berbanding terbalik dengan Ricky yang penyabar, namun terkesan menekan dalam hubungan hingga dalam cerita beberapa kali menyalahkan diri sendiri karena perbuatannya yang selalu membuat percakapan mereka berakhir cekcok. Jika di Hollywood ada Richard Linklater melalui Trilogi *Before* (*Before Sunrise*, *Before Sunset*, *Before Midnight*) yang begitu populer. Maka tidak berbeda jauh dari pada film ini karena menyorot 2 tokoh sentral tersebut, sehingga hanya fokus pada saling tukar pesan di mana pada akhirnya menjawab mengapa perilaku keduanya seperti itu. Proses pertukaran pesan yang terjadi menunjukkan adanya komunikasi interpersonal.

Effendy (2003) menjelaskan teori komunikasi interpersonal atau antar pribadi, yaitu komunikasi antara individu-individu secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pelaku komunikasi antarpribadi atau interpersonal menangkap reaksi orang lain secara langsung baik verbal maupun non verbal. Selain itu, Ardial (2014) mengatakan bentuk khusus komunikasi interpersonal ialah *dyadic*. Komunikasi *Dyadic* yaitu komunikasi yang hanya melibatkan dua orang seperti suami istri dan sebagainya, ciri-ciri komunikasi *dyadic* adalah pelaku komunikasi yang melangsungkan proses komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal dan nonverbal. Keberhasilan dan keefektifan komunikasi interpersonal tergantung pada masing-masing individu pelaku komunikasi interpersonal sendiri, keberhasilan para pelaku komunikasi interpersonal akan tercermin pada jenis-jenis pesan dan respons atau efek nonverbal mereka, seperti tatapan mata gelengan kepala dan lainnya. Menjadi menarik karena filmnya sendiri memperlihatkan pasangan dengan latar belakang yang sama (*broken home*), sehingga ikut mempengaruhi komunikasi keduanya sepanjang cerita.

Pada film tokoh Ricky diperlihatkan selalu berusaha untuk memahami dan mencari solusi bagi Alisha dan permasalahan yang dihadapinya. Walau pada akhirnya selalu muncul masalah. Perilaku Ricky merujuk pada salah satu teori dalam komunikasi interpersonal yaitu Teori Atribusi). Menurut Robbins & Judge (2008) teori ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu, individu tersebut telah berperilaku demikian yang disebabkan oleh situasi tertentu

Beberapa adegan yang merujuk pada teori tersebut yaitu, *pertama*, adegan di awal film di mana Ricky yang menginterogasi Alisha mengenai perubahan sikapnya. Alisha yang tenang tetap menjawab bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan. Pada akhirnya hal yang disembunyikan tersebut adalah kejutan ulang tahun untuk Ricky. *Kedua*, ketika Alisha ingin Ricky segera menikahinya untuk membuktikan keseriusan hubungannya. Ricky yang nampak bingung (lalu menjawab sedikit ragu) banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya status ayah Alisha. Atau adegan *ketiga*, di mana ketika Ricky diusir dari rumah Alisha karena menggunakan uang kontrakan yang dikembalikan warga setempat (mereka ingin Alisha pindah akrena ibunya yang di penjara) diberikan pada rentenir tersebut. Ketiga adegan ini memiliki kesamaan yaitu diakhir perdebatan, Ricky selalu marah dan melukai diri sendiri akaibat tidak dapat mengakomodir pesan komunikasi dari Alisha.

Apakah tokoh Alisha tidak mencerminkan teori atribusi? Jawabannya akan merujuk pada bagian paruh ketiga atau menuju babak konklusi. Adegan jalan-jalan yang dimaksudkan untuk membuat Ricky bisa mendapatkan inspirasi membuat musik pesanan temannya, berubah menjadi pertukaran yang absurd

tetapi juga memilikinya karena akhirnya fakta lain diketahui. Setelah berbagai masalah yang terjadi baik akibat dari keteledoran Ricky atau ketidakmampuan Alisha menghadapi situasinya sendiri, Ricky ditunjukkan akhirnya mau berkompromi. Melakukan apa yang menurut Alisha adalah tantangan, dijawab Ricky dengan cara yang tidak terduga sebelumnya.

Komunikasi interpersonal pada *Romantik Problematik* lebih menggambarkan tentang kegagalan komunikasi itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama tujuan dari komunikasi adalah tersampainya pesan sehingga muncul perubahan, yaitu persamaan makna, persepsi dan tujuan. Tapi film ini seolah ingin memperlihatkan lingkungan tetap jadi faktor yang mempengaruhi suksesnya komunikasi. Kita mendapati fakta bahwa sikap Alisha selama cerita berlangsung adalah hasil pengalaman pahitnya dari kecil, masalah keluarga, ditinggalkan ayah di panti asuhan. Ricky juga demikian, meski ia sendiri belajar untuk meredam emosinya, menjadi pribadi lebih baik. Dan menjadikan Alisha sebagai tujuan akhir hidup, pada akhirnya akan selalu menangis di depan Alisha (Ricky tidak pernah menangis di depan tokoh manapun selain Alisha).

Di sinilah teori Atribusi bicara. Mengenai apa yang akan kita gunakan (baik bahasa atau gestur) sebagai bentuk atribusi internal dan atribusi eksternal pada orang lain. Baik sikap Alisha pada Ricky dibangun sebagai bentuk perlawanan karena merasa dirinya dikekang. Maupun Ricky yang semata-mata hanya ingin Alisha lebih terbuka justru membuatnya semakin jauh. Meskipun dalam sebuah wawancara BW Purbanegara mengaku bahwa film ini dibuat agar siapapun jangan sampai terjebak dalam hubungan yang *toxic*, sejatinya kisah Alisha dan Ricky bukan sekedar rekaan belaka. Itu mampu merefleksikan bahwa bukan sekedar faktor latar keluarga yang membuat komunikasi interpersonal gagal, melainkan keterbukaan dan kejujuran kuncinya.

Daftar Pustaka

- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Bumi Aksara.
- Effendy. (2003). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, (2009).
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Salemba Empat.

TRAGEDI KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI KRISIS

Muhamad Hidayatul Ilham

Pendahuluan

Pada Oktober 2022 kasus kekerasan di ranah olahraga terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan serupa bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan ini terjadi saat pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia antara klub Arema FC yang bertanding melawan klub Persebaya Surabaya yang digelar Stadion Kanjuruhan. Kerusuhan terjadi mengakibatkan ratusan korban jiwa meninggal dunia. Berdasarkan laporan yang dikutip dari berbagai sumber tercatat sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kerusuhan ini (Tim Detik Jatim, 2022). Hal ini dilatarbelakangi oleh kekalahan Arema FC saat bertanding dengan Persebaya.

Kronologi kejadian di mulai dengan para pendukung Arema FC yang kecewa dengan hasil akhir pertandingan yang kemudian memasuki lapangan setelah pertandingan usai. Pihak aparat keamanan kemudian bereaksi dengan melakukan langkah-langkah pengamanan dengan cara menembakkan gas air mata ke arah penonton. Tindakan tersebut mengakibatkan kepanikan di kalangan penonton yang berdesakan mencari jalan keluar dari stadion. Penumpukan massa yang berupaya mencari jalan keluar kemudian dipicu dengan aksi represif dari aparat keamanan yang menembakkan gas air mata menjadi awal bencana yang

mengakibatkan korban jiwa berjatuhan (Detik News, 2022). Kapolda Jawa Timur menyebut bahwa penumpukan massa yang mencoba menyelamatkan diri ini mengakibatkan para penonton di stadion berimpitan sehingga mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena kepanikan yang terjadi setelah pertandingan usai (Wibawana, 2022).

Setelah peristiwa tersebut, publik mengatakan bahwa tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan disebabkan oleh banyak hal, yaitu aksi represif yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk mengendalikan massa, kurangnya kedewasaan suporter yang tidak menerima hasil akhir pertandingan, panitia penyelenggara pertandingan yang mencetak tiket melebihi kapasitas stadion hingga *broadcaster* Liga 1 yang dianggap memaksakan jam tayang pertandingan pada malam hari (CNN Indonesia, 2022). Peristiwa kekacauan yang terjadi dapat menyebabkan dampak pada sepakbola Indonesia yang masih mencoba mengembalikan reputasinya pasca diberikan sanksi oleh FIFA pada tahun 2015 yang disebabkan oleh intervensi pemerintah pada PSSI selaku federasi sepakbola Indonesia (Salusi, 2015). Selain itu, dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap regulasi kompetisi sepakbola. Hal ini dikarenakan kompetisi sepakbola yang dapat mengundang massa harus dihentikan sementara untuk menghindari penyebaran virus. Berdasarkan kejadian kerusuhan tersebut, terdapat sejumlah prediksi yang dapat memengaruhi masa depan sepakbola Indonesia. Peristiwa tersebut dapat mengakibatkan Indonesia kembali diberikan sanksi oleh FIFA selaku organisasi yang menjadi badan regulator sepakbola dunia (Muthiariny, 2022).

Guna menangani masalah peristiwa yang terjadi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, respon yang tepat terhadap peristiwa tersebut sangat diperlukan. Namun, respons dari pemangku kebijakan untuk menangani peristiwa tersebut cenderung kurang tepat dan kurang menunjukkan rasa kurang empati terhadap korban yang mengalami musibah tersebut. Selain itu, beberapa pihak yang dianggap berperan atas terjadinya peristiwa ini seperti pihak

keamanan yang terdiri dari aparat gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian dan TNI yang semestinya menunjukkan rasa tanggung jawab malah menyampaikan pernyataan yang kurang menunjukkan rasa empati (Fatimarahma, 2022). Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan ini tidak dapat dikatakan menenangkan. Terdapat beberapa blunder yang dilakukan dalam prosesnya. Beberapa di antaranya yakni tanggapan Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan pernyataan Ketua Umum (Ketum) PSSI Mochamad Iriawan. Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa penembakan gas air mata kepada suporter Aremania di atas tribun saat terjadi keriuhan sudah sesuai prosedur. Namun, yang menjadi permasalahan adalah prosedur yang dilaksanakan ini adalah prosedur standar kepolisian bukan petunjuk keselamatan dari FIFA (Hakiki, 2022).

Saat diwawancarai oleh media, Menteri Pemuda dan Olahraga cenderung lebih mementingkan kerugian yang akan diterima oleh Indonesia sebagai calon tuan rumah Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan tahun 2023 (Nabilla & Nofiana, 2022). Publik menilai pernyataan Menpora tersebut tidak menunjukkan sikap kemanusiaan yang seharusnya untuk saat ini lebih diutamakan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan *event* skala internasional. Selain itu, Ketua Umum PSSI juga membuat pernyataan blunder saat membuka *press conference* terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan dengan kalimat “hadirin yang berbahagia” (Tim Detik, 2022). Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pemangku kebijakan tersebut menjadi bagian dari bahasan komunikasi krisis yang harus dikaji secara keseluruhan, baik dari fase *pre-crisis*, *crisis*, dan *post crisis*.

Menurut Coombs (2010) komunikasi krisis merupakan pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis. Coombs (2015) mengemukakan bahwa melanjutkan bahwa krisis adalah persepsi tentang peristiwa tidak terduga yang mengancam harapan penting para pemangku kepentingan terkait dengan masalah kesehatan,

keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, dan dapat secara serius memengaruhi kinerja organisasi serta menghasilkan hasil negatif. Wang & Gupta (2022) mengatakan bahwa krisis merupakan suatu kejadian, dugaan atau keadaan yang mengancam keutuhan, reputasi, atau keberlangsungan individu atau organisasi. Hal tersebut mengancam rasa aman, kelayakan dan nilai-nilai sosial publik, bersifat merusak baik secara aktual maupun potensial pada organisasi yang pada dasarnya tidak dapat segera menyelesaikan krisis tersebut dengan sendirinya.

Fase komunikasi krisis yang pertama adalah *pre-crisis*, pada fase ini seharusnya dilakukan dengan penempatan dan pengurangan risiko serta keandalan bagi organisasi dalam mempersiapkan krisis. Namun, berbagai pihak justru tidak melakukan fase ini untuk mengurangi potensi risiko terjadinya kerusuhan. Dalam hal peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, beberapa pihak seharusnya dapat mengurangi potensi adanya korban jiwa. Secara teori korban jiwa pada kerusuhan tersebut dapat dihindari apabila fase ini dapat dilakukan dengan baik seperti misalnya panitia pelaksana menjual tiket sesuai dengan kapasitas stadion, pihak aparat menaati petunjuk keselamatan dari FIFA sehingga menghindari penggunaan gas air mata saat penanganan masalah keamanan yang terjadi saat pertandingan, pihak penyiar yang kukuh menayangkan pertandingan di malam hari. Padahal secara psikologis kegiatan yang dilakukan pada malam hari lebih berpotensi menyebabkan kericuhan. Hal ini dapat disebabkan oleh pihak aparat keamanan maupun supporter yang sudah tidak berada dalam kondisi prima (Universitas Islam Indonesia, 2022). Sehingga, dan fase *pre-crisis* ini tidak diantisipasi dengan baik.

Kemudian fase selanjutnya adalah fase *crisis*. Dalam hal ini, sikap dan tindakan aparat keamanan menggunakan tindakan represif saat peristiwa berlangsung. Pernyataan dari Kapolda Jawa Timur yang mengatakan bahwa sebenarnya penggunaan gas air mata merupakan bagian dari *crowd control* menimbulkan kecaman dari publik. Publik meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab atas jatuhnya korban jiwa di Stadion

Kanjuruhan terutama dari aparat keamanan yang menggunakan kekerasan dalam menghadapi penonton (Aditya, 2022). Fase ketiga adalah fase *post crisis*. Pada fase ini strategi apologia merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk memulihkan nama baik setelah terjadinya kesalahan. Strategi apologia pada mulanya membahas upaya individu mempertahankan diri dari serangan atau tuduhan telah bertindak salah termasuk serangan yang melecehkan dirinya (Hegner et al., 2016).

Jika ditinjau dari konteks peristiwa Kanjuruhan, pada fase *post crisis* pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab mesti mengeluarkan pernyataan maaf (apologi) terkait dengan peristiwa yang merenggut nyawa korban. Pada kasus fase ini ketua panitia pelaksana pertandingan Arema FC yang ditetapkan sebagai tersangka telah menyampaikan permohonan maaf. Pemerintah Indonesia juga bergerak cepat dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Ketua TGPF ini sendiri dikomandoi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Meskipun apologi merupakan tindakan yang sudah sewajarnya dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa ini, sudah seharusnya tindakan pencegahan di masa depan harus diperbaiki dengan menaati regulasi yang telah diberikan oleh regulator internasional. Kemudian kepentingan profit dari segi pemasukan tiket tidak menjadi prioritas, apalagi dengan mengabaikan kapasitas stadion dan mengesampingkan keamanan penonton yang datang ke stadion. Penggunaan gas air mata untuk mengontrol kerusuhan massa sudah dilarang untuk digunakan, tetapi digunakan oleh aparat keamanan Stadion Kanjuruhan (FIFA Stadium Safety and Security Regulations, 2021).

Segi media penyiar yang selama ini selalu lolos dari tanggungjawab saat terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tidak boleh lagi memaksakan kehendak untuk menyiarkan pertandingan yang memiliki atensi tinggi seperti Arema FC melawan Persebaya diselenggarakan di malam hari. Aspek psikologis massa yang sudah tidak berada dalam kondisi

prima di kedua belah pihak baik itu di sisi aparat maupun penonton saat pertandingan diselenggarakan di malam hari membuat emosi menjadi lebih mudah terpancing terutama di sisi penonton saat hasil akhir pertandingan berakhir mengecewakan untuk para pendukung. Peristiwa Kanjuruhan yang menelan korban jiwa hingga ratusan orang merupakan pembelajaran yang kesekian kalinya bagi sepakbola Indonesia yang masih berusaha meningkatkan kualitas dan membangun citra yang baru setelah dilarang beraktivitas di kancah internasional. Harapannya, peristiwa serupa di masa depan tidak terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) internasional, penonton juga mesti meningkatkan kedewasaan dengan menerima apapun hasil akhir pertandingan karena sejatinya olahraga merupakan ajang yang menguji sportivitas bukan hanya untuk atlet tapi juga bagi kalangan pendukung.

Daftar Pustaka

- Aditya, L. (2022.). *Ketua Panpel Arema FC: Tragedi Kanjuruhan Dipantik Gas Air Mata!* Retrieved 11 October 2022, from <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6335645/ketua-panpel-arema-fc-tragedi-kanjuruhan-dipantik-gas-air-mata>
- CNN Indonesia. (2022). *Polemik Jam Tayang Arema vs Persebaya Antara PT LIB dan Indosiar*. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221012080148-142-859344/polemik-jam-tayang-arema-vs-persebaya-antara-pt-lib-dan-indosiar>
- Coombs, W. T. (2010). Parameters for Crisis. In W. T. Coombs & S. J. Holladay (Eds.), *The Handbook of Crisis Communication* (pp. 17–53). Blackwell Publishing Ltd.
- Coombs, W. T. (2015). *On Going Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (4th ed.). Sage Publications.
- Detik News. (2022). *Tragedi Stadion Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Korban – DW – 02.10.2022*. Made for Minds. <https://www.dw.com/id/kerusakan-kanjuruhan/a-63310801>

- Fatimarahma, S. (2022). *Pernyataan Kontroversial Irjen Nico Afinta di Awal Tragedi Kanjuruhan*. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20221011/16/1586236/pernyataan-kontroversial-irjen-nico-afinta-di-awal-tragedi-kanjuruhan>
- FIFA. (2021). *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.
- Hakiki, I. (2022). *Kerusuhan Suporter di Kanjuruhan Malang, Kapolda Jatim Sebut Tembakan Gas Air Mata Sesuai Prosedur Halaman all - Kompas.com*. *Kompas.Com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/02/060343878/kerusuhan-suporter-di-kanjuruhan-malang-kapolda-jatim-sebut-tembakan-gas?page=all>
- Hegner, S. M., Beldad, A. D., & Kraesgenberg, A.-L. (2016). The Impact of Crisis Response Strategy, Crisis Type, and Corporate Social Responsibility on Post-crisis Consumer Trust and Purchase Intention. *Corporate Reputation Review*, 19(4), 357–370. <https://doi.org/10.1057/s41299-016-0007-y>
- Muthiariny, D. E. (2022). *PSSI Talks of Possible FIFA Sanctions after Kanjuruhan Tragedy-Sport En.tempo.co*. <https://en.tempo.co/read/1642626/pssi-talks-of-possible-fifa-sanctions-after-kanjuruhan-tragedy>
- Nabilla, F., & Nofiana, F. (2022). *Menpora Dituding Lebih Khawatirkan Sanksi FIFA dan Piala Dunia, Publik Kecewa: Mati Nuraninya!* *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2022/10/02/104522/menpora-dituding-lebih-khawatirkan-sanksi-fifa-dan-piala-dunia-publik-kecewa-mati-nuraninya>
- Salusi, N. D. (2015). *PSSI Disanksi FIFA*. <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-3107540/pssi-disanksi-fifa>
- Tim Detik. (2022). *Ucapkan 'Hadirin yang Berbahagia' di Malang, Ketum PSSI Dikecam*. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/bali/sepakbola/d-6326773/ucapkan-hadirin-yang-berbahagia-di-malang-ketum-pssi-dikecam>
- Tim Detik Jatim. (2022). *Tewaskan 127 Orang, Kerusakan Stadion Kanjuruhan Juga Lukai 180 Korban*. <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6323807/tewaskan-127-orang-kerusakan-stadion-kanjuruhan-juga-lukai-180-korban>

Universitas Islam Indonesia. (2022). *Mengulik Perspektif Psikologi Dari Peristiwa Duka di Stadion Kanjuruhan*. <https://www.uii.ac.id/mengulik-perspektif-psikologi-dari-peristiwa-duka-di-stadion-kanjuruhan/>

Wang, D., & Gupta, V. (2022). *Crisis Intervention*.

Wibawana, W. A. (2022). *Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

AKTIVISME DIGITAL *FANDOM K-POP*: ARMY INDONESIA

Annisa Rahmawati

Media Baru: Munculnya Komunitas Virtual dan Aktivisme Digital

Era media baru memberikan ruang-ruang baru bagi individu di seluruh dunia untuk berinteraksi. Individu dapat berinteraksi di banyak platform *online* yang terus muncul dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Interaksi yang tercipta melalui platform *online* memungkinkan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat maupun tujuan untuk membentuk komunitas secara *online*. Komunitas yang terbentuk dan berinteraksi secara *online* dikenal dengan istilah komunitas virtual (*virtual community*).

Menurut Rheingold (1993), komunitas virtual adalah agregasi sosial yang muncul di internet, di mana terdapat sejumlah orang yang menggunakan ruang di internet untuk diskusi publik dalam waktu yang cukup lama, dengan melibatkan perasaan manusiawi yang memadai, untuk membentuk jaringan hubungan pribadi di dunia maya. Perasaan manusiawi yang memadai ini dapat memunculkan *sense of belonging*, yaitu rasa kepemilikan atau kesadaran seseorang bahwa dirinya merupakan bagian dari sebuah komunitas. *Sense of belonging* merupakan salah satu syarat dari sebuah komunitas virtual. Adapun syarat lainnya yaitu adanya: lingkungan atau tempat bersama di mana terjadi proses komunikasi, hubungan interpersonal yang muncul dan dikelola melalui interaksi *online*, struktur internal yang ada di dalam komunitas, dan ruang

simbolik milik bersama yang direpresentasikan dengan norma, nilai, dan kepentingan bersama (Tardini & Cantoni, 2005). Syarat-syarat komunitas virtual ini menegaskan bahwa tidak semua ruang di internet di mana sejumlah orang berinteraksi – kemudian sejumlah orang ini – disebut dengan komunitas virtual.

Nasrullah (2014) membedakan komunitas virtual menjadi dua kategori. Perbedaan ini dilihat dari bagaimana transformasi komunitas itu terkait penggunaan ruang di internet atau ruang siber. Kategori pertama, komunitas virtual yang terbentuk karena komunikasi termediasi komputer. Komunikasi termediasi komputer – *computer mediated communication* (CMC) – merupakan sebuah proses komunikasi manusia melalui komputer, yang melibatkan manusia itu sendiri, terjadi dalam konteks tertentu, serta berkaitan dengan proses membentuk media untuk berbagai tujuan (Desember, 1997). Dalam kategori pertama ini, para pengguna saling bertemu dan berkomunikasi pertama kali melalui media siber. Kategori kedua, komunitas virtual terbentuk sebagai perpanjangan tangan dari komunitas dunia nyata. Artinya, komunitas virtual ini menggunakan media siber untuk melanjutkan interaksi komunitasnya di dunia nyata.

Era media baru tidak hanya memungkinkan interaksi masyarakat di dunia virtual saja, melainkan juga memungkinkan terjadinya gerakan sosial sebagai hasil dari interaksi di dunia virtual tersebut. Gerakan sosial di dunia virtual kini lebih dikenal dengan istilah aktivisme digital. Istilah aktivisme digital muncul untuk menggambarkan meluasnya penggunaan teknologi digital dalam kampanye untuk perubahan sosial dan politik (Joyce, 2010). Agenda dalam aktivisme digital banyak diinisiasi oleh komunitas atau organisasi yang juga berwujud virtual (Putri, 2022).

Keberhasilan agenda dalam aktivisme digital di mana komunitas virtual dapat menjadi salah satu aktornya dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Kondisi-kondisi ini secara khusus ditentukan oleh bergantung nilai-nilai yang secara umum berlaku di dalam masyarakat dalam dunia nyata. Di Indonesia, aktivisme media sosial, atau aktivisme digital cenderung akan berhasil memobilisasi dukungan massa ketika narasi yang disampaikan sederhana, berhubungan dengan tindakan yang memiliki risiko rendah dan

sejalan dengan metanarasi dominan seperti nasionalisme dan religiustias (Lim, 2013).

Fandom: Komunitas Virtual sebagai Aktor Aktivisme Digital

Fan kingdom atau *fandom* merupakan salah satu komunitas virtual yang semakin berkembang di era media baru. Dalam era media baru, istilah penggemar (*fan*) sendiri merujuk pada individu yang memiliki rasa ketertarikan dan hubungan emosional dengan sesuatu yang dia sukai, baik itu selebriti sebagai idola atau sesuatu yang dia anggap menarik (Duffett, 2013) sedangkan *fandom* adalah komunitas tempat orang-orang dengan minat dan perasaan yang sama terhadap selebritas atau produk media (Lacasa et al, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fandom* merupakan komunitas yang dibentuk oleh sejumlah *fan*. *Fan* membentuk *fandom* melalui afiliasi yang didorong oleh minat yang akhirnya membentuk rasa kolektif dan identitas subkultural mengenai selera bersama. Rasa kolektif dan identitas subkultural ini merupakan dua dari lima syarat dari komunitas virtual yang dikemukakan oleh Tardini dan Cantoni (2015). Rasa kolektif dan identitas subkultural dalam sebuah *fandom* nantinya akan membentuk budaya penggemar (*fan culture*). Budaya penggemar di era digital saat ini bergeser dari yang sebelumnya konvensional menjadi semakin terintegrasi dengan adanya media sosial (Sa'diyah, 2019). Budaya penggemar kini tidak hanya membicarakan tentang aktivitas penggemar seperti menonton konser dan mencari informasi mengenai idola, melainkan juga aktivisme digital yang diinisiasi oleh *fandom* melalui produksi pesan-pesan sosial.

Terdapat banyak aktivisme digital yang telah dijalankan oleh *fandom*. Beberapa di antaranya adalah *Little Monster*, *fandom* penyanyi Lady Gaga, yang telah terlibat dalam berbagai gerakan sosial (Bennett, 2014) dan *Directioners*, *fandom* *One Direction*, yang telah menyumbang untuk tujuan amal dalam rangka merayakan hari kelahiran anggota *One Direction* (Roth, 2015). Aktivisme digital yang dilakukan oleh *fandom* dalam hal ini menunjukkan bahwa penggemar dapat sangat dipengaruhi oleh nilai dan tindakan selebritas yang dia idolakan sehingga menghasilkan komunitas penggemar yang suportif dan secara sukarela terlibat dalam berbagai gerakan sosial baik atas nama *fandom*.

Istilah *fandom* dapat digunakan untuk semua komunitas yang memiliki ketertarikan atau idola yang sama misalnya *fandom* film, *fandom* acara televisi, atau *fandom* karakter *anime*. Namun kini, istilah *fandom* sangat melekat dengan *fandom* Korean Pop atau K-Pop. *Fandom* K-Pop merujuk kepada komunitas penggemar *idol group* dan *idol soloist*. Setiap *idol group* dan *idol soloist* memiliki nama *fandom* masing-masing. Salah satu *fandom idol group* yang dikenal di seluruh belahan dunia saat ini adalah ARMY.

ARMY: K-Pop Fandom dalam Era Media Baru

Adorable Representative MC For The Youth (ARMY) merupakan *fandom* *Bangtan Sonyeondan* (BTS), sebuah *music band* beranggotakan tujuh orang yang berasal dari Korea Selatan yang memulai debutnya sebagai satu unit pada tahun 2013 (Ji-young, 2019). BTS – beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook – bernaung di bawah agensi Big Hit Entertainment. BTS telah menjadi fenomena tersendiri di kancah musik dunia, salah satunya dengan menjadi *K-pop boyband* pertama yang menjadi nomine “*Best Pop Duo/Group Performance*” dalam Grammy Awards.

Kesuksesan yang diraih oleh BTS tentu tidak hanya karena kerja keras tanpa henti yang mereka lakukan, melainkan juga karena dukungan yang luar biasa dari penggemar mereka, ARMY. Hingga 30 Oktober 2022, BTS memiliki 71.5 juta *subscribers* di akun Youtube BANGTANTV, 68.6 M *followers* di akun Instagram @bts.bighitofficial dan 41.8 juta *followers* di akun Twitter @bts_bighit. Sedangkan berdasarkan data dalam *website* Tokopedia, salah satu *brand* yang menjadikan BTS sebagai *ambassador*, jumlah ARMY di seluruh dunia diperkirakan mencapai 18 juta orang (Tokopedia, 2021). Diperkirakan berjumlah puluhan juta, ARMY seringkali menjadi topik berita utama di media populer karena berbagai alasan. Hal ini juga membuat ARMY menjadi salah satu *fandom* paling kuat dan terlihat di media sosial. Selain itu, dengan jumlah yang sangat besar, ARMY dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat.

Sebagai sebuah *fandom*, ARMY telah melakukan banyak kegiatan aktivisme digital. Dua diantaranya adalah *Love Myself* dan #MatchAMillion. *Love Myself* merupakan sebuah kampanye sejak

tahun 2017 yang bertujuan untuk membuat semua anak muda merasa aman, bahagia, dan mampu tumbuh dengan cinta dan perhatian (Love Myself.Org, 2017). Kampanye ini diinisiasi oleh BTS yang bekerja sama dengan UNICEF. Melalui album *Love Yourself: Her*, BTS mencoba menyampaikan pesan tentang bagaimana menemukan dan menumbuhkan cinta dari diri sendiri. BTS percaya bahwa cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri. Kampanye ini kemudian melibatkan partisipasi aktif dari ARMY di seluruh belahan dunia. Jika Love Myself dilaksanakan sejak 2017, lain halnya dengan #MatchAMillion. #MatchAMillion merupakan kampanye yang dilakukan oleh ARMY di seluruh belahan dunia melalui *One In An ARMY Project* pada Juni 2020. Melalui kampanye ini, ARMY berhasil mengumpulkan dana lebih dari 1 Juta Dollar AS sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan *Black Lives Matter* (BLM).

Menurut Jenkins (Fuschillo, 2020), terdapat tiga fase perkembangan *fandom* terkait kebaruan atau perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu : resistensi, partisipasi, dan aktivisme. ARMY dapat dikategorikan sebagai *fandom* yang berada dalam dalam fase aktivisme. Hal ini ditandai dengan kemampuan ARMY untuk menjadi aktivis dengan menginisiasi beberapa gerakan sosial melalui media baru. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ARMY berpartisipasi secara aktif dan terlibat dalam berbagai gerakan aktivisme digital, diantaranya Love Myself dan #MatchAMillion.

Keberhasilan aktivisme digital penggemar K-pop, dalam hal ini ARMY, kembali menegaskan pentingnya *sense of belonging* dan identitas kolektif sebuah komunitas virtual. *Sense of belonging* dan identitas kolektif merupakan dua syarat komunitas virtual dari perspektif psikologis. Hal yang menarik untuk dikaji dari ARMY sebagai sebuah komunitas virtual adalah ARMY dapat menjalankan aktivisme digital tanpa adanya struktur internal di dalam komunitas. (Chang & Park, 2018) mengungkapkan bahwa ARMY sebagai *global fandom* di media sosial memiliki empat dimensi tersendiri, yaitu: kedekatan secara digital (*digital intimacy*), sosialitas non-sosial (*non-social sociability*), lokalitas transnasional (*transnational locality*), and pengorganisasian tanpa organisasi (*organizing without an organization*). Dimensi keempat, pengorganisasian tanpa organisasi, menunjukkan bahwa ARMY tidak memiliki struktur organisasi

dalam pengertian konvensional. ARMY tetap teratur secara spontan dan fleksibel. Media sosial dan aktivitas OTT (*over the top*) mereka tidak dapat dijelaskan oleh teori organisasi konvensional. Tidak ada pemimpin di dalam *fandom* sehingga semua orang (secara nominal) merupakan seorang pemimpin dan semua orang dapat ikut serta dalam setiap kegiatan.

Lebih lanjut, Chang & Park (2018) menekankan bahwa ARMY memiliki kesadaran berorganisasi dan menghargai kerja tim. Disaat yang bersamaan, ARMY juga bergerak secara spontan, tanpa batasan, mampu mengatur diri mereka sendiri, dan bergerak tanpa pemimpin. Hal ini menarik karena meskipun tidak memiliki pusat koordinasi di dalam *fandom*, ARMY tetap berhasil mengoordinasikan beberapa proyek termasuk aktivisme digital dan mencapai kohesivitas.

Tidak adanya struktur internal ajeg dalam *fandom* dan tidak adanya pemimpin utama serta jabatan fungsional lainnya pada dasarnya didasari oleh alasan karena ARMY sebagai *fandom* memiliki struktur seperti rhizoma (Ji-young, 2019). Struktur seperti rhizoma atau akar rimpang ini Pada dasarnya, teori rhizoma menegaskan struktur ARMY sebagai komunitas yang *leaderless*. Layaknya sebuah rhizoma yang berada di dalam tanah, ARMY memiliki ruang gerak yang fleksibel, bisa ke samping, ke bawah, ataupun ke atas. Dikutip dari Magdelene (Floretta, 2022), Karlina Oktaviani, seorang antropolog digital yang juga aktif dalam penelitian mengenai ARMY menjelaskan bahwa struktur rhizoma ini diperkuat karena ARMY sudah memiliki kesadaran sosial dan kemanusiaan yang cukup tinggi yang muncul karena tiga faktor: BTS yang vokal membahas isu sosial dan melakukan ragam kampanye sosial menjadi *role model* yang baik ARMY, ARMY sebagai *fandom* miliki keberagaman latar belakang sosial budaya dan profesionalitas yang begitu kaya dan adanya kesamaan pengalaman ARMY sebagai bagian individu dari kelompok penggemar termarginalisasi. Kelompok penggemar termarginalisasi di sana menyiratkan adanya pengalaman diskriminasi gender yang dialami oleh ARMY yang mayoritas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan

ARMY Indonesia dan Donasi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada 1 Oktober

2022 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Tragedi yang terjadi usai laga Arema FC dengan Persebaya itu menimbulkan banyak korban jiwa. Dilansir dari Detik.com, hingga 23 Oktober 2022, jumlah korban yang meninggal dalam tragedi ini adalah sebanyak 135 jiwa (Detik, 2022). Tragedi yang memilukan ini kemudian menggugah ARMY Indonesia melalui BTS ARMY Project Lombok untuk melakukan penggalangan dana untuk korban dan keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan. Penggalangan dana ini dilakukan melalui platform penggalangan dana dan donasi secara *online*, Kitabisa.com. Setelah tiga hari membuka donasi, mereka telah mengumpulkan dana sebesar Rp 447 juta saat diperiksa pukul 22.43 WIB (Khalid, 2022). Penggalangan dana ini tidak hanya mengajak seluruh penggemar BTS di Indonesia, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi.



Gambar 1. Penggalangan Dana ARMY Indonesia untuk Korban Kanjuruhan
Sumber : Kitabisa.com (2022)

Selain penggalangan dana, ARMY Indonesia juga membuka layanan hukum serta membuka *help center* (posko bantuan) untuk pendampingan psikologis para korban keributan Stadion Kanjuruhan (Janati, 2022). Posko bantuan untuk pendampingan psikologis para korban ini diinisiasi melalui ARMY Help Center (AHC). AHC siap untuk mendengarkan cerita dari korban Stadion Kanjuruhan yang kemudian nantinya akan diarahkan ke psikolog yang menjadi relawan di AHC. Selain pendampingan secara

psikologis, pendampingan hukum juga diberikan untuk para korban yang diinisiasi oleh ARMY Malang melalui akun twitter @Lightarmymalang.



Gambar 2. Posko Pendampingan Psikologis oleh ARMY Help Center
Sumber : BTS ARMY Help Center (2022)

Aktivisme digital yang dilakukan oleh ARMY Indonesia untuk membantu korban dan keluarga korban Tragedi Stadion Kanjuruhan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk AREMA FC (Janati, 2022). ARMY Indonesia telah menunjukkan bahwa penggemar tidak seperti yang dikemukakan oleh Casey et al. (2007): “kelompok orang yang canggung dan tidak berguna secara sosial” yang terobsesi dengan budaya pop melalui media khusus, yang memberi mereka rasa kepuasan yang menyeluruh dan melarikan diri dari kehidupan yang menyedihkan. Meskipun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, stereotipe negatif mengenai *fandom* K-Pop *Idol* masih muncul di berbagai *platform* media sosial.

Menurut Kim (2015), stereotip negatif *fandom* K-pop *Idol* di masyarakat muncul pada akhir tahun 2000-an karena popularitas transnasional grup K-pop dan aksi filantropi penggemar. Kegiatan filantropi sekarang umum dilakukan oleh *fandom* K-pop, misalnya melalui penggalangan dana dan kegiatan amal yang tidak hanya dimulai untuk keterlibatan masyarakat sipil, tetapi juga digunakan untuk mempromosikan artis yang mereka idolakan (Jung, 2012). Beberapa pihak memandang sebelah mata kegiatan amal yang dilakukan oleh *fandom* dengan asumsi bahwa motif *fandom* tersebut hanya untuk mempromosikan idola mereka atau kegiatan tersebut tidak penting. Stereotipe negatif sebagai ARMY, penggemar BTS,

terutama melekat pada perempuan. Perempuan penggemar yang mengagumi idola laki-laki masih terstigmatisasi di masyarakat.. ARMY kemudian kerap dilihat sebagai penggemar yang fanatik dan maniak yang senantiasa berteriak dan menangis karena menyembah BTS secara berlebihan (Devi, 2022)

Di saat beberapa pihak memandang sebelah mata kegiatan amal yang dilakukan oleh fandom K-Pop, fandom seperti ARMY membuktikan bahwa “tindakan yang diprakarsai sendiri... dapat memberikan bantuan dan dampak yang nyata terlepas dari motif tindakan tersebut” dan dapat “menular” (Ji-young, 2019). Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan, penggalangan donasi yang dilakukan oleh ARMY Indonesia bahkan ditujukan untuk sebuah tujuan sosial atas nama kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan BTS. Kegiatan penggalangan donasi yang dilakukan oleh ARMY kemudian melahirkan rangkaian kegiatan lainnya untuk membantu korban Tragedi Stadion Kanjuruhan dan “menular” ke berbagai pihak. Salah satunya adalah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Malang. *Fandom* sebagai sebuah komunitas virtual nyatanya membawa dampak positif baik bagi para anggota *fandom* maupun bagi masyarakat luas dalam dunia nyata.

Daftar Pustaka

- Bennett, L. (2014). ‘If We Stick Together We Can Do Anything’: Lady Gaga Fandom, Philanthropy and Activism Through Social Media. *Celebrity Studies*, 5(1), 138–152.
- BTS ARMY HELP CENTER. [@bts_ahc]. (2022). ARMY Indonesia Untuk Korban Kanjuruhan. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CjXIC72PhBA/>
- BTS ARMY Project Lombok. (2022). ARMY Indonesia Untuk Korban Kanjuruhan [Online Image]. Kitabisa.com. <https://kitabisa.com/campaign/armyforkanjuruhan>
- Casey, B., Casey, N., Calvert, B., French, L., & Lewis, J. (2007). Television studies: The key concepts. In *Television Studies: The Key Concepts*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203960967>

- Chang, W., & Park, S.-E. (2018). The Fandom of Hallyu, A Tribe in the Digital Network Era: The Case of ARMY of BTS. *Kritika Kultura*, 32, 260–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.13185/kk2019.03213>
- December, J. (1997). *The World Wide Web Unleashed*. Sams.net Publishing.
- Detik. (2022). Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan Bertambah 1 Jadi 135 Orang! <https://www.detik.com/susel/sepakbola/d-6364968/korban-tewas-tragedi-kanjuruhan-bertambah-1-jadi-135-orang>
- Devi, J. F. (2022). BTS Army: Melampaui Narasi Stigmatisasi Identitas Perempuan Penggemar. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 12(1). <https://doi.org/10.17510/paradigma.v12i1.547>.
- Duffett, M. (. (2013). *Understanding Fandom : An Introduction To The Study Of Media Fan Culture*. Bloomsbury Publishing.
- Floretta, J. (2022). *Kanjuruhan Bukan yang Pertama: Solidaritas ARMY Datang dari Pesan Kasih*. Magdalene.Co. <https://magdalene.co/story/kanjuruhan-bukan-yang-pertama-solidaritas-army-datang-dari-pesan-kasih>
- Fuschillo, G. (2020). Fans, Fandoms, or Fanaticism? *Journal of Consumer Culture*, 20(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1469540518773822>
- Janati, F. (2022). *Donasi ARMY Indonesia untuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Kumpulkan Rp 447 Juta dan Diapresiasi Arema FC*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/05/092917066/donasi-army-indonesia-untuk-korban-tragedi-kanjuruhan-kumpulkan-rp-447-juta?page=all>.
- Ji-young, L. (2019). *BTS, Art Revolution: BTS Meets Deleuze*. Parrhesia Publishers.
- Joyce, M. (2010). *Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change*. International Debate Education Association.
- Jung, S. (2012). Fan activism, cybervigilantism, and Othering mechanisms in K-pop fandom. *Transformative Works and Cultures*, 10(3). <https://doi.org/10.3983/twc.2012.0300>
- Khalid, I. (2022). *Kumpulkan Rp 447 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Ini Harapan ARMY Indonesia*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/04/225506478/>

- kumpulkan-rp-447-juta-untuk-korban-tragedi-kanjuruhan-
ini-harapan-army
- Kim, J. O. (2015). Reshaped, Reconnected and Redefned: Media Portrayals of Korean Pop Idol Fandom in Korea. *The Journal of Fandom Studies*, 3(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1386/jfs.3.1.79_1
- Lacasa, P., de la Fuente, J., Garcia-Pernia, M., & Cortes, S. (2017). Teenagers, Fandom and Identity. *Persona Studies*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.21153/ps2017vol3no2art648>
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(04), 1–19.
- Love Myself.Org. (2017). *About Love Myself*. <https://www.love-myself.org/eng/about-lovemysself/>
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Prenada Media Group.
- Putri, I. R. (2022). Aktivisme Digital dan Pemanfaatan Media Baru Sebagai Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Atas Isu Lingkungan. *Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(2), 231–246.
- Rheingold, H. (1993). *The Virtual Community: Homesteading in the Electronic Frontier*. Addison-Wesley.
- Roth, M. (2015). *One Direction Fans Gave Harry Styles the Sweetest Birthday Present Ever*. MTV.Com. <http://www.mtv.com/news/2065632/harrystyles-birthday-fundraiser/>
- Sa'diyah, S. S. (2019). Budaya Penggemar Di Era Digital (Studi Etnografi Virtual Pada Penggemar BTS Di Twitter). *Jurnal Ilmu Komunikasi : JKOM*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jkom.v2i1.34>
- Tardini, S., & Cantoni, L. (2005). A Semiotic Approach to Online Communities: Belonging, Interest and Identity in Websites' and Videogames' Communities. *International Conference E-Society, March*, 371–378. <https://www.researchgate.net/publication/266218884>
- Tokopedia. (2021). *Fakta Unik BTS ARMY, Fandom Terbesar di Dunia K-Pop*. Tokopedia.Com. <https://www.tokopedia.com/blog/profil-bts-army/>

MEREFLEKSIKAN MEDIA DI TENGAH PERUBAHAN MASYARAKAT

Farisha Sestri Musdalifah

Pendahuluan

Media, mulai dari media massa (televisi, radio, media cetak) hingga media baru (internet, media sosial) memiliki peran besar dalam menyalurkan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang melahirkan adanya media sosial sebagai bagian dari media baru. Diawali dengan kemunculan internet, dunia maya kini hadir dalam genggaman tangan para penggunanya, dengan berbagai macam teknologi dan fitur-fitur yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan banyak aktivitas. Perkembangan teknologi berbasis internet ini membuat masyarakat terus berkembang dan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan cepatnya pergantian zaman. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pula pola perilaku masyarakat yang juga mengalami pergeseran, baik dari segi budaya, etika, serta norma. Tulisan ini merupakan refleksi bagaimana media baru hadir di tengah masyarakat sehingga menimbulkan berbagai fenomena-fenomena sosial baru yang berkaitan dengan moralitas, prekariat, demokratisasi, konsumerisme, ritual media, penelitian terkait media, hingga praktik kritis penggunaan media dalam kehidupan kita sehari-hari.

Kajian mengenai media membutuhkan teori-teori sosial agar dapat menarik generalisasi pada masyarakat sebagai khalayak dari

media (Hesmondhalgh & Toynbee, 2008). Maka dari itu, media tidak dapat lepas dari konteks sosial. Munculnya media atau timbulnya media baru yang menggantikan media lama akan berdampak pada perubahan sosial masyarakatnya. Kurangnya perhatian pada konteks sosial akan menyebabkan kajian media menjadi miskin akan gejala kasualitas sosial, bagaimana media memengaruhi masyarakat, atau bagaimana masyarakat memengaruhi industri media. Hal ini didukung juga dalam tulisan Nick Couldry (Couldry, 2008) bahwa teori maupun kajian mengenai media perlu diarahkan untuk menjadi lebih sosial dibandingkan sekadar melihat sisi ekonomi politik, teks, maupun kontribusi teknis industri media. Menggunakan teori-teori sosial, maka kajian mengenai media ditelusuri dari perspektif sosiologisnya terlebih dahulu, kemudian meneliti perilaku pengguna medianya.

Sepanjang hidupnya, masyarakat mengalami perubahan yang disebabkan oleh munculnya media. Pada satu sisi, masyarakat memengaruhi media untuk memenuhi segala kebutuhannya. Berkembangnya teknologi dan media memenuhi hampir segala aspek kebutuhan kita. Hal ini tercermin salah satunya dari kemunculan aplikasi ojek atau taksi *online* yang dapat memudahkan kita mencari transportasi. Namun di sisi lain, masyarakat juga dipengaruhi oleh kehadiran media yang terus berkembang. Ritual keluarga yang tadinya berkumpul bersama di ruang televisi dapat berubah ketika hadirnya perangkat *smartphone*. Van Dijk (Dijk, 2006) mengemukakan bahwa perkembangan teknologi jaringan komunikasi perlahan-lahan mengubah struktur masyarakat dari *mass society* menuju *network society*.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi budaya masyarakat, termasuk nilai dan ritual (kebiasaan) masyarakat. Di era media baru ini, kita mengalami saat di mana ritual makan di restoran tidak lengkap jika tidak foto bersama teman, atau foto objek makanan. Kepemilikan akun media sosial juga dianggap sebagai suatu kewajiban. Selain itu, masyarakat yang tadinya tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya sekarang menjadi memiliki ruang melalui media sosial untuk berpendapat. Hal ini

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh van Dijk (Dijk, 2006), bahwa terdapat tiga klaim dampak dari kemunculan media baru, khususnya internet. Tiga klaim tersebut yaitu internet membuat kondisi politik yang lebih baik dan menyediakan informasi tentang pemerintahan, internet memungkinkan adanya debat publik, dan internet dapat meningkatkan partisipasi langsung di dalam pembuatan keputusan. Media tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakatnya, sehingga media tidak dapat dikaji sebagai variabel sendiri. Jadi, bahasan mengenai media tidak hanya fokus pada medianya saja, melainkan fokus pada perubahan sosial yang terjadi akibat timbulnya media. Dengan ini, maka kajian media saling terkait satu sama lain sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi.

Media dan Moralitas

Tayangan televisi 'realitas' (*reality show*) telah lama menuai perdebatan dan kritik, karena realitas yang terdapat dalam tayangan tersebut telah didramatisasi dan terskenario untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini berkaitan dengan kelas dari para penontonnya sebagai konsumen. Wood dan Skeggs (Wood & Skeggs, 2008) dalam tulisannya membahas mengenai kaitan antara tayangan 'realitas' dan kelas. Nichols (dalam Wood & Skeggs, 2008) menyebutkan bahwa penonton tayangan 'realitas' ini menempati level terendah dalam hirarki selera. Hal ini juga terbukti dari pernyataan Baran dan Davis (dalam Sendjaja, 2008), bahwa tayangan atau tulisan mengenai konflik, gosip, seks, kekerasan, hal-hal berbau mistis, termasuk juga tayangan realitas merupakan contoh dari jurnalisme selera rendah. Selain itu, orang-orang yang terlibat dan juga penonton dari tayangan 'realitas' ini merupakan kelas pekerja.

Menurut Wood dan Skeggs (Wood & Skeggs, 2008), kelas pekerja dalam tayangan 'realitas' ditampilkan secara berlebihan, khususnya berdasarkan situasi budaya dan ekonominya. Contoh tayangan 'realitas' di Indonesia ialah acara Minta Tolong yang disiarkan di televisi swasta RCTI. Acara ini bertema kemanusiaan dan berusaha menguak sejauh mana keikhlasan dan kejujuran seseorang untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan.

Acara ini menampilkan sifat-sifat kemanusiaan yang patut dicontoh oleh para penontonnya. Berdasarkan contoh tayangan 'realitas' tersebut, terlihat bahwa adanya skenario yang diatur sedemikian rupa sehingga menampilkan kelas pekerja di televisi sebagai masyarakat yang tidak mampu sehingga membutuhkan bantuan dari kelas menengah dan atas. Bennet (dalam Wood & Skeggs, 2008) menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mampu ini membuat tayangan menjadi hambar, sehingga perlu diberikan sentuhan berupa skenario dan dramatisasi. Dramatisasi kehidupan yang ditampilkan dalam tayangan 'realitas' inilah yang akan menarik penonton sehingga membuat masyarakat terus untuk menonton. Tayangan 'realitas' menyajikan kehidupan kelas pekerja yang spektakuler dan mengundang emosi dengan sentuhan melodrama. Penampilan kelas pekerja yang dipertontonkan dalam tayangan 'realitas' inilah yang pada akhirnya membuat nilai-nilai dan selera menjadi universal.

Dalam konteks Indonesia, Brenner (Brenner, 2011) membahas moralitas melalui isu gender dan seksualitas. Terdapat dua golongan pergerakan yang menjadi ruang publik di Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto, antara lain golongan Islam fundamentalis dan golongan demokratis. Kedua golongan ini sama-sama bertujuan untuk menempatkan aturan moral bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini, mengenai isu gender dan seksualitas. Namun, dalam menyikapi isu gender dan seksualitas, kedua golongan ini memiliki posisi yang berseberangan. Di satu sisi, golongan Islam menyarankan bahwa negara sebaiknya menerapkan hukum-hukum Islam dalam kaitannya dengan gender dan seksualitas, karena kedua isu tersebut merupakan ranah privat. Namun di sisi lain, golongan demokratis bersikeras bahwa isu gender dan seksualitas merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.

Konsep dari moralitas itu sendiri perlu dipertanyakan. Apakah moral konseptual? Apakah moral kontekstual? Tidak ada standar-standar baku mengenai sejauh mana suatu tindakan dikatakan sebagai bermoral maupun tidak. Sejauh ini, konsepsi moralitas kembali lagi pada konteks sejarahnya. Standar definisi

mengenai ruang privat masih cara lama, yaitu mengadopsi standar Zaman Orde Baru. Pada akhirnya, moralitas merupakan sebuah kontestasi wacana. Siapa yang mempromosikan, maka ialah yang menjadi panutan moral yang paling benar. Media dalam hal ini memegang peranan penting, karena media mengonstruksikan moral. Solusinya ialah terletak pada posisi dari media itu sendiri. Harus ada penguatan lembaga publik yang memegang teguh kode etik tanpa pengaruh pasar, seperti media Antara dan TVRI.

Media dan Prekariat

Eksplorasi pekerja oleh kapitalis merupakan sebuah aspek fundamental dalam konsep kelas Marx (Fuchs, 2010). Kelas proletar merupakan mesin yang memproduksi nilai tambah, sedangkan kapitalisme merupakan mesin yang mengkonversi nilai tambah ini menjadi modal tambahan berikutnya. Dalam tulisannya, Fuchs (Fuchs, 2010) mengemukakan bahwa terdapat eksploitasi terhadap pekerja berpendidikan (*knowledge labour*). Salah satu contoh dalam lingkungan kita sehari-hari ialah pengetahuan yang dikomodifikasi, seperti sistem operasi Windows yang diproduksi sekali kemudian diperbanyak untuk kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Semakin berkembangnya teknologi di era media baru sekarang ini, eksploitasi kelas juga masih terjadi. Media baru seperti YouTube merupakan suatu wadah di mana kita sebagai konsumen informasi atau pengetahuan juga dapat sekaligus menjadi produsen. Jika konten yang ditampilkan dalam YouTube menarik, maka YouTube dapat menjadikan konten tersebut komoditas untuk dipasangkan iklan sehingga menghasilkan keuntungan. YouTube hanya menyediakan wadah, sedangkan konten informasi akan muncul dan mereproduksi dengan sendirinya.

Perkembangan teknologi ini tidak hanya terjadi dalam ranah informasi maupun hiburan seperti YouTube, melainkan juga dalam ranah transportasi, seperti munculnya aplikasi Uber. Uber merupakan aplikasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kendaraan dengan pihak yang membutuhkan kendaraan untuk menuju ke suatu tempat tertentu. Pengemudi Uber dieksploitasi oleh

perusahaan Uber itu sendiri, karena pekerjaan sebagai pengemudi Uber berbeda dengan pekerjaan pada umumnya (Adriaanse, 2016). Menurut Adriaanse (Adriaanse, 2016), pengemudi Uber dapat digolongkan sebagai pekerja prekariat. Pekerja prekariat merupakan mereka yang bekerja secara fleksibel, paruh waktu, sementara, dan tidak pasti (Fuchs, 2010).

Sebagai pekerja prekariat, pengemudi Uber dieksploitasi dengan berbagai cara karena fleksibilitas pekerjaannya. Namun, beragamnya eksploitasi dan segala ketidakpastian perusahaan Uber terhadap pengemudi-pengemudinya bertolak belakang dengan kesuksesan model Uber di negara-negara Barat. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adanya krisis pekerjaan dan model Uber itu sendiri. Krisis pekerjaan di negara-negara Barat diawali dengan berubahnya ideologi pasar dari liberalisme menjadi neoliberalisme yang berorientasi pada pasar bebas. Munculnya neoliberalisme menciptakan situasi dan iklim di mana Uber dapat berkembang (Adriaanse, 2016). Konsumen tentunya akan memilih transportasi dengan biaya terjangkau, nyaman, dan pasti (harga sudah tercantum di awal saat memesan kendaraan). Di samping itu, kesuksesan Uber juga didukung oleh surplus populasi, di mana mereka yang bukan merupakan tenaga kerja di bawah sistem kapitalisme (Adriaanse, 2016). Surplus populasi ini berpengaruh terhadap tersedianya lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.

Menyempitnya jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran memunculkan adanya pekerjaan omong kosong (*bullshit jobs*), fleksibilitas, dan pekerjaan paruh waktu. Pekerjaan omong kosong merupakan pekerjaan yang tidak bernilai dan tidak bertujuan, namun tetap ada untuk membuat seseorang tetap bekerja. Fleksibilitas artinya seorang pekerja dapat mengubah struktur pekerjaan dengan oposisi atau biaya rendah/minimal. Sementara, pekerjaan paruh waktu didefinisikan sebagai pekerja yang biasanya bekerja dibawah 30 jam seminggu sebagai pekerjaan utama (Adriaanse, 2016). Ketiga jenis pekerjaan non-standar di atas merestrukturisasi pasar tenaga kerja dan merupakan *role model*

dari ekonomi neoliberal (Borchard dan Huhtanen, 2013, dalam Adriaanse, 2016).

Paparan mengenai perubahan ideologi, surplus populasi, menyempitnya lapangan pekerjaan hingga timbulnya jenis-jenis pekerjaan non-standar di atas membuat kita mempertanyakan kembali kelangkaan pekerjaan tradisional dan hubungan antara buruh-majikan. Dalam hal ini, pekerja prekariat merupakan faktor penting yang mendukung kesuksesan Uber di negara-negara barat. Dengan memanfaatkan internet dan GPS, Uber menggunakan teknologi untuk menyambungkan pengemudi mobil dan mereka yang membutuhkan transportasi ke tujuan tertentu. Pengemudi Uber di sini bukan merupakan pekerja perusahaan yang stabil dengan kontrak jangka panjang dan dilindungi, melainkan pekerja yang independen dengan pengaturan yang fleksibel. Dalam model ini pula, pengemudi yang memiliki nilai di bawah standar dapat dipecah tanpa prosedur legal. Maka dari itu, model Uber tetap berhasil meskipun para pekerjanya terus dieksploitasi ialah karena Uber memanfaatkan pekerja prekariat yang disebabkan oleh krisis pekerjaan.

Media dan Demokratisasi

Di era digital ini, semua orang dapat menjadi konsumen sekaligus produsen dari konten dan informasi. Hal ini dapat kita temui di internet melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikan melalui blog maupun laman web lainnya. Fenomena ini menuai kritik dan perdebatan antara keahlian dan demokrasi dalam dunia jurnalisme. Keberadaan keahlian jurnalistik mulai dipertanyakan beserta dengan konsekuensinya terhadap nilai normatif dalam kehidupan demokrasi, publik, dan keadilan sosial. Kritik tajam terhadap profesi jurnalis mulai muncul di era tahun 1960-1970an, di mana banyak penelitian mengkritisi profesionalisme para jurnalis yang dikenal sebagai pihak transparan dan memiliki otoritas untuk mengonstruksi realitas. Tidak dapat dihindari, kita harus memahami bahwa perkembangan teknologi menantang pemahaman kita mengenai apa itu jurnalisme dan bagaimana jurnalisme bekerja.

Studi sosiologi di akhir tahun 1970an menyebutkan bahwa jurnalis menyebut statusnya sebagai seorang ahli yang menghadapi pandangan otoritatif pada bentuk dan makna kehidupan publik. Schudson (dalam Anderson, 2008) menilai konstruksi realitas oleh para jurnalis ini sudah sangat umum dalam penelitian jurnalisisme, sehingga terdapat kelompok radikal baru yang menyebutkan bahwa pemberitaan jurnalis dalam hubungannya dengan realitas dinilai membosankan. Masalah mendasarnya ialah bagaimana jurnalis menerjemahkan satu urutan sumber daya yang langka (keahlian mereka dalam membangun berita) menjadi sesuatu yang lain (kekuatan sosial politik) menjadi tidak terjawab.

Di samping konstruksi realitas yang dilakukan, Gans dan Tuchman (dalam Anderson, 2008) juga melihat bahwa jurnalis merupakan substitusi dari struktur yang lebih besar, yakni organisasi media, politik, dan ekonomi. Seorang jurnalis berbeda dengan profesi-profesi lainnya, karena tidak harus lulus sekolah tertentu. Maka dari itu, Zelizer (dalam Anderson, 2008) memilih untuk menyebut seorang jurnalis sebagai komunitas interpretif dibandingkan jurnalis sebagai profesi. Seorang jurnalis menggunakan kekuatan naratifnya untuk menjaga posisinya sebagai komunitas interpretif. Anderson (2008) sendiri mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat memasuki profesi jurnalis ini karena kerumitannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh munculnya media baru, bahwa tidak semua orang yang menulis dan mempublikasikan tulisannya di media sosial dapat dikatakan sebagai jurnalis. Khamis dan Vaughn (Khamis & Vaughn, 2011) membedakan antara *citizen journalism* dengan jurnalisisme profesional. *Citizen journalism* menggunakan media digital untuk melaporkan kejadian-kejadian di lapangan dengan mengunggah teks atau video langsung ke internet.

Kesuksesan dari munculnya media baru ini terbukti dengan jatuhnya rezim pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir. Artikel dari Khamis dan Vaughn (Khamis & Vaughn, 2011) menggambarkan bagaimana revolusi di Mesir terjadi akibat adanya *cyberactivism*. Howard (dalam Khamis & Vaughn, 2011) mendefinisikan *cyberactivism* sebagai tindakan yang menggunakan internet untuk

memajukan suatu politik tertentu yang sulit untuk dilakukan secara *offline*. *Cyberactivism* ini berkaitan dengan adanya *civic engagement* (keterlibatan masyarakat), yaitu proses di mana masyarakat sipil diundang untuk berpartisipasi dalam upaya politik, ekonomi, dan sosial yang sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk membawa perubahan (Khamis & Vaughn, 2011). Para masyarakat, dalam hal ini *citizen journalist* menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk melaporkan kejadian-kejadian saat aksi protes berlangsung. *Citizen journalist* dinilai lebih reliabel dan kredibel dalam menyampaikan informasi dibandingkan jurnalis profesional dari media seperti CNN maupun MSNBC, karena masyarakat Mesir lebih mengetahui kondisi negaranya sendiri dibandingkan para jurnalis profesional.

Cyberactivism yang terjadi di Mesir membuktikan bahwa semua orang dapat menyampaikan aspirasinya dan menyebarkannya seluas mungkin. Mereka dapat mengumpulkan massa yang memiliki pemikiran sejenis. Selain itu, pihak yang mengontrol dalam media baru merupakan pengguna (*netizen*) media baru itu sendiri. Hal ini di satu sisi menunjukkan demokratisasi dalam media. Namun di sisi lain, kita tidak mengetahui latar belakang pendidikan masing-masing *netizen* dalam media. Terpaan dalam media baru ini tidak dapat dibatasi, karena siapa saja dapat mengakses media baru. Maka dari itu, tidak jarang jika sikap kekanak-kanakan di media baru lebih mendominasi dibandingkan diskusi sehat yang membangun. Maka dari itu, demokratisasi itu sendiri merupakan sebuah paradoks, karena partisipasi yang selama ini digaungkan dalam media tidak dapat dikontrol sehingga menjadi *overparticipation*. Maka dari itu, perlu adanya literasi media, sehingga kita tidak dengan mudah dapat digiring melalui pemberitaan media.

Media dan Konsumerisme

Saat ini, setiap manusia cenderung untuk mengonsumsi barang atau jasa secara terus-menerus tanpa memperhatikan apakah hal tersebut benar-benar dibutuhkan dan berguna. Kecenderungan ini akhirnya membuat manusia menjadi konsumtif, di mana dalam

hidupnya seorang manusia akan selalu mengonsumsi sesuatu. Hal ini berkaitan dengan paham konsumerisme, di mana manusia membeli suatu barang untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya. Mengacu pada Baudrillard (1998) konsumsi bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan karena memaknai suatu objek sebagai bagian dari sistem yang berupa tanda atau kode, bahasa, dan moral.

Media memainkan peranan penting dalam terciptanya budaya masyarakat konsumtif, salah satunya melalui iklan. Ketika mengonsumsi sesuatu, konsumen sebelumnya diberikan rangsangan atau stimulus. Contohnya ketika kita melihat iklan, kita akan lebih mengingat iklan yang menarik. Hal ini dapat memengaruhi perilaku konsumen seseorang. Selain itu, peran lingkungan sosial dan masyarakat juga mendukung terciptanya perilaku konsumtif pada manusia. Pemikiran Baudrillard mengenai konsumerisme ini dipengaruhi oleh dua tokoh teori sosiologi klasik, yaitu Karl Marx dan Emile Durkheim (dalam Baudrillard, 1998). Melalui pemikiran Marx, Baudrillard mengemukakan bahwa produksi berprioritas pada konsumsi. Hal ini dapat dikaitkan dengan logika ekonomi, bahwa penawaran ada karena banyaknya permintaan. Kemudian, melalui pemikiran Durkheim, Baudrillard melihat konsumerisme dalam perspektif struktural fungsional, yaitu konsumsi sebagai perilaku kolektif. Perilaku kolektif merupakan sesuatu yang ditegakkan, moralitas, dilembagakan, dan merupakan keseluruhan sistem nilai. Maka dari itu, perilaku konsumsi merupakan perilaku yang telah terinstitusionalisasi. Kita sebagai manusia dilatih dan belajar untuk mengonsumsi sesuatu.

Fenomena konsumerisme ini dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia, modernisasi dan pembangunan ekonomi telah dipromosikan sejak zaman Orde Baru (1966-1997). Menurut William Liddle (dalam Ansori, 2009), liberalisasi ekonomi politik ketika rezim Orde Baru berperan penting dalam pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Masyarakat kelas menengah merupakan mereka yang menciptakan sebuah ruang budaya baru secara eksplisit (Ansori, 2009). Salah satu budaya yang

diciptakan oleh masyarakat kelas menengah, khususnya di Kota Jakarta, untuk menunjukkan identitasnya ialah pergi ke *kafe tenda*. Masyarakat kelas atas identik dengan gaya hidup makan di restoran mewah. Mengikuti budaya kelas atas tersebut, masyarakat kelas menengah menciptakan kafe tenda, yaitu tempat makan dengan suasana yang cukup mewah, namun dengan harga makanan yang terjangkau. Melalui kafe tenda, masyarakat kelas menengah Kota Jakarta dapat menyeimbangkan upaya mereka untuk membangun identitas kelas dan membuat perbedaan antar kelas. Maka dari itu, makan di kafe tenda merupakan upaya yang tidak pernah berakhir untuk membuat budaya kelas menengah melalui konsumerisme.

Selain kafe tenda, salah satu budaya yang diciptakan oleh kelas menengah untuk membangun identitasnya ialah pergi ke pusat perbelanjaan (*mall*). Daniel Ziv (dalam Ansori, 2009) menyebutkan bahwa dalam *mall* terdapat barang-barang mewah yang ditampilkan di etalase, memiliki tempat makan, kafe-kafe mahal, tempat bermain, pertunjukan musik secara langsung, salon, bahkan tempat menonton film. *Mall* dapat berfungsi sebagai tempat di mana masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jakarta dapat bersosialisasi bersama teman-teman, menikmati hiburan, atau sekedar mengunjungi. Namun, semakin hari, semakin jelas terlihat bahwa *mall* di Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, melainkan juga mengungkapkan unsur-unsur praktik budaya, khususnya budaya konsumsi. Sekarang ini, pergi ke *mall* tidak harus berbelanja, melainkan untuk *mejeng*. *Mejeng* merupakan perilaku yang dengan sengaja menampilkan tingkatan konsumsi tertentu, seperti memakai baju keluaran terbaru. Maka dari itu, makna dari *mall* sebagai pusat perbelanjaan itu sendiri telah berubah. Budaya mengunjungi *mall* merupakan salah satu upaya kelas menengah untuk dapat menunjukkan identitasnya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, mengunjungi *mall* atau makan di kafe tenda merupakan simbol-simbol konsumsi dan gaya hidup yang ditampilkan oleh masyarakat kelas menengah untuk dapat membedakan dirinya dengan masyarakat kelas bawah.

Ritual Media

Munculnya media memiliki berbagai dampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya itu, media dapat menghubungkan manusia-manusia yang sebelumnya tidak saling mengenal, sehingga media juga berdampak pada kehidupan sosial. Couldry (Couldry, 2003) dalam tulisannya mencoba untuk melihat bagaimana kehidupan sosial dimediasi melalui sistem media yang dampak kekuatannya sangat besar. Hal ini dikenal sebagai ritual media, yang mengacu pada seluruh jajaran situasi di mana media berdiri untuk sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang berkaitan dengan level organisasi fundamental di mana kita dapat terhubung sebagai anggota dari masyarakat (Couldry, 2003).

Pemikiran Couldry mengenai ritual media ini didasarkan pada tiga tokoh teori sosiologi, yaitu Emile Durkheim, Jacques Derrida, dan Michael Foucault. Pemikiran Durkheim (dalam Couldry, 2003) mengenai *Division of Labour* menjelaskan tentang institusi, di mana masyarakat memiliki fungsinya masing-masing yang saling menunjang. Institusi terkecil yang berada di sekitar lingkungan kehidupan kita merupakan institusi keluarga. Selain itu, terdapat juga institusi agama dalam pemikiran Durkheim di mana agama merupakan suatu ritual yang terinstitusionalisasi. Dalam hal ini, media merupakan salah satu institusi yang posisinya setara dengan institusi-institusi lain, seperti keluarga, agama, maupun pendidikan. Melalui pemikiran Durkheim tersebut, Couldry melihat bahwa media dapat mengubah institusi. Ritual menonton televisi yang biasa dilakukan oleh keluarga dapat berubah karena munculnya media baru seperti internet dan *gadget*. Ritual keagamaan juga dapat berubah ketika media muncul, seperti tayangan televisi yang menunda kegiatan ibadah seseorang. Hal ini membuat Couldry kemudian memandang media sebagai pusat dari segala institusi. Karena media telah menjadi pusat dari segala institusi, Derrida kemudian menyarankan adanya dekonstruksi institusi, di mana institusi-institusi yang tadinya berubah karena pengaruh media dikonstruksikan ulang. Misalnya, munculnya aturan bahwa di meja makan tidak boleh ada *gadget*.

Pemikiran Foucault fokus pada strategi kuasa yang dapat dimainkan oleh media. Media dapat membawa narasi besar untuk mengonstruksi pikiran khalayaknya. Ketika media sudah menjadi pusat dari semua institusi, maka strategi kuasa akan berjalan. Bahkan, identitas juga dapat diarahkan ke dalam narasi besar. Hal ini kembali lagi pada siapa yang berkuasa dalam memegang media agar dapat mengarahkan narasi besar untuk membentuk identitas.

Melalui perspektif antropologi, Couldry (Couldry, 2003) mengemukakan tiga pendekatan memahami istilah 'ritual', pertama ialah tindakan kebiasaan yang polanya berulang. Kedua ialah tindakan yang diformalkan, seperti pola beraturan yang memiliki makna. Ketiga ialah tindakan yang melibatkan nilai-nilai transenden. Berdasarkan tiga pendekatan ritual di atas, pendekatan kedua dan ketiga dinilai lebih menarik dan saling tumpang tindih dibandingkan pendekatan pertama. Tindakan yang diformalkan merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kebiasaan, karena suatu ritual melibatkan pola-pola yang memiliki makna. Pada pendekatan ketiga, di mana tindakan melibatkan nilai-nilai transenden, memiliki kecocokan dengan pendekatan kedua, namun menggeser penekanan pertanyaan dari bentuk murni ritual menuju nilai-nilai tertentu. Tindakan yang diritualkan mengarahkan perhatian kita ke sesuatu yang lain, yang lebih luas, dengan pola transenden, sehingga meningkatkan pertanyaan dari khalayak. Begitu pula dengan media yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial kontemporer, dengan pola transenden yang lebih luas di mana detil-detil kehidupan sosial lebih masuk akal. Maka dari itu, ritual di era kontemporer ini disebut sebagai 'ritual media'. Sesuatu akan menjadi ritual jika tidak ada refleksi. Media pada akhirnya dapat mendegradasikan suatu hal, misalnya ialah *pop culture* yang tadinya memiliki derajat tinggi, menjadi biasa saja di mata masyarakat.

Penelitian Media

Penelitian media selama ini dibandingkan melalui kriteria perbedaan yang sebagian besar bersifat 'nasional teritorial', di mana masih terkotak-kotakkan oleh batasan bangsa negara. Hal ini masuk

akal dalam beberapa bidang, seperti sistem media dan ekonomi politik, namun mengabaikan kriteria perbedaan lainnya yang perlu dirumuskan di luar bingkai bangsa negara, seperti ras, jenis kelamin, etnis, dan deterritorialisasi budaya populer. Berdasarkan banyak kritik terhadap wadah pemikiran teritorial tersebut dalam perbandingan penelitian media, artikel yang ditulis oleh Hepp dan Couldry (Hepp & Couldry, 2009) ini mengembangkan pendekatan transkultural (lintas budaya) dalam membandingkan penelitian media. Pendekatan ini tidak bermula dari negara dan batas-batas teritorialnya, tetapi lebih menekankan pandangan yang lebih kompleks dalam membandingkan penelitian media yang secara spesifik berbeda-beda. Hal ini disebut sebagai penebalan budaya (*cultural thickenings*). Untuk dapat mengerti pendekatan transkultural tersebut, pertama kita harus mengkritisi wadah pemikiran (*container thinking*) yang tersirat dalam banyak perbandingan penelitian media. Kemudian, kita menguraikan pemahaman tentang budaya media sebagai penebalan budaya.

Hepp dan Couldry (2009) mengkritisi wadah pemikiran teori sosial dalam perbandingan penelitian media dan merumuskannya menjadi tiga poin (Hepp & Couldry, 2009). Poin pertama mengkritik konsep *container state*, yaitu penolakan terhadap bangsa (*nation*) sebagai sesuatu yang menampung masyarakat. Poin kedua mengkritik pemikiran bahwa negara dibagi berdasarkan wilayah (teritorial), di mana budaya nasional terkait dengan wilayahnya. Poin ketiga mengkritik teorisasi mengenai ikatan nasional dan wilayah masyarakat sebagai sesuatu yang terintegrasi secara fungsional, sehingga mengabaikan segala proses penarikan dan pelanggaran yang tidak berfungsi dari kehidupan sosial kontemporer. Kritik mengenai wadah pemikiran dalam teori sosial harus dikontekstualisasikan dalam kritik-kritik mengenai pemikiran yang masih fungsionalis dalam penelitian sosial, khususnya penelitian media (Hepp & Couldry, 2009).

Jika kita mengontraskan argumen ini dengan diskusi studi media dan komunikasi saat ini, maka *container thinking* harus digantikan. Terdapat dua contoh untuk mendukung

pergantian *container thinking* ini, contoh pertama merupakan buku *De-Westernizing Media Studies* dari James Curran dan Myung-Jin Park. Dalam buku tersebut, Curran dan Park (dalam Hepp & Couldry, 2009) berpendapat bahwa ketika teori globalisasi mengkritisi pusat kebaratan, maka teori tersebut tidak dapat menjelaskan kekuatan hubungan dari kapitalisme global, seperti ekonomi politik di media dan komunikasi, karena teori tersebut mengesampingkan fokus pada negara sebagai unit perbandingan yang relevan. Maka dari itu, kita harus memisahkan pemikiran Barat dari dalam diri kita. Namun, bagaimana bisa mengkritik Barat jika kita masih memakai paradigma Barat? Menurut Curran dan Park (dalam Hepp & Couldry, 2009), negara masih relevan dengan penelitian komparatif media saat ini dengan argumen bahwa sistem komunikasi masih dalam aspek signifikasi nasional dan bahwa negara masih merupakan penenada penting dari perbedaan Mereka mengembangkan model yang berpusat pada negara untuk membandingkan sistem media antara dikotomi-dikotomi neo-liberal melawan regulasi dan demokrasi melawan otoritarian.

Contoh kedua merupakan buku *Comparing Media System* dari Hallin dan Mancini (dalam Hepp & Couldry, 2009). Menurut mereka, kebanyakan literatur mengenai media sangat etnosentris, hanya berdasarkan pengalaman suatu negara. Maka dari itu, Hallin dan Mancini (dalam Hepp & Couldry, 2009) mengembangkan tiga model sistem media, antara lain model pluralis yang berpihak, model korporasi demokratis, dan model liberal. Ketiga model ini hanya berlaku di beberapa negara saja. Hubungan negara terhadap sebuah model tidak hanya membuktikan sesuatu tentang media dan sistem politik, melainkan juga tentang masyarakat dan budaya medianya.

Praktik Kritis

Kajian media pada umumnya dilakukan dengan mengacu pada contoh penelitian dari negara-negara koloni, terutama Amerika dan Inggris. Toby Miller (2008) memberi penekanan bahwa kajian media merupakan kajian yang lebih internasional dan interdisiplin, dengan cara keluar dari konteks nasional. Kajian-kajian media

selama ini dinilai mengabaikan isu-isu internasional dan pekerja, padahal kedua isu tersebut penting dalam konteks budaya dan media. Kajian mengenai media pada umumnya bertema isu kepemilikan dan kontrol, konten, dan khalayak. Miller (Miller, 2008) membagi tiga tema besar kajian media tersebut menjadi dua kajian media, antara lain Kajian Media 1.0 dan Kajian Media 2.0.

Kajian Media 1.0 lebih fokus pada gagasan khalayak yang pasif dan efek dari media secara psikologis. Pada kajian 1.0 ini, media dianggap sebagai suatu kekuatan besar yang dapat memberikan dampak negatif pada khalayaknya. Maka dari itu, kajian ini lebih fokus pada kepemilikan dan kontrol media dibandingkan respon khalayak terhadap media yang dikonsumsi. Kesadaran individu sebagai khalayak dibentuk untuk kepentingan ekonomi politik dan produksi media. Berbeda dengan Kajian 1.0, Kajian Media 2.0 sebaliknya melihat bahwa kekuatan bukan terletak pada media, melainkan pada khalayak yang mengonsumsi media. Pada kajian ini, media dianggap tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ditampilkan, karena khalayak dianggap sudah cukup cerdas untuk melakukan interpretasi makna.

Miller (Miller, 2008) melihat bahwa Kajian Media 1.0 maupun Kajian Media 2.0 masing-masingnya terdapat kekurangan. Kajian Media 1.0 hanya fokus pada kekuatan media sehingga mengabaikan peran khalayak, sementara Kajian Media 2.0 fokus pada khalayak sebagai penonton tanpa melihat adanya dominasi dan eksploitasi dari media. Selain itu, kedua kajian tersebut juga mengabaikan peran pekerja di dalamnya. Menurut Wayne (dalam Miller, 2008), tanpa pekerja, maka tidak ada media dan budaya. Untuk itu, Toby Miller (Miller, 2008) mengajukan kajian baru sebagai solusi, yaitu Kajian Media 3.0 yang merupakan irisan dari Kajian Media 1.0 dan Kajian Media 2.0. Asumsi pertama Miller mengembangkan kajian ketiga ini ialah perlunya berbagai macam perspektif dalam mengkaji media. Maka dari itu, Miller (Miller, 2008) menganggap bahwa kajian media harus menggabungkan analisis etnografi, ekonomi politik, dan analisis estetika secara lokal maupun global. Maka dari itu, kita dapat melakukan Kajian Media 3.0 ini berdasarkan sejarah dalam

menteorikan budaya. Budaya dapat dipelajari melalui dua jalan, yaitu melalui ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam kemanusiaan, teks budaya dinilai berdasarkan kriteria kualitasnya, di mana perbedaan diartikulasi melalui norma-norma sosial. Sementara, ilmu sosial lebih fokus pada agama, adat, waktu, dan ruang dari kelompok-kelompok yang berbeda secara etnografik dan statistik. Ilmu sosial mengartikulasi perbedaan melalui norma-norma simbolik.

Terdapat beberapa contoh aplikatif yang dapat dikategorikan sebagai Kajian Media 3.0, seperti situs Sarai (sarai.net), Free Software Foundation (fsf.org), dan Alternative Law Forum (altlawforum.org). Situs-situs tersebut menggabungkan unsur internasionalisme, ekonomi politik, etnografi, analisis teks, dan mengisi kekurangan yang diabaikan oleh Kajian Media 1.0 dan Kajian Media 2.0. Intinya, Kajian Media 3.0 merupakan salah satu praktik kritis yang berusaha melawan dominasi kapitalis.

Unsur pekerja yang selama ini juga diabaikan oleh Kajian Media 1.0 dan Kajian Media 2.0 dapat dibahas dalam Kajian Media 3.0. Miller (Miller, 2008) mengambil satu kasus dalam produksi perangkat lunak permainan. Sejak tahun 1980-an, nama kreator tidak dituliskan dalam *credits* sehingga para kreator kehilangan popularitasnya sebagai pekerja. Pemilik perusahaan perangkat lunak permainan dapat dengan mudah mengganti para pekerjanya dan mengabaikan hak-hak mereka, sehingga para pekerja menjadi terdominasi. Kemudian, munculnya protes dari para pekerja perusahaan permainan EA (*Electronic Arts*) menimbulkan pergerakan dari kaum prekariat. Kaum prekariat dapat menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak nya yang selama ini termarginalkan. Perjuangan ini juga dapat menjadi fokus dalam Kajian Media 3.0 yang diusulkan oleh Miller (Miller, 2008), karena hal tersebut tidak dapat dilihat melalui Kajian Media 1.0 dan Kajian Media 2.0.

Kesimpulan

Setelah tinjauan yang telah dipaparkan pada sebelumnya, terdapat benang merah dari ketujuh bahasan tersebut dalam menjelaskan media dan dampaknya bagi perubahan masyarakat

sebagai khalayaknya. Bahasan mengenai media dan masyarakat diawali dengan moralitas, yang berkaitan dengan peran media dalam mengarahkan narasi besar untuk membentuk identitas. Mereka yang menganggap dirinya bermoral mulai membuat standar bagaimana moralitas ditayangkan melalui media. Maka dari itu, terdapat konstentasi moral yang dapat menciptakan *moral panic*. *Moral panic* merupakan suatu keadaan munculnya ketegangan demi kepentingan pihak tertentu yang merasa lebih bermoral. Hal ini terlihat ketika media menyensor tayangan-tayangan yang dianggap menampilkan pornografi, seperti belahan dada. Solusi dari pertarungan narasi pembentukan identitas ini ialah harus ada media netral yang memegang teguh kode etik tanpa adanya pengaruh dari pasar.

Media juga berkaitan dengan tenaga kerja prekariat. Munculnya media baru dan krisis jumlah lapangan kerja meningkatkan jumlah tenaga kerja prekariat. Hal ini tercermin dari munculnya aplikasi ojek dan taksi *online*, yang memudahkan kita dalam mencari transportasi dengan harga yang terjangkau. Di sini, pertarungan wacana juga terjadi. Tenaga kerja prekariat di satu sisi terlihat diuntungkan, karena memiliki jam kerja yang fleksibel dan pemasukan yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, tenaga kerja prekariat tidak memiliki jaminan asuransi seperti tenaga kerja pada perusahaan dengan sistem kapitalisme.

Berkembangnya media sangat berpengaruh terhadap terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Kekuatan demokratisasi dari masyarakat melalui media telah terbukti dengan jatuhnya rezim pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir (Khamis & Vaughn, 2011). Hal ini membuat demokratisasi pada media menjadi semakin jelas. Kontestasi wacana semakin terlihat ketika terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Namun jika dilihat dari lain sisi, pertarungan wacana dalam media baru ini tidak dapat dibatasi karena semua orang dapat menyuarakan aspirasinya. Hal ini membuat demokratisasi pada media menjadi paradoks karena pertarungan wacana menjadi tidak dapat dikontrol, sehingga menyebabkan *overparticipation*. Literasi

media menjadi hal yang penting bagi kita untuk melihat berita atau opini yang tersebar dalam media.

Pertarungan wacana juga terjadi pada budaya konsumsi yang ditampilkan melalui media. Konsumsi tidak hanya sekadar kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan memaknai suatu objek sebagai bagian dari sistem yang berupa tanda, bahasa, dan moral (Baudrillard, 1998). Kelas menengah menciptakan identitasnya sendiri untuk membedakan dirinya dengan kelas bawah dengan cara menampilkan gaya hidup yang 'meniru' kelas atas. Hal ini tercermin dari munculnya kafe tenda, tempat makan dengan suasana cukup mewah, namun memiliki harga yang terjangkau. Dengan ini, masyarakat kelas menengah dapat menyeimbangkan upaya untuk membangun identitas baru agar berbeda dengan masyarakat kelas bawah. Gaya hidup konsumsi masyarakat menjadi berubah sejak kemunculan media, karena media dapat menampilkan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Sesuatu ini merupakan barang konsumsi yang memiliki tanda atau nilainya tersendiri, sehingga merepresentasikan identitas kelas.

Secara tidak langsung, budaya konsumsi juga berkaitan dengan ritual media, di mana media menjadi pusat dari segala institusi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat terlihat pada ritual media oleh kelas menengah yang menggunakan media untuk menampilkan kehidupannya, seperti mengunggah foto ketika makan di restoran, liburan, dan foto-foto lainnya untuk menunjukkan identitas kelasnya. Couldry (Couldry, 2003) didasari oleh pemikiran Emile Durkheim, melihat bahwa praktik ritual media yang dilakukan oleh masyarakat menggambarkan bahwa media seakan-akan menjelma seperti agama yang menuntun dan memengaruhi kehidupan bermasyarakat menuju kebenaran yang hakiki.

Praktik ritual media dan budaya konsumerisme pada masyarakat membuat kajian media harus melampaui konteks teritorial bangsa dan negara. Isu-isu seperti ras, gender, etnis, dan deterritorialisasi budaya populer juga perlu untuk diteliti dengan melangkahi batasan teritorial bangsa dan negara menggunakan

pendekatan transkultural. Isu-isu tersebut tidak hanya dapat dikaji pada konteks masyarakat Indonesia saja, melainkan dapat ditarik ke dalam fenomena perubahan masyarakat secara luas.

Berdasarkan pendekatan yang transkultural dan interdisiplin dalam mengkaji media, maka kita harus mengubah praktik-praktik kita dalam menggunakan media. Modernisasi dan masuknya paham neoliberalisme ke dalam media membentuk kita menjadi pribadi yang cuek dan individualis akibat adanya sistem. Manusia dibatasi oleh sekat-sekat jabatan pada sistem kapitalisme, membuat kita merasa memiliki kelas lebih tinggi dan enggan untuk berinteraksi dengan mereka yang dianggap merupakan kelas bawah. Kita harus melangkahi sekat-sekat sistem tersebut dan mencoba untuk berbaur dengan masyarakat tanpa memandang kelas. Dengan melakukan praktik kritis ini, kita dapat memperluas wawasan dan pandangan mengenai kehidupan di dunia ini dari berbagai perspektif.

Pada akhirnya, apa yang ditampilkan melalui media merupakan pertarungan wacana. Berbagai kelompok masyarakat saling berkontestasi menyuarakan wacana yang dianggap paling benar, mulai dari moralitas, tenaga kerja prekariat, demokratisasi, konsumerisme, dan ritual media yang berpengaruh terhadap kajian media dan praktik kritis yang akan kita lakukan. Hal ini merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi media yang mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia dalam masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Adriaanse, M. L. (2016). *Profits and Precarity: Uber and the Crisis of Work*. Leiden University.
- Anderson, C. (2008). Journalism: Expertise, Authority, and Power in Democratic Life. In D. Hesmondhalgh & J. Toynbee (Eds.), *The Media and Social Theory* (pp. 248–264). Routledge.
- Ansori, M. H. (2009). *Consumerism and the Emergence of a New Middle Class in Globalizing Indonesia*.

- Baudrillard, J. (1998). *The Consumer Society: Myths and Structures*. SAGE Publications Ltd.
- Brenner, S. (2011). Private Moralities in the Public Sphere: Democratization, Islam, and Gender in Indonesia. *American Anthropologist*, 113(3), 478–490. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2010.01355.x>
- Couldry, N. (2003). *Media Rituals: A Critical Approach*. Routledge.
- Couldry, N. (2008). Form and Power in An Age of Continuous Spectacle. In D. Hesmondhalgh & J. Toynbee (Eds.), *The Media and Social Theory*. Routledge.
- Dijk, J. van. (2006). *Network Society*. SAGE PublicationsSage CA: Los Angeles, CA.
- Fuchs, C. (2010). Class, Knowledge and New Media. *Media, Culture & Society*, 32(1), 141–150. <https://doi.org/10.1177/0163443709350375>
- Hepp, A., & Couldry, N. (2009). What Should Comparative Media Research be Comparing? Towards a Transcultural Approach to “Media Cultures.” In D. K. Thussu (Ed.), *Internationalizing media studies* (pp. 32–48). Routledge.
- Hesmondhalgh, D., & Toynbee, J. (2008). Why Media Studies Needs Better Social Theory. In *The Media and Social Theory* (p. 24). Routledge.
- Khamis, S., & Vaughn, K. (2011). Cyberactivism in The Egyptian revolution: How Civic Engagement and Citizen Journalism Tilted the Balance. *Arab Media and Society*, 14(3), 1–25. <https://doi.org/10.12691/jsa-3-1-1>
- Miller, T. (2008). Step Away from The Croissant. In D. Hesmondhalgh & J. Toynbee (Eds.), *The Media and Social Theory* (pp. 210–230). Routledge.
- Sendjaja, S. D. (2008). Akuntabilitas Sosial Media Massa. In *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*. Kompas.
- Wood, H., & Skeggs, B. (2008). Spectacular Morality: ‘Reality’ Television, Individualisation, and The Remaking of The Working Class. In D. Hesmondhalgh & J. Toynbee (Eds.), *The Media and Social Theory*. Routledge.

BAB VI

Dinamika Isu-Isu Sosial Politik Kontemporer Ilmu Hubungan Internasional

MENINJAU KEMBALI KOMITMEN INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI CRPD DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

Ramdan Lamato

Pendahuluan

Dalam perkembangan kajiannya, khazanah akademik kontemporer mengenai Ilmu Hubungan Internasional (HI) telah turut mengakui urgensi berbagai isu Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya momen Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948, HAM semakin mendekonstruksi hukum internasional dengan memandang pentingnya hak-hak mendasar manusia yang telah disepakati secara universal alih-alih hak negara semata. Ratifikasi negara-negara pada DUHAM, Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya, serta berbagai konvensi dan perjanjian internasional lainnya menandakan komitmen negara untuk menginternalisasi instrument HAM global ke dalam komponen dan instrumen normatif serta legislatif pada ranah internal dan menjamin pemenuhan hak-hak yang dilindungi pada perjanjian-perjanjian tersebut (Donnelly, 2003).

Salah satu isu HAM yang semakin mendapatkan atensi global adalah isu disabilitas. Isu disabilitas telah menjelma menjadi salah satu fokus penting dalam perkembangan pembahasan mengenai HAM. Perumusan *Convention on Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) telah menjadi momentum digaungkannya isu disabilitas

dalam kerangka HAM universal. Sebagai sebuah norma HAM internasional, CRPD memuat prinsip-prinsip fundamental HAM yang berlaku secara universal serta mengakui kaum difabel sebagai pemegang hak-hak mendasar sebagai manusia dan subjek HAM (Degener, 2016). CRPD juga secara tidak langsung mengantarkan diskursus mengenai isu disabilitas pada babak baru, di mana pendekatan-pendekatan tradisional, seperti *charity-based* (pendekatan belas-kasih) dan *medical-based* (pendekatan medis) tidak lagi relevan untuk memandang isu disabilitas dan kaitannya dengan inklusi sosial.

Titik fokus pembahasan isu disabilitas dengan pendekatan berbasis sosial dan HAM berada pada penekanan atas nilai-nilai dasar manusia, yakni martabat, otonomi, kesetaraan, dan solidaritas, yang dimiliki oleh siapa saja termasuk kaum difabel. Hal ini menjadi signifikan, mengingat bahwa dominasi pendekatan tradisional di atas dalam perspektif disabilitas telah menciptakan semacam ruang segregasi dan stigmatisasi terhadap kaum difabel. Pendekatan tradisional tersebut menitikberatkan peletakan kaum difabel sebagai objek dan mengabaikan peran mereka sebagai subjek dalam kehidupan sosial. Dalam konteks faktual, kaum difabel di seluruh belahan bumi seringkali dianggap “beban” bagi keluarga dan masyarakat ketimbang sebagai subjek yang mandiri (Quinn & Degener, 2002).

Dengan hadirnya CRPD sebagai momentum titik balik pengarusutamaan dan inklusi isu disabilitas, maka negara-negara anggota pihak CRPD sangat diharapkan untuk menunjukkan bukti komitmen mereka dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia sendiri tergolong sebagai salah satu negara peratifikasi awal CRPD. Indonesia menandatangani CRPD pada 2007, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ratifikasi CRPD menjadi UU No. 19 tahun 2011. Selanjutnya, Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai revisi UU No. 19 tahun 2011. Isu disabilitas juga telah dimasukkan dalam agenda Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) pada RANHAM 2015-2019 dan 2021-2025. Selain itu, Indonesia sebenarnya sudah

memiliki beberapa regulasi yang membahas hak-hak disabilitas, di antaranya adalah UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Penerapan regulasi-regulasi di atas membuat ekspektasi dunia terhadap Indonesia menjadi sangat tinggi untuk menjadi negara yang ramah disabilitas. Hal demikian adalah wajar, dan juga terlebih lagi, jumlah populasi difabel di Indonesia tidak bisa dikatakan sedikit. Tercatat bahwa populasi difabel berumur dua tahun atau lebih berjumlah total 21.1 juta jiwa, atau 8.56% jika dibandingkan keseluruhan penduduk (Survei Penduduk Antar Sensus, 2015). Namun pada realitanya, hal ini berbanding terbalik dengan tingginya tingkat pelanggaran hak-hak difabel dan diskriminasi terhadap difabel yang sudah mendarah daging di Indonesia. Dalam kondisi penerapan di lapangan, komitmen Indonesia terhadap CRPD nampak berbanding terbalik dengan ekspektasi banyak pihak.

Human Rights Watch (HRW) pada 2016 merilis laporan yang menguak praktik pemasangan yang masih terjadi terhadap sekitar 57 ribu difabel mental/psiko-sosial. Di samping itu, Nicola Edwards (2014) menilai ratifikasi CRPD oleh Indonesia hanya sebagai *lip-service* semata, dan masih banyak ketidaksesuaian antara kebijakan disabilitas Indonesia dan prinsip-prinsip dalam CRPD. Adanya ketimpangan ini seakan semakin dikuatkan dalam *joint shadow report* yang dilayangkan aliansi Disability Convention Team (2017) kepada Komite Hak Disabilitas PBB untuk mengkritisi kasus-kasus diskriminasi dan kurangnya kesadaran atas disabilitas di Indonesia, serta regulasi tingkat nasional dan daerah yang secara eksplisit bertolak belakang dengan poin pada CRPD.

Tulisan ini mengidentifikasi setidaknya dua pekerjaan rumah (PR) paling krusial oleh Indonesia yang harus diselesaikan untuk menegaskan kembali konsistensi dan kepatuhan Indonesia pada CRPD. Kedua poin tersebut adalah harmonisasi kebijakan/peraturan mengenai disabilitas di Indonesia dan inklusi kaum difabel dalam seluruh aspek sosial kemasyarakatan. PR di atas merupakan masalah-masalah structural dan melekat yang masih saja muncul

bahkan setelah segenap peraturan, kebijakan, dan sosialisasi telah dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak disabilitas.

Aspek paling pertama dan paling krusial yang harus segera diperbaiki dalam komitmen Indonesia terhadap hak disabilitas adalah kebijakan dan peraturan mengenai disabilitas di Indonesia. Sebagian besar kebijakan disabilitas di Indonesia masih meletakkan kaum difabel sebagai obyek kebijakan dan berfokus pada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan (PSHK, 2016). Pendekatan pada kebijakan ini turut memperlebar jarak kesenjangan yang memisahkan kaum difabel dengan komunitas masyarakat. Ditambah lagi, peraturan dan perundangan disabilitas cenderung memaksakan agar kaum difabel yang memiliki kondisi fisik berbeda untuk menyesuaikan dengan keadaan “normal” yang dialami non-difabel. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 69 UU Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 33 Tahun 1964, dan Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 1964 tidak berupaya memenuhi hak dan menghilangkan hambatan bagi kaum difabel. Ketiga pasal tersebut hanya mengatur mengenai bantuan dana kepada kaum difabel. Alih-alih penghapusan hambatan struktural bagi kaum difabel, santunan dana merupakan mekanisme yang dianggap dapat menyelesaikan masalah, sehingga problematika kompleks dalam isu disabilitas yang seharusnya disasar tetap tidak tersentuh dan terangkat ke permukaan.

Pembahasan mengenai kebijakan disabilitas di Indonesia sangat berkaitan dengan data disabilitas, karena sudah selayaknya kebijakan disusun dan diterapkan dengan mengacu pada data-data dan indikator-indikator yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Pada kenyataannya, data disabilitas di Indonesia masih belum mumpuni dan memadai. Seperti dilansir media Tempo, sampai dengan saat ini, Kementerian Sosial dan kementerian terkait belum memiliki data angka pasti mengenai populasi difabel di Indonesia. Data mengenai disabilitas masih mengacu pada dua survei nasional, yakni Susenas 2018 dan Riskesdas 2018. Namun, dua survei tersebut menggunakan indikator yang sangat berbeda sehingga menghasilkan angka populasi difabel yang perbedaannya cukup

signifikan (Hastuti dkk, 2020). Selain data penyandang disabilitas secara umum, data disabilitas secara mendetail yang mengandung informasi nama dan alamat sebenarnya telah disusun pada 2018 oleh Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDP). Akan tetapi, sampai dengan 2019, dataset ini hanya mampu mengumpulkan sekitar 140.000 individu. Dari kondisi di atas dapat dilihat bahwa dataset yang lengkap mengenai populasi kaum difabel masih carut-marut. Hal ini dapat memicu kebijakan-kebijakan yang diterapkan atas data tersebut menjadi salah sasaran. Adanya dataset terpusat, terintegrasi, dan menggunakan indikator kesehatan, sosial, dan ekonomi yang komprehensif merupakan hal mendesak bagi pemenuhan HAM kaum difabel pada masa mendatang.

Aspek selanjutnya yang masih menimbulkan rasa miris adalah inklusi sosial terhadap kaum difabel yang tidak kunjung terwujud. Dengan adanya pendekatan berbasis sosial dan HAM pada CRPD (Degener, 2016), sudah selayaknya Indonesia sebagai negara peratifikasi mewujudkan kesetaraan dan persamaan bagi difabel dan non-difabel. Pada kenyataannya, marjinalisasi isu disabilitas dalam aspek sosial masih sangat tinggi. Kaum difabel tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini kemudian berkonsekuensi negatif yang semakin membuat kualitas hidup kaum difabel menjadi lebih rendah daripada non-difabel. Kaum difabel secara umum memiliki taraf pendidikan dan kesehatan rendah. Selain itu, akses kepada lapangan pekerjaan dan fasilitas umum lainnya tidak sebaik akses yang dimiliki non-difabel. Situasi demikian justru memicu efek bola salju yang semakin membatasi peluang kaum difabel untuk mengambil peran dalam pembangunan, dan lebih parah lagi, mengucilkan kaum difabel dari tatanan sosial.

Di antara pembahasan dalam pendekatan sosial isu disabilitas adalah mengenai disabilitas sebagai identitas. Dalam model sosial disabilitas, hambatan-hambatan bagi kaum difabel bukan lagi kondisi yang dimilikinya, melainkan situasi konteks sosial yang masih

mengecualikan mereka untuk berpartisipasi di masyarakat. Identitas yang dimiliki kaum difabel wajib untuk dihargai dan diakomodir oleh pemerintah untuk menghapuskan ignoransi dan membangun jembatan penyambung antara difabel dan non-difabel. Namun, kondisi di lapangan justru mencerminkan hal yang berlawanan. Alih-alih melunturkan hambatan sosial yang ada, kaum difabel justru “dipaksa” untuk mengikuti *setting* sosial yang berlaku secara “normal”. Contoh paling sederhana adalah penerapan sistem sekolah luar biasa di Indonesia yang justru merupakan antitesis dari prinsip pendidikan inklusif yang diatur dalam CRPD. Sistem pendidikan luar biasa yang memisahkan dan mengkotak-kotakkan anak-anak difabel dan non-difabel justru merupakan langkah-langkah awal menuju jurang segregasi yang sangat lebar. Selain itu, penggunaan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) sebagai bahasa pengantar resmi di SLB juga berlawanan dengan aspek penghargaan terhadap komunitas difabel Tuli. Absennya keterlibatan komunitas Tuli dalam penciptaan SIBI oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan SIBI tidak dapat dimengerti oleh penyandang Tuli secara umum dan tidak representatif. Komunitas difabel Tuli di Indonesia sejatinya telah memiliki bahasa sendiri, yakni Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang tercipta secara natural dan lebih melekat pada komunitas Tuli sebagai identitas mereka. Namun BISINDO tidak terlalu diakui dan SIBI tetap digunakan dalam pembelajaran di SLB. Hal ini secara langsung mencederai penghormatan atas identitas kaum Tuli di Indonesia menyangkut bahasa mereka yang tidak mendapatkan pengakuan. Dua kasus di atas adalah sedikit dari bentuk nyata adanya hambatan sosial yang menimpa kaum difabel yang tidak kunjung dituntaskan oleh pemerintah Indonesia selaku *duty bearer* dalam penghormatan dan pemenuhan HAM bagi warganya.

Komitmen sungguh-sungguh pemerintah terhadap integrasi kebijakan yang komprehensif dan langkah-langkah inklusi kaum difabel dalam seluruh sektor dan tatanan sosial patut untuk didesak. Implementasi CRPD dalam UU No. 8 Tahun 2016 beserta produk hukum/kebijakan turunan yang tidak disandingkan dengan praktik-praktik baik dalam pemenuhan hak-hak kaum difabel memunculkan sebuah ironi sekaligus tidak kunjung menyempitkan kesenjangan yang dialami oleh kaum difabel. Sebagai tindak lanjut,

Indonesia juga wajib untuk meratifikasi Protokol Opsional CRPD yang mengatur mengenai prosedur pelaporan secara mandiri oleh individu dan masyarakat/komunitas. Ratifikasi Protokol Opsional CRPD ini dipandang krusial karena tetap sejalan dengan tujuan negara dan tidak berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia untuk bergabung dengan 100 negara lainnya yang meratifikasi Protokol Opsional CRPD sebagai perwujudan lebih jauh atas praktik-praktik pemenuhan HAM bagi kaum difabel yang sudah berjalan (Komnas HAM, 2016).

Mengerucutkan pembahasan pada tema Buku 39 Tahun FISIP UNSRI, penulis melandaskan tulisan ini pada paradigma konstruktivisme yang menegaskan bahwa instrumen HAM beserta produk turunannya merupakan seperangkat norma yang tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Seperangkat norma ini terlahir ke dunia sebagai hasil dari sekumpulan ide/gagasan yang terus dikontestasikan dan dikonstruksikan. Mengacu pada landasan ontologis demikian, sudah selayaknya segenap rakyat Indonesia tidak terkecuali civitas akademika FISIP UNSRI melakukan serangkaian “rekonstruksi” untuk menghapuskan secara bertahap stigmatisasi dan diskriminasi terhadap kaum difabel di Indonesia. Terlebih lagi, dalam semangat menyambut momentum 39 tahun kiprah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, isu disabilitas seharusnya menjadi salah satu pokok pembahasan penting yang mewarnai ruang-ruang kajian akademik di lingkungan FISIP UNSRI. Hal ini ditujukan untuk semakin menegaskan kontribusi pembelajar ilmu sosial dan politik di Indonesia dan di Universitas Sriwijaya khususnya dalam inklusi disabilitas pada berbagai lapisan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2015). Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.
- Cogburn, D. L., & Reuter, T. K. (2017). Making disability rights real in Southeast Asia: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in ASEAN. Lanham: Lexington Books.

- Degener, T. (2016). Disability in a Human Rights Context. *Laws Journal*, Vol. 5 No. 35. pp. 1-24. doi:10.3390/laws5030035
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Edwards, N. (2014). Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Australian Journal of Asian Law*, 1-15.
- Hastuti, et.al. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. SMERU Research Institute
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). *Mendorong Pengesahan "Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (OP-CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas* (pp. 1-34, Position Paper). Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Nursyamsi, F., et al. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Publication). Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. doi:<https://pshk.or.id/publikasi/riset/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas/>
- Quinn, G., & Degener, T. (2002). *Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in The Context of Disability* (Rep. No. HR/PUB/02/1).
- Tempo.co. (2018). *Bahasa Isyarat SIBI dan Bisindo, Tilik Perbedaannya*. <https://difabel.tempo.co/read/1105916/bahasa-isyarat-sibi-dan-bisindo-tilik-perbedaannya>. Diakses 7 Oktober 2022.
- Tempo.co. (2021). *Kementerian Sosial Bersih-bersih Data Penyandang Disabilitas*. <https://difabel.tempo.co/read/1494010/kementerian-sosial-bersih-bersih-data-penyandang-disabilitas>. Diakses 7 Oktober 2022.

KETIDAKSTABILAN POLITIK KIRGIZTAN MENIMBULKAN KONFLIK DOMESTIK (KONSEP KEAMANAN MANUSIA; PERSONAL)

Muhammad Yusuf Abror

Pendahuluan

Di dalam penulisan ini penulis membahas *human securiy*, spesifikasinya pada *human security personal*. Penulis mengambil studi kasus *human security personal* di negara Kirgiztan. *Security* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan keamanan memiliki arti kebebasan dari berbagai macam resiko. Seperti yang disebutkan oleh United Nation Development Program (UNDP), keamanan manusia berarti “kebebasan dari rasa takut dan dapat memenuhi kebutuhan” (King & Murray, 2000). Sedangkan menurut Prof. Edward Newman dari United Nations University (2001), Ia memberikan pandangan bahwa yang dimaksud dengan keamanan manusia adalah “bebas dari rasa takut, bebas dari rasa tertekan, bebas mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban”. Pandangan tradisional keamanan difokuskan pada penggunaan militer untuk menjamin integritas wilayah negara berdaulat. Dana yang dihabiskan untuk keamanan militer secara global sebesar dari 49% dari total pendapatan penduduk dunia (UNDP, 1994).

Meskipun dana yang besar tersebut dianggap telah meningkatkan keamanan bagi masing-masing negara yang menjalankannya, tetap saja keamanan itu menjadi bias. Keamanan menjadi sangat menakutkan akibat dari penumpukan senjata yang

bisa saja suatu saat nanti menjadi bom waktu bagi seluruh dunia. Korban jiwa dari peningkatan militer terus berjatuhan, dengan senjata yang dibeli melalui anggaran negara dapat membunuh rakyatnya sendiri. Para pembuat kebijakan lebih fokus pada keamanan teritorial negaranya daripada fokus pada keamanan warga negaranya. Meskipun teritori suatu negara itu aman, jika konflik internal di dalam suatu negara tetap terjadi, maka keamanan dengan meningkatkan biaya militer menjadi tidak berarti. Hal ini menurut Johan Galtung hanya memenuhi konsep *negative peace*, yaitu ketiadaan perang antar negara. Namun pada kenyataannya konflik dan kekerasan di dalam negara masih terus berlangsung. Menurut Galtung ini tidak memenuhi konsep *positive peace*, yaitu seharusnya konflik dan kekerasan di dalam kehidupan sosial harus dihilangkan.

Teori ini yang kemudian sesuai dengan konflik di Kirgiztan, konflik yang terjadi di sini lebih kepada *positive peace*, yaitu perang saudara, anti pemerintahan, otoriterisme penguasa, pengekangan HAM dan konflik sosial-politik lainnya. Konflik di Kirgiztan adalah bertujuan dalam memperebutkan kekuasaan tertinggi, ketidakstabilan ekonomi, sentimen etnis Kirgiz dengan etnis Uzbek dan birokrasi pemerintah yang kurang baik. Konflik politik di Kirgiztan telah menyebabkan kekerasan ditatanan sosial masyarakat. Mereka merasakan dampak penderitaan konflik yang berlarut-larut, sehingga korban jiwa berjatuhan.

Menurut UNDP keamanan manusia memiliki empat karakteristik penting yaitu, universal, komponen keamanan manusia yang saling tergantung, keamanan manusia yang baik dijamin melalui pencegahan konflik, dan keamanan manusia adalah berpusat kepada setiap orang (King & Murray, 2000). Sedangkan yang terjadi di Kirgiztan merupakan peristiwa yang sangat tidak mencerminkan keamanan manusia. Hal ini disebabkan konflik yang berjalan, monopoli politik oleh pemerintah sehingga disebut sebagai pemerintahan otoriter dan pemerintah yang memperkaya diri sendiri membuat pihak oposisi dan rakyat pada umumnya tidak menyukai rezim Aykanev. UNDP juga mengkategorikan bahwa

ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan dalam tujuh kategori, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi/personal, keamanan masyarakat dan keamanan politik (King & Murray, 2000). Dari ketujuh kategori keamanan yang disebutkan oleh UNDP, Kirgiztan masuk ke dalam kategori tidak ada rasa aman pada keamanan personal, ekonomi, masyarakat, dan politik. Hal ini tercermin pada tahun 2005, yaitu pada masa Revolusi Tulip. Kebutuhan mereka yang harus disediakan oleh negara tidak terpenuhi karena pemerintah sibuk mempertahankan kekuasaannya dan sibuk berkonflik dengan kelompok oposisi.

Menurut kebijakan luar negeri Jepang, keamanan manusia dapat didefinisikan secara komprehensif mencakup semua ancaman yang mengancam kelangsungan hidup manusia, kehidupan sehari-hari dan kehormatan, degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terorganisir transnasional, obat-obatan terlarang, pengungsi, kemiskinan, ranjau darat dan penyakit menular lainnya seperti HIV/ AIDS. Secara sederhana keamanan manusia dapat didefinisikan kepada tidak ada rasa terancam dan tidak aman, baik langsung maupun tidak langsung (fisik, pelecehan seksual, kekerasan, penganiayaan, atau kematian) dan memiliki hak dalam menginginkan sesuatu (pekerjaan yang menguntungkan, makanan, dan kesehatan). Jika hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka keamanan manusia dapat tercapai.

Di dalam penulisan artikel ini, penulis akan menjelaskan mengenai konsep keamanan personal. Keamanan personal merupakan bentuk ancaman yang lebih memberikan ancaman dibandingkan tindakan kriminalitas (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Hal tersebut tercermin pada persepsi dan ketakutan yang dimiliki oleh masing-masing individu, contohnya ketakutan tidak mendapatkan akses pada layanan kesehatan, selain itu ketakutan kehilangan pekerjaan juga memberikan efek yang signifikan pada rasa tidak aman dan percaya diri. Ancaman saat ini juga berasal dari negara dalam bentuk kekerasan fisik, dari negara lain (peperangan), bentuk terorisme yang melewati batas negara, serta ancaman dari

kelompok lain (konflik agama dan etnik), individu atau geng (kekerasan di jalanan), kekerasan domestik, kekerasan terhadap anak (memanfaatkan, prostitusi, buruh anak) bahkan kekerasan terhadap diri sendiri (bunuh diri dan narkoba).

Menurut UNDP dapat dikatakan sebagai ancaman keamanan personal jika terdapat berbagai macam ancaman yang di dalamnya terdapat kekerasan fisik (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Saat ini orang-orang merasa menjadi semakin sering terancam dengan bentuk kekerasan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, contoh ancaman yang berasal dari negara berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi. Ancaman dari kelompok lain seperti konflik etnis dan agama, ancaman yang berasal dari individu atau geng yang disebut kekerasan di jalanan, hingga dalam bentuk penyanderaan. Kekerasan juga menimpa perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan. Kekerasan juga menimpa anak-anak seperti penyalahgunaan wewenang untuk memeralat anak, buruh anak, dan prostitusi anak. Keamanan politik merupakan bentuk represi politik yang berhubungan dengan sikap hormat terhadap hak asasi manusia, perlindungan dari diktator serta penyalahgunaan militer.

Pada akhirnya dengan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia (SDM), keamanan manusia memberikan gambaran bahwa sumber dari rasa tidak aman berasal dari tidak sempurnanya pembangunan yang sedang terjadi. Seharusnya capaian dalam pembangunan ekonomi khususnya pada pembangunan SDM berjalan berdampingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan konflik dan perang yang mungkin terjadi. Hal ini yang terjadi pada tahun 2005 di Kirgiztan, yaitu pembangunan ekonomi di Utara Kirgiztan lebih baik daripada di Selatan, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang membuat daerah Selatan yang di huni oleh kebanyakan suku Uzbek tidak terakomodir dengan baik.

Kemiskinan negara Kirgiztan sesungguhnya merupakan hal paling mendasar yang kemudian mendasari terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Kemiskinan yang terjadi di Kirgiztan

juga dikarenakan pemerintahan yang korup, sehingga politik dan kemiskinan seperti sebuah rantai yang saling berhubungan. Ketidakadilan dalam hal kemiskinan secara tidak langsung dapat menstimulasi orang menerima aksi kekerasan yang secara langsung berarti juga terlibat dalam konflik. Secara umum keadaan tertekan dapat mempengaruhi degradasi moral yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau pemberontakan.

Keamanan personal di bawah UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) berarti hak yang dimiliki tiap individu yaitu:

“Menurut pasal 3 adalah hak untuk hidup, pasal 4 larangan terhadap perbudakan, pasal 5 larangan kekerasan fisik, pasal 6 kekerasan individu, ancaman dari negara, pasal 7 kesetaraan di mata hukum, pasal 9 larangan penangguhan penahanan/ perang), pasal 11 asas praduga tidak bersalah, kejahatan individual dan kelompok, pasal 12 perlindungan terhadap privasi, dan pasal 13 kebebasan berpendapat”. (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007)

Dari beberapa pasal mengenai keamanan personal menurut UDHR di atas, terdapat hak-hak individu/ personal yang dilanggar oleh rezim penguasa Kirgiztan di tahun berkuasa 1990-2005, yaitu Presiden Akayev melakukan tindak kekerasan terhadap lawan politik atau kepada rakyat yang dianggap membangkang pemerintahan. Negara memberikan ancaman kepada warga negaranya yang akan memperotes kebijakan negara, sehingga kebebasan berpendapat tidak berjalan dengan bebas. Konsep dari keamanan personal dan kedamaian dalam masyarakat sudah meluas dalam paradigma pembangunan manusia dan keamanan manusia, konflik yang terjadi bukan hanya sekedar konflik tapi sudah meluas ke level struktural, personal, kekerasan pribadi, dan kekerasan sebagai akibat dari pembangunan.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa banyak negara mengikuti model terkini yang kemudian menimbulkan kekerasan struktural dan rasa tidak aman secara fisik. Seringnya, faktor ekonomi dan sosial di klaim menjadi penyebab kekerasan. Di sisi lain ketika pertumbuhan diartikan sebagai kemajuan, hal tersebut di saat yang bersamaan juga menstimulasi kekerasan dalam berbagai bentuk.

Hal tersebut meliputi; kekerasan terhadap pekerja, perempuan, anak-anak, pribumi, peradaban, ras atau etnis, serta personal. Dari penjabaran singkat di atas, penulis dapat mengambil pertanyaan penulisan bahwa *“Mengapa Rezim yang Memimpin Kirgiztan Mempengaruhi Keamanan Personal?”*

Pembahasan

Tingginya angka kemiskinan pada populasi Kirgiztan dan ketidakseimbangan dari sumber daya yang tersedia di bagian Utara dan Selatan negara tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya angka pengangguran yang memungkinkan penjahat untuk melakukan kekerasan di jalan yang mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Askar Akayev di periode 1990-2005. Seperti yang dijelaskan oleh Vaux dan Goodhand, keterlibatan negara lain juga memberikan potensi konflik tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari posisi Kirgiztan sebagai simbol modernisasi barat yang menimbulkan banyak friksi di negara tersebut. Pembentukan aliansi negara tetangga yang juga memiliki kapabilitas politik yang kemudian juga mengharuskan pembagian ‘kue’ secara merata (Vaux and Goodhand, 2001). Kegagalan dalam pencegahan korupsi serta monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik menimbulkan munculnya berbagai macam kelompok kepentingan dengan ‘*interest*’nya masing-masing yang kemudian melegalkan berbagai cara untuk memudahkan kepentingan mereka. Mereka dapat menggunakan bantuan asing untuk mengukuhkan posisi mereka.

Sebelum melanjutkan mengenai keamanan personal di Kirgiztan, penulis akan menjelaskan secara singkat profil Kirgiztan. Kirgiztan memiliki ibu kota bernama Biskhek, negara ini memiliki jumlah populasi sebesar 5,5 juta dan masuk kategori sebagai negara miskin di Asia Tengah. Namun memiliki wilayah geografis yang sangat strategis, yaitu menjadi jalur penghubung antara Barat dan Timur. Maka dari itu Rusia dan Amerika Serikat meletakkan pasukan mereka di Manas, Kirgiztan. Sekitar 20% pasukan AS diekspor ke

Afghanistan melalui pangkalan militer Manas, Kirgiztan (Radio Irib, 2011).

Negara ini hanya memiliki wilayah sebesar 6% yang dapat ditanami dan dijadikan lahan pertanian, melalui pertanian ini Kirgiztan bergantung dan menjadi pemasukan negara karena negara ini tidak memiliki hasil bumi yang melimpah untuk menjadi bahan komoditi ekspor. Selain pertanian, Kirgiztan mendapatkan pemasukan negara dari emas, sedangkan sumber minyak bumi dan gas hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri negara itu. Kondisi negara yang miskin pemasukan ini menjadi semakin buruk ketika para pejabat yang memimpin melakukan praktik KKN, sehingga membuat perkembangan ekonomi negara kurang maju dan investasi asing tidak berjalan dengan baik. Kirgiztan terbentuk akibat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan dipimpin oleh Presiden Askar Akayev yang bertahan hingga tahun 2005. Pada awalnya Akayev menjadi harapan bagi Kirgiztan menuju negara yang demokrasi dan reformasi ekonomi. Namun tujuan awal yang telah dirancang dengan baik itu berubah, yaitu ketika presiden Akayev menumpuk kekuasaan dan harta, korupsi, dan nepotisme yang merajalela, serta partai-partai oposisi dimarjinalkan.

Kejatuhan Rezim Presiden Askar Akayev

Pihak oposisi tidak puas dengan kepemimpinan Akayev dan akhirnya melakukan aksi penggulingan. Oposisi yang dibantu oleh media, politik, dan dana segar dari Amerika Serikat dapat dengan mudah menggulingkan Akayev karena kepemimpinan yang dianggap otoriter. Penggulingan rezim Akayev dikarenakan rezim ini telah melakukan tindakan yang tidak pantas, yaitu memperkaya diri sendiri dan meningkatkan pengekangan HAM. Pada awalnya gerakan Revolusi Tulip bertujuan melakukan penggulingan kekuasaan Akayev, namun dalam kenyataannya dilapangan mereka melakukan penjarahan massal dan kekerasan akibat dari kurangnya pengendalian dari pihak oposisi yang menjadi motor pergerakan.

Pergerakan revolusi ini juga mendapat dukungan dari etnis Uzbek yang selama ini merasa sering termarjinalkan di Kirgiztan.

Selain itu pergerakan ini timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang (pemalsuan) terhadap pemilu parlemen pada 27 Februari dan 13 Maret 2005. Hal ini dapat terlihat dari orang-orang yang mengisi kursi parlemen, 75 kursi parlemen yang tersedia hanya 6 yang dinyatakan tidak berkaitan dengan orang-orang dekat dan anak-anak dari Akayev (The Guardian, 2005). Jadi 69 orang di dalam kursi parlemen adalah orang-orang yang setia terhadap Akayev. Tujuan dari adanya manipulasi anggota parlemen ini adalah agar Akayev dapat mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara yang diubah adalah mengenai pembatasan pengajuan pencalonan kembali presiden dari maksimal dua kali terpilih menjadi tiga kali terpilih menjadi calon presiden melalui pemilihan umum. Tentu hal ini tidak bisa diterima oleh pihak oposisi yang selama ini hak-hak berpolitik dan suaranya selalu ditekan oleh Akayev.

Pergerakan penggulingan ini terjadi pada 23 Maret 2005 dengan cara menduduki markas besar pemerintah, yaitu Gedung Putihnya Kirgiztan dan menduduki stasiun TV serta radio milik pemerintah. Revolusi pecah di kota Biskhek dengan masa 1.000 orang turun ke jalan dan melakukan pengepungan terhadap kantor presiden (BBC, 2005). Akibatnya Presiden Akayev melarikan diri dengan helikopter ke Rusia dan menyatakan pengunduran dirinya sebagai presiden. Setelah penggulingan tersebut, tahanan politik dibebaskan dari penjara dan Mahkamah Agung Kirgiztan menyatakan Pemilu Parlemen tidak sah dan harus di ulang. Pada hari berikutnya Revolusi Tulip yang diikuti kekuatan rakyat sebesar 15.000 datang ke pusat kota Biskhek di Ala-Too Square untuk menggulingkan Akayev (Eurasianet, 2005). Akibatnya terjadi bentrokan antara demonstran anti pemerintah dengan demonstran pro pemerintah menghasilkan 2 orang tewas dan 121 orang lainnya luka-luka (Eurasianet, 2005). Setelah demonstran berhasil menguasai Ala-Too Square, mereka bergerak ke gedung presiden dan mengambil alih gedung.

Rezim Presiden Bakiyev

Setelah rezim Akayev jatuh, pemimpin dari pihak oposisi yang bernama Kurmanbek Saliyevich Bakiyev berhasil memenangkan

pemilu dan menjadi presiden Kirgiztan dengan suara 89% (Hiro, 2005). Namun presiden terpilih ini justru memberlakukan kebijakan yang sama seperti presiden terdahulunya, yaitu menempatkan keluarga dan orang-orang terdekatnya di posisi-posisi strategis negara serta dituduh telah memperkaya diri sendiri. Selain itu Presiden Bakiyev juga melakukan tindakan yang represif terhadap oposisi serta jurnalis yang mengkritik kebijakannya. Puncaknya adalah ketika tewasnya Almaz Tashiyev seorang jurnalis oposisi akibat serangan dari pihak pemerintah. Akibatnya pendukung Revolusi Tulip yang telah menjatuhkan rezim Akayev mulai tidak percaya dengan Bakiyev, hal ini karena bertentangan dengan pendukung Revolusi Tulip yang menjunjung slogan bahwa negara harus bebas dari KKN.

Presiden Bakiyev mendapatkan nama yang buruk dihadapan rakyatnya akibat besarnya korupsi, otoritarianisme, dan kebijakan yang tidak efektif dibandingkan presiden sebelumnya (Akayev). Akibatnya Bakiyev tidak lagi menjadi presiden setelah lima tahun memimpin dan digantikan oleh presiden sementara Otunbayeva. Otunbayeva melakukan peningkatan wewenang parlemen dan mengurangi wewenang presiden dengan tujuan agar dapat memperbaiki demokrasi yang mulai tidak stabil. Konflik yang terjadi di Kirgiztan yang biasanya mengenai politik, pada tahun 2010 berubah menjadi konflik antar etnis. Keadaan tidak stabil di Kirgiztan terjadi di kota Osh, hal ini dikarenakan adanya konflik etnis Uzbek dengan etnis Kyrgyz. Akibat dari konflik etnis ini korban-korban berjatuhan, yaitu sekitar 200 warga kehilangan nyawa dan ratusan lainnya luka-luka dalam kerusuhan antara kedua etnis ini (Eurasianet, 2005). Akibat dari konflik ini, ribuan warga Uzbek melarikan diri ke perbatasan Uzbekistan-Kirgiztan. Sehingga terjadi keadaan darurat di daerah Selatan negara Kirgiztan. Konflik etnis ini akibat kesenjangan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah hanya fokus pembangunan di Utara negara yang banyak dihuni oleh etnis Kirgiz dan kurang memperhatikan etnis Uzbek yang berada di Selatan negara. Wilayah Selatan Kirgiztan ini memang merasa dianaktirikan oleh wilayah Utara Kirgiztan.

Ancaman Keamanan Manusia Berlanjut

Bahkan hingga kini krisis politik masih menyelimuti Kirgiztan, hal ini ditandai dengan mundurnya Presiden Sooronbay Jeenbekov di tahun 2020. Ia dituntut turun oleh masyarakat Kirgiztan dan oposisi karena pemerintahannya dianggap korup serta ekonomi yang menurun. Ketika memasuki masa saat pandemi melanda Kirgiztan, membuat perekonomian negara dan masyarakat di dalamnya semakin sulit. Sehingga akhirnya digantikan oleh Presiden Kirgiztan pengganti Sooronbay Jeenbekov. Meskipun sudah berganti, presiden baru ini juga bahkan sampai menyatakan negara sedang krisis paling serius dan perekonomian paling parah karena mereka devisa anggaran mencapai 24 juta dolar AS (Erina, 2021). Belum lagi di tahun 2022 ini terjadi konflik antara Kirgiztan dengan Tajikistan yang lagi-lagi menimbulkan masalah keamanan manusia terutama keamanan personal yaitu hak untuk hidup aman dari ancaman. Konflik yang terjadi di Selatan Kirgiztan tepatnya di kota Batken ini membuat anak-anak yang tinggal diperbatasan terpaksa harus mengungsi dan tidak bisa sekolah. Menteri Pendidikan Kirgiztan menyatakan bahwa ada sekitar 137.000 orang dievakuasi (Sultanalieva, 2022) karena konflik ini menimbulkan kerusakan diberbagai sektor seperti Taman Kanak-kanak (TK) dan sekolah lanjut lainnya. Dapat dibayangkan untuk sekolah saja menjadi hal yang mewah, padahal itu adalah hak dasar manusia untuk mendapatkan pendidikan.

Kesimpulan

Keamanan Personal merupakan keamanan dari rasa takut dan mendapatkan kebutuhan bagi individu. Sehingga keamanan personal merupakan rasa aman pada diri untuk dapat mendapatkan akses kesehatan, pekerjaan yang layak, bebas berpendapat, bisa berpartisipasi dalam politik, dan mendapatkan HAM yang layak. Di dalam studi kasus keamanan personal di Kirgiztan ini, terjadi pelanggaran terhadap keamanan personal, selain keamanan personal, negara ini juga melakukan pelanggaran terhadap keamanan masyarakat, ekonomi, dan politik. Di dalam masalah

keamanan personal negara melakukan tindakan kekerasan dan pengekangan HAM terhadap oposisi dan rakyat yang protes atas kebijakan pemerintah. Rakyat tidak dapat berpartisipasi di dalam politik jika berlawanan dengan arus politik pemerintah.

Selain itu, akibat pemerintahan yang korup membuat rakyat Kirgiztan menjadi miskin dan perekonomian yang tidak berkembang dengan baik. Akibat perkembangan ekonomi yang tidak merata di negara tersebut, menyebabkan konflik etnis antara Uzbek dengan Kirgiz. Hal ini disebabkan karena kesenjangan ekonomi Utara dan Selatan yang tidak seimbang. Sehingga etnis Uzbek melihat pemerintah hanya mengutamakan etnis Kirgiz saja. Selain konflik dengan Tajikistan juga membuat keamanan personal menjadi terancam bahkan bisa hilang. Begitu pentingnya konsep keamanan manusia bagi seluruh masyarakat dunia, terlebih jika keamanan personal sudah terancam maka apa yang bisa didapatkan dari manusia lagi? tentu ini sudah menjadi tugas negara untuk memberikan rasa aman bagi masyarakatnya. Rasa aman itu tidak hanya aman dari ancaman pihak eksternal seperti serangan militer oleh Tajikistan ke Kirgiztan, namun juga harus aman dari dalam negeri yaitu keadilan antar etnis (Uzbek dan Kirgiz) agar pemerataan ekonomi juga bisa terdistribusi merata. Selain itu korupsi menjadi hal yang harus diperhatikan dalam ini harus diperbaiki sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- BBC News. (2005). *Protests Force Kyrgyz Poll Review*. <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4369065.stm>>. di akses pada 28 Februari 2016.
- Erina, Reni. (2021). *Presiden Japarov: Kyrgyzstan Hadapi Krisis Ekonomi Paling Serious*. RMOL.ID. <<https://dunia.rmolid/read/2021/05/05/486731/presiden-japarov-kyrgyzstan-hadapi-krisis-ekonomi-paling-serius>>. Diakses pada 6 November 2022.

- Eurasianet. (2005). *Akayev Administration Collapses in Kyrgyzstan, Sending Tremors Across Central Asia*. <<http://www.eurasianet.org/departments/civilsociety/articles/eav032405.shtml>>. Di akses pada 27 Februari 2016.
- Hiro, Dilip. (2005). *Kyrgyzstan's Tulip Revolution Wilts*. <<http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/jul/24/kyrgyzstan-election-tulip-democracy>>. Di akses pada 27 Februari 2016
- King, Gary & Murray, Christopher. (2000). *Rethinking Human Security*. Harvard University: Department of Government.
- Radio Irib. (2011). *Konflik Etnis di Kyrgyzstan Dampak Ketegangan Politik*. <www.indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/34071-Konflik_Etnis_di_Kyrgyzstan_Dampak_Ketegangan_Politik>. Di akses pada 28 Februari 2016.
- Sultanalieve, Syinat. (2022). *Kyrgystan-Tajikistan Conflict Leaves Children without Education*. Human Right Watch. <<https://www.hrw.org/news/2022/10/03/kyrgyzstan-tajikistan-conflict-leaves-children-without-education>>. Diakses pada 6 November 2022.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou & Chenoy, Anuradha M. (2007). *Human Security Concepts and implications*. New York: Routledge.
- The Guardian. (2005). *Pink Revolution Rumbles on in Blood and Fury*. <<http://www.theguardian.com/world/2005/mar/27/nickpatonwalsh.theobserver>>. Di akses pada 28 Februari 2016.
- Vaux, T., and Goodhand, J. (2001). *Disturbing Connections: Aid and Conflict in Kyrgyzstan*. London: Conflict Assessments, Security and Development Group.

MODAL SOSIAL DALAM PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Abdul Nadjib

Pendahuluan

Dewasa ini globalisasi sudah memasuki era baru yang dinamakan dengan Revolusi Industri 4.0 Klaus Shwab (2016) dalam *The Fourth Industrial Revolutions* menjelaskan jika dunia sudah mengalami empat tahap revolusi, yakni 1) Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung di abad ke-18 ditandai dengan ditemukannya mesin uap, sehingga memungkinkan untuk memproduksi barang secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 yang berlangsung di abad 19-20 ditandai dengan digunakannya listrik yang menjadikan biaya produksi semakin kecil, 3) Revolusi Industri 3.0 yang berlangsung sekitar tahun 1970-an ditandai dengan digunakan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 yang berlangsung pada tahun 2010-an ditandai dengan adanya rekayasa intelegensia dan *internet of thing* sebagai faktor penting mobilisasi dan konektivitas manusia dan mesin.

Secara fundamental akibat dari adanya Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan pola pikir manusia, kehidupan manusia dan saling berkaitan satu dan yang lainnya. Berbagai aktivitas manusia di era ini akan terdisrupsi di bermacam bidang, bukan cuma sebatas pada teknologi, akan tetapi juga di bidang yang lainnya misalnya saja ekonomi, sosial dan politik. Revolusi industri 4.0 meletakkan teknologi menjadi dasar dalam berkegiatan di masyarakat. Segala proses aktivasi di era ini dilaksanakan melalui sistem otomatisasi,

di mana perkembangan teknologi internet semakin maju tidak cuma sekedar menghubungkan manusia di berbagai belahan dunia akan tetapi juga menjadi sebuah basis bagi proses transaksi penyelenggaraan pemerintah dan perdagangan ekonomi.

Perubahan cara hidup manusia dan kinerjanya secara fundamental dinamakan dengan revolusi industri, di mana melalui perkembangan teknologi informasi bisa menggabungkan dalam dunia kehidupan dengan digital yang bisa berdampak pada semua bidang keilmuan. Pesatnya perkembangan yang terjadi pada teknologi informasi memunculkan berbagai terobosan seperti pada bidang *artificial intelligent* dan atau *internet of things* di mana teknologi komputer sebuah bidang kehidupan yang mengadopsi keterampilan seseorang ke dalam sebuah aplikasi yang berbasis teknologi dan menciptakan teknologi informasi dan proses produksi yang pengendaliannya dapat dilakukan secara otomatis.

Ketika dunia memasuki abad ke-21, kemudian keadaan dunia menjadi berubah. Orang menyebut bahwa abad 21 adalah abad keterbukaan atau abad globalisasi. Sebab di abad ini warga masyarakat dunia semakin mudah berinteraksi, membaur dan terintegrasi dalam satu sistem tatanan kehidupan masyarakat luas. Karena kemudahan interaksi dan komunikasi antar warga masyarakat dunia tersebut, kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia menjadi saling mempengaruhi. Sebut saja model layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan publik, bisnis, bahkan sampai pekerjaan dan seterusnya semua saling mempengaruhi satu sama lain.

Pendeknya, peradaban manusia pada masa ini telah mengalami kemajuan dan modernitas di berbagai sektor, sehingga dengan sendirinya menuntut kualitas sumber daya manusia yang juga unggul dan dapat diandalkan. Berbagai tuntutan peradaban yang serba canggih dan baru tersebut, pada saat yang sama juga menuntut berbagai kemajuan berpikir serta terobosan dalam menyusun konsep dan mengambil kebijakan yang relevan. Hal ini selaras dengan perspektif filsuf Khun yang mengatakan bahwa ketika sejumlah tantangan baru yang harus dihadapi dengan

memakai pemikiran lama, maka semua bentuk usaha tidak akan berhasil. Agar dapat bersaing di tengah pertarungan kehidupan global yang sangat terbuka, segala bentuk tantangan baru harus dijawab dengan terobosan-terobosan pemikiran yang *genuine* dan *out of the box* (Tilaar, 1998).

Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat menimbulkan kegagalan pemerintah dan masyarakat terutama yang berada di daerah dalam menghadapinya. Keterbatasan kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur jaringan, dan kesiapan dalam adopsi teknologi maju masih menjadi tantangan di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Berbagai kemajuan dan keterbukaan yang ditawarkan teknologi maju dalam revolusi industri 4.0 menimbulkan kegamangan baru bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kegamangan itu beralasan karena kehadiran teknologi maju dikhawatirkan justru dapat mendisrupsi pemerintah daerah itu sendiri dan selanjutnya berdampak pada ketidakefektifan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Kegagalan dan kegamangan pemerintah daerah memasuki era revolusi industri 4.0 ini menjadi “pekerjaan rumah” yang harus bisa di atasi oleh pemerintah daerah itu sendiri karena kehadiran revolusi industri 4.0 tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi lokal yang ada untuk secara bersama-sama dapat menyelesaikan “pekerjaan rumah” itu dengan baik dan bijak.

Salah satu potensi dan kearifan lokal yang ada dan melekat di daerah adalah modal sosial. Pendapat dari Portes dalam (Paul A. Adler, 2002) menjelaskan jika modal sosial merupakan sebuah konsepsi yang luas dengan beragam penjelasan yang mana satu dan yang lainnya saling berhubungan. Konsepsi tersebut dilandasi dengan nilai jaringan sosial atau kelompok sosial yang terbentuk. Modal sosial juga bisa dimaknai dengan berbagai bagian dari sebuah sistem organisasi yang mempunyai berbagai tingkatan sendiri misalnya kepercayaan, religius, norma dan hukum adat yang diterapkan sesuai dengan permufakatan bersama sampai sebuah

sistem struktur jaringan sosial yang melembaga atas keputusan bersama yang bisa memaksimalkan efisiensi masyarakat dengan mengatur dan memfasilitasi berbagai perilaku yang terkoordinir. Kemudian pendapat dari Putnam (2000) menjelaskan jika modal sosial dimaknai dengan dua konsepsi yang saling bertentangan yang dapat mengarah ke makna yang bertolak belakang; 1) modal sosial merupakan kapasitas yang muncul dari kepercayaan yang secara umum terbentuk dalam wujud tak tertulis di dalam masyarakat ataupun berbagai bagian tertentu dari masyarakat, yang diterapkan secara turun-menurun, 2) konsep modal asing juga dimaknai dengan sejumlah nilai ataupun norma baik formal ataupun informal yang dimiliki dan disetujui bersama dengan semua anggota sebuah kelompok yang memungkinkan untuk menjalin kerja sama.

Apakah modal sosial yang tumbuh berakar di tengah masyarakat di daerah dapat berperan menyelesaikan “pekerjaan rumah” untuk mengurangi kegagapan dan kegamangan pemerintah daerah memasuki era revolusi *industry 4.0*?. Pertanyaan tersebut menjadi *problem statement* yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran modal sosial dalam penguatan pemerintah daerah memasuki era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menjadi penting untuk dapat mengetahui apakah modal sosial yang tumbuh berakar di setiap daerah di Indonesia dapat berperan menguatkan pemerintah daerah memasuki era revolusi industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri belakangan ini sering sekali terdengar di telinga masyarakat di berbagai ruang sosial, baik itu ruang yang bersifat formal atau informal. Pembicaraan serius mengenai tema revolusi industri di berbagai seminar, diskusi publik, *talk show*, dan ruang-ruang kelas kuliah seolah menjadi *tranding topic* dan isu segar yang menggairahkan untuk diperbincangkan. Bahkan, isu ini juga menjadi obrolan ringan yang menarik bagi orang-orang biasa di warung-warung kopi setiap pagi. Istilah ‘revolusi’ bisa dimaknai dengan perubahan yang berlangsung secara radikal serta

kedatangannya tidak disangka-sangka (Hidayaturrahmah, 2017). Revolusi industri sesungguhnya adalah perubahan yang terjadi secara besar-besaran pada proses hidup dan cara manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya serta menghasilkan sebuah barang (Hamdan, 2018). Fenomena revolusi industri sesungguhnya mulai bergulir antara tahun 1750-1850. Pada waktu itu, berbagai sektor seperti teknologi, manufaktur, transportasi, pertanian, dan pertambangan mengalami perubahan besar yang berimplikasi pada kondisi di dunia di bidang industri, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

Revolusi Industri untuk kali pertama yang disebut revolusi industri 1.0 mulai bergulir di abad ke-18 yang sudah mulai menggunakan mesin uap (Mumtaha & Khoiri, 2019). Mesin uap ini kemudian dipakai untuk memproduksi barang, sehingga dunia kerja yang asalnya memberdayakan tenaga manusia dan hewan beralih menjadi memanfaatkan tenaga mesin. Pada waktu itu mulai terlihat secara nyata bahwa dengan menggunakan tenaga mesin, aktifitas produksi barang menjadi lebih cepat dan meningkat (Satya, 2018). Selain itu, ketika transportasi internasional masih bertumpu pada transportasi laut yang bergantung dengan tenaga angin, mesin uap kemudian juga diterapkan di sektor transportasi. Dengan menggunakan mesin uap, transportasi internasional menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Pada tahap selanjutnya, revolusi industri 2.0 menemukan momentumnya pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang sebelumnya sudah diganti dengan tenaga mesin uap, secara berangsur-angsur mulai digantikan dengan tenaga listrik. Pada masa ini mobil-mobil mulai diciptakan untuk lebih memudahkan mobilitas masyarakat (Shwab, 2016).

Pada masa revolusi industri ke dua memang peradaban dunia sudah melibatkan mesin dalam berbagai aktifitasnya. Namun pada masa itu tenaga manusia masih memainkan peranan yang cukup penting dalam setiap proses produksi barang. Baru kemudian pada tahap selanjutnya, saat revolusi industri 3.0 mulai menemukan momentumnya pada tahun 1970an, tenaga manusia perlahan mulai

tidak memainkan peranan yang sentral lagi. Pada saat yang sama, perlahan tapi pasti, abad industri mulai beralih ke abad informasi. Revolusi industri ketiga ini ditandai dengan penciptaan komputer dan robot, yakni sistem mesin yang bisa bergerak serta berpikir secara otomatis. Kira-kira sekitar tahun 2010an, masyarakat dunia menyebut bahwa dunia sudah mencapai era revolusi industri 4.0 di mana era ini sudah mulai menggunakan *cyber* fisik dan kolaborasi manufaktur (Pranoga, Rahmah, Primasti, & Indah, 2018). Kata industri 4.0 sesungguhnya muncul dari proyek pemerintah Jerman yang melakukan promosi tentang komputerasi manufaktur.

Secara lebih rinci, Lee, Lapira, Bagheri, dan Kao (2013) memaparkan bahwa revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya digitalisasi manufaktur setidaknya dipengaruhi oleh empat faktor yang mendorongnya: a) volume data, konektivitas, dan kekuatan komputasi yang mengalami peningkatan; b) kemampuan, analisis, dan kecerdasan bisnis yang juga mengalami peningkatan; c) munculnya model interaksi baru yang terjadi di antara manusia dan mesin; dan d) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, misalnya robotika dan 3D *printing*. Sedangkan Lifter dan Tschienner menambahkan bahwa prinsip dasar dari revolusi industri 4.0 merupakan integrasi antara mesin, alur kerja, dan sistem, dengan mengimplementasikan jaringan cerdas disepanjang rantai serta proses produksi untuk mengontrol satu dengan yang lainnya secara mandiri (Maryanti & Apriana, 2019).

Tantangan dan Peluang Industri 4.0

Pendapat dari Tjandrawinata (2016) menyatakan jika pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat otomatisasi yang muncul di berbagai bidang, teknologi, dan pendekatan baru yang mengintegrasikan secara nyata, digital dan fundamental. Dalam era industri 4.0 banyak sekali tantangan yang harus dihadapi yakni terkait dengan keamanan teknologi informasi, kestabilan mesin produksi, minimnya keterampilan yang dimiliki, stakeholder yang tidak mampu berubah, dan banyak pekerjaan yang hilang sebab sudah diubah ke otomatisasi. Dengan banyaknya pekerjaan yang

menghilang akibat dari adanya perubahan menjadi otomatisasi, membuat pengangguran begitu mengancam, di mana pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Februari tingkat pengangguran mencapai 7,01 juta jiwa (5.33%) dari jumlah angkatan kerja 131.55 juta jiwa (BPS 2018).

Prinsip Desain Industri 4.0

Ada berbagai prinsip industri 4.0 yaitu, Pertama, interkoneksi yakni kemampuan mesin, perangkat sensor dan orang untuk terkoneksi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya melalui *internet of things*, prinsip tersebut memerlukan keaman dan standar yang berkolaborasi. Kedua, transparansi informasi adalah kemampuan sistem informasi untuk melahirkan Salinan virtual dunia fisik dengan memperbanyak model digital dengan data sensor termasuk data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang mencakup kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan memadukan serta mengevaluasi informasi secara sadar untuk mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan permasalahan mendesak dalam tempo yang singkat. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang sebagai kemampuan sistem fisik maya untuk mengambil keputusan sendiri dan melaksanakan tugas dengan sedemikian rupa. Prinsip industri 4.0 sesuai dengan pendapat dari Hermann et al (2016) dapat digambarkan secara sederhana seperti di bawah ini;



Gambar 1. Prinsip Industri 4.0
Sumber: Hermann et al, 2016

Modal Sosial

Dalam dunia bisnis, ketika orang memperbincangkan mengenai istilah modal biasanya pikirannya akan tertuju pada uang, rumah toko (ruko), toko, atau berbagai peralatan bisnis lainnya. Namun jika istilah modal dikawinkan dengan atau dibawa ke konteks sosial maka istilahnya menjadi modal sosial dan memiliki pengertian yang berbeda. Sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat secara umum, modal sosial yaitu modal yang notabene tidak termasuk modal ekonomi, dan secara fungsional memiliki peran untuk membangun segala sesuatu yang menjadi harapan. Modal sosial adalah sesuatu yang abstrak akan tetapi memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan sosial ataupun kelompok (Leana, Carrie, R., and Pil, 2006). Ferrer et.al juga mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi, modal sosial memiliki peran yang sangat penting sekaligus memiliki pengaruh positif bagi kinerja organisasi (Ferrer et al., 2013). Munculnya modal sosial dalam kehidupan disebabkan oleh karena proses interaksi sosial dalam suatu lingkungan sosial misalnya kelompok, organisasi ataupun masyarakat

Segala bentuk modal, baik itu yang berbentuk uang atau sosial akan memiliki dampak dan pengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Modal sosial, modal materi, ataupun modal lainnya sama-sama akan membuahkan hasil berupa tingkat *return* (pengembalian) yang diimpikan. Namun terdapat perbedaannya, jika modal uang dapat diukur dengan perbandingan tertentu, sementara pengukuran modal sosial tidak bisa menggunakan ukuran yang pasti. Sebab, dampak modal sosial dalam sebuah lingkungan sosial tidak bisa diukur dengan uang. Jika sebuah organisasi ingin mengetahui tingkat pengembaliannya (*return*), maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Dalam perspektif Woolcock, modal sosial adalah sesuatu yang memungkinkan peningkatan individu dalam bekerja sama yang saling menguntungkan serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum (Woolcock, 1998). Setidaknya terdapat enam hal yang berhubungan dengan modal sosial yakni partisipasi dalam kerja sama, hubungan timbal balik, kepercayaan, norma-

norma sosial, kebersamaan, dan proaktif (Rosyadi, 2018). Sementara Francis Fukuyama menjelaskan jika modal sosial bisa dipahami sebagai segala sumber daya yang dimiliki seorang individu atau kelompok, baik sifatnya tampak atau tidak tampak dan dipakai untuk proses kerja sama kelompok yang saling menguntungkan serta dipahami secara bersama-sama (Fukuyama, 2000).

Dalam pandangan *The Asia Foundation*, yang disebut modal sosial adalah hasil interaksi yang berasal dari sumber daya pengetahuan dan identitas yang dipakai dan dibentuk dalam pembelajaran secara simultan (Asia Foundation, 1998). Hidayat menjelaskan jika modal sosial adalah segala hal yang bisa dilihat dengan nyata, termasuk di dalamnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan, protokol profesional, belajar sosial, kolaborasi, kepercayaan dan solusi terhadap berbagai permasalahan umum, tanggung jawab secara bersama. Kemudian Hidayat juga menambahkan jika modal sosial ialah sarana untuk mengontrol perilaku, sehingga sebagai suatu sumber daya yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial (Hidayat, 2001). Berdasarkan pandangan-pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal sosial yaitu modal yang abstrak, tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan eksistensi dan manfaatnya, yakni kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), sikap timbal balik (*reciprocal*), dan jaringan sosial (*network*) yang lahir dari seseorang ataupun komunitas dan modal-modal itu memiliki fungsi fungsi untuk mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki suatu unit sosial.

Unsur Modal Sosial

Dalam perspektif Fukuyama, modal sosial mempunyai tiga unsur pokok dan utama, yakni kepercayaan, timbal balik, dan interaksi sosial (Fukuyama, 2000). Namun ketika diambil intisari dari pengertian tentang modal sosial di atas, dapat juga dikatakan bahwa unsur modal sosial ada empat, yakni, kepercayaan, timbal balik, norma, dan jaringan sosial. Untuk memperjelas definisi dari

masing-masing unsur tersebut, maka akan dibahas secara lebih lanjut di bawah ini.

a. Trust (kepercayaan)

Dalam pandangan McElroy, Jorna, dan Engelen (2006) *trust* (kepercayaan) dapat diartikan sebagai sikap seseorang dalam mempercayai orang lain bahwa mereka akan berperilaku dan bertindak secara benar. Karena itu, *trust* (kepercayaan) merupakan sebuah sikap yang sangat penting dalam aktifitas kerja sama yang saling menguntungkan. Sebab, *trust* memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja sama sehingga mendorong individu untuk mau bekerja sama dengan orang lain dan memperoleh manfaat produktifitas secara bersama-sama. Lebih jauh Fukuyama menjelaskan bahwa *trust* adalah sejumlah ekspektasi yang diharapkan muncul dari suatu komunitas untuk bertingkah laku secara jujur, kooperatif, teratur, yang semua itu berdasar pada norma-norma yang disepakati dan dijunjung bersama. Ketika *trust* terwujud maka akan sangat berguna untuk pencipta ekonomi tunggal karena dapat menekan biaya, karena dengan *trust* seluruh anggota komunitas lebih mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Dari sini dapat dikatakan bahwa eksistensi *high-trust* akan melahirkan solidaritas yang besar, kerja sama yang solid, dan saling patuh terhadap regulasi dan norma yang dianut, sehingga akan tercipta rasa kebersamaan dalam sebuah kerja sama (Fukuyama, 2002).

b. Reciprocal (timbang balik)

Unsur utama modal sosial yang kedua ialah *reciprocal*. *Reciprocal* dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik dan kesalingan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dan dapat kita temui dalam berbagai aktifitas masyarakat, seperti saling membantu, saling memberi, saling mengunjungi, dan berbagai jenis bentuk kesalingan yang lain yang muncul karena adanya interaksi sosial (Soetomo, 2006). Sikap timbal balik atau kesalingan adalah sebuah sikap yang baik dalam merespon berbagai hal yang muncul di hadapan kita karena menunjukkan rasa peka, simpati, dan empati terhadap orang lain. *Reciprocity* menurut Deckop, Cirka dan Andersson adalah sikap yang menganut konsep pertukaran

sosial, sehingga siapa saja yang melakukan kesalingan akan memetik berbagai keuntungan baik yang akan diperoleh secara langsung atau di masa yang akan datang (Deckop, John R, Cirka, Carol C and Andersson, 2003). Hal ini dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan keseharian kita bahwa ketika seseorang berbuat baik untuk sesama, maka ia akan berkesempatan untuk mendapatkan manfaat. Lazimnya, naluri seseorang ketika diberi kebaikan oleh orang lain maka ia cenderung ingin membalas kebaikan yang sama kepada yang memberi di kesempatan lain. Jika dilihat dari perspektif agama, sikap timbal balik ini sesungguhnya selaras dengan ajaran agama. Di dalam agama diajarkan bahwa ketika seorang individu dihormati maka diajarkan untuk membalas dengan hal yang sebanding atau utamanya lebih banyak.

c. Norm (Normal)

Unsur utama ketiga modal sosial adalah norma. Norma dapat diartikan sebagai standar sosial yang mendeskripsikan dan menjadi pedoman perilaku bagi semua anggota organisasi. Norma pun dapat menjadi *prescriptive* yang menentukan tingkah laku yang boleh ataupun tidak boleh dilaksanakan oleh anggota organisasi (Schroeder, 2010). Walaupun norma merupakan aturan standar yang disepakati oleh sebuah organisasi, namun juga dapat menjadi norma pribadi, karena terinternalisasi dan terintegrasi dengan norma pribadi. Namun sesungguhnya, supaya norma organisasi yang ada dapat dipatuhi dengan penuh kesadaran oleh semua anggota, maka ketika awal perumusan norma semua anggota harus hadir dan menyampaikan aspirasinya masing-masing. Perlawanan terhadap norma yang ada biasanya disebabkan oleh karena kurang terakomodasinya usulan-usulan dari semua anggota. Sehingga yang terjadi adalah pembangkangan terhadap norma atau bahkan resistensi terhadap norma yang ada. Keberhasilan sebuah norma dapat dilihat dari kepatuhan para anggota dalam menaati semua norma yang ada secara sadar. Ketika para anggota organisasi banyak yang tidak mau mematuhi norma, maka dapat dikatakan jika norma tersebut tidak dapat menjadi modal sosial. Sebab, norma yang dapat menjadi modal sosial ialah ketika norma tersebut

didukung dan ditaati oleh segenap anggotanya, sehingga dapat meningkatkan kerja sama di antara semua anggota dan memperoleh keuntungan secara bersama-sama

d. Interaksi Sosial

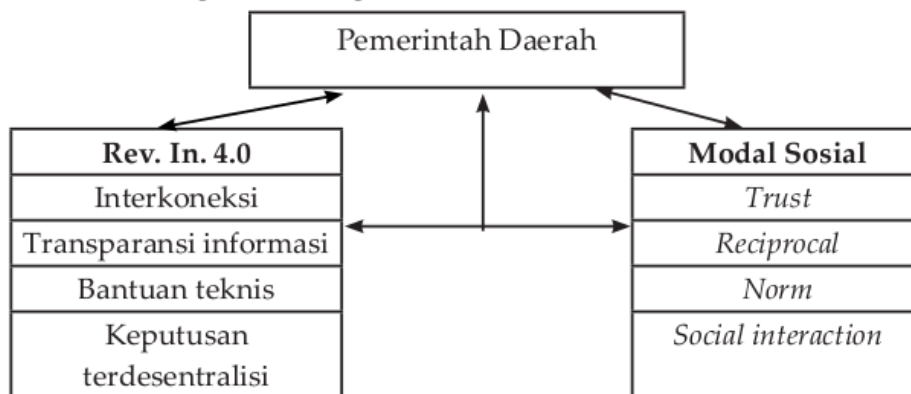
Sementara unsur utama modal sosial yang keempat adalah interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu sebuah hubungan antara dua ataupun lebih individu, di mana perilaku individu yang satu merubah, mempengaruhi, ataupun memperbaiki perilaku individu yang lainnya ataupun sebaliknya (Gerungan, 1996). Sementara Caplin juga menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah relasi sosial yang bersifat interpersonal yang saling mempengaruhi satu dan yang lainnya secara bersama-sama (Caplin, 1991). Interaksi sosial yang semakin luas akan menjangkau seluruh sudut-sudut wilayah masyarakat. Interaksi sosial yang menjangkau secara luas tersebut akan memungkinkan terjadinya kerja sama, hubungan timbal-balik dan terbangunnya rasa kepercayaan di antara manusia.

Dengan kata lain, interaksi sosial akan melahirkan jaringan sosial. Jaringan sosial adalah relasi sekumpulan individu yang dihubungkan karena perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan *civic engagement*. Jaringan sosial biasanya terbentuk dikarenakan adanya kesamaan dalam beberapa hal seperti kesamaan agama, ideologi, hobi, pandangan politik, nasib, daerah yang sama, dan sebagainya (Pratikno, 2001). Dalam perspektif ilmu ekonomi, jaringan merupakan sekumpulan agen individual dengan berbagai nilai-nilai dan norma-norma informal melebihi nilai-nilai dan norma-norma yang penting untuk transaksi pasar biasa. Berdasarkan teori tersebut bisa dikatakan jika modal sosial memiliki kemanfaatan bukan hanya pada aspek sosial saja namun juga bermanfaat dalam aspek ekonomi (Pratikno, 2001).

Pola Kerja Modal Sosial dalam Revolusi Industri 4.0

Sebagaimana dimaklumi bahwa dewasa ini dunia telah memasuki revolusi industri yang keempat, sehingga sektor industri mengalami lompatan yang besar karena teknologi informasi dan

komunikasi diberdayakan secara maksimal. Akibatnya, berbagai sektor kehidupan masyarakat dunia seperti sektor ekonomi, industri, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain sebagainya mengalami perubahan-perubahan besar (Satya, 2018). Artikel ini memuat hasil penelitian penulis tentang peran modal sosial dalam penguatan pemerintah daerah memasuki era revolusi industri 4.0 yang dilakukan di 2 kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2021. Sebelum membahas perihal tersebut, perlu diilustrasikan pola kerja modal sosial terhadap revolusi industri sebagaimana bagan di bawah ini.



Gambar 2. Pola Kerja Modal Sosial terhadap Revolusi Industri 4.0 Pada bagian ini akan dikaji serta dianalisis terkait dengan hal itu.

Sumber: Diolah Penulis

a. Peran Kepercayaan (*Trust*)

Di tengah kehidupan revolusi industri yang serba berbasis teknologi digital dan internet, di mana interkoneksi antar anggota masyarakat dan dengan dunia usaha maupun pemerintah yang hampir tidak terbatas, pemerintah daerah berusaha maksimal mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dengan baik. Meski banyak ditemukan permasalahan yang timbul terutama dalam ketersediaan infrastruktur jaringan, kapasitas literasi digital ASN yang terbatas, dan sistem yang belum mendukung adopsi teknologi baru di daerah. Pemerintah daerah berlomba-lomba membangun sistem aplikasi atau manajemen informasi dengan menggunakan jasa vendor sebagai pihak ke 3.

Dalam kondisi demikian transfer teknologi dan informasi dari vendor kepada operator ASN terjadi sangat lambat sehingga justru kemudian terjadi ketergantungan baru pemerintah daerah kepada vendor. Dengan demikian pembangunan sistem aplikasi baru menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena baru dapat menghasilkan *output* dan belum ada *outcome* nya. Sementara itu dalam waktu yang hampir bersamaan pemerintah daerah juga sibuk membangun infrastruktur jaringan dan pengembangan literasi digital ASN secara cepat. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah baru karena pembangunan infrastruktur jaringan cenderung diserahkan kepada pihak ke 3 dan pengembangan literasi digital ASN umumnya diminati oleh ASN dari generasi milenial saja, sedangkan generasi X dan *baby boomer* kurang tertarik. Kegagapan dan kegamangan pemerintah daerah dalam mengadopsi sekaligus mengimplementasikan teknologi maju ini menimbulkan kurang percayaan dari modal sosial *trust* masyarakat dan *stakeholders* baik dalam menjalankan prinsip interkoneksi, maupun transparansi informasi. Beberapa informan dari unsur masyarakat dan dunia usaha mengatakan bahwa:

“kami belum bisa percaya kepada pemerintah daerah karena memang kenyataan belum siap memasuki era revolusi industri. Beberapa diantaranya adalah keterbatasan kapabilitas ASN, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan mindset jajaran pemerintah daerah belum digital minded, serta kepemimpinan yang belum transformatif”.

Dikhawatirkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam memasuki era revolusi industri 4.0 justru akan mendisrupsi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sebagai penerima layanan publik pemerintahan. Dengan demikian modal sosial tidak dapat membangun kohesi positif dengan pemerintah daerah dalam memasuki era revolusi industry 4.0.

b. Peran *Reciprocal* (timbal balik)

Perilaku timbal balik atau kesalingan, merupakan perilaku yang sangat sesuai dan selaras dengan norma, agama, dan fitrah manusia kapanpun dan di manapun mereka hidup, termasuk di era keterbukaan akibat ekspansi revolusi industri 4.0. Sebab perilaku timbal balik akan memberikan rasa saling membantu, saling memberi, saling mengasihi, saling empati, saling memiliki, dan berbagai kesalingan positif lainnya (Werdiningsih, 2020). Ketika kesalingan positif tersebut tumbuh dalam berbagai lini kehidupan, maka hampir dapat dipastikan perilaku kesalingan tersebut akan selalu memberikan harmoni dan berbagai dampak positif lainnya bagi lingkungan kelompok sosial seperti, pemerintahan, perusahaan, organisasi, dan masyarakat. Misalnya saja dalam sebuah organisasi, ketika masing-masing pegawainya memiliki modal sosial berupa timbal balik, maka iklim kerja yang terjadi di sana akan sangat sehat dan kondusif, dan pastinya berujung pada produktifitas dan profit yang tinggi yang dapat dinikmati secara bersama-sama. Sikap kesalingan ini juga akan memberi dampak positif yang besar jika diimplementasikan dalam berbagai jenis kegiatan, baik untuk sebuah organisasi atau komunitas masyarakat. Pada saat terjadi kesenjangan literasi kompetensi digital ASN dengan dunia usaha dan atau *stakeholder* lainnya maka *reciprocal* dapat berperan dalam bantuan teknis maupun dalam membangun keputusan terdesentralisasi secara efektif dan efisien. Seperti halnya yang diungkapkan informan kunci sebagai berikut:

“Adopsi teknologi maju dalam revolusi industri 4.0 adalah suatu keniscayaan. Kami tahu pemerintah daerah belum siap memasukinya, tapi dengan saling membantu dan mendukung satu dengan lainnya, kami yakin pemerintah daerah akan mampu memasuki era revolusi industri 4.0 ini dengan mumpuni dan bertahap setelah kebutuhan dasar seperti infrastruktur jaringan, minset pimpinan, kapasitas SDM ASN, dan sistem yang berkembang telah dibenahi lebih dahulu”.

Dengan demikian modal sosial *reciprocal* dapat membangun kohesi positif dengan pemerintah daerah memasuki era revolusi industri.

c. Peran Norm (Norma)

Sesuai dengan pengertiannya, norma dapat dipahami sebagai konsensus yang dirumuskan dan disepakati bersama sebagai standar perilaku sosial yang memiliki peran untuk dijadikan sebagai pedoman, panduan, dan pengendali perilaku dalam sebuah komunitas. Terdapat beberapa norma yang dikenal di masyarakat, misalnya norma agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Sebagaimana modal sosial *reciprocal*, modal sosial norma juga sangat selaras dengan fitrah manusia di manapun mereka tinggal dan kapanpun mereka hidup. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam dunia ekonomi dan bisnis sangat membutuhkan norma. Jika pemerintah, masyarakat, dan para pelaku bisnis tidak menjunjung norma-norma yang ada, dapat dipastikan adopsi teknologi revolusi industri 4.0 semakin sulit dan gamang dalam memulainya.

Dalam dunia politik, dunia hukum, dunia, seni dan budaya, dunia pendidikan, kesehatan, dan berbagai lini kehidupan, sekali lagi sangat membutuhkan penegakan norma-norma yang ada. Lebih-lebih untuk kondisi hidup di era keterbukaan, era globalisasi, era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini. Di mana sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat dunia telah terdegragasi mentalnya akibat kecanggihan dunia digital. Bayangkan ketika sebuah lingkungan sosial seperti pemerintahan, perusahaan, organisasi, dan masyarakat di mana masing-masing anggotanya sama-sama memiliki modal sosial lebih-lebih di era industri 4.0, secara teori tentu akan tercipta sebuah kehidupan yang harmoni dan akan mendatangkan keuntungan yang dapat dinikmati secara bersama-sama. Beberapa informan kunci mengatakan:

“Kami menyadari bahwa mau tidak-tidak mau, suka – tidak suka, dan setuju – tidak setuju adopsi teknologi maju dalam revolusi industri 4.0 harus dapat kita terima dan laksanakan. Tentu saja kami akan mendukung secara moral pemerintah daerah dalam melaksanakannya. Karena kalau kami tidak mendukungnya maka justru kita akan menjadi korban teknologi”

Dengan demikian adanya norma ini akan membangun kohesi positif modal sosial dengan pemerintah daerah memasuki era revolusi industri 4.0

d. Peran Interaksi Sosial

Di tengah perkembangan kecanggihan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi semacam ini aktifitas interaksi sosial hampir dapat dipastikan mengalami penurunan yang sangat drastis sekali. Betapa tidak, masyarakat mau belanja berbagai keperluan saja sudah dapat dipenuhi secara *online*. Orang bekerja juga sudah dapat dilakukan secara *online*. Fenomena-fenomena inilah yang pada gilirannya menjadikan orang satu dengan yang lainnya jarang berinteraksi secara nyata. Orang-orang yang dulunya memenuhi dan berinteraksi di ruang-ruang publik, kini berpindah menjejali ruang-ruang media sosial. Komunikasi atau interaksi sosial dengan melalui gawai, memang juga bagian dari jenis komunikasi sosial.

Namun apapun alasannya, komunikasi nyata tetap lebih bermakna dan bernilai ketimbang hanya komunikasi virtual saja. Hal ini bisa dilihat berbagai fenomena komunikasi virtual yang terkadang malah justru menimbulkan masalah karena memiliki potensi untuk terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dari sini bisa dikatakan jika interaksi sosial secara nyata tetap memainkan peranan yang sangat penting untuk membangun sebuah tatanan kehidupan yang harmoni yang dapat membangun sebuah jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya kerja sama dan memberikan keuntungan di antara semua anggota masyarakat. Kehadiran teknologi maju yang serba digital dan internet dikhawatirkan akan mengurangi atau bahkan meniadakan interaksi sosial

yang telah terjadi selama ini. Beberapa informan dari unsur masyarakat mengatakan:

“Kami mengkhawatirkan kehadiran teknologi maju yang serba digital dan internet ini akan mengurangi atau bahkan meniadakan interaksi sosial langsung yang telah terjadi selama ini. Kondisi ini dapat mengancam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti silaturahmi, gotong royong, dan sejenisnya. Sementara itu Pemerintah daerah juga belum dapat meyakinkan bahwa teknologi maju ini akan dapat mempertahankan interaksi sosial diantara kita meskipun melalui virtual”.

Dengan demikian modal sosial interaksi sosial belum dapat membangun kohesi dengan pemerintah daerah memasuki era revolusi industri 4.0. Implikasi dari hasil pembahasan penelitian ini memperlihatkan jika pemerintah daerah di Indonesia akan memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dalam kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Karena harus menyiapkan beberapa kebutuhan dasar seperti *mindset* dan sistem pemerintahan yang mendukung, kapasitas SDM ASN yang mumpuni, ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai, dan kesiapan pemimpin yang transformatif di daerah. Kondisi demikian akan menunjukkan modal sosial belum dapat sepenuhnya membangun *trust* dan interaksi sosial dalam menguatkan pemerintah daerah memasuki era revormasi industri 4.0.

Kesimpulan

Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan yang terjadi secara besar-besaran pada proses hidup dan kehidupan manusia termasuk bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik. Pemerintah daerah umumnya mengalami kegagalan dan kegagapan dalam memasuki era ini karena keterbatasan dalam banyak hal, seperti kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur jaringan, *mindset* dan sistem di pemerintahan yang belum siap,

serta umumnya kepemimpinan yang tidak transformatif dalam menghadapi perubahan besar teknologi maju ini.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa modal sosial belum sepenuhnya dapat menguatkan pemerintah daerah dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Peran modal sosial *trust* dan interaksi sosial belum dapat memberikan penguatan positif bagi pemerintah daerah dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Sedangkan modal sosial *reciprocal* dan *norm* dapat memberikan penguatan positif pemerintah daerah memasuki era revolusi industri 4.0. Implikasi penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dalam menyiapkan diri memasuki era revolusi industri 4.0.

Daftar Pustaka

- Asia Foundation. (1998). Kekuatan Kolektif Sebagai Strategi Mempercepat Pemberdayaan Usaha Kecil. *Prosiding Konferensi Nasional Usaha Kecil 7-8 Oktober*. Jakarta.
- Caplin, J. P. (1991). *Dictionary of Psychology*. New York: Dell Publishing Co.
- Darwin, C. (2004). *On The Origin Of Species*. New Zealand: Castle Book.
- Deckop, John R, Cirka, Carol C and Andersson, L. M. (2003). The Reciprocity of Helping Behavior in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 47(2).
- Doney, P., Cannon, J., & Mullen, M. (2003). Understanding the Influence of National Culture on the Development of Trust. *Academy of Management Review*, 23(3), 601–620.
- Eden, D. (1988). Pygmalion, Goal Setting, and Expectancy: Compatible Ways to Raise Productivity. *Academy of Management Review*, 13(4), 639–652.
- Ferrer, E., Bousoño, C., Jorge, J., Lora, L., Miranda, E., & Natalizio, N. (2013). Enriching Social Capital and Improving Organizational Performance In The Age of Social Networking. *International Journal of Information, Business and Management*, 5(2).

- Fukuyama, F. (2000). *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order*. USA: Touchstone.
- Fukuyama, Francis. (2002). *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Gerungan. (1996). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Eresco.
- Hamdan. (2018). Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12142>
- Hidayat, H. (2001). *Efektivitas Pelatihan Kapital Sosial untuk Meningkatkan Kesadaran Berbangsa*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Hidayaturrahmah, A. N. (2017). *Analisis Dampak dari Revolusi Industri 4.0 di Bidang Kesehatan*. Surakarta: Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.
- Khasali, R. (2018). *Strawberry Generation*. Jakarta: Mizan.
- Kim, D. J., Sivasailam, N., & Rao, H. R. (2004). Information Assurance in B2C WebSites for Information Goods/Services. *Electronic Markets*, 14(4), 344–359.
- Leana, Carrie, R., and Pil, F. (2006). Social Capital and Organizational Performance: Evidence from urban Public School. *Organization Science*, 17(3).
- Lee, J., Lapira, E., Bagheri, B., & Kao, H. (2013). Recent Advances and Trends in Predictive Manufacturing Systems in Big Data Environment. *Manuf*, 1(1).
- Maryanti, N., & Apriana, D. (2019). Kompetensi Siswa SMK dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang 12 Januari 2019*.
- McElroy, M. W., Jorna, R. J., & Engelen, J. Van. (2006). Rethinking Social Capital Theory: A Knowledge Management Perspective. *Journal of Knowledge Management*, 10(5).
- Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce). *Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 4(2).

- Novitasari, S. (2016). Peran Kepercayaan Konsumen Pada Bisnis On Line Terhadap Beli Ulang Pada Konsumen Di Maganda. *Gema Ekonomi*, 5(1).
- Pranoga, W. N. H., Rahmah, A. M., Primasti, N. A. M., & Indah, P. (2018). Peran Mahasiswa Sebagai Penghubung Antar Era Melalui Pembuatan Media Pembelajaran Bagi Guru Di Pedesaan. *Mengembangkan Kompetensi Pendidik Dalam Menghadapi Era Disrupsi*. Surakarta: Kerja sama PGSD-POR Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pratikno. (2001). *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial*. Yogyakarta: FISIPOL UGM bekerja sama dengan Kantor Eks Menteri Negara.
- Rosyadi, K. (2018). New Social Capital Dan Revolusi Industri 4.0; Studi Terhadap Pembangunan Masyarakat UMKM Batik Tanjung Bumi Bangkalan Madura. *Jurnal Pamator*, 11(2).
- Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0. *Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI*, X(09).
- Schroeder, D. A. (2010). *Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations*. California: SAGE Publication.
- Shwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Crown Business.
- Sidi, I. P. S., & Setiadi, B. N. (2013). Manusia Indonesia Abad 21 Yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi. Retrieved from Himpunan Psikologi Indonesia website: <https://himpni.or.id/blog/makalah-3/post/manusia-indonesia-abad-21-yang-berkualitas-tinggi-ditinjau-dari-sudut-pandang-psikologi-19>
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tambayong, Y. (2013). *Kamus Isme-Isme: Filsafat, Teologi, Seni, Sosial, Politik, Hukum, Psikologi, Biologi, Medis*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.

- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *Ijous, 1(1)*.
- Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework.
- Yolanda. (2019). Menyiasati Dampak Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi, 21(3)*.

ETNIS TIONGHOA DALAM POLITIK INDONESIA

Khairunnas

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang secara geografis berada dalam jalur perdagangan internasional. Jauh berabad-abad yang lalu Indonesia yakni selat malaka merupakan negara yang berada dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan India terus ke Laut Persia melalui Suriah ke Laut Tengah (Gisca, 2020). Posisi Indonesia yang sangat strategis tersebut merupakan pintu awal datangnya etnis dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan perdagangan, terutama etnis Arab, India, Persia, dan Tiongkok yang eksistensinya sangat signifikan bila dibandingkan etnis-etnis lainnya dan ada hingga saat ini. Pembauran dalam pasar dagang tersebut dalam jangka panjang akhirnya mendorong terjadinya berbagai peristiwa sosial, misalnya seperti pernikahan antara etnis pendatang dan etnis pribumi (asimilasi) yang selanjutnya mewariskan percampuran keturunan. Selain itu keberadaan etnis yang datang dari berbagai negara pada saat itu juga ada yang sampai saat ini akhirnya menetap dan tinggal di Indonesia dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang pola penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan negara dan rakyat bersumber dari ide utama yakni Demokrasi (Yani, 2018). Bentuk pemerintahan demokrasi menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk turut serta menjadi bagian dari kontestasi politik,

baik sebagai partisipan maupun aktor politik utama (kandidat) tanpa terkecuali. Bentuk pemerintahan yang demikian tentu sangat proporsional tanpa membedakan identitas sosial tertentu dalam praktik politik. Sehingga hak yang sama dapat dimiliki warga negara dalam menggunakan hak politiknya.

Sistem politik Indonesia memfasilitasi dinamika yang heterogen, dengan berbagai semboyan kebhinnekaan dan wujudnya ada dalam konstitusi serta diatur dalam aturan perundang-undangan. Meskipun demikian, kondisi yang sangat multikultural tetap memiliki potensi yang sangat besar terhadap konflik identitas tanpa adanya nilai-nilai toleransi. Sehingga kebhinnekaan sebagai semboyan persatuan juga sekaligus menjadi alarm bagi bangsa Indonesia bahwa heterogenitas memiliki tantangan munculnya politik etnis yang sangat sensitif, dan rentan terhadap praktik politik Identitas. Akan tetapi dalam sebuah negara yang majemuk politik etnis tentu menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari, justru politik etnis merupakan ciri khas dari masyarakat yang majemuk (Pratama, 2016).

Etnis berketurunan Cina yang selanjutnya secara aturan perundang-undangan secara resmi bernama resmi Etnis Tionghoa, merupakan etnis yang setelah sekian lama menetap di Indonesia juga turut serta dalam berbagai aktivitas politik, tercatat bahwa Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang datang pada masa lampau untuk berdagang lalu menetap dan mengambil berbagai posisi strategis dalam politik Indonesia. Keterlibatan Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia sudah dimulai sejak era sebelum kemerdekaan terutama dalam gerakan merebut kemerdekaan, dan berlanjut setelah kemerdekaan pada berbagai era pemerintahan, bahkan berlangsung hingga saat ini. Menurut Leo Suryadinata, penduduk Indonesia Tionghoa naik sekitar 1,45% sampai 2,04% setiap tahunnya (Machfud, 2013). Sehingga dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah tersebut memungkinkan munculnya potensi kepentingan politik dalam melindungi hak-hak kelompok dan kebutuhan komunitas dalam keterwakilan bernegara.

Eksistensi Etnis Tionghoa dalam politik Indonesia mengalami pasang surut. Apalagi pada masa kolonial Etnis Tionghoa ditempatkan pada kelas sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat pribumi. Lebih parahnya, pada masa itu hubungan pribumi dengan Etnis Tionghoa diperburuk karena pemerintahan kolonial menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai “pengutip pajak” kepada pribumi. Pada masa selanjutnya hubungan diantara keduanya juga tidak harmonis karena mayoritas Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan pelaku-pelaku dagang yang pada akhirnya secara langsung berkompetisi dengan pedagang-pedagang lokal. Meskipun demikian pada masa-masa berikutnya tercatat bahwa Etnis Tionghoa terlibat dalam berbagai gerakan kemerdekaan, sangat dekat dengan pemerintahan Presiden Soekarno, dan pasca reformasi menunjukkan keterlibatan yang sangat signifikan dalam politik, terutama posisi-posisi strategis dalam parlemen, kabinet, bahkan sebagai kepala daerah.

Perjalan politik Etnis Tionghoa tercatat tidak mudah, setelah mengalami diskriminasi rasial pada Era Presiden Soeharto, dan sempat membaik setelah berbagai kebijakan yang menjamin kesamaan hak bagi warga Tionghoa oleh presiden Abdurrahman Wahid, pada masa selanjutnya Etnis Tionghoa tetap saja harus berada dalam pusaran konflik politik identitas. Beberapa peristiwa politik yang terjadi di Indonesia mencatat bahwa politik identitas yang menyerang Etnis Tionghoa masih sering terjadi, baik pada gelaran pemilihan legislatif, maupun pada pemilihan kepala daerah. Misalnya saja pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, majunya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada kontestasi tersebut diwarnai dengan sejumlah perdebatan politik yang menjurus pada praktik politik identitas. Dampaknya, pada pemilu 2019 hingga memuncaknya suhu politik menjelang pemilu 2024 isu tentang politik identitas menjadi perbincangan hangat, dan sikap politik Etnis Tionghoa juga menjadi sorotan publik.

Ada dua arus yang berbeda antara sistem politik yang terbuka dan peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia. Keduanya seperti berjalan kontradiktif sehingga mendorong adanya potensi

konflik identitas yang berkepanjangan. Padahal, Etnis Tionghoa sudah sejak lama ada dan telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bahkan sejak masa gerakan kemerdekaan. Meskipun pasang surut, menjadi sebuah kajian yang menarik mengupas bagaimana Etnis Tionghoa tetap konsisten berkiprah dalam berbagai aktivitas politik di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini, eksistensinya dalam politik Indonesia bahkan melampaui antusiasnya etnis-etnis lain yang ada di Indonesia dalam berpolitik, keberadaannya kian mencolok dan mengundang perhatian banyak pihak.

Pembahasan

Munculnya Etnis Tionghoa Sebagai Entitas Politik di Indonesia

Masalah etnisitas menjadikan sebuah kajian yang menarik dibahas dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Multikulturalisme bisa menjadi sebuah kekayaan bagi suatu negara dan juga sekaligus bisa menjadikan sebuah konflik yang luas apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan adanya masyarakat yang multikultur, menunjukkan bahwa adanya sebuah kekayaan etnis bagi negeri itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai negeri yang multikultur dengan ratusan etnis, adat dan budaya yang ada didalamnya. Etnis ini biasanya dijadikan sebagai sebuah cara untuk mencirikan suatu kelompok masyarakat yang dilihat dari Bahasa, budaya, warna kulit dan sejenisnya. Selain etnis lokal yang mendiami wilayah Indonesia, terdapat juga etnis luar yang sudah lama juga mendiami wilayah Indonesia seperti Arab, India, Tionghoa, dan lain-lain.

Entitas Etnis Tionghoa muncul jauh sebelum Republik ini merdeka. Pada masa Kolonial, etnis Tionghoa sudah berhimpun dengan membentuk Partai Tionghoa Indonesia. Entitas politik ini dijadikan sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan diplomasi yang bertujuan untuk menuntut hak secara politis. Pembagian kelompok pada zaman kolonial yang 'memaksa' Etnis Tionghoa menempati kelompok ras Timur Asing menjadikan Etnis Tionghoa terjepit di antara masyarakat yang ada, oleh penjajah Belanda, Etnis Tionghoa

diawasi dan dibatasi gerak, sementara oleh kelompok pribumi mereka dianggap sebagai orang luar yang pro terhadap penjajah (Pahrozi, 2019).

Era kolonial, Etnis Tionghoa membentuk Gerakan Pan-China yang menyatakan bahwa Etnis Tionghoa sebagai Kawula Belanda. Gerakan ini bertujuan untuk menyingkirkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Etnis Tionghoa saat itu, seperti keharusan menempati wilayah tertentu yang diatur oleh pemerintah Belanda, serta mengikutsertakan Etnis Tionghoa dalam pemerintahan baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat. Seiring perkembangannya, pada tahun 1918 Pan-China terbagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok pro-Belanda dan kelompok yang berorientasi ke RRC. Namun tahun 1928, kelompok peranakan yang berpendidikan Belanda mendirikan partai kaum peranakan bernama Chung Hwa Hui (CHH). Berhubung sikap CHH yang pro Belanda, beberapa kelompok yang tidak setuju akhirnya keluar dan mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang pro-Indonesia (Suryadinata, 2002). Tujuan utama dalam pendirian PTI ini dibentuk adalah untuk menyadarkan Etnis Tionghoa agar bergabung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik Indonesia juga dapat dilihat dari kontribusi beberapa tokoh Tionghoa yang terlibat dalam anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), antara lain: Liem Koen Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia, Oey Tiang Tjoei, pimpinan surat kabar Hong Po, dan Oey Tjong Hauw, ketua partai kaum peranakan Tionghoa (Chung Hwa Hui) (Matanasi, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Etnis Tionghoa menjadi bagian inti dalam merumuskan Pancasila yang dijadikan dasar negara hingga saat ini. Fakta sejarah tersebut juga dapat diilhami sebagai legitimasi politik bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia sampai kapanpun.

Masa Kelam Politik Etnis Tionghoa di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kembalinya muncul berbagai macam golongan Tionghoa antara lain Persatuan Tionghoa tahun 1948 dan organisasi lainnya seperti BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) (Suryadinata, 2002). Hubungan yang dekat antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis yang berorientasi ke negara Uni Soviet dan Tiongkok secara tidak langsung juga membuka hubungan yang baik dan luas dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang lebih dekat ke China dalam sektor pemerintahan (Sulistyo, 2003). Namun hal ini malah menjadi sebuah tragedi memilukan bagi orang Tionghoa di Indonesia. Karena setelah runtuhnya Soekarno, orang-orang Tionghoa menjadi sasaran akhir kemarahan baik itu masyarakat maupun pemerintahan selanjutnya (Orde Baru) yang dikenal dengan pemerintahan yang anti Tionghoa.

Rezim Soeharto telah menabukan semua yang berbau Tionghoa, mulai dari nama, bahasa, aksara, surat kabar bahkan sampai dengan ekspresi keagamaan juga dilarang. Semua yang berkaitan dengan Tionghoa harus dipreteli dan diganti dengan nama yang lebih terdengar Indonesia. Rezim Soeharto memberlakukan kebijakan politik asimilasi total. Etnis Tionghoa ingin diterima sebagai warga negara, maka harus melakukan pembauran (politik asimilasi) agar dianggap lebih Indonesia. Politik asimilasi total ini memaksa warga Etnis Tionghoa menanggalkan semua bentuk identitas yang berkaitan dan berbau ke-Tionghoa-an.

Beberapa hari sebelum Orde Baru berakhir, dalam peristiwa Mei 1998 di Jakarta, Etnis Tionghoa masih saja diselimuti oleh kejadian yang memilukan. Mereka dijarah, diperkosa dan bahkan dibunuh massa kerusuhan. Situasi krisis dan kebencian yang terframing terhadap Etnis Tionghoa menjadi alasan yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Meskipun demikian sejarah terlanjur mencatat bahwa peristiwa tersebut menjadi titik terendah orang Etnis Tionghoa di Indonesia (Pattiradjawane, 2000). Selanjutnya Orde Baru berakhir dan Etnis Tionghoa memasuki babak baru dalam menempatkan posisi politiknya dalam politik Indonesia.

Berakhirnya Orde Baru menjadikan terbukanya kran kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam ranah sosial-politik. Mulai bermunculan banyak partai politik baru. Tiga dari banyak partai politik tersebut didirikan oleh orang Tionghoa, antara lain: Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Pembauran Indonesia, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) (Suryadinata, 2003). Selain lembaga politik, Etnis Tionghoa yang tidak tertarik dengan politik praktis, mereka lebih memilih bergabung dengan organisasi sosial non-politik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Babak Baru Politik Etnis Tionghoa di Indonesia

Titik terang bagi posisi politik Etnis Tionghoa pasca reformasi bersamaan dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia. Pasca terpilihnya beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, sejumlah slogan anti diskriminasi rasial populer dikampanyekan. Presiden Gus Dur terkenal sebagai bapak pluralisme yang sangat gencar menyuarakan nilai-nilai keberagaman dalam pidato-pidatonya. Lebih dari itu Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang sangat diskriminatif terhadap Etnis Tionghoa. Hal tersebut menyita perhatian warga Tionghoa, bahkan warga Tionghoa memberikan julukan kepada Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Tionghoa Indonesia (Hoon, 2012).

Setelah keluar dari persoalan diskriminasi rasial, posisi politik Etnis Tionghoa berangsur pulih, hal ini ditandai dengan munculnya kembali tokoh-tokoh politik Etnis Tionghoa dalam kontestasi politik di Indonesia. Peristiwa Reformasi menjadi momentum yang menunjukkan kembalinya posisi politik Etnis Tionghoa, tercatat pada Pemilu 1999 ada 150 orang lebih calon anggota legislatif dari Etnis Tionghoa yang mewarnai kontestasi politik saat itu. Jumlah keikutsertaan tokoh-tokoh Etnis bahkan meningkat 200 orang lebih pada pemilu 2004, yang selanjutnya tokoh-tokoh tersebut bahkan sangat populer dalam dunia politik karena menempati berbagai

posisi strategis sebagai anggota parlemen, kepala daerah, bahkan sebagai menteri (Khairunnas et al., 2018). Tokoh-tokoh tersebut seperti Mari Elka Pangestu yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Alvin Lie Ling Piao yang pernah menjadi anggota DPR RI, Basuki Tjahya Purnama yang pernah menjadi Bupati Belitung Timur dan juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, serta masih banyak tokoh lainnya yang berkiprah dalam politik Indonesia.

Pasca reformasi tendensi terhadap eksistensi politik Etnis Tionghoa sempat kembali terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Munculnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai salah satu kandidat calon Gubernur dan kuatnya isu politik identitas saat itu memicu berbagai reaksi politik yang diawali dengan isu agama lalu berkembang menjadi isu keetnisan yang menyerang identitas Etnis Tionghoa (Lestari, 2019). Polarisasi yang terjadi sempat memicu berbagai reaksi keras dalam bentuk kampanye-kampanye politik dan mengangkat isu-isu keetnisan. Kalahnya Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak mengakhiri isu politik identitas yang terjadi saat itu, isu politik identitas bahkan berlanjut hingga Pemilu 2019 yang dampaknya masih terasa hingga saat ini.

Politik identitas marak terjadi pasca Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019, dan tidak jarang isu politik identitas yang diangkat membangun tendensi negatif terhadap munculnya tokoh-tokoh politik dari kalangan Etnis Tionghoa. Bila berkepanjangan dan terus berkembang maka demokrasi Indonesia tentu telah berbalik mundur dan mengulang diskriminasi rasial yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Disisi lain, hal ini menandakan bahwa posisi politik Etnis Tionghoa di Indonesia semakin kuat, sehingga menjadi isu politik yang dijadikan para kompetitor politik dalam mengamankan posisi politik mereka.

Apabila kita merujuk kepada konsep sistem politik yang salah satu fungsinya adalah sebagai rekrutmen politik, yang selanjutnya akan memilih sejumlah pejabat politik yang memiliki kewenangan dalam menghasilkan sejumlah kebijakan politik (Anggara, 2015), maka tekanan politik yang demikian kuat diberikan terhadap

posisi politik Etnis Tionghoa akan memicu reaksi yang serius pada pemilu 2024. Dorongan dalam melindungi hak-hak kelompok dari tindakan-tindakan yang diskriminatif menjadi alasan utama, sehingga kekuasaan menjadi alat yang strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Kemungkinan itu sangat terbuka lebar, kuantitas dan pertumbuhan penduduk Etnis Tionghoa di Indonesia yang telah dibahas sebelumnya menjadi tukar tambah kepentingan politik yang sejajar dan menjanjikan potensi suara yang cukup besar dalam pemilu berikutnya untuk membangun koalisi dengan kelompok-kelompok politik lain di Indonesia.

Kesimpulan

Eksistensi Etnis Tionghoa dalam politik Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan, keterlibatan media-media Tionghoa dalam memberitakan gerakan-gerakan kemerdekaan menjadi salah satu bukti keterlibatan tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tercatat Etnis Tionghoa sangat dekat dengan Presiden Soekarno, bahkan beberapa tokoh Etnis Tionghoa menduduki beberapa posisi menteri pada Kabinet saat itu. Bertolak belakang dengan masa Pemerintahan Soekarno, posisi politik Etnis Tionghoa pada masa Presiden Soeharto sangat mencekam, Etnis Tionghoa bahkan mengalami diskriminasi rasial yang melarang penggunaan identitas Tionghoa bagi warga Tionghoa itu sendiri. Momen Reformasi sekaligus menjadi titik bangkitnya posisi politik Etnis Tionghoa di Indonesia, kebijakan Abdurrahman Wahid dalam menjamin kesetaraan hak warga Tionghoa mendorong keberlanjutan kiprah politik Etnis Tionghoa yang berlangsung hingga saat ini.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2015). 11. Buku Sistem Politik Indonesia.pdf. In *Sistem Politik Indonesia* (pp. 22–24).
- Gisca, S. (2020). Jalur Sutera: Sejarah dan Posisi Indonesia. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/140000869/jalur-sutera-sejarah-dan-posisi-indonesia?page=all>.

- Hoon, C. Y. (2012). *IDENTITAS TIONGHOA: Pasca Soeharto (Budaya, Politik, dan Media)*. LP3S & Yayasan Nabil.
- Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018). Perilaku Memilih Pemuda Tionghoa Pada Pilkada Kota Palembang 2018. *Journal of Moral and Civic Education*, 2(2), 77–91. <http://jmce.ppj.unp.ac.id/index.php/JMCE/article/view/102>.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.21107/sml.v2i1.551>.
- Machfud, C. (2013). *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Matanasi, P. (2017). Komposisi Etnis dan Agama Para Perumus Pancasila. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/komposisi-etnis-dan-agama-para-perumus-pancasila-cpMq>.
- Pahrozi, R. (2019). Dinamika Pembauran Identitas Tionghoa Muslim Di Palembang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 75. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i1.1313>.
- Pattiradjawane, R. L. (2000). Peristiwa Mei 1998 di Jakarta. In I. Wibowo (Ed.), *Harga yang harus dibayar* (p. 213). Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A. (2016). Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia. *JIPP (Journal Ilmu Politik & Pemerintahan)*, 2(2), 214–229. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/ADHKPRTM>
- Sulistyo, H. (2003). *Palu dan Arit di Ladang Tebu, (Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan)*. Gramedia.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus di Indonesia*. LP3S Indonesia.
- Suryadinata, L. (2003). Kebijakan Negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa : Dari Asimilasi ke Multikulturalisme? *Jurnal Antropologi Indonesia*, 1–12.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>.

GERAKAN SOSIAL DAN GERAKAN SOSIAL GLOBAL⁴

Zulfikri Suleman⁵, Abdul Halim⁶

Pendahuluan

Aksi kolektif masyarakat yang memiliki kesadaran terkait isu-isu sosial yang masih terpinggirkan atau yang sering dikenal dengan Gerakan sosial adalah sebuah fenomena sosial politik yang terus berkembang hingga saat ini. Isu dan ruang lingkup merupakan dua hal penting yang terus mengalami perkembangan dalam kajian Gerakan sosial. Gerakan sosial biasanya berangkat dari kegelisahan ditingkat lokal yang kemudian mampu berkembang pada ruang lingkup global. Hal ini tidak bisa dihindarkan dari dukungan perkembangan teknologi dan informasi di era digital yang semakin menguatkan konteks Gerakan dalam ruang lingkup Global. Pada tingkat global, Siapa yang tidak mengenal sepak terjang *Greenpeace*, gerakan sosial global yang memperjuangkan pelestarian lingkungan, atau *Women's Lib* (*Women Liberation*), gerakan sosial global yang memperjuangkan kesetaraan untuk kaum perempuan semesta.

⁴ Tulisan ini merupakan pengembangan dari tulisan yang berjudul "Gerakan Sosial (Masyarakat Desa): Masalah Obsesi", Yang dipresentasikan dalam Webinar Nasional Jurusan Sosiologi FISIP UNSRI Pada 7 Juli 2020

⁵ Pengajar dan Pengampu mata kuliah "Gerakan Sosial" pada Jurusan Sosiologi FISIP UNSRI dan "Gerakan Sosial Global" pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI

⁶ Pengajar mata dan "Gerakan Sosial Global" pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI

Tulisan ini mencoba membicarakan gerakan sosial dari aspek praktisnya dengan cara menyajikan beberapa cerita inspiratif tentang aktivitas orang per orang atau beberapa orang dalam rangka mendorong kemajuan masyarakat desa atau masyarakat kelas bawah di perkotaan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan konsep 'obsesi' sebagai penggerak utama bagi suatu gerakan sosial yang efektif dan berkesinambungan. Setelah itu, menumbuhkan nilai-nilai kepedulian, solidaritas sosial dan kerja sama adalah kata-kata kunci untuk diskursus gerakan sosial untuk masyarakat desa khususnya mau pun untuk masyarakat pada tingkat global. Mengenai gerakan sosial masyarakat desa, kita bisa mengajukan dua pertanyaan: **bagaimana keadaan masyarakat desa kita sekarang ini? Dan Gerakan sosial seperti apa yang perlu didorong untuk mendorong kemajuan masyarakat pedesaan, khususnya di masa pandemi covid-19 sekarang ini?**

Setiap orang bisa mengajukan jawaban yang berbeda-beda, sesuai dengan anutan perspektif teoritis dan keyakinan ideologis masing-masing. Satu hal yang mungkin sudah disepakati sejak awal adalah bahwa gerakan sosial tertentu perlu digagas dan digalakkan untuk kemajuan masyarakat di pedesaan. Tentang hal ini, kita berbicara tentang tanggungjawab sosial seorang akademisi atau ilmuwan. Merujuk pada eskalasi konflik politik dan kekerasan horizontal akibat Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 yang lalu, Novri Susan menghimbau para ilmuwan sosial agar meninggalkan keberpihakan politik mereka dan, sebaliknya, mengutamakan pembentukan imajinasi kolektif yang memperjuangkan keadilan, perdamaian dan kehidupan bersama tanpa kekerasan dalam masyarakat (Kompas, 2014). Seturut dengan ini, kita dapat juga mengemukakan bahwa para akademisi dewasa ini memiliki tanggungjawab sosial personal (*personal social responsibility*) yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan khususnya.

Masyarakat Desa dan Dunia

Kita tidak sulit untuk menyepakati bahwa desa (dan masyarakatnya) di negeri kita pada umumnya, dan khususnya di Sumatera Selatan, masih mengalami keterbelakangan di semua sektor kehidupan. Data tentang “Indeks Desa Membangun” tahun 2015 menunjukkan beberapa hal. Pertama, dari 74.093 jumlah desa di tanah air, 12.951 di antaranya masih masuk kategori ‘sangat tertinggal’, 26.362 kategori ‘tertinggal’, 3.484 masuk kategori ‘mandiri’ dan hanya 189 desa yang masuk jadi desa ‘maju’. Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, dari jumlah desa sebanyak 2.851, 290 desa (10%) masih tergolong ‘sangat tertinggal’. 1.990 (70%) dianggap ‘tertinggal’, 553 (19%) sudah ‘berkembang’, 18 desa (1%) sudah ‘mandiri’, tanpa satu pun dianggap sudah ‘maju’. Untuk Sumsel juga, angka putus sekolah untuk anak SD/MI adalah 0,23%, nomor tiga tertinggi di Indonesia setelah Papua dan Gorontalo. Kedua, sebagian besar desa dengan kategori ‘sangat tertinggal’ dan ‘tertinggal’ berada di luar pulau Jawa. Sebaliknya, sebagian besar desa yang sudah dianggap ‘mandiri’ dan ‘maju’ terpusat di pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur (Kemendes, 2016). Dengan demikian, di samping keterbelakangan, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa secara nasional.

Data tahun 2015 di atas juga menunjukkan bahwa banyak program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat desa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah-pemerintah sebelumnya, termasuk oleh pemerintah daerah, pihak swasta dan kekuatan-kekuatan pemberdaya lainnya di tingkat akar rumput, belum memberikan hasil secara maksimal. Pengamatan sepintas memang menampakkan keadaan masyarakat desa yang semakin terbuka dan berkembang, khususnya melalui penetrasi ekonomi dan kemajuan terbatas infrastruktur komunikasi dan transportasi. Tapi pengamatan yang lebih cermat dari perspektif ekonomi politik liberal sebenarnya justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya: misalnya, masyarakat desa hanya berkembang sebagai konsumen (*users*) dari produk-produk luar, bukan sebagai produsen yang mendatangkan kekayaan desa, sehingga keadaan masyarakat desa seringkali

digambarkan semakin bergantung pada kekuatan ekonomi dari luar. Masuknya perangkat komunikasi *handphone* dan *smartphone* dengan semua perangkat ikutannya sampai ke desa-desa sekarang ini dengan gamblang menunjukkan pola ketergantungan desa dan masyarakatnya ini. Secara keseluruhan, desa dan masyarakat desa sampai sekarang tetap saja terkebelakang dan memprihatinkan.

Indonesia sekarang kebetulan baru pulih dari amukan wabah covid-19 (*corona virus disease 2019*) atau disingkat corona saja. Wabah ini mulai menular sejak awal tahun 2020. Selama masa itu narasi publik kita didominasi oleh isu-isu sekitar peningkatan jumlah terdampak, usaha penanganannya (PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan yang meninggal dunia mau pun yang sembuh. Khusus untuk masyarakat desa, wabah corona ini telah menimbulkan efek yang berantai yang berujung pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai contoh, larangan untuk berkumpul, misalnya di pasar, telah menyulitkan warga desa yang berdagang untuk menjual barang dagangannya. Contoh lain, petani karet terpaksa berhenti menyadap karet karena tidak ada yang membeli (stok karet menumpuk di pedagang besar/pabrik). Begitu juga, warga desa yang bekerja di kota terpaksa menerima keputusan hubungan kerja dan pulang ke desa masing-masing sebagai penganggur baru. Khusus untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dampak dari pandemi covid-19 ini begitu parah sehingga menjuluki tahun 2020 sebagai ‘*annus horribilis*’ atau tahun yang mengerikan (Saptowalyono, 2020). Secara keseluruhan, pandemi covid-19 telah mendatangkan proses penderitaan tambahan bagi masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya.

Kita menyaksikan upaya Pemerintah daerah dan pemerintah daerah untuk membantu warga yang terdampak wabah corona ini lewat penyediaan anggaran darurat. Tapi terlihat dengan jelas, kemampuan keuangan dan sumberdaya Pemerintah dan pemerintah daerah amat terbatas. Dalam konteks inilah kita menyaksikan munculnya uluran bantuan dari pihak swasta dan pribadi dalam berbagai bentuk kepada warga masyarakat yang paling rentan terhadap dampak corona ini. Dengan kata lain, sikap kepedulian terhadap sesama, solidaritas sosial dan kerja sama menjadi aspek lain yang muncul seiring dengan efek berantai masif yang menimpa

masyarakat pada umumnya akibat wabah corona ini. Meskipun kehidupan masyarakat sekarang ini, termasuk masyarakat desa, sudah mulai memasuki masa kenormalan baru dalam arti kembali beraktivitas dengan protokol kesehatan, akibat destruktif yang diakibatkannya belum akan segera pulih seperti sediakala. Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa sikap peduli terhadap sesama, solidaritas sosial dan kerja sama di antara banyak pihak akan tetap mewarnai kehidupan bersama di desa khususnya.

Mengenai masyarakat dunia, dapat dikemukakan bahwa masyarakat dunia sekarang ini juga sedang terancam akibat beberapa perkembangan yang memprihatinkan. Pertama, meskipun sudah memasuki masa endemi paskapandemi covid-19 selama dua setengah tahun belakangan ini dan pemulihan di semua bidang kehidupan, dunia belum benar-benar terbebas dari ancaman zoonosis, sebagaimana terlihat dari ancaman penyakit cacar monyet (*monkeypox*) akhir-akhir ini. Dalam konteks ini, tersedianya vaksin secara lebih merata untuk semua lapisan masyarakat dunia merupakan keharusan. Fakta bahwa ketersediaan vaksin untuk masyarakat di beberapa negara di Afrika hanya berkisar sekitar enam persen berbanding 70 persen untuk masyarakat di negara-negara maju menunjukkan pentingnya sikap peduli dan kerja sama lintas negara dewasa ini.

Kedua, perkembangan akibat Perang Rusia–Ukraina yang sudah berlangsung selama delapan bulan. Meskipun kasus perang itu sendiri terjadi di kawasan Eropa Timur, tapi sikap keras-reaktif Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap Rusia, serta embargo ekonomi dan perdagangan yang menyertainya, sungguh-sungguh telah menempatkan dunia pada ancaman perang dengan lingkup dan intensitas lebih luas. Perang Rusia–Ukraina juga jadi ancaman serius karena skala bencana yang ditimbulkannya menular sampai jauh ke pelosok mana pun. Yang dimaksud adalah krisis pangan dan energi dengan akibat-akibat ikutan–kesulitan ekonomi secara umum yang dirasakan baik oleh masyarakat di negara-negara maju dan terutama oleh masyarakat di negara-negara berkembang. Perlambatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga barang

kebutuhan sehari-hari, peningkatan jumlah pengangguran serta sikap mendahulukan kepentingan sendiri di kalangan pemerintah negara-negara pada umumnya adalah bencana yang menjauhkan masyarakat dunia dari kerja sama dan saling membantu seperti yang dimaksudkan.

Tentang Obsesi

Dalam usaha memahami dan seterusnya menggagas suatu gerakan sosial untuk masyarakat, khususnya masyarakat desa terkait pandemi covid-19 ini, penulis mencoba menggunakan konsep 'obsesi' (A. Rahman Zainuddin, 2004). Pada umumnya dianut pandangan bahwa suatu gerakan sosial dapat dilaksanakan apabila terdapat masalah-masalah yang harus di atasi serta orang-orang yang akan melaksanakannya. Artinya, tidak terlalu dipersoalkan orang-orang seperti apa yang akan bisa mendukung gerakan sosial tersebut. Kecenderungan ini terutama dilekatkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah atau pemerintah daerah seperti gerakan disiplin nasional, gerakan hidup sederhana, gerakan literasi dan lain-lain. Sehingga tidak mengherankan apabila kita akhirnya menyaksikan bahwa sebagian besar 'gerakan sosial' yang dirancang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah tersebut lebih bersifat seremonial-birokratis ketimbang gerakan yang murni transformatif. Menurut penulis, melaksanakan suatu gerakan sosial dengan mengabaikan obsesi dari orang-orang yang mendukungnya akan mengurangi makna dan keberhasilan gerakan sosial itu sendiri.

Rahman Zainuddin menggunakan konsep 'obsesi' untuk menjelaskan apa yang dipikirkan oleh seorang pemikir politik atau filsuf politik. Menurutnya, obsesi adalah satu konsep yang paling dominan dan amat penting bagi seorang pemikir politik dan yang senantiasa mempengaruhi pemikirannya di setiap waktu. Obsesi adalah inti dari bangunan pemikiran seseorang. Dengan demikian, karya tulis seorang pemikir politik atau filsuf politik pasti mengandung satu obsesinya. Demikianlah, menurut A. Rahman Zainuddin, obsesi Machiavelli adalah persatuan dan

kemegahan negara Italia di abad ke-16, obsesi St. Agustinus adalah mempertahankan konsep kerajaan Tuhan di dunia, obsesi Plato adalah mewujudkan kehidupan bersama yang stabil dan yang dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran dan ilmu pengetahuan. Tentang bagaimana seseorang yang memiliki obsesi tertentu memahami lingkungannya, A. Rahman Zainuddin menulis:

“Orang yang mempunyai sebuah obsesi tidak enak melihat kenyataan yang ada. Ia tidak dapat menerima kenyataan itu. Ia ingin mengubah kenyataan itu menjadi sesuatu yang lain yang menurut pendapatnya jauh lebih baik, sesuai dengan obsesinya tadi”.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, tulisan ini mengajukan argumentasi bahwa suatu gerakan sosial yang berhasil untuk masyarakat desa, khususnya dalam menghadapi pandemi covid-19 sekarang ini, harus bertumpu pada obsesi orang-orang yang mendukungnya, yaitu keyakinan akan kebenaran suatu keadaan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, masyarakat desa yang peduli satu sama lain, yang tumbuh dalam ikatan solidaritas yang kuat, akan mampu menghadapi dengan efektif bahaya apa pun dari pandemi covid-19 sekarang ini. Tanpa keyakinan obsesif seperti ini, gerakan sosial itu tidak akan mendatangkan hasil seperti yang diharapkan. Pengertian ini dapat kita identikkan dengan beberapa istilah lain seperti ‘bekerja dengan *passion*’, memandang kerja sebagai karya atau bekerja dengan perasaan terpanggil. Yang terakhir ini mengingatkan kita pada apa yang diungkapkan Weber tentang motivasi ekonomi kaum kapitalis Protestan, khususnya dari sekte Calvinis, di Eropa Barat di abad ke-19, yaitu bekerja/berdagang sebagai panggilan ibadah, bukan untuk mencari untung, agar di akhirat kelak terpilih sebagai makhluk Tuhan penghuni surga. Inilah yang kemudian dikenal sebagai etika Protestan dan yang telah mendorong kemajuan tatanan kapitalis di Eropa Barat di masa itu.

Beberapa Cerita Inspiratif

Para pembaca rutin koran-koran nasional dengan mudah akan menemukan banyak berita, cerita dan ulasan yang menarik tentang

aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa di antaranya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa.

1. Ini cerita tentang 268 perajin keramik di desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta (KOMPAS, 10 Juni 2014, hal. 16). Di desa tersebut usaha kecil keramik sudah berlangsung sejak jaman kolonial dengan kondisi naik-turun. Keadaan tidak sehat dirasakan karena tidak ada kebersamaan di antara perajin ini. Misalnya, pembelian bahan baku tanah liat dilakukan sendiri-sendiri sehingga menjadi mahal. Begitu juga, menjual produk ke pasar juga dilakukan sendiri-sendiri sehingga lebih menampakkan persaingan daripada persatuan dan kerja sama. Faktor lain, kerja sebagai perajin keramik mulai ditinggalkan anak-anak muda, mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik besar. Keadaan di atas mulai berubah ketika tampil H. Eman Sulaeman sebagai Ketua Koperasi OVOP (*One Village One Product*). Eman dan kawan-kawannya berusaha memperkenalkan produk keramik desanya ke luar dengan cara mengikuti macam-macam pameran di Jakarta dan membuka pasar luar negeri. Usaha ini mulai membuahkan hasil ketika pada triwulan pertama tahun 2014 Koperasi OVOP mengeksport dua kontainer keramik dengan macam-macam bentuk dan model senilai Rp 180 juta. Keberhasilan ini meyakinkan para perajin keramik tentang pentingnya persatuan dan kebersamaan di antara mereka sehingga bisa mendatangkan keuntungan lebih besar. Dengan keuntungan lebih besar tersebut, para perajin bisa memberi upah para pekerja/buruh putar lebih besar daripada upah minimum kabupaten. Akibat selanjutnya, anak-anak muda di desa Anjun mulai berpaling lagi ke usaha kerajinan keramik tradisional di desa mereka ini, satu hal yang sebelumnya dianggap lebih rendah daripada kerja memburuh di pabrik-pabrik.

2. Kedua, ini adalah cerita tentang ibu-ibu di desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (KOMPAS, 2 Januari 2018, hal. 23). Kareloe adalah tipikal desa penghasil jagung yang terkebelakang, buta aksara dan karena itu miskin. Sebagai petani jagung, para suami memboyong istri dan anak-anaknya untuk menginap di ladang jagung sampai berbulan-bulan di masa tanam, masa pemeliharaan dan masa panen. Akibatnya, para ibu luput dari kegiatan-kegiatan lain yang produktif dan anak-anak mereka tidak berkesempatan mengenyam pendidikan dengan memadai. Kegiatan keseharian seperti inilah yang membuat warga desa Kareloe dari tahun ke tahun akrab dengan keterbelakangan.
3. Tahun 2015, dengan bimbingan istri Bupati Kabupaten Jeneponto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, dibentuk Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jeneponto. Tujuannya adalah untuk memberdayakan ibu-ibu di desa yang mengalami tingkat buta aksara sampai 40% tersebut. Caranya, para pendamping FPPI membujuk para ibu agar bersedia menjalani program tulis-baca, termasuk dengan cara mendatangi ibu-ibu di kebun mereka masing-masing. Setelah melalui perjuangan berat dan berhasil, ibu-ibu tersebut diberi latihan ketrampilan kerajinan dari tongkol jagung yang melimpah. Tongkol jagung yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong, dengan bantuan peralatan sederhana dan pembagian kerja, dirakit menjadi macam-macam barang kerajinan seperti kap lampu, wadah tisu, wadah pensil dan lain-lain. Hasil kerajinan ini kemudian diikuti dalam pameran-pameran dan dijual dengan harga berkisar antara Rp 25.000 – Rp 500.000. Di samping kerajinan tongkol jagung, kaum ibu desa Kareloe juga mendapat pelatihan ketrampilan membuat kue, menjahit, menganyam dan makanan ringan dengan bahan baku yang dihasilkan sendiri. Berkat kesadaran bersama dan kebersamaan, serta dorongan dari pemerintah daerah, desa Kareloe dan

masyarakatnya berhasil mengatasi keterbelakangan mereka dan bahkan kemudian dinobatkan menjadi desa percontohan vokasi di Jeneponto.

Ini cerita tentang jalan berliku mewujudkan status Hutan Desa di desa Kepayang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (KOMPAS, 12 Desember 2014, hal. 45). Desa Kepayang adalah bagian dari hutan Lalan yang amat kaya dengan kayu berkualitas dan menjadi sumber kehidupan utama warga di sekitarnya. Desa ini bisa dikatakan terisolir, berjarak 28 kilometer dari Bayung Lencir melalui jalan tanah bergelombang atau enam jam perjalanan dengan kapal cepat dari Palembang. Penebangan kayu besar-besaran terjadi sejak tahun 1970 seiring dengan keluarnya kebijakan Pemerintah tentang hak penguasaan hutan (HPH) oleh beberapa perusahaan kayu. Seiring dengan penebangan besar-besaran ini, para buruh, pegawai perusahaan dan pedagang kecil dari daerah sekitar mulai tinggal menetap di desa Kepayang. Habisnya masa penguasaan HPH tahun 1999, yang berarti mulai habisnya persediaan kayu komersial, tidak dengan sendirinya menghentikan aktivitas penebangan kayu ini. Penebangan kayu ilegal tetap marak, meskipun sudah dilakukan usaha penegakan hukum oleh aparat keamanan. Dewasa ini luas lahan desa Kepayang berjumlah 450 hektar dengan sumber ekonomi yang semakin terbatas untuk mendukung kehidupan 2.290 jiwa penduduknya. Tahun 2008, dan dengan pendampingan dari lembaga Wahana Bumi Hijau (WBH) kepala desa mengajukan kepada Pemerintah status Hutan Desa untuk desa Kepayang. Tujuannya adalah untuk pelestarian lingkungan di samping untuk dikelola demi peningkatan kesejahteraan penduduknya. Dengan pendampingan oleh WBH, masyarakat juga diarahkan untuk pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perkebunan karet. Usulan status Hutan Desa untuk desa Kepayang ini disetujui tahun 2010. Meskipun demikian, pengelolaan swadaya terhadap

kawasan hutan desa seluas 5.170 hektar ini menghadapi tantangan karena aksi perambahan hutan dan penebangan liar yang tetap berlanjut. Pengelolaan sendiri hutan desa oleh masyarakat desa Kepyayang tetap merupakan harapan yang belum kesampaian.

4. Selanjutnya adalah cerita tentang sekolah gratis sang juru parkir dari desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (KOMPAS, 24 Oktober 2016, hal. 16). Undang Suryaman (40 tahun) adalah juru parkir dari pagi sampe sore di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor dengan penghasilan hanya Rp 50.000 per hari. Pria beristri dengan empat anak ini cuma tamat sekolah dasar, tidak mampu melanjutkan ke SMP karena orang tuanya hanya seorang petani gurem. Meskipun berpendidikan rendah dan menjalani hidup papa, Undang memiliki satu obsesi: menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Rumahnya yang sederhana kemudian disulap menjadi taman belajar gratis untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pada saat dibuka tahun 2012 baru 18 anak yang ikut belajar, dengan Undang sendiri dan istrinya sebagai pengajar. Seperti biasa terjadi, inisiatif Undang ini sempat mengundang sikap curiga dari warga desanya. Para warga menduga, Undang dan istrinya akan memungut biaya sampai ratusan ribu per anak di taman belajarnya. Tapi dengan niat baik dan keseriusannya, Undang mulai berhasil meyakinkan warga desanya dan tahun berikutnya jumlah anak yang belajar meningkat menjadi 25 orang. Tahun 2014 Undang berhasil meningkatkan status taman belajarnya menjadi taman kanak-kanak (TK) Nafilatul Husna Ataulah dan taman bacaan Al Quran (TPA) Raudatul Jannah. Ini adalah hasil dari keikutsertaannya dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru TK Al Quran Jawa Barat.

Sampai tahun 2016 terdapat 60 anak yang belajar di TK dan 120 orang yang belajar di TPA, di mana 75% di antaranya

berasal dari keluarga tidak mampu. Bagaimana Undang membiayai pelaksanaan visinya yang mulia ini? Pada mulanya Undang menyisihkan Rp 10.000 dari Rp 50.000 penghasilannya sebagai juru parkir untuk biaya operasional. Karena tidak mencukupi, ia akhirnya mencari kerja tambahan sebagai pencuci mobil dengan penghasilan Rp 50.000 per hari untuk jam kerja antara pukul 18.00 – 03.00. Bahkan istri Undang akhirnya juga ikut membantu kerja keras suaminya dengan juga bekerja sebagai pencuci mobil. Terharu dengan ketulusan Undang dan istrinya, pimpinan usaha pencucian mobil tempat mereka bekerja kemudian memberikan bantuan uang sewa rumah untuk aktivitas belajar selama selama setahun, bantuan buku gambar, pensil, penghapus dan buku pelajaran membaca Al Quran. Sejak itu bantuan juga mengalir dari pihak lain seperti mahasiswa dan donasi para dermawan, sehingga akhirnya bisa menutupi sebagian dari biaya operasional yang dibutuhkan. Yang luar biasa, tidak ada gaji untuk 5 guru TK dan 10 guru TPA. Mereka mengajar sebagai relawan.

5. Terakhir adalah cerita tentang kepedulian dan pengabdian mahasiswa melalui kelompok “Kita Indonesia” (KOMPAS, 23 Desember 2014). Kelompok sukarelawan ini dibentuk bulan November 2011 oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran: Rizky Isman, Mustabsyrotul Ummah, Helmy Saputra dan Arif Muhammad Farman. Ide dasarnya adalah menjadi pengajar di sekolah dasar di desa-desa sekitar kampus sebagai tanggapan atas keluhan tentang kurangnya pengajar di sekolah-sekolah dasar tersebut. Waktu yang mereka sediakan adalah hari Sabtu dengan mengajarkan ilmu Seni dan IT (teknologi informasi) untuk siswa sekolah dasar negeri di Neglasari, Jatinangor. Kegiatan ini kemudian mendapat tanggapan positif dengan bergabungnya para relawan baru, termasuk dari perguruan tinggi yang berbeda. Materi ajar dan tempat mengajar juga meluas, seperti Bahasa Inggris,

Matematika, pelajaran mengaji dan kegiatan memotivasi untuk beberapa panti asuhan.

Para relawan “Kita Indonesia” kemudian juga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat “Safari Desa”. Bentuknya adalah dengan cara menginap selama dua hari tiga malam di suatu desa. Selama waktu dua hari tiga malam tersebut, beberapa mahasiswa memberikan pelajaran dan permainan yang mengasyikkan untuk anak-anak, dengan tujuan untuk memotivasi anak-anak tersebut. Kegiatan lain adalah memutar film hiburan, memberikan bantuan alat-alat sekolah serta mendirikan rumah baca “Kita”. Gerakan “Safari Desa” sejauh ini sudah menjangkau beberapa desa di Jawa Barat. Menurut Rizky Isman, “Dengan semangat berpikir, berbuat dan bermanfaat, “Kita Indonesia” akan terus berupaya untuk masyarakat karena ini bukan gerakan aku-kamu, tapi ini gerakan kita”.

Inspirasi dari India dan Turkiye

Gerakan sosial inspiratif dunia tidak hanya berasal dari masyarakat di negara-negara Barat tapi juga tumbuh mapan di masyarakat negara-negara berkembang. Di India tahun 2009 bermula gerakan global DFC (*Design for Change*) yang menularkan virus “Aku Bisa” untuk pembelajaran anak-anak. Gerakan global ini dicetuskan oleh Kiran Bir Sethi melalui “Riverside School” (2001) di pinggir Sungai Sabarmati, Ahmedabad, Gujarat, India (KOMPAS, 20 September 2015, hal. 13). Asumsi dasar pembelajaran ini adalah bahwa anak-anak tingkat sekolah dasar tidak bisa divonis “salah” atau “tidak bisa”. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam menumbuhkan keberanian dan daya kreativitas anak. Untuk itu Kiran Bir Sethi memperkenalkan prinsip *design thinking* atau *berpikir reka cipta* untuk anak-anak. Prinsip pembelajaran seperti ini berbasis belajar langsung dari kehidupan masyarakat, dengan mengarahkan anak-anak pada “sesuatu yang salah dan mengganggu” dalam kehidupan bersama. Selanjutnya anak-anak didorong berorientasi pada pemecahan masalah, bereksperimen, bekerja sama, optimis

dan tidak takut berbuat salah. Gerakan DFC sebagai kelanjutan dari “Riverside School” yang terus berkembang dewasa ini telah diterapkan dalam proses pembelajaran anak di Amerika Serikat, Spanyol, Peru dan Taiwan, sehingga akan memberi harapan pada anak-anak dunia untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendorong perubahan masa depan dunia yang lebih baik.

Di Turkiye kita juga mengenal tradisi saling peduli dan berbagi dengan sesama yang disebut *askida ekmek* yang berarti “roti gantung” (Republika, 9 Desember 2019, hal. 19). Maksudnya, di toko-toko roti di Gostepe, Istanbul, Turki, tumbuh subur kebiasaan melayani pembeli yang ingin bersedekah tanpa pretensi mengharapkan imbalan dan pengakuan. Caranya, untuk pembeli yang ingin bersedekah, dari misalnya dua roti yang dibayarnya, satu roti digantung di tempat tertentu. Tentu saja roti yang digantung semakin lama akan semakin banyak sampai pada saat tertentu para fakir miskin dan musafir datang. Cara berbagi khas masyarakat Turkiye ini dipercaya sudah berusia berabad-abad dan menjadi mekanisme untuk mengatasi kesenjangan kehidupan dalam masyarakat. Tradisi *askida ekmek* ini bahkan dewasa ini sudah diperluas melalui platform media sosial sehingga mencakup juga kepedulian terhadap lapisan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi untuk makan gratis di restoran-restoran yang tercantum dalam aplikasi. Intinya, tradisi berbagi *askida ekmek* ini telah mendapat sambutan luas dari masyarakat Turkiye dan merambah ke kota-kota besar lain seperti Ankara dan Izmir.

Kita amati, tujuh cerita ringkas inspiratif di atas berlangsung di tempat yang berbeda, dalam kurun waktu yang berbeda dan melibatkan orang-orang yang berbeda pula. Kita tidak mendapat informasi terbaru mengenai kelanjutan cerita-cerita tersebut. Tapi ketujuh cerita itu sebenarnya memiliki beberapa kesamaan. Pertama, cerita-cerita di atas berkisar di sekitar keterbelakangan warga desa dan warga miskin di negara lain yang hendak diantaskan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kemudian melibatkan bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah atau pihak swasta. Kedua, seseorang atau sekelompok orang tersebut adalah individu-

individu yang berbeda dari orang kebanyakan; mereka memiliki obsesi tentang kebaikan bersama, visi yang jelas dan komitmen yang amat kuat untuk mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya, orang atau sekelompok orang tersebut bekerja keras dengan hati yang ikhlas, semata-mata dituntun oleh idealisme dan obsesinya tentang kebaikan bersama tersebut. Terakhir, bekerja keras dan ikhlas secara berkesinambungan ini akan mampu meyakinkan pihak lain, termasuk pemerintah daerah, untuk ikut berpartisipasi dan mengulurkan bantuan.

Kesimpulan

Relevansi diskursus tentang gerakan sosial untuk masyarakat desa dan gerakan sosial global di masa akhir pandemi covid-19, sekarang ini dan bahkan di masa depan adalah dalam konteks penumbuhan sikap peduli terhadap sesama, memperkuat solidaritas sosial dan kerja sama yang harmonis di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila bencana corona atau bencana akibat perang dianggap sebagai bencana tambahan bagi kesulitan hidup masyarakat desa dan masyarakat global, yang amat dibutuhkan adalah penguatan dan penyebarluasan nilai-nilai kebaikan ini. Kunci untuk semua itu adalah kepeloporan dari orang atau sekelompok orang yang obsesif, yang bekerja keras dan tulus dalam membantu masyarakat desa dengan cara apa pun. Obsesi yang disertai dengan kerja keras dan hati yang tulus akan menjamin tumbuh-kembang gerakan sosial yang efektif dan berkesinambungan, baik di tingkat desa, lokal, nasional mau pun global.

Daftar Pustaka

- Ayu, R. S. (2018). Mereka Bangkit Melawan Keterbatasan. *Kompas*, p. hal. 23.
- Bayu, D. (2016, 11 24). Sekolah Gratis Sang Juru Parkir. *Kompas*, p. hal. 16.

- Haryanto. (1998). Gerakan Sosial Politik: Tinjauan Teoritik. *Widyapraja No. 29*, hal. 3-17.
- Joesoef, D. (2015). Membangun Desa. *Kompas*, p. hal. 6.
- Kemendes. (2019). *Indeks Desa Membangun*. Retrieved from <https://idm.kemendes.go.id>: <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Kompas. (2014). *Keberpihakan Ilmuan Sosial*. Retrieved from Kompas.com .
- Saptowalyono, C. A. (2020). "Annus Horribilis" UMKM Nusantara. *Kompas*, p. hal. 9.
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer edisi ke-1*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Zainuddin, A. R. (2004). *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi, dieditori oleh Hermawan Sulistyio*. Jakarta: Pensil-324.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

Djunaidi

Pendahuluan

Salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik adalah perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi. Di satu sisi, meningkatnya tuntutan pendidikan formal, khususnya pendidikan tinggi, menjadikan pendidikan tinggi sebagai industri strategis yang diharapkan mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lingkungan yang sangat kompetitif antar institusi pendidikan tinggi mengharuskan institusi pendidikan fokus pada kualitas pengajaran dan dapat bersaing secara unggul. Pembelajaran pada perguruan tinggi bisa berfungsi berarti dalam kenaikan mutu pangkal energi orang di Indonesia lewat aktivitas pembelajaran serta pengajaran, riset serta dedikasi pada warga. Begitu juga dipaparkan dalam 3 Hukum Akademi Besar kalau tujuan serta guna pembelajaran besar dengan cara nyata tertuang dalam Peraturan Penguasa Nomor. 60 Tahun 1999, tujuan pembelajaran besar ialah (1) menyiapkan partisipan ajar jadi badan warga yang profesional dengan cara akademis serta handal, (2) meningkatkan serta mengedarkan ilmu, berusaha menggunakan ilmu buat tingkatkan derajat hidup warga serta memperkaya adat bangsa.

Berdasarkan Hukum No 25 Tahun 2009 mengenai Jasa Khalayak, jasa khalayak telah jadi keinginan serta kebingungan di masa wilayah mandiri. Penguasa sendiri yang bertanggung

jawab atas hukum yang menata angan- angan *good governance*. Buat tingkatkan keyakinan khalayak pada penguasa, aturan rezim yang bagus wajib, menguatkan kerakyatan serta hak asas orang, tingkatkan kedamaian sosial adat, kurangi kekurangan, menguatkan proteksi sosial serta area, serta menggunakan pangkal energi alam dengan cara bijak. Bagi UU Jasa Khalayak, jasa khalayak dimaksud selaku sesuatu aktivitas ataupun serangkaian kegiatan yang dicoba dalam bagan pelampiasan keinginan jasa tiap masyarakat negeri serta masyarakat cocok dengan peraturan perundang- undangan di aspek benda, pelayanan, serta administrasi. Tiap badan eksekutor negeri, tubuh hukum, tubuh bebas yang dibangun dengan Hukum buat menyelenggarakan jasa khalayak, serta tubuh hukum lain yang terbuat spesial yang diucap selaku eksekutor. Arahan bagian kegiatan yang membawahi dengan cara langsung satu ataupun lebih bagian yang menyelenggarakan jasa khalayak merupakan pimpinan bagian kegiatan eksekutor.

Persaingan yang ketat antar perguruan tinggi menuntut lembaga pendidikan untuk mementingkan pendidikan dan layanan kelembagaan agar dapat menonjol dari persaingan tersebut. Mutu layanan bisa dimaksud selaku perbandingan antara apa yang diharapkan klien layanan serta apa yang sesungguhnya dirasakan oleh klien. Rancangan ini bisa dimengerti selaku evaluasi klien elaboratif dari layanan khusus serta tingkatan buat penuh impian yang dialami klien dan tingkatan kebahagiaan dikala membagikan jasa (Islam, 2020). Wycof dalam Tjiptono (Nurdin, 2019) mengatakan jika kualitas jasa ataupun layanan ialah kadar keunggulan yang diharapkan dan pengaturan atas kadar keunggulan itu untuk memenuhi keinginan konsumen. Hal ini berarti apabila pelayanan atau layanan yang diterima (*perceived service*) cocok dengan yang diharapkan hingga mutu layanan atau pelayanan dipersepsikan bagus serta mendinginkan.

Bila pelayanan yang diterima melewati angan- angan pelanggan hingga mutu pelayanan atau layanan dipersepsikan legal semacam mutu yang sempurna, kebalikannya apabila pelayanan atau layanan yang diterima lebih kecil dari pada yang diharapkan,

hingga mutu pelayanan atau layanan hendak dipersepsikan kurang baik. Perguruan tinggi harus mengambil langkah antisipatif untuk merespon persaingan yang semakin meningkat dan bertanggung jawab untuk mengeksplorasi dan meningkatkan setiap aspek layanan yang dimiliki untuk menghasilkan kepuasan. Menurut Zeithaml di kutip Jasfar (Anggraini & Alhempri, 2021) kepuasan merupakan perbandingan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diterima dengan harapan pelanggan sebelum menggunakan produk. Kepuasan yang diberikan sebagai perwujudan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu mahasiswa dalam menyadari potensi penuh yang dimiliki, untuk memanusiaikan orang lain, untuk mendidik dan meningkatkan perilaku manusia karena pendidikan akan terus mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan pendidikan, kualitas pendidikan juga akan meningkat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan, jika pendidikan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas maka pelayanan dalam pendidikan dapat dikatakan maksimal. Situasi persaingan antar perguruan tinggi memerlukan perhatian terhadap kualitas pendidikan dan fasilitas agar institusi dapat bersaing dan unggul. Oleh karena itu, saat ini semua perguruan tinggi perlu bertindak adaptif sebagai akibat dari perubahan lingkungan internal dan eksternal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa agar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Universitas.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah rangkaian proses pembelajaran yang membantu seseorang dalam memahami dan lebih kritis dalam berpikir. Pendidikan digunakan sebagai cara biasa untuk mencapai standar hidup yang lebih baik (Dwianti, Julianti, & Rahayu, 2021). Menurut Feni (Kosilah & Septian, 2020) pendidikan adalah

bimbingan atau dukungan orang dewasa untuk mendewasakan anak dengan tujuan membantu anak mengatasi tantangan hidupnya tanpa bantuan dari luar.

Dalam (Depdiknas, 2003) Ilmu pembelajaran yang kerap diucap dengan ilmu keguruan merupakan agen ilmu yang menekuni mengenai kemajuan peradaban, serta kematangan psikologi manusia. Salah satu inisiatif buat meningkatkan serta tingkatkan mutu pangkal energi orang dalam mengalami bermacam tantangan masa kesejagatan merupakan dengan menekankan berartinya pembelajaran untuk tiap orang (Normina, 2017). Pendidikan adalah pengarah atau kepemimpinan yang terarah dari pendidik terhadap pertumbuhan psikologis dan spiritual peserta didik menuju perkembangan kepribadian yang utama (Tafsir, 2016). Pendidikan adalah kebutuhan sekunder, dan pendidikan tetap sangat penting. Karena tanpa pendidikan manusia, sulit untuk berkembang dan bahkan menjadi kelompok yang lebih muda. Oleh karena itu, pendidikan harus bertujuan untuk menghasilkan manusia berkualitas yang berdaya saing, berakhlak mulia, dan berakhlak mulia (Elfian & Johan, 2017).

Pengertian Pendidikan Tinggi

Pembelajaran perguruan tinggi merupakan tahapan pembelajaran besar yang melingkupi program pembelajaran akta, ahli, magister, handal, serta ahli yang dilaksanakan oleh Universitas (Depdiknas, 2003). Pembelajaran besar bisa berupa perguruan tinggi, politeknik, sekolah besar, institut, serta universitas (Elfian & Johan, 2017). Perguruan tinggi dapat diartikan secara harfiah, dan kata "universitas" adalah tempat belajar, berbagi ilmu, berkreasi dan mengekspresikan diri, atau mewujudkan kreativitas dalam berbagai hal. Kata "tinggi" menunjukkan level, tetapi ini adalah orang-orang yang sudah memiliki potensi awal. Artinya yang kuliah di PT adalah intelektual dan emosional, termasuk manusia mental dan setengah jadi. Sederhananya, PT adalah tempat belajar bagi para intelektual dan cendekiawan yang baru muncul (Suryana, 2018).

Menurut Barnet (Arifin, 2017) perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pengertian ini, pendidikan tinggi adalah sebuah proses, mahasiswa dipandang sebagai prestasi yang berharga di pasar tenaga kerja, dan keberhasilan diukur dengan tingkat keterlibatan lulusan dalam masyarakat (tingkat pekerjaan) dan kadang-kadang dengan tingkat pendapatan yang mereka capai dalam karir mereka. Layanan pendidikan merupakan dasar pembelajaran yang ialah badan keilmuan serta harus turut dan dalam penajaan pembelajaran yang cocok serta menyelenggarakannya supaya searah dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Dengan tutur lain, pembelajaran besar ini ialah langkah akhir dari pembelajaran resmi buat menciptakan partisipan ajar yang mempunyai keahlian lain selain keahlian akademik yang bermanfaat untuk warga dan bisa dipakai pada dikala diperlukan (Hasbullah, 2021). Upaya pemerintah dalam memberikan rambu-rambu pengelolaan perguruan tinggi sudah banyak dicoba baik melalui UU Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Penguasa, maupun produk hokum yang lain, termasuk juga untuk mendorong adanya kegiatan akreditasi oleh Badan Akredi atasi Nasional yang semakin nyata terukur serta tertib (Prabowo, 2010). Akademi besar ialah salah satu badan pembelajaran yang dilahirkan oleh penguasa dan swasta selaku tempat yang pas buat belajar menghasilkan insan yang berkompeten dengan cara intelektual, psikologis, individu serta sosial. Oleh sebab itu, buat menggapai tujuan itu, akademi besar butuh diatur dengan cara efisien serta berdaya guna (Purwandani, Sutarsih, & Sururi, 2018).

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah untuk memberikan kemudahan dan dukungan kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum dalam pelaksanaannya, memajukan kehumasan, mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kehumasan, dan memberikan publisitas yang memuaskan kepada masyarakat. Kelompok atau lembaga tertentu. Ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dasar. Artinya, layanan yang setara untuk semua, layanan

yang proporsional untuk semua, dan layanan yang tidak setara untuk individu tergantung pada perbedaan yang relevan (Djamrut, 2015).

Pelayanan publik yang berkualitas atau pelayanan yang baik dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan kinerja yang baik pula. Karyawan dikatakan sukses jika bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang benar dan terencana (Setiadi, 2018). Pelayanan publik mesti dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku (Persada., 2017). Jasa khalayak bisa dimaksud selaku pemberian layanan (melayani) kebutuhan orang ataupun warga yang memiliki kebutuhan pada badan itu cocok dengan ketentuan utama serta aturan metode yang sudah diresmikan (Saputro, 2015).

Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan memiliki banyak maksud yang berbeda dan bermacam- berbagai, mulai dari maksud yang konvensional hingga yang berarti. Maksud konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan kepribadian langsung dari suatu produk, sejenis: *performance* (keahlian), *reability* (keandalan), *ease of use* (mudah dalam konsumsi), *esthetics* (estetika), dan serupanya. Jika kualitas diartikan berlaku seperti semua sesuatu yang membenarkan keceriaan konsumen dan upaya pergantian kearah emendasi kemudian mendobrak walhasil dikenal gelar *Q= MATCH (Meets Agreed Terms and Changes)*. Kualitas layanan adalah sebuah perlakuan atau tindakan individu atau organisasi yang bertujuan untuk membuat pelanggan atau karyawan merasa puas (Kasmir, 2017). Kualitas pelayanan merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap perusahaan yang menginginkan hasilnya bersaing di pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Maulana, 2016).

Dimensi Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono & Diana (Wijaya, 2011) kualitas layanan memiliki lima dimensi yang disebut kualitas layanan. Kelima aspek kualitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keaslian (reliabilitas). Ini adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
2. Responsiveness (respon dan perhatian). Karyawan sangat ingin membantu pelanggan dan memberikan layanan secara responsif, dan peduli dengan keluhan atau harapan pelanggan.
3. Assurance ataupun Agunan. Keahlian inilah yang memungkinkannya membagikan rasa nyaman dari ancaman, resiko ataupun keragu-raguan, dan kejelasan wawasan, sopan santun serta keyakinan pegawai.
4. Empathy (Empati). Kemampuan untuk memperhatikan pelanggan sepenuhnya, mudah dihubungi, berkomunikasi dengan baik dan memahami sifat dan kemampuan kebutuhan pelanggan individu.
5. Tangible (wujud) merupakan wujud realitas fisik, termasuk fasilitas, peralatan, karyawan, dan informasi atau metode komunikasi.

Ada 4 faktor berarti dalam cara jasa khalayak, ialah: a) Fasilitator pelayanan, ialah pihak yang bisa membagikan jasa khusus pada pelanggan, berbentuk penyediaan serta penyerahan Benda ataupun pelayanan (*services*). b) Akseptor layanan, ialah pelanggan yang diucap pelanggan (klien) yang mendapatkan bermacam layanan dari fasilitator layanan. c) Tipe layanan, ialah fasilitator layanan bisa membagikan layanan pada mereka yang menginginkan layanan. d) Kebahagiaan klien dalam membagikan layanan, fasilitator layanan wajib merujuk pada tujuan penting layanan, ialah kebahagiaan klien. Perihal ini amat berarti, sebab kebahagiaan klien umumnya berhubungan akrab dengan mutu benda ataupun pelayanan yang mereka nikmati (Barata, 2004).

Metodologi Penelitian

Tata cara riset selaku metode objektif buat memperoleh informasi dengan tujuan serta khasiat khusus (Sugiyono, 2016). Tata cara penelitian menarangkan metode riset yang hendak dicoba, yang

di dalamnya melingkupi materi ataupun modul riset, perlengkapan, jalur riset, elastis, serta informasi yang akan diadakan serta analisa informasi (Mahsun, 2011). Metode yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara riset deskriptif. Tata cara deskriptif merupakan survei yang melukiskan, mendefinisikan, ataupun menganalisa kondisi poin survei apa terdapatnya, terkait pada suasana pada dikala survei serta situasinya (Sugiyono, 2016). Karakteristik riset deskriptif ini yang bisa membedakannya dari tipe riset yang lain ialah melegakan jalan keluar permasalahan yang terdapat pada era saat ini, ataupun permasalahan atau peristiwa yang faktual serta berarti, riset ini dimaksudkan buat mendefinisikan suasana ataupun peristiwa dengan cara pas serta cermat, bukan buat mencari ikatan karena dampak (Yusuf, 2017). Tipe riset yang dipakai merupakan riset daftar pustaka. Riset daftar pustaka merupakan susunan aktivitas yang berhubungan dengan gimana informasi daftar pustaka digabungkan, memo dibaca serta terbuat, serta materi riset diedit (Zed, 2008).

Pembahasan

Semua institusi pendidikan tinggi harus dikelola sesuai dengan prinsip manajemen kontemporer, termasuk Keseluruhan *Quality Management (TQM)*, yang menekankan kalau bagian sistem pembelajaran besar wajib berperan dengan cara sempurna serta difokuskan pada usaha koreksi dengan cara totalitas. Untuk memperoleh keberhasilan yang lebih besar yang tidak pernah berhenti, upaya peningkatan kualitas dilakukan secara sengaja dan metodis (Anish, Haryono, & Mindarti, 2020).

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berbagai persoalan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan tinggi yang berkualitas untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul yang mampu bersaing secara global dan nasional. Perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan cepat dengan mempersiapkan keterampilan dan kemampuan baru bagi mahasiswanya agar dapat menghadapi berbagai tantangan

yang dihadapinya. Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Melalui jenis pendidikan nonformal dan informal, peran perguruan tinggi merupakan tujuan akhir dari jenjang pendidikan kedinasan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Perguruan tinggi berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing untuk menyediakan sumber daya manusia dengan keterampilan dan kemampuan sesuai kebutuhan lapangan. Selain itu, perguruan tinggi yang berkualitas dapat menghasilkan pemimpin dan pemikir nasional yang akan menentukan pembangunan masa depan negaranya (Nulhaqim, Heryadi, Pancasilawan, & Fedryansyah, 2018). Pendidikan termasuk dalam UU No. 20/2003, Bab XI, Pasal 39-44 (Departemen Pendidikan, 2002). Pasal 39 meliputi tenaga kependidikan yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melaksanakan pelayanan teknis untuk mendukung proses pendidikan satuan pendidikan, dengan pendidik merencanakan, melaksanakan, dan mempelajari proses pembelajaran Tenaga profesional yang bertanggung jawab atas penilaian kinerja, penyuluhan dan pelatihan. Penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya bagi para pendidik universitas (Hermawan, 2011).

Pengembangan sumber daya manusia di Perguruan Tinggi sangat penting dalam mengatur sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di universitas. Dalam dunia pendidikan, komponen-komponen tersebut perlu dikelola secara efisien dan profesional agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Sistem manajemen yang profesional merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pendidikan. Kualitas talenta lembaga juga menentukan keberhasilan lembaga melalui pengelolaan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya tersebut. Manajemen dapat dimulai dengan perencanaan, pengadaan, seleksi, penempatan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi yang wajar dan sesuai, dan mempromosikan efektivitas hubungan tenaga kerja dengan manajemen (Maghfiroh, Santosa, & Sedya, 2020).

Fokus layanan dalam Perguruan Tinggi adalah pada perluasan kemampuan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pendidikan tinggi melalui pelayanan sangat dibutuhkan untuk melatih lulusan yang unggul dan berdaya saing. Pelayanan SDM juga membutuhkan seseorang yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu, penguatan SDM mahasiswa, fungsional dan tenaga kependidikan, serta semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi menjadi keharusan. Jelas bahwa pendidikan tinggi sangat membutuhkan strategi, proses dan sumber daya manusia yang baik. Fokus manajemen universitas adalah pada penguatan sumber daya manusia yang bisa disebut sebagai jantung dalam dunia pendidikan untuk melahirkan generasi yang berkualitas.

Penguasa berusaha menghasilkan mutu serta kompetensi buat tingkatkan kemampuan pangkal energi orang yang bermutu serta handal dengan tingkatkan jumlah orang yang ikut serta dalam bermacam aktivitas, pembelajaran, penataran pembibitan, serta lain serupanya. Penguasa sedang melaksanakan usaha yang penting buat meningkatkan serta tingkatkan mutu pangkal energi orang aparatur negeri. Kenaikan mutu pangkal energi orang bisa berakibat pada gimana badan penguasa beranjak. Prinsip hukum yang berikan ruang untuk eksekutor negeri buat melaksanakan tugasnya wajib dipakai buat tingkatkan pengembangan pangkal energi orang (Hayat, 2014).

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi sudah sepatutnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. Peningkatan yang harus diperhatikan adalah kualitas staf, untuk menarik staf yang kompetitif dan berkualitas. Hal ini biasa disebut dengan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Untuk memastikan fungsi SDM berjalan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan institusi, maka institusi mengevaluasi (mengevaluasi) pelaksanaan program SDM yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi secara keseluruhan. Selanjutnya melakukan penilaian atau *assessment* yang digunakan untuk mengukur apakah seorang pegawai telah bekerja secara efektif

dan bagaimana kontribusinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh universitas.

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

Integritas alat serta infrastruktur ialah prinsip berarti yang lain dalam jasa khalayak. Tersedianya alat serta infrastruktur kegiatan yang mencukupi, perlengkapan kegiatan serta pangkal energi yang lain, tercantum ketersediaan teknologi data. Jasa khalayak ialah pandangan berarti buat menggapai jasa yang efisien serta berdaya guna. Prinsip yang terakhir merupakan prinsip kejujuran serta akurasi. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan eksekutor jasa khalayak. Alat serta infrastruktur merupakan bagian penataran yang mensupport kemampuan semua partisipan ajar di seluruh dasar pembelajaran, bagus resmi ataupun nonformal. Penafsiran alat pembelajaran itu sendiri mencakup seluruh perkakas ataupun peninggalan yang dipakai dengan cara langsung dalam cara pembelajaran, bagus yang beranjak ataupun tidak, sebaliknya alat infrastruktur merupakan seluruh perkakas yang tidak dipakai dengan cara langsung dalam cara pembelajaran. Alat serta infrastruktur butuh ada buat mendukung aktivitas penataran, tingkatkan kualitas pembelajaran serta menggapai tujuan pembelajaran nasional (Kartika, Husni, & Millah, 2019).

Penyediaan alat serta infrastruktur jasa yang mencukupi oleh eksekutor jasa khalayak berakibat pada kebahagiaan warga kepada jasa. Standar layanan terakhir merupakan keahlian fasilitator layanan. Keahlian fasilitator layanan wajib ditetapkan dengan cara pas bersumber pada wawasan, kemampuan, keahlian, tindakan, serta sikap yang dibutuhkan supaya pelayanan yang diserahkan betul-betul handal. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 setelah itu Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 sampai Permendikbud No 3 Tahun 2020 segenap menarangkan kalau alat dan prasarana ialah sesuatu standar nasional ataupun standar minimum sesuatu keberhasilan penataran besar. Mengenai ini jadi suatu dorongan para perguruan tinggi besar buat kemudian mencegah dan tingkatkan jasa alat infrastruktur dilingkungannya. Hambatan yang Terpaut

tidak terjaganya atau sedikitnya minat pada perlengkapan prasarana yang dimiliki menimbulkan hancurnya alat atau usangnya fitur yang sepatutnya sudah dijadwalkan untuk emendasi atau inovasi suatu alat perlengkapan prasarana, belum lagi ditemui perangkat- fitur yang gampang dipindahkan yang gampang cacat sampai lenyap membuat terganggunya suatu pelayanan penataran itu sendiri (Riyanto, Sumarna, & Nurdin, 2021).

Sehubungan dengan berartinya kedudukan serta guna badan serta infrastruktur pembelajaran yang ialah salah satu pangkal energi yang amat berarti buat mendukung cara penataran serta pemanfaatannya buat menggapai tujuan yang diharapkan dengan cara efisien, butuh ditingkatkan pengelolaannya. Cocok dengan kebijaksanaan penguasa dalam memberdayakan Akademi Besar selaku fasilitator layanan yang berhak penuh buat memberikan layanan pembelajaran yang tembus pandang serta bertanggung jawab, memaksimalkan semua cara pengadaan serta memakai, menjaga, dan sediakan seluruh tipe alat serta infrastruktur pembelajaran. Tingkatan alat serta infrastruktur pembelajaran bisa mengadaptasi pengurusan infrastruktur. Badan pembelajaran bertabiat mandiri dalam menata serta mengurus kebutuhan badan pembelajaran, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan pembelajaran yang legal, cocok dengan keinginan serta kemampuannya, dan berdasarkan harapan serta kesertaan malim(Setyaningsih, 2018).

Berdasarkan pendapat Jannah (Gunawan, Mashur,& Hamka, 2022) mengatur alat serta infrastruktur pembelajaran butuh mencermati prinsip-prinsip ialah 1) Prinsip pendapatan tujuan, membenarkan seluruh situasi prasarana, serta buatnya ada untuk konsumen. 2) Prinsip ekonomi, ialah konsep sedetail bisa jadi, tercantum pangkal energi yang dipakai, tidak kelewatan, namun kondisi prasarana yang didistribusikan wajibenuhi persyaratan keamanan serta kenyamanan konsumen. 3) Prinsip manajemen, kepemimpinan diatur oleh peraturan yang legal semacam hukum yang wajib dipatuhi, disiplin kepada instruksi yang diserahkan, serta penerapannya. Oleh sebab itu, cara pengurusan ini berjalan dengan

bagus. 4) Prinsip tanggung jawab yang nyata berarti pengelola butuh bertugas serupa buat bersama-sama melaksanakan kewajiban yang diserahkan terpaut dengan pengurusan prasarana pembelajaran. Seluruh badan regu butuh menguasai apa yang mereka jalani serta berperan cocok dengan metode yang sudah diresmikan. 5) Prinsip kedamaian, kedamaian seluruh partisipan, melakukan seluruh aktivitas yang direncanakan. Perihal ini memastikan kesuksesan kemampuan yang diidamkan. Akur berarti mempunyai tindakan handal buat bertugas dengan nyaman.

Melaksanakan MoU

Dalam mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Perguruan Tinggi. Perlu diadakannya *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai lembaga atau mitra. MoU adalah dokumen hukum yang menjelaskan kesepakatan awal antara para pihak dan memberikan dasar untuk penyusunan kontrak masa depan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Perguruan Tinggi. MoU ini bertujuan untuk mendukung kegiatan di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia antara ombudsman dan universitas di Republik Indonesia, dan merupakan tugas Ombudsman untuk meningkatkan pelayanan publik di Perguruan Tinggi. Penting MoU adalah untuk mengetahui inti dari kesepakatan atau perjanjian antara kedua pihak yang terlibat dalam kerja sama. Selain program sendiri, universitas juga menerima tawaran kerja sama dari institusi lain (Selly, Soetopo, & Mustiningsih, 2016). Sebagaimana UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, kewajiban pengawasan pelayanan publik adalah berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga negara, pemerintah daerah dan lembaga individu.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah sifat produk atau jasa mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan kepuasan dan kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan membawa tuntutan yang diharapkan kepada pengguna jasa. Peningkatan

kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan tinggi dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan bidang Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dan melaksanakan MoU dengan lembaga yang lain.

Tersedianya SDM yang unggul dan berkualitas di Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa baik dari administrasi maupun kegiatan pembelajaran. Selain itu juga sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di Perguruan Tinggi harus diberikan secara maksimal demi kenyamanan mahasiswa yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi tersebut. Adanya sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perguruan Tinggi perlu melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan tujuan masing-masing. MoU ini sebagai bentuk dari implementasi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008.

Implikasi Kebijakan

Kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan tinggi dapat berimplikasi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan khususnya Perguruan Tinggi yang melahirkan SDM berkualitas.
2. Memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Mengelola dan menjaga sarana prasarana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa.
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
5. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui SDM yang profesional, unggul dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Anggraini, N., Alhempri, R. (2021). Analisa Kebahagiaan Pelanggan PT Hawah Holiday Penginapan Pekanbaru. *Harian Data Riset*, 1(9), 1927.
- Anish, Haryono, B. S.,& Mindarti, L. I. (2020). Mutu Jasa Administrasi Akademik di Akademi Besar (Riset pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Harian Objektif Administrasi Khalayak(JIAP)*, 6(2), 215.
- Arifin, Meter. (2017). Strategi Manajemen Pergantian dalam Tingkatkan Patuh di Akademi Besar. *Harian EduTech*, 3 (1), 126.
- Barata, A. A. (2004). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima cet 2*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Djamrut, D. E. (2015). *Inovasi Jasa Khalayak di Kecamatan Bengawan Kunjang Kota Samarinda*. *Harian Ilmu Penguasa*, 3 (3), 1479.
- Dwianti, I. N., Julianti, R. R., & Rahayu, E. T. (2021). Dampak Perlengkapan PowerPoint dalam pelatihan Jarak Jauh pada Aktivitas Kebugaran Tubuh Anak ajar. *Setiap hari Adil Alat Penataran*, 7(4), 675.
- Elfian, A. P.,& Johan, R. S. (2017). Kedudukan Pembelajaran Besar dalam Tingkatkan Atensi Warga buat Daya produksi Pembelajaran. *Sosio E- Kons*, 9 (3), 201.
- Furqoni, Meter. (2014). Strategi Tingkatkan Mutu Jasa Khalayak di Kantor Biro Kependudukan serta Pencatatan Awam Kabupaten Ponorogo. *Harian Publika*, 2 (3), 4.
- Gunawan, F., Mashur, S.,& Hamka. (2022). Analisa Manajemen Alat serta Infrastruktur Pembelajaran Dalam Tingkatkan Kualitas Layanan di Biro Pembelajaran serta Kultur Kota Martil. *Harian Ilmu Pembelajaran Islam serta Multikultural(JIMPE)*, 1 (1), 4.
- Hasbullah. (2021). Penerapan Mutu Terpadu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 11 (1), 3.
- Hayat. (2014). Kenaikan Mutu Energi Orang Jasa Khalayak dalam Kerangka Undang Undang No 5 Tahun 2014 Mengenai

- Aparatur Awam Negeri. *Harian Kebijakan serta Manajemen PNS*, 8 (1), 32. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8 (1), 32.
- Hermawan, I. K. (2011). Analisa Pangkal Energi Orang Pembelajaran Besar. *Harian Pembelajaran serta Kultur*, 17 (4), 407.
- Islam, R. (2020). Determinants Of Service Quality And Its Effect On Customer Satisfaction And Loyalty: An Empirical Study Of Private Banking Sector. *The TQM Journal*.
- Kartika, S., Husni, & Millah, S. (2019). Akibat Mutu Alat serta Infrastruktur kepada Atensi Berlatih Anak didik dalam Penataran Pembelajaran Agama Islam. *Harian Riset Pembelajaran Islam*, 7 (1), 116.
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent Filosofi serta Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kosilah, & Septian. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Assure dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (6), 1139.
- Maghfiroh, Santosa, & Sedy. (2020). Manajemen Pangkal Energi Orang Dalam Kenaikan Kualitas Akademi Besar Universitas Darussalam Gontor. *Harian Dengung Manajemen Pembelajaran*, 9 (2), 18.
- Mahsun, M. (2011). *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, A. S. (2016). Akibat Mutu Jasa serta Harga kepada Kebahagiaan Klien PT. TOI. *Harian Ekonomi*, 7(2), 117.
- Normina. (2017). *Pembelajaran dalam Kultur*. *Ittihad Harian Kopertais Area XI Kalimantan*, 15 (28), 17.
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, R. D., Pancasilawan, R., & Fedryansyah, M. (2018). Berperan Perguruan tinggi Besar dalam Tingkatkan Kualitas Penataran di Indonesia untuk Hadapi ASEAN Community 2015 Mau Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *SOCIAL WORK Setiap hari*, 6 (2), 198.
- Nurdin, I. (2019). *Mutu Jasa Khalayak*. Surabaya: Alat Kawan Brilian.
- Persada, H. (2017). *Manajemen Jasa Khalayak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Prabowo, H. (2010). Knowledge Management di Akademi Besar. *Binus Business Review*, 1 (2), 408.
- Purwandani, D., Sutarsih, C., & Sururi. (2018). Akibat Kualitas Layanan Alat serta Infrastruktur kepada Kebahagiaan Mahasiswa di Faklutas Pembelajaran Teknologi serta Keahlian Universitas Pembelajaran Indonesia. *Harian ADPEND*, 81.
- Riyanto, V., Sumarna, & Nurdin, H. (2021). Sistem Informasi Sarana Prasarana (Sisapras) Sebagai Monitoring Fasilitas Pelayanan Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknologika*, 11 (1), 2.
- Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 2 (1), 19.
- Selly, A., Soetopo, H., & Mustiningsih. (2016). Manajemen Program Internasionalisasi di International Office (IO) dalam Menciptakan World Class University. *Harian Pembelajaran Humaniora*, 4 (4), 205.
- Setiadi, A. (2018). Akibat Kepemimpinan serta Kompetensi Aparatur kepada Mutu Jasa *Khalayak*. *Journal of management Review*, 2 (2), 211.
- Setyaningsih, S. (2018). Pengurusan Alat Infrastruktur dalam Aplikasi Kurikulum Pembelajaran Guru Sekolah Bawah: Suatu Bersedia Permasalahan di Universitas Negara Semarang. *Harian Manajemen Pembelajaran*, 13 (1), 64.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, S. (2018). Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, 2 (2), 370.
- Tafsir, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, T. (2011). *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta: Indeks.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Zed, Meter. (2008). *Tata cara Riset Daftar pustaka*. Jakarta: Yayasan Oncor Indonesia.

TANTANGAN PEACEBUILDING MELALUI PENDIDIKAN DI TINGKAT KOMUNITAS

Studi Kasus: Ruang Belajar Penyala (RBP) di Maluku

Abdul Halim

Pendahuluan

Maluku merupakan daerah yang sangat menjanjikan sebagai penghasil rempah (Alhadar, 2001). Alasan tersebut yang menjadikan para penjajah Eropa untuk datang ke Maluku guna mendapatkan rempah serta menyebarkan agama Kristen Protestan di tanah Maluku. Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku terjadi tidak terlalu masif. Hal ini didasarkan pada adanya empat kerajaan besar di Maluku yang lebih dahulu menanamkan ajaran Islam hampir ke seluruh kepulauan Maluku termasuk ke Filipina selatan. Belanda hanya mampu masuk ke Maluku selatan dan pedalaman Halmahera untuk penyebaran ajaran Kristen di Maluku (Sihbudi, 2001). Dengan penyebaran agama ini, Maluku tersegregasi menjadi dua entitas yakni Maluku utara yang merupakan kelompok Islam dan Maluku Selatan yang didominasi oleh kelompok Kristen (Sihbudi, 2001).

Segregasi sosial yang dilandaskan agama ini, semakin diperuncing oleh Belanda melalui politik *'Divide at Impera'* atau politik adu domba yang dibentuk melalui pendidikan dan pekerjaan di Maluku Selatan. Belanda memberi akses pendidikan pada penganut Kristen dibandingkan dengan pemeluk Islam yang berada

di Maluku Selatan. Selain itu, Belanda juga memberikan akses pekerjaan kepada para pemeluk agama kristen di birokrasi kolonial Belanda bagi mereka yang berpendidikan tinggi dan menjadikan anggota tentara kolonial Belanda bagi mereka yang kurang berpendidikan (Sihbudi, 2001). Pemaparan di atas setidaknya bisa memberi gambaran secara sederhana mengenai bagaimana pola awal dari konflik yang terjadi di Maluku. Berangkat dari penjabaran di atas, segragasi yang berbasis agama masih terjadi pada di berbagai sektor. Sektor-sektor inilah yang kemudian menjadi bagian dari analisis situasional konflik yang terjadi di Maluku. Adapun beberapa hal yang mendasari meliputi sektor ekonomi dan Komunitas Islam pendatang, Politik dan Pendidikan, Globalisasi dan Informasi yang membentuk sebuah situasi konflik di Maluku.

Sektor Ekonomi dan Komunitas Islam Pendatang

Sektor Ekonomi memberikan kontribusi yang memperuncing kondisi konflik yang terjadi di Maluku. Di bidang pemerintahan dan pendidikan banyak dikuasai oleh komunitas Kristen, sedangkan bidang perdagangan dikuasai oleh komunitas Islam. Semakin meningkatnya penguasaan pada bidang perdagangan kemudian membentuk dominasi komunitas Islam dalam kehidupan perekonomian di Maluku. Peningkatan dominasi ekonomi di Maluku juga tidak bisa dilepaskan dari jumlah komunitas Islam yang semakin banyak. Faktor transmigrasi era orde baru menjadi salah satu alasan peningkatan jumlah penduduk Islam Maluku yang semakin meningkat. Masyarakat pendatang tersebut mayoritas adalah penanun Islam yang berasal dari Entitas Bugis, Buton dan Makassar (Sihbudi, 2001). Ketiga Entitas pendatang ini cukup mendominasi dalam sistem perekonomian di Maluku. Masuk dalam sistem ekonomi dan perdagangan jauh lebih mudah bagi para kaum pendatang dibandingkan untuk masuk dalam sistem birokrasi yang sudah didominasi oleh kelompok entitas Kristen.

Sektor Politik dan Pendidikan

Perjalanan sistem politik di Maluku memiliki pergeseran signifikan dalam rentan satu dekade dari awal 1990. Dua dekade kepemimpinan di era tersebut dipimpin oleh Gubernur yang berasal dari komunitas Islam. Dalam kepemimpinannya, terjadi pengusuran posisi-posisi strategis dalam sistem politik pemerintahan di Maluku di mana posisi yang selama ini dipegang oleh individu dari komunitas Kristen, kemudian digeser dan dialihtangankan kepada individu dari komunitas Islam. Ada unsur Islamisasi yang terjadi dalam proses pemerintahan di Maluku. Selama kurun waktu yang sudah sangat lama, secara tidak langsung sudah ada sistem “*balancing*” entitas agama dalam sistem politik pemerintahan. Contoh sederhananya adalah apabila Gubernur dari kelompok Kristen, maka sekretaris daerah adalah dari kelompok Islam. Akan tetapi hal tersebut mulai bergeser dan pemerintahan dengan posisi strategis mulai didominasi oleh satu kelompok saja (Sihbudi, 2001).

Melihat dominasi dalam sistem politik pemerintahan di Maluku sudah mulai didominasi oleh kelompok Islam, Kelompok kristen sebenarnya juga sudah membuat dominasi dalam sistem pendidikan tinggi di Maluku khususnya Universitas Pattimura. Proses Kristenisasi mulai semakin gencar digalakkan di perguruan tinggi guna mengimbangi kekuatan kelompok Islam yang semakin mendominasi segala lini kehidupan. Pemerintah pusat juga menyumbang faktor pendukung dalam memperuncing konflik di Maluku. Melalui UU no. 5/1979 mengenai pokok pokok pemerintahan desa (Ratnawati, 1999), menggeser posisi tokoh-tokoh adat yang biasanya memimpin desa, kemudian dipinggirkan dengan sistem pemerintahan desa yang coba disama ratakan ke seluruh indonesia. Sistem ini kemudian membuat masyarakat didalam sebuah desa tidak memiliki tokoh adat yang memiliki kekuasaan dan mampu bertindak dengan posisi yang dimiliki karena sudah digantikan dengan para kepala desa yang lebih menitik beratkan pada sisi politis.

Globalisasi dan Informasi

Pela Gandong adalah sebuah ikatan kekerabatan yang ada di Maluku sejak zaman dahulu kala. Secara sederhana Pela Gadong adalah sistem yang memungkinkan masyarakat berbeda agama untuk bisa mengikat sumpah lewat upacara khusus, berjanji untuk saling setia, saling membantu dan membela (Sihbudi, 2001). Globalisasi memberikan kontribusi besar dalam pergeseran nilai luruh kehidupan bersama antar umat beragama di Maluku melalui falsafah Pela Gandong. Terjadi degradasi fungsional dalam konteks Pela Gandong yang disebabkan oleh Globalisasi yang merajalela disegala lini kehidupan yang kemudian menjadikan Pela Gandong yang harusnya bersifat kultural-religius menjadi simbolik saja.

Eskalasi konflik kemudian coba diredam dengan berbagai tindakan dan program perbaikan pasca konflik agar tendensi terhadap konflik mampu diturunkan dan menghasilkan sebuah kehidupan yang lebih baik antar dua kelompok beragama di Maluku. Akan tetapi persoalan dalam perbaikan pasca konflik sampai sekarang belum memberi dampak baik dalam proses perbaikan kondisi masyarakat, walaupun sudah banyak program yang dilakukan guna meningkatkan interaksi kedua kelompok ke arah positif tetapi belum berindikasi pada pembentukan perdamaian berkelanjutan di Maluku. Pemuda dan anak-anak menjadi dua elemen penting dalam terbentuknya perdamaian di Maluku. Dua elemen ini seringkali dikesampingkan dalam proses bina damai yang berujung pada pembentukan perdamaian yang positif dan berkelanjutan. Dua elemen ini menjadi penting dalam proses bina damai dengan asumsi bahwa mereka adalah kelompok yang langsung tidak terlibat konflik tetapi terdampak langsung dari konflik yang sedang terjadi serta kelompok ini juga mungkin akan menjadi aktor yang akan mengulang konflik terjadi kembali dikemudian hari.

Dua elemen di atas merupakan kelompok yang dikategorikan usai sekolah. Indikator ini yang kemudian memungkinkan pendidikan menjadi media yang relevan yang bisa digunakan dalam

penciptaan perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan. Tulisan ini akan menganalisis mengenai tantangan dalam membentuk perdamaian disektor pendidikan pada level komunitas dengan menjadikan anak-anak usia sekolah sebagai objek dalam pembentukan perdamaian berkelanjutan. Tulisan ini akan membahas mengenai kelompok belajar yang bernama "*Ruang Belajar Penyala (RBP)*" yang diinisiasi oleh kelompok pemuda lokal yang memiliki harapan besar untuk menurunkan tendensi konflik dan mengarahkan anak-anak usia sekolah untuk bisa membentuk perdamaian yang berkelanjutan.

Tabel 1. Poin Penjabaran

<p>Faktor pendukung: Inisiatif Pemahaman konteks lokal Nilai kehidupan "<i>Basudara</i>" dan "<i>Pela Gandong</i>" Peleburan masyarakat atas dasar toleransi bukan segragasi</p> <p>Faktor penghambat Pesebaran dan <i>Networking</i> Mobilisasi Kerbatsan sumberdaya (Manusia dan Dana) Dukungan Pemerintah Keberlanjutan Program</p>
--

Sumber: Diolah Penuliss

Pembahasan

Deklarasi dunia tentang pendidikan berasumsi bahwa pendidikan bukan hanya mengenai baca dan berhitung tetapi juga perubahan yang mempromosikan nilai positif. Melalui nilai positif yang diajarkan, maka dukungan dalam perdamaian bisa terjadi (Jomtien Declaration,1990). Berangkat dari asumsi terkait pendidikan dan perdamaian serta konteks masyarakat Maluku pascakonflik sangat mungkin perdamaian dapat dibentuk dari sektor pendidikan. Para pemuda Maluku yang melihat peluang ini bersama sama menggunakan peluang ini sebagai bentuk kontribusi yang bisa diberikan dalam pembentukan perdamaian berkelanjutan di Maluku. Tirta Triana dan kawan-kawan mengagas

sebuah komunitas belajar yang diberi nama “*Ruang Belajar Penyala (RBP)*” (Dewi, 2015). Keterbatasan dan ketidakefektifan bentuk pembelajaran di sekolah untuk membagi nilai perdamaian menjadi indikasi awal lahirnya inisiatif dalam membentuk komunitas yang diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah. Komunitas ini hadir bukan untuk menggantikan sekolah formal sebagai tempat anak-anak untuk menimba ilmu, tetapi untuk menanamkan nilai perdamaian dan mencairkan stereotip dan tendensi negatif yang sudah berkembang dalam masyarakat selama konflik berlangsung kepada anak-anak yang terdampak konflik agar mereka tidak mengalami traumatik konflik dan tidak menghasilkan dendam yang mungkin dikemudian hari akan kembali tersulut.

Inisiatif yang dimiliki oleh pemuda lokal ini memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi. Analisis berangkat dari pemahaman yang dimiliki oleh para penggiat program yang sudah sangat paham mengenai konteks masyarakat lokal dan dapat menjadi katalisator untuk mengajak anak-anak bergabung pada komunitas ini serta memberikan pemahaman kepada orang tua mereka bahwa program yang dijalankan akan berimplikasi baik tanpa ada ketakutan bagi para orang tua untuk memberikan izin kepada anaknya untuk ikut program yang dijalankan karena yang menjadi pelaksanan dan penggagas adalah pemuda yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Ruang Belajar Penyala (RBP) mampu merangkul sekitar tiga puluh anak dengan pencampuran antara anak-anak yang beragam Islam dan anak-anak yang beragama kristen dalam komunitas. Anak-anak tersebut kemudian diajarkan tentang nilai-nilai toleransi dan perdamaian melalui cara-cara yang sangat sederhana dan dekat dengan anak-anak. Metode pembelajaran yang dilakukan antara lain adalah *icebreaking*, *games*, dongeng dan alat peraga. Pada setiap metode pembelajaran, disisipkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi agar dikemudian hari mereka dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut karena sudah tertanam dari kecil mengenai nilai tersebut.

Komunitas ini juga tidak lupa menyisipkan nilai adat lokal yang dimiliki oleh masyarakat Maluku dari zaman dahulu yakni

Pela-Gandong dan *Basudara*. Kedua nilai adat ini merupakan nilai adat yang sangat mementingkan tingkat toleransi dan penghargaan yang sangat tinggi. Hanya saja kondisi pra dan saat konflik nilai ini dikesampingka karena tendensi antar kelompok yang makin memanas. Nilai adat ini dihadirkan kembali dalam pembauran yang dilakukan pada setiap program yang dilakukan agar anak-anak dapat memahami bahwa Maluku masa lalu sudah hidup damai dan menghargai satu sama lain (Dewi, 2015). Pemahaman terkait konteks lokal yang sangat baik dan pesebaran nilai damai dengan saasaran yang sudah dianggap tepat ternyata mengalami cukup banyak problematika dalam membetuk rekonstruksi masyarakat pascakonflik yang dapat hidup dengan nilai perdamaian yang berkelanjutan. Persoalan yang dihadapi Ruang Belajar Penyala (RBP) dalam mencapai tujuannya adalah Sumber daya dana. Inisiatif lokal yang sangat baik tanpa didukung oleh pendanaan yang dianggap netral menjadi sebuah problematika yang dihadapi komunitas ini. Kurangnya dana karena berangkat dari ide kolektif saja membuat mereka harus menggunakan dana pribadi dalam pelaksanaan program. Minimnya dana terlihat dari tempat belajar yang mereka gunakan yakni pos kamling, pos ronda serta tempat pengajian (jika sedang tidak digunakan) menjadi alternatif dalam pelekasanaan program yang mereka inisiasi. Kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program menjadi sebuah masalah lain, dengan sedikitnya jumlah relawan mengharuskan mereka bergantian dalam mejalankan program yang mereka rancang.

Minimnya dukungan pemerintah juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Pemerintah terlihat lebih berfokus pada pembentukan perdamaian ditatanan yang terlihat dan diranah yang begitu formal. Pendidikan yang dijadikan media dalam bina damai yang dilakukan pemerintah hanya pada konteks pendidikan formal yang tidak terlalu memberi dampak besar dalam implikasi terjadinya perdamaian yang berkelanjutan. Pendidikan yang digadang-gadang pemerintah menjadi media bina damai belum mampu diterapkan secara baik oleh para guru. Selain itu, pembauran siswa disekolah juga menjadi masalah karena siswa masih memilih

untuk mengenyam pendidikan formal pada sekolah yang berbasis agama. Jumlah siswa yang cukup banyak disekolah menjadi salah satu indikator sulitnya implementasi nilai damai. Pemerintah haruslah lebih peka pada kelompok-kelompok kecil yang lebih mengakar rumput dalam melaksanakan proses bina damai.

Kelemahan lain yang dimiliki oleh Ruang Belajar Peyala (RBP) adalah terkonsentrasinya program pada satu kelompok masyarakat yang berimplikasi pada sedikitnya jumlah penerima manfaat dari program yang dilakukan. Komunitas ini belum mampu untuk menyebarkan konsep dan program yang mereka miliki pada komunitas kelompok didesa atau kecamatan lain. Penulis berasumsi jika program ini mampu mengkaderisasi relawan baru ditempat lain akan semakin menunjukkan pola keberhasilan dari proses bina damai. Semakin luasnya mobilisasi dan networking yang terbangun dengan program yang serupa yang diinisiasi oleh kaum muda, akan membentuk nilai perdamaian yang berkelanjutan dan menciptakan sebuah program yang berkelanjutan baik untuk anak-anak serta para relawan.

Kesimpulan

Penjabaran yang dipaparkan di atas, menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab persoalan hambatan yang dimiliki oleh program bina damai dalam tatanan komunitas. Kesimpulan pertama yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :



Diagram 1 .Program Bina Damai
Sumber: Diolah Penulis

Berangkat dari contoh kasus yang diangkat, penulis melihat program bina damai yang dilakukan kebanyakan terbentur pada persoalan substansi dan dukungan. Program yang dijalankan oleh

Ruang Belajar Penyala (RBP) memiliki nilai substansi yang sangat baik. Pemahaman terkait konteks lokal dan nilai perdamaian dan apa yang ingin dibagi dirasakan sangat krusial dalam pembentukan bina damai untuk anak-anak terdampak konflik agar mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Akan tetapi dukungan dari pemerintah dan pendanaan menjadi sebuah persoalan yang dihadapi untuk keberlanjutan program yang diinisiasi. Berbeda dengan program pemerintah yang memiliki dukungan finansial dan birokrasi yang kuat tetapi tidak mampu untuk menyentuh esensi substansi terpenting agar nilai perdamaian dapat teraplikasi dengan baik. Dua komponen ini menjadi penting untuk diperhitungkan demi menjawab tantangan dalam proses bina damai berkelanjutan.

Networking menjadi hal yang sangat penting untuk menyebarkan nilai perdamaian secara menyeluruh ke semua masyarakat terkhusus anak-anak. Penulis berasumsi jika program ini mampu disebarkan ke daerah-daerah lain yang terdampak konflik dan diinisiasi oleh aktor lokal maka percepatan penyebaran nilai perdamaian, toleransi dan pembentukan kondisi perdamaian yang berkelanjutan bisa teraplikasi secara cepat. Jika program hanya dititik beratkan pada satu komunitas masyarakat saja, tidak menutup kemungkinan penyebaran kebencian dan kekerasan dari kelompok yang tidak mendapatkan program bisa mempengaruhi kelompok yang sudah didik mengenai nilai perdamaian kembali tumbuh. Perdamaian haruslah dijaga dan disebarkan untuk kemudian mampu menekan peluang terjadinya konflik dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Alhadar, Smith. (2001). *Produk Sejarah Kolonial hal. 12, Lihat pada buku Ketika Semerabak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu*. Sekretariat Tapak Ambon.
- Dewi, Andi Rosita. 2015. *Tirta Triana Bangga, Anak Didiknya Semangat Belajar di Pos Ronda*. Diakses melalui <https://www.brilio.net/news/tirta-triana-bangga-anak-didiknya-semangat-meski-belajar-di-pos-ronda-tirta-triana-150427k.html>
- Sihbudi, Riza at.al. (2001). *Bara dalam Sekam*. Mizan. Bandung.
- Ratnawati, Tri. (1999). *Identifikasi Akar Masalah di Daerah Ambon dan Solusi*. LIPI. Jakarta.

PEREMPUAN-PEREMPUAN PENGHAPUS STIGMA KEPEMIMPINAN

Ferdiansyah Rivai

Kabar baik datang dari negara-negara yang dipimpin oleh Perempuan. Norwegia, Islandia, Finlandia, Taiwan, Selandia Baru, Jerman dinobatkan oleh banyak lembaga dan media massa sebagai negara-negara yang paling baik dalam penanganan Covid-19. Deep Knowledge Group misalkan, sebuah konsorsium perusahaan-perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada masyarakat digital, menempatkan negara-negara tersebut di atas sebagai Top 40 negara dengan tingkat keamanan paling baik dalam menghadapi Covid-19 di masa-masa awal terjadinya pandemi.

Lembaga ini meneliti ragam aspek di dalam penanganan Covid-19, mulai dari *Safety Ranking, Quarantine Efficiency, Government Efficiency of Risk Management, Monitoring and Detection, Healthcare Readiness, Regional Resiliency*, hingga *Emergency Preparedness*. Di hampir semua aspek tersebut, negara-negara yang dipimpin oleh perempuan masuk ke dalam 40 negara terbaik. Jerman, Selandia Baru, Norwegia dan Taiwan bahkan ada di peringkat 20 besar di dalam keseluruhan peringkat. Fakta ini tentu pukulan telak bagi stigma/*stereotype* yang seringkali dilekatkan pada (pemimpin) perempuan.

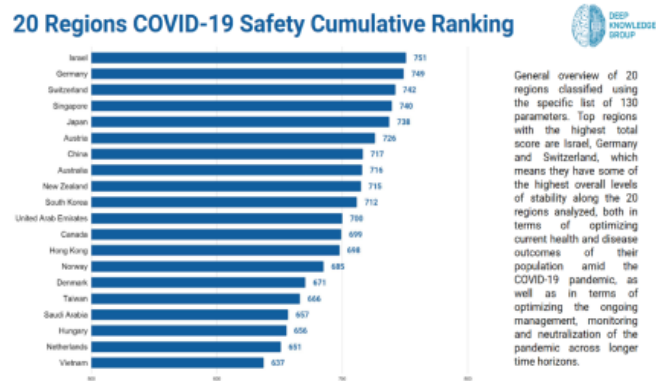


Diagram 1. Ranking Keseluruhan Penangan Covid
Sumber: Deep Knowledge Group, 2020)

Setidaknya di lingkungan kehidupan penulis, masih jamak terdengar anggapan-anggapan bahwa “Perempuan lahir dengan tiga akal dan tujuh perasaan, sementara laki-laki sebaliknya”. Atau ucapan-ucapan spontan seperti “wajarlah, dia perempuan, lebih sensitif hatinya”. Ada satu “pengalaman buruk” sewaktu kuliah yang harus diceritakan di sini. Di kelas yang membahas tentang Gender dan Hubungan Internasional, dosen yang mengajar waktu itu meminta peserta kelas untuk mengajukan pertanyaan dengan iming-iming nilai.

Sebetulnya tidak ada ketertarikan bertanya, tapi karena kelas begitu tegang dan hening, guna mencairkan suasana, penulis memutuskan untuk bertanya:

“Bagaimana pendapat ibu tentang pendapat yang menyatakan bahwa Laki-laki terlahir dengan tujuh akal dan tiga perasaan, sementara perempuan sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan apabila kita melihat bagaimana Presiden Megawati mengambil keputusan menjual Indosat ke pihak asing. Atau Margareth Thatcher yang membuat kebijakan Perang Malvinas. Bukankah itu adalah sebuah keputusan-keputusan irasional yang sangat emosional”.

Ketimbang menjawab pertanyaan dan memberi nilai, dosen tadi lebih ke menceramahi (lagi) seisi kelas mengenai persoalan gender dari A-Z. Beliau sepertinya kesal melihat betapa bebalnya “otak laki-laki” dalam menerima pemahaman mengenai

kesetaraan gender. Sudah dijelaskan panjang lebar, masih saja tidak paham. Alhasil, terjadi repetisi materi perkuliahan waktu itu.

Belakangan penulis insaf, dan menyadari bahwa kekesalan dosen tadi sangat beralasan. Dia sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan perbedaan fungsi, peran, mentalitas dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang hidup dalam pola pikir masyarakat adalah konstruksi (bukan takdir yang melekat) yang bisa berujung pada *stereotype*. Jadi adalah kesalahan besar melekatkan stigma kepemimpinan berdasarkan klasifikasi “laki-laki” atau “perempuan”. Peluang laki-laki dan perempuan untuk irasional pada hakikatnya sama besar. Namun karena struktur sosial tidak berpihak pada perempuan, maka kepemimpinan perempuanlah yang seringkali menjadi sorotan dan objek kesalahan.

Angela Markel (Kanselir Jerman), Tsai Ing Wen (Presiden Taiwan), Erna Solberg (Perdana Menteri Norwegia), Jacinda Ardern (Perdana Menteri Selandia Baru) adalah beberapa nama yang dianggap berhasil menghapus stigma negatif terhadap kepemimpinan perempuan selama masa pandemi Covid-19. Yang paling menakjubkan adalah bagaimana mereka bertindak sangat rasional dengan rasa percaya penuh terhadap sains. Ketika wabah ini muncul di negara yang mereka pimpin, mereka langsung mendengarkan nasihat-nasihat saintifik untuk kemudian mengambil keputusan. Mereka melakukan tes sebanyak mungkin pada masyarakatnya, segera menganjurkan *social/physical distancing*, hingga tak segan-segan melakukan *lockdown*.

Kedua, mereka semua juga berhasil memanfaatkan media massa dan media sosial untuk melakukan persuasi kepada masyarakat. Jika Jerinx SID menganggap televisi-televisi di Indonesia bersekutu dengan elit-elit global untuk terus menebarkan ketakutan, maka Erna Solberg mampu menjadikan televisi di Norwegia untuk menjadi medium dialognya dengan masyarakat agar tidak panik dan mau percaya pada pemerintah. Ketika pemerintah di Indonesia menggelontorkan milyaran

rupiah untuk membayar *influencer* media sosial guna mengundang wisatawan mancanegara di tengah pandemi ini (Hakim, 2020), Sanna Marin (Perdana Menteri Finlandia) memilih untuk membayar *influencer* media sosial untuk menyebarkan informasi penting terkait Covid19 kepada masyarakat yang kurang terpapar berita-berita media arus utama (Nadira, 2020).

Hal yang kedua ini sangat menarik. Di dalam bukunya *Gender in International Relations* yang terbit tahun 1992, Ann Tickner mengkritik Kajian Hubungan Internasional yang dianggap terlalu didominasi oleh nuansa maskulinitas. Keamanan Internasional dipandang hanya dari kaca mata perang dan militer, di mana di dalam kedua kaca mata ini, perempuan selalu disubordinasikan (Tickner, 1992). Karena yang pergi berperang adalah laki-laki untuk berperang juga dengan laki-laki. Hal ini membuat kajian Ilmu Hubungan Internasional mengabaikan banyak hal. Bahwa keamanan bukan hanya tentang absennya perang, militer dan hal-hal lain yang terkait dengan *hard power*, melainkan juga absennya kekerasan, ketertindasan struktural, ekonomi dan juga budaya yang selama ini seringkali dianggap tidak terkait dengan terminologi "*Security*".

Perempuan yang menurut Tickner sudah terlalu lama mengalami domestifikasi, akhirnya juga memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang lebih mikro: tentang empati dan juga persuasi. Pemimpin perempuan tumbuh menjadi sosok yang lebih peka dengan keadaan, dan tidak tertarik dengan tetek bengek glorifikasi kekuasaan. Tickner kemudian berasumsi bahwa hal ini akan mempengaruhi karakter seorang perempuan ketika ia nanti memiliki otoritas untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan publik.

Terbukti, pemimpin-pemimpin perempuan ini tidak melihat pandemi dari sudut pandang kemanan tradisional: bahwa masyarakat harus didisiplinkan dengan pendekatan militer, bahwa pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting dari kesehatan warganya. Mereka tidak seperti itu. Justru dalam keadaan seperti ini mereka berhasil melihat kesehatan jauh lebih penting

daripada pertumbuhan ekonomi. Mereka meredam kecemasan masyarakat bukan dengan ancaman-ancaman menakutkan, melainkan dengan tindakan-tindakan persuasif yang mampu membangun rasa percaya masyarakat, sehingga yang muncul adalah optimisme bahwa negara hadir sebagai entitas nomer satu yang akan melindungi masyarakat dari bahaya pandemi ini.

Ini tentu sangat kontras ketika kita sandingkan dengan Donald Trump misalkan. Betapa Trump sangat arogan dalam menghadapi Covid-19 ini. Di awal-awal mereka sesumbar Amerika Serikat tidak akan terdampak, hingga mereka mengabaikan protokoler kesehatan dan imbauan yang saintifik. Tapi lihat, Amerika Serikat menjadi negara terparah. Dan Trump dengan jumawa masih mengatakan: "Angka tinggi positif Covid-19 itu karena dia berhasil menyelenggarakan tes ke seluruh rakyatnya", bahkan di salah satu berita belum lama ini Wakil Trump menolak memakai masker ketika masuk Rumah Sakit (Tim detikcom, 2020). Indonesia pun kurang lebih sama dengan Amerika Serikat. Sesumbar di awal kemunculan Covid-19, dan kemudian serba salah dalam mengambil keputusan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ketika Covid19 muncul di Wuhan dan diprediksi oleh banyak lembaga dapat menyebar ke seluruh dunia, Indonesia sempat merasa tidak akan terkena dampak. Indonesia kemudian justru membuat promo besar-besaran untuk menarik wisatawan agar mau datang ke Indonesia.

Ekonom Faisal Basri sempat mengatakan bahwa kesalahan Indonesia di masa-masa awal penanganan Pandemi adalah karena terlalu menuhankan ekonomi, memberhalakan investasi dan mengabaikan persoalan utamanya yaitu kesehatan. Hal ini bisa kita lihat dengan sangat nyata dari struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Pelaksanapun dari kalangan ekonomi, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Sekretaris komite dijabat Raden Pardede dari Kamar Dagang dan Industri dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Susiwijono Moegiarso. Lalu Tim PPKM Darurat dikoordinatori Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurut Faisal Basri jika Pak Luhut sudah ngomong, semua diam, dan hanya mau mendengarkan masukan yang dia mau (Akbar, 2021).

Berita di masa-masa awal terjadinya covid juga memperlihatkan bagaimana militer mengambil peran besar dalam penanganan Covid19, bahkan sempat dikatakan TNI justru sudah memiliki skema dalam penanganan Covid (LaporCovid-19, 2021). Dapat dibayangkan, menghadapi pandemi dengan pendekatan militer. Tapi ya wajar, karena jika dilihat lebih rinci lagi, struktur Tim Penanganan Covid-19 Indonesia memang diisi oleh unsur TNI dan POLRI (Selain Luhut Pandjaitan, ada Doni Monardo, Terawan Agus Putranto, dan unsur TNI-Polri lain) dan didominasi laki-laki. Hanya ada dua nama perempuan di sana: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Daftar Pustaka

- Akbar, C. (2021). *tempo.co*. Retrieved October 21, 2022, from Tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/1484003/faisal-basri-sebut-kesalahan-utama-ri-dalam-tangani-covid-19-menuhankan-ekonomi>
- Deep Knowledge Group. (2020). *COVID-19 Regional Safety Assessment*. Retrieved May 1, 2020, from *dkv.global*: <http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-infographic-summary.pdf>
- Hakim, R. N. (2020). *Kompas.com*. Retrieved May 1, 2020, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/20380521/pemerintah-anggarkan-rp-72-miliar-untuk-bayar-influencer-demi-tingkatkan>
- LaporCovid-19. (2021). *LaporCovid-19*. Retrieved October 25, 2022, from *LaporCovid19.org*: <https://laporcovid19.org/post/kekuasaan-dan-militer-dalam-merespon-pandemi-bukti-dari-lapangan>

- Nadira, F. (2020). *republika.co*. Retrieved May 1, 2020, from Republika: <https://iqra.republika.co.id/berita/q8tqcq382/negara-dipimpin-perempuan-jadi-contoh-terbaik-tangani-corona>
- Tickner, J. A. (1992). *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*. New York: Columbia University Press.
- Tim detikcom. (2020). *detik.com*. Retrieved October 25, 2022, from Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-5078053/beribu-alasan-trump-tolak-pakai-masker>

INTOLERANSI INTRA-AGAMA: Studi Konflik Sektarian Komunitas Sunni-Syiah di Sampang Madura

Gunawan Lestari Elake

Latar Belakang

Intoleransi antar dan intra agama masih merupakan pekerjaan rumah besar di republik ini. Laporan Setara Institute menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus intoleransi terhadap minoritas agama di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, terdapat 216 kasus pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 2012 (Watch, 2013). Sementara itu, hal serupa juga mengemuka dalam laporan Wahid Institute, yakni 184 peristiwa pelanggaran pada 2010, 267 pada 2011 dan 278 pada 2012, meski terdapat juga penurunan berturut-turut pada dua tahun setelahnya (Wahid Institute, 2015). Tentu saja, situasi ini cukup mengkhawatirkan sebab bagaimana pun juga keberagaman (pluralitas) merupakan fakta sosio-kultural yang sulit ditolak dan bahkan menjadi fundamen eksistensi keindonesiaan kita

Salah satu kasus intoleransi keyakinan beragama yang mengemuka dan mendapatkan perhatian luas banyak kalangan adalah kekerasan sektarian antara komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Madura. Akibat dari kekerasan ini adalah jatuhnya korban jiwa, hilangnya harta benda (puluhan rumah rusak terbakar), dan ratusan orang komunitas Syiah terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan hidup di tempat pengungsian (relokasi).

Sebagaimana umumnya kasus intoleransi agama dan intra-agama, apa yang tampak sebagai pemicu dari kekerasan ini adalah klaim kebenaran agama yang eksklusif, disertai sentimen/prasangka buruk serta kebencian yang meluas terhadap keyakinan agama tertentu yang berbeda. Komunitas Syiah ditunding menjalankan ajaran/praktek keagamaan yang menyimpang, sesat dan menyesatkan, serta berbahaya bagi 'kemurnian' ajaran Islam oleh sejumlah ulama Sunni yang memiliki pengaruh kuat di Sampang dan Madura pada umumnya. Bagi para ulama ini, menghentikan ajaran dan eksistensi komunitas Syiah merupakan tugas suci mereka sebagai garda depan untuk membentengi umat dari segenap perpecahan, apapun cara dan akibatnya (Kontras Surabaya, 2012).

Artikel ini berupaya untuk memahami mengapa peristiwa intoleran tersebut mengemuka dan berkembang menjadi kekerasan sektarian berbasis agama. Dengan menggunakan pendekatan *In/Out Group*, artikel berusaha menunjukkan bahwa narasi inklusi-eksklusi yang membentuk identitas 'kita' dan 'mereka' sebagai salah satu faktor penting pendorong konflik. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dimensi geopolitik Timur Tengah sebagai faktor tak langsung yang berkontribusi terhadap makin menajamnya persetruan identitas Sunni-Syiah secara global, termasuk di Indonesia.

Toleransi, Intoleransi dan Agama: Pendasaran Teoritis

Pertama-tama penulis perlu mengurai makna toleransi, dan bagaimana hubungannya dengan agama, menurut Andrew Cohen, sikap toleran adalah "*...an agent's intentional and principled refraining from interfering with an opposed other (or their behaviour, etc.) in situations of diversity, where the agent believes she has the power to interfere*" (Powell & Clarke, 2013). Setidaknya terdapat dua justifikasi moral atas toleransi, yakni; a) pragmatis, tindakan toleran mengemuka demi pertimbangan stabilitas kehidupan bermasyarakat semata, meskipun pada prinsipnya seseorang mempunyai kekuasaan untuk mencegah kelompok atau agama yang berbeda tersebut menjalankan aktivitasnya, dan; b) non-pragmatis, bisa dikatakan

bahwa ini adalah kritik terhadap justifikasi pragmatis yang pada analisis terakhir, memungkinkan tindakan intoleran terjadi ketika situasinya berubah (menguntungkan pihak mayoritas). Justifikasi ini berhubungan dengan tradisi liberal, di mana separasi antara ruang publik dan privat menjadi syarat mutlak tatanan masyarakat, semenjak agama adalah domain privat, negara tidak boleh campur tangan dalam ajaran dan praktek agama. Negara memiliki posisi yang netral terhadap setiap persaingan antar kelompok masyarakat (termasuk kelompok keagamaan) (Powell & Clarke, 2013).

Persoalannya, relasi antara agama dengan toleransi tidak selalu bersifat simetris. Beberapa kalangan bahkan beranggapan bahwa agama, secara esensial, adalah intoleran dan merupakan sumber kekerasan, karenanya sikap toleran terhadap agama adalah tindakan yang sia-sia. Barangkali, argumen tersebut muncul dari fakta keras bahwa dalam sejarah maupun situasi kontemporer, agama 'menyumbang' konflik yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang begitu mudah termobilisasi dalam permusuhan, kekerasan dan peperangan atas nama agama. Jelas argumen semacam ini reduksionis, sebab ada banyak konflik lain yang tidak berbasis agama, juga menafikan kenyataan bahwa agama tidak berada dalam ruang kosong serta memiliki ikatan-ikatan dinamis secara geo-kultural. Mungkin lebih tepat jika kita merujuk pada konsep yang ditunjukkan oleh Appleby, bahwa terdapat ambiguitas 'yang suci', yang yang secara intrinsik melekat dalam agama, yakni adanya misteri (*mysterium*), rasa gentar dan ngeri (*tremendum*), serta ketakjuban (*fascinans*). Dalam misteri yang suci terkandung dua hal sekaligus: yakni rasa takjub, dan ketakutan sekaligus. Tindakan kekerasan (intoleran) berhubungan dengan salah satu dimensi yang suci ini, yakni: ketakutan dan rasa gentar (Abdalla, 2013). Dengan kata lain, ada watak yang mendua dari agama, disatu sisi terdapat dimensi agama yang memicu pertentangan dan kekerasan terhadap kelompok agama lain, akan tetapi disisi lain, secara intrinsik terdapat juga orientasi pada nilai-nilai perdamaian.

Berkaitan dengan itu, relasi antara kekerasan (intoleran) dan agama juga bisa kita temukan dalam pendekatan psikologis, yakni

Efek *In-Group/Out-Group*. Pendekatan ini menekankan tentang tendensi individual untuk meningkatkan kepercayaan diri anggota-anggota in-group-nya dengan menunjukkan sikap penuh prasangka dan diskriminatif terhadap mereka yang out-group. Sebagaimana juga pengelompokan etnis dan politik, afiliasi keagamaan juga dapat memicu dinamika psikologis dalam agama/keyakinan tersebut, yang memungkinkan terjadinya stereotipe, efek negative, sikap dan tindakan anti-sosial kepada *out-group* (Powell & Clarke, 2013). Menurut penulis, term yang pas untuk efek in.out-group ini adalah 'kita' dan 'mereka'.

Pada dasarnya, suatu kelompok (termasuk kelompok agama) dalam derajat tertentu memiliki norma bersama, nilai, tradisi dan aspek-aspek metafisika pada anggota-anggotanya, yang memungkinkan terjadinya mobilisasi, justifikasi, dan pembenaran atas aksi kolektif tertentu. Agama merupakan salah satu mode identifikasi sosial yang penting, menyediakan identitas sosial yang komprehensif bagi individu-individu sebagai penegasan diri, termasuk pandangan dunia tentang kosmik dan kehidupan duniawi. Identitas inilah yang kemudian mengukuhkan batasan-batasan yang jelas antara 'kita' dan 'mereka' secara metafisika, yakni antara 'kita' yang merupakan kumpulan orang-orang beriman dan suci, dengan 'mereka' yang bejat dan kafir. Persoalannya, ketika pandangan dunia sebuah kelompok ('kita') dipresepsikan terancam oleh keberadaan kelompok lain ('mereka') maka yang terjadi adalah, tidak hanya mengentalnya pengukuhan diri kelompok ini tetapi juga penghinaan, pengkambinghitaman dan tindakan agresif terhadap kelompok lain (Powell & Clarke, 2013).

Menurut Ihsan Ali Fauzi (2013), Identifikasi 'kita' dan 'mereka' ini membutuhkan legitimasi terus menerus agar tidak usang, lewat narasi-narasi besar tertentu, yakni: dasar-dasar keimanan, kisah-kisah dan ritual keagamaan, dan sebagainya. Narasi ini juga mengemuka dalam bentuk-bentuk ekspresi yang simbolik seperti pakaian, arsitektur, musik dan lainnya. Persoalannya, ketika eskalasi konflik meningkat, hal tersebut (agama sebagai identitas diri dan kelompok, serta justifikasi yang menopangnya) dapat berkembang

lebih jauh menjadi pola kekerasan keagamaan yang mengemuka selama ini, yakni legitimasi atas penggunaan kekerasan (seperti jihad) terhadap kelompok-kelompok lain ('mereka'). Setidaknya ada tiga cara pemberian legitimasi ini, yakni: (a) seruan formal kepada tradisi keagamaan tertentu, yang menunjukkan situasi-situasi khusus di mana penggunaan kekerasan dapat dibenarkan; (b) penguatan narasi-narasi yang menunjukkan kejahatan dan kebengisan kelompok lain, kelompok "mereka", yang mengancam keselamatan kelompok "kita"; dan (c) rujukan kepada sebuah misi suci keagamaan tertentu di mana tindakan militeristik, setidaknya dalam situasi tertentu, dapat dibenarkan (Fauzi, 2013).

Sekilas Tentang Syiah di Indonesia

Perbedaan (bahkan pertentangan) mazhab antara Sunni-Syiah adalah sesuatu yang telah berlangsung lama dan mewarnai sejarah perkembangan Islam itu sendiri samapai sekarang. Pangkalnya adalah pada perdebatan kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad wafat, yakni antara apakah kepemimpinan itu dipegang oleh sahabat-sahabat terdekat nabi, yang tentu saja memiliki pemahaman luas tentang kebiasaan-kebiasaan nabi, ataukah mengikuti garis keturunan nabi (ahlul bait). Kita tahu kemudian bahwa Abu Bakar lah yang dipilih sebagai pemimpin pertama paska nabi, meskipun mayoritas kelompok Islam pada saat ini setuju, terdapat kelompok yang percaya bahwa seharusnya pemimpin ummat adalah Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah anak nabi, salah seorang yang pertama memeluk Islam. Mereka percaya bahwa nabi telah menentukan Ali sebagai penggantinya, salah satunya adalah peristiwa Ghadir Khum, di mana nabi secara eksplisit menyatakan bahwa Ali adalah pengganti dirinya. Mereka yang mendukung Ali ini menamakan dirinya sebagai Syiah. Dalam perkembangannya, perbedaan-perbedaan ini kemudian mengerucut kedalam dua pengelompokan besar mazhab Islam, yakni Sunni-Syiah. Perbedaan ini dalam perkembangannya memiliki relasi dengan pertentangan-pertentangan politik sepanjang sejarah Islam.

Sejarah Syiah di Indonesia sesungguhnya bisa dilacak bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia, Beberapa catatan menunjukkan bahwa perseteruan antara Syiah-Sunni sudah terjadi sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Kenyataan seperti ini tidak mengherankan karena Islam adalah agama baru yang dibawa oleh para pedagang dan dai dari luar sehingga permusuhan antarkelompok Islam di wilayah-wilayah dari mana Islam itu datang juga dibawa ke Nusantara. Secara umum, Sunni-Syiah tidak pernah menjadi identitas kelompok bagi Muslim Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa Syiah sendiri, sebagaimana Sunni, tidak pernah muncul dalam suatu kelompok Islam dengan batas-batas yang jelas yang kemudian membentuk sebuah batas yang terorganisir secara baik dengan simbol-simbol budaya dan ritual yang terbedakan dengan kelompok lain. Syiah yang datang ke Indonesia di tahap awal tidak ubahnya dengan penyebaran Islam itu sendiri di mana para penyebar tentu saja akan menyebarkan Islam sesuai dengan pemahamannya sendiri. Hanya saja, aliran Syiah pada tahap penyebaran ini tidak dengan label Syiah. Islam Syiah ini masih terlihat jelas dalam berbagai ritual Muslim Indonesia, misalnya barzanji, shalawatan, suroan, perayaan Tabut di Sumatera, dan lain sebagainya (Hamdi, 2012).

Lalu bagaimana masuk dan berkembangnya Syiah di Sampang? Sebenarnya bermula dari bapaknya Tajul Muluk (pemimpin komunitas Syiah Sampang saat ini), yakni Kiai Makmun. Oleh karena terinspirasi dengan Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayotolla Ali Khomeini, ia mulai diam-diam belajar Syiah dari sahabatnya pada awal 80-an. Ketertarikan inilah yang kemudian membuat ia menyekolahkan anak-anaknya: Tajul Muluk; Roisul Hukama; dan putrinya, Ummi Hani ke Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan (1983). YAPI dikenal sebagai pesantren yang cenderung pada mazhab Syiah. Pada 1993, Tajul berangkat ke Arab Saudi untuk belajar di Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki. Karena terkendala biaya, sekolahnya berhenti di tengah jalan. Meski demikian, Tajul Muluk yang bernama asli Ali Murtadha ini tetap bertahan di Arab dengan bekerja. Sepulang dari Saudi, Tajul

aktif mengajar di pesantren milik bapaknya, yakni Misbahul Huda. Pesantren ini sendiri berdiri atas bantuan warga desa yang juga mantan murid-murid kiai Makmun. Pesantren ini mengembangkan ajaran Syiah. Berbeda dengan bapaknya, Tajul mengajarkan ajaran Syiah secara terbuka, dalam kurun tiga tahun ratusan warga desa Blu'uran dan Karang Gayam menjadi pengikut Syiah. Situasi inilah yang kemudian memicu keberatan dari sejumlah ulama, terutama kiai Ali Karrar Shinhaji (masih kerabat dekat dari ayah Tajul, Kiai Makmun). Namun, mereka tidak menentang Tajul secara terbuka karena hormat terhadap Kiai Makmun. Teror dan intimidasi terhadap Tajul dan komunitas Syiah dimulai setelah meninggalnya kiai Makmun (Setiawan, 2012).

Dimensi Geopolitik Timur Tengah

Menajamnya narasi sektarian Sunni-Syiah di Indonesia tidak berkembang dari ruang kosong dan dapat begitu saja dilepaspisahkan dari dinamika politik internasional. Akarnya adalah rivalitas Arab Saudi dan Iran yang telah berlangsung lama dan makin menajam akhir-akhir ini. Sejak keberhasilan Revolusi Islam Iran 1979 menumbangkan pemerintahan monarki Syah Reza Pahlevi, Saudi senantiasa menempatkan Iran sebagai ancaman geopolitik di Teluk, begitupula sebaliknya. Peristiwa revolusi tersebut membuat Saudi dan sejumlah negara monarki di Timur Tengah khawatir dengan kemungkinan terjadinya revolusi serupa di negara mereka. Kehawatiran tersebut memuncak ketika kelompok Syiah di Provinsi Timur melancarkan protes, demonstrasi dan pemberontakan terhadap pemerintahan Saudi pada akhir 1970 hingga awal 1980-an (Matthiesen, 2013). Gerakan revolusi ini mendapatkan dukungan yang besar terutama dari wilayah pedesaan yang miskin dan mendapatkan dampak negatif industri minyak yang merusak lahan pertanian mereka. gerakan revolusi ini pada akhirnya berhasil dihentikan oleh tentara nasional Saudi. Menariknya, gerakan revolusi oleh komunitas Syiah ini didahului dengan peristiwa penting lainnya, yakni pendudukan Masjidil Haram oleh kelompok Sunni anti-kerajaan pada akhir November

1979. Kedua peristiwa ini membuat Saudi melihat adanya ancaman nyata dari kelompok oposisi termasuk kemungkinan kerja sama diantara mereka sebagai ancaman utama pemerintah.

Sejak saat itu pula, pemerintah Saudi memandang ideologi Syiah sebagai ideologi yang mengancam struktur kekuasaan kerajaan. Menurut Matthiesen (Matthiesen, 2014) inilah momen di mana elit-elit politik Saudi kemudian mulai melahirkan dan mereproduksi narasi 'ancaman Syiah' (*Shia Threats*). Narasi ini kemudian disebarlusakan melalui media, institusi keagamaan, fatwa ulama Wahabi, beserta berbagai jaringan institusi pendidikan dan kebudayaannya di seluruh dunia untuk mempertajam ketegangan Sunni-Syiah. Rivalitas keduanya makin meningkat setelah peristiwa *Arab Spring* (2011), sebuah gelombang demokratisasi di Timur Tengah yang ditandai dengan rontoknya sejumlah rezim diktator yang berkuasa puluhan tahun. Kondisi turut menginspirasi kelompok oposisi pada masing-masing negara untuk melancarkan tuntutan reformasi politik. Dalam kasus Saudi, mengikuti argumen Matthiesen (2013), narasi sektarian 'ancaman Syiah' disebarkan secara massif melalui berbagai media untuk mengalihkan perhatian warga terhadap problem politik dan ekonomi dalam negeri. Intervensi kedua negara tersebut dalam kasus Suriah dan Yaman membuat situasi makin runyam. Narasi-narasi tersebut seolah mendapatkan justifikasi konkrit di mana rezim Bashar Al-Assad yang didukung Iran dianggap sebagai 'masalah utama' umat Islam ketimbang isu lainnya seperti masalah Israel-Palestina.

Apa yang nampak di Timur Tengah sebagai perseteruan politik yang melibatkan manuver-manuver perimbangan kekuatan dan *proxy war* antar kedua negara tersebut, kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi semata-mata perseteruan identitas dan mazhab keagamaan di dalam dunia Islam, termasuk Indonesia. Artinya, konflik sektarian tidak hanya bisa dipahami dalam kerangka perbedaan keyakinan semata, melainkan juga merupakan produk dari proses politik yang melingkupinya. Fanar Haddad (2011) menjelaskan bahwa dalam banyak kasus ketegangan dan konflik sektarian antara komunitas Sunni dan Syiah di Timur Tengah

berkaitan erat dengan kondisi-kondisi politik dan ekonomi yang ada. Dengan lain perkataan, konflik ini sebetulnya tidak bersifat permanen melainkan kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh konflik politik antara berbagai aktor yang berkepentingan. Apalagi dalam catatan sejarah peradaban Islam hubungan antara kedua komunitas ini pernah sangat harmonis dalam rentang waktu yang cukup panjang (Bagir, 2015).

Kronologis Kekerasan

Kekerasan sektarian terhadap komunitas Syiah ini terjadi di dua desa, yakni Desa Karang Gayam, dusun Nangkreneng, dan desa Karang Penang, dusun Gading Laok, Kabupaten Sampang Madura. Setidaknya sejak tahun 2007 sampai 2012 terdapat empat kali peristiwa kekerasan terhadap pengikut Syiah, sebagai berikut (Kontras Surabaya, 2012)⁷:

Peristiwa pertama, Pada Februari 2007, Tajul Muluk, pemimpin komunitas Syiah, mengadakan maulid nabi bersama keluarga dan para santrinya di rumahnya, kegiatan ini mengundang sejumlah ustadz Syiah dari luar Sampang. Sebelum acara dimulai, ribuan orang dari beberapa desa yang bersenjata tajam, kayu dan pentungan memblokir jalan masuk dan mengintimidasi peserta maulidan yang datang. Acara ini tetap berlangsung dibawah penjagaan ketat aparat. September 2009, eskalasi konflik meningkat, ratusan massa anti-syiah bergerak mengepung Nangkreneng yang dipicu oleh ketidakmaun Tajul menghadiri pertemuan yang diinisiasi dalam rangka membahas keberatan para ulama atas keberadaan Syiah di Nangkreneng. Pada bulan Oktober, PC NU Sampang mengadakan pertemuan bersama ulama dan Muspika Kecamatan Omben untuk membahas keberadaan aktivitas dakwah Tajul Muluk dan pengikut Syiah. Hasilnya, dalam keadaan terpojok Tajul menandatangani pernyataan tentang kesesatan Syiah, dan berhenti menjalankan aktivitas dakwahnya.

⁷ Kronologis ini, penulis susun dari Laporan Kontras Surabaya (2012) <<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Laporan-Investigasi-Syiah-di-Sampang.pdf>>

Peristiwa kedua, Pada Februari 2011, Tajul beserta jamaahnya kembali berencana mengadakan peringatan Maulid Nabi di pasantrennya. Seperti kejadian sebelumnya, ribuan massa ribuan massa kembali menutup akses masuk ke Desa Karang Gayam, aksi ini dimotori oleh BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura), pemicunya jelas Tajul dianggap tidak patuh terhadap pernyataan sebelumnya. Setelah kejadian itu menyusul sejumlah pertemuan antar ulama, diantaranya melibatkan pemerintah dan pihak kemanan (kepolisian), yang intinya berupaya merelokasi Tajul keluar dari Madura. Puncaknya adalah pada April 2011 pertemuan para ulama beserta pemerintah dan pihak kepolisian, yang menghasilkan dukungan kepolisian terhadap tuntutan ulama bahwa Tajul akan direlokasi keluar Madura. Dengan terpaksa, Tajul memutuskan untuk pergi ke Malang.

Peristiwa Ketiga, karena merasa keadaan kampung halamannya sudah cukup kondusif Tajul memutuskan pulang secara diam-diam pada Juli 2011 namun diketahui oleh warga anti-syiah, ia lalu diamankan oleh pihak kepolisian. Provokasi-provokasi terhadap komunitas Syiah tetap dilancarkan oleh tokoh agama anti-Syiah. Puncaknya adalah, 29 Desember 2011 ratusan orang dari desan Omben dan Karang Penang menyerbu kompleks pesantren milik Tajul di Dusun Nangkrengan. Sambil mengumandangkan takbir, massa membakar musala, madrasah, asrama, dan rumah Tajul Muluk. Sebelumnya, pada 18 Desember 2011, rumah salah seorang pengikut aliran Syiah, Mat Siri, di Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, dibakar.

Peristiwa Keempat, ini adalah peristiwa paling tragis sebab menimbulkan korban jiwa, warga syiah yang sedang merayakan lebaran ketupat pada 26 Agustus 2012 (tradisi keagamaan di Madura) tiba-tiba diserang oleh ratusan orang. Pangkalnya adalah percekocokan antara warga Syiah dengan kelompok anti-Syiah yang memblokir iring-iringan warga Syiah yang mengantar anak-anaknya kembali ke pesantren-pesantren di Jawa setelah liburan. Hammah (warga Syiah) tewas dibacok dalam perkelahian itu.

Tragisnya, peristiwa pembantaian Hammah itu terjadi di depan mata anaknya sendiri.

Kekerasan Sektarian: Efek In/Out Group

Setelah meninggalnya Kiai Makmun (ayah sekaligus 'benteng' Tajul dalam menyebarluaskan ajaran Syiah), teror terbuka terhadap warga Syiah semakin menjadi-jadi. Pada pertengahan tahun 2005, KH. Ali Karrar Sihanji (seorang kiai yang sangat berpengaruh di Sampang) menginisiasi pengajian akbar di Desa Karang Gayam yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dan para kiai dari kecamatan Omben. Nampaknya, tabliq akbar ini menjadi semacam digunakan untuk sebagai 'deklarasi' menentang komunitas Syiah (Kontras Surabaya, 2012).

Sejumlah dalil, interpretasi dan narasi teologis disebarluaskan dengan massif oleh para kiai tersebut, misalnya pada tahun 2006, sekitar 50-an ulama se-Madura mengeluarkan pernyataan yang secara umum menyatakan bahwa ajaran Syiah adalah sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan Islam, ajaran orang-orang Syiah ini syarat dengan kebencian dan penghinaan terhadap para istri dan sahabat nabi, mendustakan semua ulama yang di luar Syiah, mengajak masyarakat untuk menghindari tipu muslihat orang-orang Syiah ini, dan meminta kepada pemerintah untuk menghapus ajaran tersebut hingga keakar-akarnya (R, 2012). Akibatnya adalah perpecahan ditingkat *grassroot* menjadi tak terhindarkan, jalinan sosial masyarakat (yang sesungguhnya homogen secara profesi – rata-rata petani) koyak, bahkan hubungan persaudaraan pun rusak. Setiap kali ada hajatan pada masing-masing kubu, situasi curiga-mencurigai terjadi. Dalam rentang waktu tersebut, *stereotyping* terhadap Tajul dan komunitas Syiah pun mengemuka. Tajul dikesankan sebagai pembawa ajaran sesat di Karang Gayam dan Blu'uran yang telah menipu masyarakat, pelanggar HAM (dalam arti 'mengubah' kepercayaan masyarakat) dan biang kerok kerusuhan (Afdillah, 2013).

Para kiai ini juga menggunakan jaringan kultural diantara mereka untuk memperkuat sentimen dan pengkafiran terhadap

Syiah (*out-group*) ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa bulan setelah peristiwa kekerasan kedua terjadi, MUI se-Madura secara resmi mengeluarkan sikap, yakni: 1) *Kami, MUI se-Madura, menyatakan bahwa aliran Syiah yang ada di Karang Gayam itu sesat, dan;* 2) *Kami, MUI se-Madura, meminta kepada pemerintah agar Tajul Muluk segera direlokasi.* Upaya ini didorong sampai pada tingkat regional, yang menghasilkan fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan ajaran Syiah dan mendorong fatwa yang sama di tingkat pusat sebab hal tersebut merupakan aspirasi dari bawah.

Perlu ditekankan di sana bahwa secara umum terdapat kekhususan kultural, terutama dalam praktek keagamaan. Ketundukan dan kepasrahan hirarkis terhadap figur agama adalah norma dalam kehidupan keseharian mereka. Oleh karenanya, pengabaian atau pelanggaran yang dilakukan secara disengaja atas aturan itu menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi sosial maupun kultural (Hamdi, 2012). Bagi orang-orang Madura, kiai merupakan jaminan atas persoalan-persoalan moral dan akhirat. Kuntowijoyo bahkan menyebut kiai Madura dengan elit desa. Dari sini terlihat jelas betapa kiai merupakan tokoh sentral dalam praktek keagamaan orang Madura. Maka tidaklah mengejutkan, justifikasi-justifikasi agama yang dilancarkan oleh para kiai ini terhadap komunitas Syiah bisa dengan mudah menyebar menjadi sentimen/prasangka buruk ditingkat bawah, yang berujung pada mobilisasi-mobilisasi aksi kekerasan.

Selain itu, terdapat semacam norma umum ajaran keagamaan di Madura, untuk memegang teguh pada tradisi dan ajaran Islam yang telah turun-temurun diajarkan oleh generasi awal pembawa Islam di Madura. Kenyataan bahwa orang-orang Madura 'diwajibkan' untuk belajar Islam di pasantren-pasantren yang memiliki afiliasi kekerabatan dengan kiai-kiai yang merupakan keturunan dari generasi pertama tadi, atau setidaknya-tidaknya pasantren diluar Madura yang memiliki geneologi keilmuan yang sarupa dengan ulama-ulama Madura, menjelaskan fenomena tersebut.

Dalam konteks sedemikian, kemunculan Syiah di Sampang dianggap sebagai *out-group* yang bertentangan dan menjadi

ancaman atas *common values* (tradisi Islam Madura) yang sudah begitu megakar tersebut. Kehadiran orang-orang Syiah tak lain dan tak bukan adalah 'pengganggu' terhadap stabilitas sosio-keagamaan yang ada. Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam banyak kesempatan, para ulama anti-Syiah ini meminta Tajul Muluk untuk kembali memeluk ajaran *Ahlusunnah wal jamaah (in-group)*. Ketika hal tersebut tidak tercapai maka kelompok yang berbeda tersebut mesti 'dihapuskan sampai keakar-akarnya'. Artinya, kekerasan terhadap komunitas Syiah adalah sesuatu yang pantas dan dapat dibenarkan secara teologis oleh kelompok anti-Syiah.

Lebih lanjut, ancaman terhadap tradisi ini juga sebetulnya berhubungan dengan metode dakwah Tajul, yang menggabungkan urusan-urusan akhirat dan duniawi. Tajul dianggap banyak membantu kehidupam ekonomi masyarakat disekitarnya, sehingga mendapatkan simpati yang luas. Tajul mengubah tradisi Maulid yang cukup memberatkan masyarakat, dari *door-to-door* menjadi terpusat di masjid desa. Warga hanya diminta sekitar 20ribu rupiah untuk acara tersebut dan selebihnya digunakan untuk keperluan pengajian selanjutnya. Kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat mambantu. Soalnya tradisi Maulid (pada bulan rabiul awanl) sudah menjadi semacam ritual wajib yang mesti diselenggarakan oleh masyarakat di tiap-tiap rumah, sehari bisa tiga sampai lima kali acara Maulidan ini dilakukan di rumah yang berbeda. Tentu saja ini cukup memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Maka, muncul simpati yang luas dari masyarakat terhadap Tajul, dan menjadi faktor penting yang membuat perlahan tapi pasti Tajul memiliki pendukung yang kuat dan loyal. Tentu saja hal ini bisa dipandang sebagai 'perlawanan' terhadap otoritas para kiai lainnya yang sudah mapan. Tajul bahkan menghimbau kepada pengikutnya untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah-madrasah milik para kiai, dan lebih mengutamakan sekolah-sekolah negeri sebab lebih professional. Tajul juga aktif mengadvokasi problem masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah desa dan dusun, bahkan membentuk FMB (Forum Masyarakat Desa)

dalam rangka itu. Ada tiga isu yang aktif ia advokasi, yakni: a) penyaluran program subsidi pemerintah, yang tersendet sampai ditingkat kepala desa, b) praktek rente dalam pembuatan KTP oleh birokrasi desa, dan; c) masalah sertifikasi tanah yang berlarut-larut. (Afdillah, 2013) Hal ini, tentu saja, membuat Tajul tidak hanya berhadapan dengan otoritas keagamaan saja, tetapi juga politik.

Dalam konteks tersebut, Tajul berada pada posisi yang secara tidak langsung 'menentang' legitimasi tokoh dan kelompok dominan di Sampang. Ketika seorang Tajul Muluk berhasil membangun sebuah komunitas baru dengan nilai-nilai yang berbeda, maka kehadirannya bisa dianggap sebagai upaya untuk mendelegitimasi basis otoritas sejumlah kiai. Sebagai kelompok yang superior, kiai-kiai ini (BASSRA, NU dan MUI) berusaha keras agar nilai-nilainya tetap kokoh, lalu mengemukakan narasi-narasi kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok Syiah, narasi-narasi ini berfungsi dalam derajat tertentu mengandaikan sebuah 'perang suci' terhadap kelompok Syiah.

Kesimpulan

Dari eksplorasi di atas kita dapat mengidentifikasi setidaknya dua hal yang menjadi faktor pendorong konflik dan kekerasan komunitas Sunni-Syiah tersebut. *Pertama*, faktor tak langsung, yakni menajamnya rivalitas geopolitik antara Saudi dan Iran di Kawasan Timur Tengah yang kemudian tereduksi sedemikian rupa menjadi semata-mata narasi permusuhan antara mazhab di negeri-negeri muslim lainnya, termasuk Indonesia. Bukan sebuah kebetulan jika meningkatnya ketegangan identitas tersebut di Indonesia (termasuk kasus Sampang) berkembang beriringan dengan makin masifnya narasi permusuhan antara mazhab sebagai akibat dari rivalitas tersebut. Narasi sektarianisme yang berkembang di Timur Tengah meluas dan masuk ke pelosok-pelosok tanah air sehingga memperkuat identitas dirinya sebagai Sunni sekaligus meminggirkan mereka yang Syiah.

Kedua, faktor tokoh agama di tingkat lokal. Perlu diingat bahwa konflik tidak selalu berakhir dengan kekerasan. Peristiwa

kekerasan tersebut merupakan implikasi dari berkembangnya narasi-narasi permusuhan yang dieksplisitkan secara massif oleh sejumlah aktor (tokoh agama). Sampai pada titik di mana komunitas Syiah tidak hanya dipandang sebagai ancaman tetapi juga perlu untuk disingkirkan. Posisi sosio-kultural tokoh agama yang sangat vital dalam masyarakat Madura memungkinkan mobilisasi-mobilisasi akar rumput sulit dihindari sehingga memicu kekerasan. Situasi ini diperparah dengan aktivisme Tajul yang seringkali dianggap 'mengganggu' struktur kekuasaan lokal.

Kekerasan sektarian ini seharusnya bisa dihindari apabila masing-masing pihak mampu mengelola perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara damai. Hal ini tentu saja membutuhkan itikad damai yang kuat, pemahaman yang utuh serta terbuaknya ruang-ruang komunikasi dan rekognisi antara sesama. Apalagi, seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, dalam banyak catatan sejarah hubungan kedua komunitas tidak selamanya bersifat konfliktual, melainkan bersifat harmonis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Situasi konfliktual tidak berdiri sendiri melainkan dikondisikan oleh proses politik yang ada. Bagaimanapun juga kedua tradisi ini turut mewarnai wajah Islam di Indonesia dalam sejarahnya. Abdurrahman Wahid, seorang ulama NU, dalam suatu kesempatan berusaha untuk mengurai perbedaan-perbedaan tersebut dengan menggambarkan bahwa wajah NU adalah 'Syiah minus Imammah'. Pada tahun 2004, lebih dari 200 ulama di seluruh dunia berkumpul di Amman Yordania dalam semangat persatuan Islam, mengeluarkan sebuah fatwa penting (dikenal dengan *Amman Message*), yakni pengakuan delapan mazhab dalam Islam, termasuk Syiah (*Amman Message*, 2004)⁸. Ini adalah basis teologis penting agar perbedaan-perbedaan tersebut tidak berakhir menjadi kekerasan sektarian.

⁸ Risalah ini terdiri dari tiga poin, yakni (1) pengakuan delapan mazhab Islam dan tiga tradisi teologis; (2) melarang penyebutan kafir sesama Muslim, dan; (3) penentuan dasar mengeluarkan fatwa sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut penggalan teks risalah poin pertama: "(1) *Whosoever is an adherent to one of the four Sunni schools (Mathahib) of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali), the two Shi'i schools of Islamic jurisprudence (Ja'fari and Zaydi), the Ibadi school of Islamic jurisprudence and the Thahiri school of Islamic jurisprudence, is a Muslim. Declaring that person an apostate is impossible and impermissible. Verily his (or her) blood, honour, and property are inviolable....*"

Daftar Pustaka

- Abdalla, U. A. (2013). *Kenapa Terjadi Kekerasan Atas Nama Agama?* Jakarta. Retrieved from <http://www.suarakita.org/wp-content/uploads/2013/06/Kenapa-terjadi-kekerasan-atas-nama-agama.pdf>
- Afdillah, M. (2013). *DARI MASJID KE PANGGUNG POLITIK; Studi Kasus Peran Pemuka Agama dan Politisi dalam Konflik Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur* (Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/63764>
- Amman Message. (2004). Amman Message. Retrieved November 2, 2022, from <https://ammanmessage.com/the-three-points-of-the-amman-message-v-1/>
- Bagir, H. (2015, December 1). WAWANCARA – HB: Sejarah Sunni-Syiah, Sejarah Perdamaian. Retrieved November 2, 2022, from IslamIndonesia website: <https://islamindonesia.id/wawancara/wawancara-hb-sejarah-sunni-syiah-sejarah-perdamaian.htm>
- Fauzi, I. A. (2013). *Ambivalensi sebagai peluang Agama, Kekerasan, Upaya-upaya Perdamaian*. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel. (Surabaya). Retrieved from [//10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D89874%26keywords%3D](http://10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D89874%26keywords%3D)
- Haddad, F. (2011). *Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Hamdi, A. Z. (2012). Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi 'i Sampang Madura. *Islamica Jurnal Studi Keislaman* (6), 2, 215–231.
- Kontras Surabaya. (2012). *Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang*. Surabaya.
- Matthiesen, T. (2013). *Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn't*. Stanford University Press. Retrieved from <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=7d468fec40e6f46211042bd4bbd6f1c5>

- Matthiesen, T. (2014). *The Other Saudis: Shiism, Dissent and Sectarianism*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107337732>
- Powell, R., & Clarke, S. (2013). Religion, Tolerance, and Intolerance: Views from Across the Disciplines. In S. Clarke, R. Powell, & J. Savulescu (Eds.), *Religion, intolerance, and conflict*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199640911.003.0001>
- R, A. (2012, January 3). 50 Ulama Telah Peringatkan Ajaran Tajul Muluk. Retrieved November 2, 2022, from Hidayatullah.com website: <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/01/03/34062/50-ulama-telah-peringatkan-ajaran-tajul-muluk.html>
- Setiawan, K. (2012, September 2). Bagaimana Kronologi Syiah Masuk Sampang? Retrieved November 2, 2022, from Tempo website: <https://nasional.tempo.co/read/426989/bagaimana-kronologi-syiah-masuk-sampang>
- Wahid Institute. (2015). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoleransi: Utang Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta. Retrieved from <http://wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan%20kbb%202014%20-%20the%20wahid%20institute.pdf>
- Watch, H. R. (2013). Atas Nama Agama Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia. *USA: Human Rights Watch*.

MEMAHAMI G20 SEBAGAI INFORMAL *INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION*

Nurul Aulia

Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas tentang G20 sebagai *informal intergovernmental organization* dan menjelaskan mengapa negara *middle power* seperti Indonesia berpartisipasi dalam organisasi ini. Pertama, tulisan ini akan menjelaskan tentang pandangan perspektif arus utama studi Hubungan Internasional tentang Organisasi Internasional. Kemudian, tulisan ini akan menjelaskan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh *formal intergovernmental organization* dan *informal intergovernmental organization*. Setelah itu, tulisan ini akan menguraikan sejumlah argumen terkait mengapa negara *middle power* seperti Indonesia berpartisipasi dalam organisasi internasional informal seperti G-20.

Organisasi Internasional sangat lekat dalam kajian ilmu Hubungan Internasional. Organisasi internasional dibentuk oleh negara-negara Eropa saat revolusi industri terjadi, dengan tujuan untuk mempermudah hubungan antar negara dalam berbagai aktivitas. *Concert of Europe* dan *the Hague System* yang terbentuk pada abad ke-19 adalah cikal bakal organisasi internasional yang bersifat multilateral (Park, 2020:324). *Union of International Association* (2018) mencatat bahwa di tahun 2018 terdapat 7,726 organisasi internasional

antarpemerintah. Dengan jumlah yang cukup masif ini, maka penting untuk memahami perkembangan dan kompleksitas dalam organisasi internasional di era kontemporer saat ini.

Organisasi Internasional dalam Teori Hubungan Internasional (HI)

Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu HI melihat teori sebagai seperangkat ide yang menyederhanakan dunia yang kompleks dan membantu untuk mengidentifikasi beragam pendorong dan aktor kunci dalam hubungan internasional (Hurd, 2014). Penstudi Hubungan Internasional menggunakan teori untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi beragam aspek dalam hubungan internasional (Karns, Mingst, Stiles, 2015). Tulisan ini akan menjelaskan pandangan Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme terhadap organisasi internasional.

Realisme memandang suram politik internasional dan melihat skeptis terkait organisasi internasional. Bagi realisme, hubungan internasional erat kaitannya dengan 'power'. Negara merupakan aktor yang memiliki kemampuan mengakumulasi 'power' melalui pengembangan militer, penarikan pajak, dan mengeluarkan mata uang (Barkin, 2009). Sementara itu, organisasi internasional tidak dapat melakukannya. Organisasi internasional tidak bisa lepas dari negara dan agar dapat berhasil menjalankan tujuannya maka organisasi internasional membutuhkan sokongan dari negara. Bagi realisme, organisasi internasional hanya sebatas alat bagi negara untuk meningkatkan kekuatannya dan organisasi internasional merefleksikan kepentingan dari *great powers* (Mearsheimer, 1994). Dengan demikian, bagi Realisme, fokus pada organisasi internasional sebagai aktor yang independen menjadi kurang relevan.

Organisasi internasional berkaitan dengan kerja sama antar negara. Meskipun realisme memandang bahwa pada dasarnya negara di dunia saling berkompetisi, namun tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama. Kerja sama mungkin saja tercapai namun sulit untuk mempertahankannya (Mearsheimer, 1994). Terdapat dua faktor yang menghambat kerja sama terbentuk, yaitu pertimbangan untuk-rugi yang diperoleh dan kekhawatiran

terhadap adanya kecurangan (Grieco, 1988). Pertama, ketika negara mempertimbangkan kerja sama maka negara tersebut tidak hanya memikirkan pada keuntungan yang akan diperoleh namun juga memperbandingkan keuntungan yang diperolehnya dengan pihak lawan yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Negara akan bekerja sama ketika ia mendapatkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan negara lain. Kedua, negara cenderung enggan untuk bekerja sama dalam suatu perjanjian yang mengikat karena takut bahwa pihak lain akan melanggar perjanjian tersebut (Lipson, 1984).

Teori Liberalisme berpandangan bahwa sifat dasar manusia adalah baik. Ketidakadilan dan peperangan adalah produk dari ketidaksepahaman antara pemimpin negara. Oleh karena itu, konflik dan peperangan dapat dihilangkan melalui aksi kolektif dan memperbaiki institusi. Liberalisme juga melihat bahwa manusia sebagai individu adalah aktor kunci sehingga negara bukanlah aktor yang monolitik, namun pluralistik. Dengan demikian, kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari pengaruh aktor domestik dalam negara tersebut (Hurd, 2014). Negara memiliki beragam kepentingan nasional dan tidak jarang kepentingan tersebut akan berubah-ubah (Mingst, Karns, Stiles, 2015). Liberalisme berasumsi bahwa negara berpartisipasi dalam organisasi internasional untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi internasional dipandang hanya sebatas badan fungsional bagi negara untuk memperoleh kepentingannya. Liberalisme memandang bahwa organisasi internasional sebagai arena bagi negara untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama (Mingst, Karns, Stiles, 2015). Organisasi internasional menjadi arena bagi negara untuk bernegosiasi dan membangun koalisi. Selain itu, organisasi internasional menjadi instrumen politik luar negeri negara untuk mencegah atau menghambat perilaku agresif negara lain. Martin & Simmons (1994) menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat efektif untuk mencegah negara yang ingin membelot dari kerja sama. Organisasi internasional menyediakan arena, aturan dan prosedur bagi negara untuk saling berinteraksi sehingga tatanan internasional

yang stabil dapat tetap terjaga. Dengan demikian, seluruh negara dapat diuntungkan dalam kerja sama internasional melalui *collective action* (Keohane, 1984).

Teori Konstruktivisme terutama dalam karya Barnett & Finnemore (1999, 2004) fokus pada kemampuan organisasi internasional untuk menggunakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku negara. Bagi konstruktivisme, sumber 'power' dari organisasi internasional berasal dari otoritas yang diklaim melalui keahlian yang dimiliki organisasi internasional tersebut (Barnett & Finnemore, 2005). Organisasi internasional menyediakan tempat bagi aktor pemerintah untuk melakukan proses sosialisasi dan pembelajaran tentang norma dan nilai baru. Dengan adanya proses sosialisasi dan pembelajaran ini maka akan mendorong negara untuk mengubah kepentingan nasionalnya dari kepentingan yang bersifat sempit menjadi kepentingan yang lebih luas dan dapat diterima secara global (Finnemore, 1996).

Kemudian, organisasi internasional juga membantu negara untuk mempromosikan agenda kebijakan luar negerinya. Organisasi beroperasi sebagai sebuah forum kebijakan yang memberikan tempat bagi negara untuk terlibat dalam diskusi kebijakan. Organisasi internasional menjadi '*sounding board*' bagi negara untuk mendiseminasikan idenya (Nay, 2014). Dalam menganalisis tentang organisasi internasional, Konstruktivisme melihat interaksi sosial antar aktor dan juga norma utama yang mengatur perilaku negara dalam organisasi internasional. Organisasi internasional dilihat sebagai agen dalam konstruksi sosial dan sebagai pembuat norma yang berupaya untuk mengubah perilaku sosial negara (Finnemore & Sikkink, 2001). Dengan demikian Organisasi Internasional bukan hanya sebatas alat dari negara, namun juga merupakan aktor yang independen dan memiliki pengaruh dalam hubungan internasional.

Spektrum dalam Organisasi Antar Pemerintah: *Formal Intergovernmental Organization & Informal Intergovernmental Organization*

Sejumlah literatur dalam studi ilmu Hubungan Internasional seringkali hanya melihat pada Organisasi Antarpemerintah yang bersifat formal. Barnett & Finnemore (2004) mendefinisikan organisasi internasional sebagai “*an organization that has representatives from three or more states supporting a permanent secretariat to perform ongoing tasks related to common purpose.*” Mingst, Karns & Stiles (2015) menyatakan bahwa Organisasi Antarpemerintah terdiri dari tiga negara atau lebih sebagai anggotanya, beroperasi di sejumlah negara dan memiliki kantor pusat kesekretariatan, dan memiliki perjanjian resmi berupa statuta, perjanjian, atau piagam. Kedua definisi di atas tidak sepenuhnya mencerminkan organisasi antarpemerintah seperti BRICS, G-20 ataupun G-7. Saat ini, *Informal Intergovernmental Organization* (IIGO) menjadi semakin penting dalam politik internasional. Kemunculan “G group”, BRICS (Brazil, Rusia, China, South Africa), MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, Argentina), AOASIS (Alliance of Small Island States) memperlihatkan contoh penting dalam memahami organisasi antarpemerintah. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa organisasi antarpemerintah dapat juga berbentuk informal.

Pada bagian ini akan membahas tentang dua spektrum dalam organisasi antarpemerintah, yaitu *Formal Intergovernmental Organization & Informal Intergovernmental Organization*. Karakteristik dan uraian kedua bentuk organisasi antarpemerintah ini akan dijelaskan berdasarkan tulisan dari Felicity Vabulas & Duncan Snidal (2013). Merujuk pada Pevehouse, dkk (2004), *Formal Intergovernmental Organization* didefinisikan sebagai (1) sebuah badan formal yang terbentuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang diakui secara internasional, (2) memiliki anggota negara tiga atau lebih, (3) memiliki sekretariat yang permanen atau memiliki kantor pusat dan/atau staf yang permanen. Sementara itu, Vabulas & Snidal (2013:197) mendefinisikan *Informal Intergovernmental Organization* sebagai (1) terbentuk bukan karena adanya perjanjian formal namun karena memiliki kesamaan ekspektasi terhadap tujuan tertentu

yang diutarakan secara eksplisit, (2) memiliki negara anggota yang menyatakan keanggotaannya secara eksplisit, (3) berpartisipasi dalam pertemuan reguler namun tidak memiliki sekretariat, kantor pusat, dan/atau staf permanen.

Para anggota *Informal Intergovernmental Organization* (IIGO) secara jelas memiliki ekspektasi yang sama terkait tujuan dari organisasi tersebut, meskipun berbentuk perjanjian formal. Kesamaan pandangan dan tujuan dapat diutarakan melalui pengumuman, pemberitaan resmi, ataupun laporan hasil pertemuan. IIGO mengadakan pertemuan secara reguler salah satunya untuk menjamin agar kesamaan pandangan terhadap tujuan organisasi tersebut selalu ada. Vabulas & Snidal (2013:198) menyatakan bahwa, meskipun masing-masing negara memiliki kesamaan tujuan namun motivasinya dalam berpartisipasi pada organisasi tersebut bisa saja beragam. Keanggotaan dari IIGO adalah negara namun tidak menutup kemungkinan keterlibatan aktor non-negara. Kendati demikian, negara memiliki peran dominan dalam IIGO tersebut. Dikarenakan IIGO tidak memiliki perjanjian resmi maka negara anggotanya tidak harus meyakinkan publik untuk berpartisipasi dan meratifikasi perjanjian dalam organisasi tersebut (Vabulas & Snidal, 2014).

Negara anggota IIGO melaksanakan pertemuan reguler untuk mendiskusikan isu yang menjadi perhatian bersama, berbagi informasi, membentuk konsensus, dan jika memungkinkan akan menyetujui rencana aksi bersama (Vabulas & Snidal, 2014). Pertemuan antar kepala pemerintah dalam IIGO memberikan kesempatan bagi para pemimpin negara tersebut untuk mendiskusikan masalah penting secara informal dan saling bertukar janji untuk bekerja sama secara informal. IIGO dapat menjadi instrumen penting untuk memperbaiki hubungan komunikasi antar negara yang memiliki hubungan kurang harmonis (Haftel, 2012).

Berbeda dengan FIGO yang memiliki sekretariat permanen untuk mengkoordinasikan tugas birokrasi organisasi tersebut, IIGO tidak memiliki sekretariat permanen. Negara anggotanya tidak membentuk sekretariat yang permanen karena negara anggota IIGO

tersebut memandang bahwa tidak perlu untuk mendelegasikan kapasitas dalam pengambilan keputusan yang independen kepada organisasi tersebut (Hawkins, et.al 2006). Alih-alih memiliki sekretariat yang permanen, banyak IIGO memberlakukan aturan rotasi kepemimpinan yang mana pemimpin IIGO tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pertemuan dan menyediakan fungsi kesekretariatan (Vabulas & Snidal, 2014).

Negara berpartisipasi dalam IIGO disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, IIGO bersifat lebih fleksibel jika dibandingkan dengan FIGO sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi negara. Dikarenakan sifatnya yang informal maka negara lebih mudah untuk melanggar komitmennya ketika situasi internasional menjadi lebih sulit diantisipasi. Kedua, negara berpartisipasi dalam IIGO karena negara tidak harus merelakan sebagian otonominya kepada sekretariat IGO. IIGO tidak menyediakan mekanisme untuk monitoring dan penegakan kesepakatan. IIGO hanya menyediakan arena bagi negara untuk bertukar informasi, bernegosiasi, dan berkoordinasi. Dengan begitu IIGO membantu negara untuk membentuk kesepahaman bersama dan mengkoordinasikan posisinya tanpa harus terbebani dengan komitmen formal, seperti yang ada pada FIGO. Ketiga, negara lebih mudah menjaga kontrol atas informasi negaranya dan antar negara anggotanya karena negara tidak menjadi subjek dari transparansi organisasi. Keempat, persetujuan informal dapat tercapai lebih cepat karena bersifat tidak mengikat dan tidak permanen. IIGO menjadi bermanfaat ketika situasi krisis terjadi dan mengharuskan para pemimpin negara bertindak cepat (Vabulas & Snidal, 2014:2011).

Studi Kasus: G20 sebagai IIGO dan Partisipasi Indonesia

G20 merupakan sebuah forum resmi yang bersifat informal, atau dapat dikatakan sebagai IIGO. G20 menjadi arena bagi negara untuk berinteraksi secara langsung, secara personal, namun bersifat informal untuk memecahkan sejumlah permasalahan global yang sulit dipecahkan. Dengan kata lain bahwa hanya isu-isu yang “sulit” saja yang akan didiskusikan oleh para pemimpin G20 dan

diharapkan isu-isu ini dapat didiskusikan. G20 dipandang sebagai arena yang paling potensial karena memberikan kursi bagi negara-negara ekonomi besar dunia untuk memecahkan masalah tanpa harus dibebani oleh birokrasi seperti yang ada di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau IMF (*International Monetary Fund*) (The Standley Foundation, 2011).

G20 hadir bukan karena adanya peperangan antar negara, namun dikarenakan ketidakstabilan ekonomi dunia. Asal mula G20 adalah dari pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 dalam merespon krisis finansial di Asia pada tahun 1999 (BI, 2020). Pada 1999, Menteri Keuangan Kanada dan Amerika Serikat menginisiasi pertemuan tersebut dan setelahnya dilangsungkan tiap tahun. Pada 2008, krisis keuangan global melanda dunia, sementara itu IMF, G8 serta pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 tidak mampu melakukan koordinasi dengan baik untuk merespon situasi tersebut. Oleh karena itu, situasi tersebut menjadi katalis di mana pertemuan G20 ditingkatkan menjadi pertemuan para pemimpin G20 pada November 2008 (Cooper & Thakur, 2013). Terlihat jelas bahwa G20 sebagai IIGO telah menjadi “pemecah masalah” dalam mengatasi situasi krisis kala itu.

Bagi *Global South*, legitimasi kehadiran G20 dapat dikatakan sebagai respon dari sentimen negara-negara *Global South* terhadap mekanisme dalam organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan IMF yang membuat keputusan yang berdampak bagi seluruh negara *Global South* tanpa adanya persetujuan dari negara-negara tersebut (The Standley Foundation, 2011). G20 juga menjadi jembatan dalam mempertemukan *Global South* dan *Global North*. Selain itu, karena berbentuk IIGO yang tidak memiliki sistem birokrasi seperti PBB atau IMF maka G-20 dipandang menjadi lebih efektif dalam menyediakan forum pertemuan negara-negara utama ekonomi dunia.

G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Keanggotaan G20 merepresentasikan 2/3 dari jumlah populasi dunia. PDB (Produk Domestik Bruto) dari negara-negara G20 setara dengan 80% PDB

dunia dan 75% dari perdagangan dunia berasal dari negara-negara G20. Keanggotaan G20 lebih beragam yang terdiri dari tiga entitas berbeda, yaitu kelompok negara-negara maju, kelompok negara *emerging economies*, dan kelompok negara-negara berkembang. Dalam pertemuan pemimpin G20 di Pittsburgh, 2009, dinyatakan bahwa salah satu harapan bersama dari negara-negara anggota G20 yang dituangkan dalam *G20 Leaders Statement* (University of Toronto, 2009), yaitu:

“To reform the global architecture to meet the needs of the 21st century. After this crisis, critical players need to be at the table and fully vested in our institutions to allow us to cooperate to lay the foundation for strong, sustainable and balanced growth. We designated the G20 to be the premier forum for our international economic cooperation.”

Dalam komunike, para anggota negara-negara G20 secara jelas menyatakan tujuan dalam G20 sebagai sebuah forum kerja sama antar negara dalam bidang ekonomi. Selain itu, adanya keinginan untuk mereformasi arsitektur global agar dapat lebih sesuai dalam menanggapi tantangan-tantangan baru di abad ke-21. Sebagai IIGO, G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Untuk menyiasatinya maka G20 memiliki presidensi yang salah satu tugasnya adalah menjadi penyelenggara rangkaian pertemuan G20 selama satu tahun penuh. G20 juga memiliki sistem Troika yang terdiri dari “negara presidensi berjalan, negara presidensi sebelumnya, dan negara presidensi berikutnya” yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pertemuan G20 (G20.org, 2022).

Pada 2022, Indonesia menduduki presidensi di G20. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Indonesia saat ini juga dikategorikan sebagai kekuatan pasar baru (*new established emerging market*) dengan PDB di atas US\$1 Triliun (G20.org, 2022). Sebagai *middle power* dan *emerging economies*, Indonesia memiliki kapasitas untuk berperan sebagai narahubung antara negara-negara maju dan negara berkembang. Indonesia memainkan peran kunci dalam G20 untuk membawa pesan dari

negara-negara ASEAN khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya.

Terdapat sejumlah manfaat strategis dalam keanggotaan Indonesia di dalam G20. Kementerian Keuangan RI (2022) menyatakan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan G20 untuk membahas isu-isu global. Dalam presidensinya, tiga isu prioritas dari pemerintah Indonesia, yaitu (1) Arsitektur Kesehatan Global, (2) Transformasi Digital dan Ekonomi, (3) Transisi Energi Berkelanjutan. Kemudian, Indonesia juga dapat memperlihatkan kemampuannya sebagai pemimpin dalam membentuk dan mendukung kebijakan di level internasional (Sushanti, 2019, Kementerian Keuangan RI, 2022).

Kesimpulan

Organisasi internasional menjadi salah satu fokus kajian dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Saat ini terdapat lebih dari 7,000 organisasi internasional antarpemerintah. Dalam interaksinya di tingkat internasional, Indonesia berpartisipasi di sejumlah organisasi internasional, termasuk G20. Dalam tipologi Organisasi Internasional, G20 dapat dikategorikan sebagai *Informal Intergovernmental Organization* (IIGO). Dengan karakteristiknya sebagai IIGO, G20 menjadi relevan untuk mengatasi isu-isu internasional. Indonesia sebagai negara anggota G20 juga melihat bahwa G20 mempunyai posisi strategis dalam arsitektur tata kelola internasional dan memperkuat posisi Indonesia di level global.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia (2020) *Presidensi G20 Indonesia 2022*. Diakses pada [https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx#:~:text=Sejarah%20Pendirian%20G20,-Dibentuk%20pada%201999&text=G20%20pada%20awalnya%20merupakan%20pertemuan,Jalur%20Sherpa%20\(Sherpa%20Track\)](https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx#:~:text=Sejarah%20Pendirian%20G20,-Dibentuk%20pada%201999&text=G20%20pada%20awalnya%20merupakan%20pertemuan,Jalur%20Sherpa%20(Sherpa%20Track).).

- Barkin, S. (2006) *International Organization: Theories and Institutions*. Palgrave Macmillan.
- Barnett, M., Finnemore, M. (2005) *Roles for the World: International Organization in Global Politics*. Cornell University Press.
- Cooper, A. F., & Thakur, R. (2013). *The group of twenty (G20)*. Routledge.
- Finnemore, M., (1996) "Constructing Norms of Humanitarian Intervention." Dalam Peter J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. Columbia University Press.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (2001). Taking stock: the constructivist research program in international relations and comparative politics. *Annual review of political science*, 4(1), 391-416.
- G20.org (2022) *G20pedia*. Diakses pada <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/53830b3e-a257-4a06-ae33-681a404eace7>
- Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism. *International organization*, 42(3), 485-507.
- Haftel, Y. Z. (2012). *Regional economic institutions and conflict mitigation: Design, implementation, and the promise of peace*. University of Michigan Press.
- Hawkins, D. G., Lake, D. A., Nielson, D. L., & Tierney, M. J. (Eds.). (2006). *Delegation and agency in international organizations*. Cambridge University Press.
- Martin, L. L., & Simmons, B. A. (1998). Theories and empirical studies of international institutions. *International organization*, 52(4), 729-757.
- Karns, M.P., Mingst, K.A., & Stiles, K. W. (2013). *International organizations: the politics and processes of global governance* (3rd Eds). Lynne Rienner Publisher.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Februari 21). *Manfaat Presidensi G20 Bagi Indonesia*. Diakses pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/14750/Manfaat-Presidensi-G20-Bagi-Indonesia.html>
- Keohane, Robert O. (1984) *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.

- Lipson, C. (1984). International cooperation in economic and security affairs. *World Politics*, 37(1), 1-23.
- Mearsheimer, J. J. (1994/95). The false promise of international institutions. *International Organization*, 19(3), 237-282.
- Nay, O. (2014). International organisations and the production of hegemonic knowledge: How the World Bank and the OECD helped invent the fragile state concept. *Third World Quarterly*, 35(2), 210-231.
- Pevehouse, J., Nordstrom, T., & Warnke, K. (2004). The Correlates of War 2 international governmental organizations data version 2.0. *Conflict Management and Peace Science*, 21(2), 101-119.
- Sushanti, S. (2019). Aktualisasi Indonesia Dalam G20: Peluang Atau Tren. *Jurnal Ilmiah Widya Sosio politik*, 1(1), 1-14.
- The Standley Foundation (2011) 'Rivalry and Partnership – The Struggle for a New Global Governance Leadership' *Policy Dialogue Brief* (Muscatine, IA), diakses pada <https://stanleycenter.org/publications/rivalry-and-partnership-the-struggle-for-a-new-global-governance-leadership/>
- Union of International Organizations (2018), *Yearbook of International Organizations, 2018–2019*, Munchen: K.G. Saur.
- University of Toronto (2009) *G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit*, G20 Information Centre. Diakses pada <http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#economy>
- Vabulas, F., & Snidal, D. (2013). Organization without delegation: Informal intergovernmental organizations (IIGOs) and the spectrum of intergovernmental arrangements. *The Review of International Organizations*, 8(2), 193-220.

REFLEKSI TIGA INDEKS DI NEGARA G20

Retno Susilowati

Pendahuluan

Di bulan November 2022, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali, sebagai konsekuensi terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk tahun 2022 di Itali tahun 2021. Ditengah berbagai keresahan yang sedang dirasakan oleh sebagian penduduk, adanya kenaikan BBM yang memicu kenaikan harga di sejumlah barang kebutuhan pokok dan barang-barang sekunder lainnya, isu pandemic lain setelah Covid 19 mereda, pemerintah tak kalah risau dengan kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu, sudah merebak isu global bahwa tahun 2023 adalah tahun yang amat sulit ditebak perkembangan ekonomi dunia. Sosok G20 identik sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, berkeinginan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang, antar negara maju dan negara berkembang, serta menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya. Pertumbuhan ekonomi masih sangat dipuja dan diposisikan sangat penting untuk diprioritaskan.

Menarik untuk disimak lebih jauh apakah pertumbuhan ekonomi yang baik, juga akan membawa manfaat yang positif bagi kualitas hidup manusia dan tidak memarginalkan sebagian penduduknya dalam memanfaatkan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik

merupakan prasyarat untuk membangun kualitas manusia kearah yang lebih baik, dan sebaliknya modal kualitas sumber daya manusia merupakan potensi untu meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tiga indeks yang dimaksud dalam tulisan ini adalah *Human Development Index (HDI)*, *Gender Development Index (GDI)*, dan *Gender Inequality Index (GII)*. Ketiga indeks tersebut kembangkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) dengan tujuan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan manusia dan juga perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Di Indonesia, indeks ini dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Pentingnya menyusun catatan akan capaian indeks dimaksudkan untuk memberi sebagian jawaban atas pertanyaan “benarkah pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas hidup manusia?”

Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang kemudian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Sejalan dengan definisi tersebut, pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi menurut Badan PAmerika Serikatt Statistik (BPS) adalah seperangkat Amerika Serikatha dan kebijakan yang ditujukan agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan secara adil, dan berupaya menggerakkan proses kegiatan ekonomi dari sektor sekunder ke sektor primer dan tersier. Maka sangat dimungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, akan berdampak pada pembangunan manusianya semakin baik, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi sering diidolakan sebagai prioritas pembangunan di kancah global, namun pertumbuhan ekonomi sendiri memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya dari sisi kuantitas saja. Menurut ibu Menteri keuangan.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia memiliki modal awal seperti letak geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sistem politik. Keunggulan dalam hal kuantitas penduduk juga harus diikuti dengan kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat dinilai melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)” (Mulyani, 2017).

Bertujuan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia UNDP mengembangkan *HDI* dengan 3 indikator sejak tahun 1990, menjadi acuan semua negara untuk memotret kualitas hidup manusia. Dikutip dari Badan PAmerika Serikatt Statistik, Definisi dari IPM adalah proses perluasan pilihan bagi para penduduk. IPM dibuat dengan bertujuan untuk mengukur berapa pencapaian hasil pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan. Adapun ketiga dimensi dasar pembangunan tersebut adalah lamanya hidup, tingkat pendidikan dan standard hidup layak. Angka IPM ini kemudian akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau daerah, maka angka tersebut menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik (BPS, 2020).

Akan tetapi, capaian IPM masih belum menggambarkan secara terpilah antara perempuan dan laki-laki, sehingga belum terlihat jelas apakah hasil-hasil pembangunan telah meningkatkan kualitas hidup antara kedua jenis kelamin secara seimbang. Oleh karena itu, pada tahun 1995 UNDP juga mengembangkan *GDI (Gender Development Index) is a Ratio of female to male HDI values*, indeks ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti *HDI/IPM*, tetapi juga menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Skor indeks antara 0 s/d 1 semakin tinggi indeks semakin berkualitas pembangunan manusia. Capaian skor *GDI* akan dikelompokkan kedalam 5 group (UNDP, 2022). Pengelompokan ke dalam 5 group sesuai dengan capaian rasio indeks IPM perempuan dan laki-laki. Group 1 adalah negara

dengan *GDI* sangat baik, dan group 5 adalah negara dengan *GDI* sangat tidak baik.

Indeks lain yang sering digunakan untuk menganalisis apakah terjadi ketidakadilan gender dalam suatu negara atau wilayah, *UNDP* juga telah mengembangkan *Gender Inequality Index (GII)*. Isu keadilan gender menguat setelah deklarasi *Beijing Platform Of Action* yang resmi menjadi rezim internasional, dalam publikasi Dalam *Human Development Report (HDR)* tahun 1995 telah mengangkat tema mengenai gender (Kemen PPPI, 2020). Munculnya isu ketidakadilan gender ini didasarkan atas masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia adanya diskriminasi dan marginalisasi perempuan pada proses pembangunan dibandingkan laki-laki. Jika masih terjadi marginalisasi pada kelompok masyarakat tertentu termasuk kelompok perempuan, maka disitulah hadir ketidakadilan gender (*Gender inequality*). *Beijing Platform Of Action* adalah penegasan kembali bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan sesuai dengan *CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*.

Konvensi telah menjadi rezim internasional dan telah diratifikasi 189 negara di dunia. Sejarah panjang *CEDAW* dimulai semenjak tahun 1947 disaat PBB membentuk *UN Commission on the Status of Women (CSW)* dengan tujuan sebagai badan untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan (Afriandi, Putri, & Harza, 2022). Tidak seperti 2 indeks sebelumnya, *Gender Inequality Index (GII): A composite measure reflecting inequality in achievement between women and men in three dimensions: reproductive health, empowerment and the labour market* (*UNDP, 2022*). Melihat tiga dimensi yang digunakan dalam *GII*, memang tidak sama dengan dimensi yang digunakan untuk mengukur *HDI dan GDI*, walaupun ketiga indeks tersebut semuanya dikembangkan oleh *UNDP*. Badan PAmerika Serikat Statistik Indonesia menterjemahkan *GII (Gender Inequality Index)* atau *IKG (Indeks Ketimpangan Gender)* sebagaimana namanya merupakan Indeks yang bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan

dalam tiga aspek pembangunan manusia sebagai akibat dari adanya ketimpangan gender. Besaran Indeks ini adalah antara 0 s/d 1. Semakin tinggi indeks maka menunjukkan semakin timpang pula capaian keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (BPS, 2020).

Potret Capaian HDI, GDI dan GII di Negara-negara G20

G20 merupakan suatu forum multilateral strategis yang menjadi penghubung antara negara-negara maju dan berkembang di dunia. Kelompok informal ini terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). Secara umum, tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif (Kristina, 2022). Negara-negara yang tergabung dalam G20, 'dianggap' memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang baik sekalipun tidak semua anggota G20 tergolong negara maju. Indonesia, Argentina, Afrika Selatan, Brazil, Turki dan Meksiko, merupakan negara yang masih tergolong negara berkembang dengan permasalahan yang masih mendera seperti rendahnya kualitas hidup penduduknya dan diantaranya memiliki populasi yang sangat besar tidak sebanding dengan kapasitasnya mengelola pembangunan ekonomi.

Tabel 1. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi, HD, GDII dan GII Negara Anggota G20

Negara	Rangking Pertumbuhan Ekonomi Dunia Menurut IMF	Rangking HDI Dunia	Group of GDI	Rangking GII Dunia
Tiongkok	2	4	1	48
Amerika Serikat	1	21	1	44
Rusia	11	52	1	50
Arab Saudi	18	35	4	50
Turki	23	48	3	65
Indonesia	17	114	3	110
Brazil	10	87	1	94
Argentina	26	47	1	69

India	6	132	5	122
Jerman	4	9	1	19
Australia	13	5	2	19
Jepang	3	19	1	22
Inggris	5	18	1	27
Kanada	8	15	1	17
Korea Selatan	12	19	1	15
Prancis	7	28	1	22
Afrika Selatan	36	109	3	97
Italia	9	30	1	13
Meksiko	16	86	1	75
Uni Eropa	-		-	

Sumber: UNDP The Gender Inequality Index 2022 rankings, UNDP Human Development Report 2022, UNDP Gender Development Index 2022, IMF 2021

Menyimak data di atas, pertumbuhan ekonomi yang dilansir IMF 2021, terdapat 9 negara masuk dalam 10 besar terbaik dalam pertumbuhan ekonomi dunia, 10 negara berada pada urutan ke 10-36 dunia. Untuk *HDI*, *UNDP* membuat klasifikasi, negara dengan *very high human development* adalah negara yang mampu masuk ke ranking 1-66, disusul negara dengan *high human development* adalah negara yang mampu masuk ranking ke 67-115 dunia. Termasuk *Medium High Human development* jika berada pada ranking ke 116-159 dunia, dan kelompok terakhir yaitu *low Human development* adalah negara yang berada pada posisi 160-192 dunia.

Dari klasifikasi di atas maka 14 negara anggota G20, termasuk negara dengan *Very high Human Development* dengan skor indeks antara 0,800-0,962. Indonesia, Afrika Selatan, Brazil dan Meksiko termasuk pada kelompok negara dengan *High Human development* dengan skor indeks 0,703-0,796. Indonesia pada posisi ke 114, sekalipun masuk kelompok *High Human development* tetapi sudah mendekati kelompok *Medium Human development* yang dimulai dari ranking ke 116. Hanya satu negara yang tergolong *Medium High Human development* yaitu India, hanya mampu berada pada posisi 132 dunia. Capaian sangat memprihatinkan, persoalan

terbesar India adalah populasi yang sangat besar dan kemiskinan yang mendera penduduk jumlahnya sangat tinggi.

Jika dikoreksi dengan memasukkan dimensi gender, maka terlihat bahwa negara-negara dengan *Very High Human development*, juga mampu menciptakan keseimbangan dalam pencapaian indeks pembangunan penduduk perempuan dan indeks pembangunan penduduk laki-laki *capaian Gender development Index* termasuk pada group 1 yaitu negara-negara yang tidak atau relatif sangat kecil terjadi ketimpangan gender. Tiga negara yaitu Indonesia, Turki dan Afrika Selatan digolongkan pada group 3 yang artinya masih cukup banyak ketimpangan gender pada capaian 3 dimensi *HDI* yaitu angka harapan hidup (Kesehatan), pengetahuan dan Pendidikan dan kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi. Dua negara yaitu Arab Saudi masuk group 4, masih tinggi ketimpangan gender dan India dengan posisi berada pada group paling rendah (5) yang artinya ketimpangan indeks pembangunan perempuan dan laki-laki sangat tinggi .

Capaian *GII* atau IKH berdasarkan data yang tertuang dalam *HDR21-22 Statistical Annex GII Table* dikeluarkan oleh *UNDP 2022*, terdapat tujuh negara G20 mampu menempatkan pada posisi 27 negara terbaik dalam menekan ketimpangan gender yaitu Jerman (2), Australia (3), Italia (13), Korsel (15), Kanada (17), Jepang (22), dan Inggris (27). Empat negara berada pada posisi 50 dunia untuk *GII* yang dicapai yaitu Amerika Serikat (44), Tiongkok (48), Rusia dan Arab Saudi sama-sama berada pada posisi ke 50. Negara menengah secara ekonomi berada pada posisi 65-97, Turki (65), Argentina (69), Meksiko (75) dan Afrika Selatan pada rangking ke 97. Dua negara terbawah yaitu Indonesia dan India masing-masing berada pada rangking ke 110 dan 112.

Posisi Amerika Serikat cukup “mengagetkan” sebagai negara adikuasa ekonomi, selalu menggaungkan hak azasi manusia termasuk kesetaraan gender, berada pada posisi ke 44. Amerika Serikat adalah salah satu negara tidak bersedia meratifikasi *CEDAW* walaupun ikut menandatangani dengan alasan, telah memiliki payung hukum sendiri yang sudah lama berlaku tentang hak-hak

perempuan di ranah publik, jauh sebelum CEDAW dideklarasikan oleh PBB. Di samping itu sistem proses pembuatan UU termasuk dalam meratifikasi rezim yang berasal dari hukum internasional di pemerintah federal Amerika Serikat cukup panjang prosesnya, tidak hanya selesai diputuskan oleh senat saja melalui voting tetapi juga dibawa ke *House of Representatives* (DPR Amerika Serikat), sehingga memerlukan dukungan yang mutlak dari kongres (Rahmi, 2019).

Tiongkok sebagai negara raksasa ekonomi berada pada posisi ke 2 dunia dengan *HDI* yang juga sangat tinggi berada pada posisi ke 4 terbaik dunia, masih menampilkan ketidakadilan gender sehingga menempati urutan ke 48. Harianty (2021 melalui medcom) memaparkan bahwa perempuan di Tiongkok banyak yang mengalami diskriminasi dalam memasuki dunia kerja, terjadi juga penangkapan para aktivis yang menyuarakan kesetaraan gender (Harianty, 2021). Contoh Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai negara adi daya ekonomi dunia memperlihatkan ketidakadilan gender masih sering terjadi hingga saat ini. Indonesia masih harus berjuang keras untuk keluar dari posisi ke 110, tidak jauh beda dengan capaian *HDI* yang berada pada posisi ke 114, prestasi pertumbuhan ekonomi yang sering mendapat apresiasi dari *IMF* maupun *World Bank* dan juga negara-negara maju dan berkembang, menjadi tantangan tersendiri. Tingginya ketidakadilan gender di Indonesia diakui oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

“Penyebab adanya ketidaksetaraan itu antara lain karena kebijakan, program dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan adanya perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi lainnya di masyarakat.” (Bintang, 2021)

Kesetaraan gender di India, masih sangat tinggi dengan posisi di 112 dunia, kondisi yang selaras dengan capaian *HDI* yang berada pada posisi ke 132, capaian *GDI* juga sangat rendah sehingga India masuk ke dalam group 5 artinya group paling bawah dalam hal capaian indeks pembangunan gender. Tiga indeks tersebut sangat tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu bertengger pada posisi ke 6 dunia. Jumlah penduduk yang

sangat besar dan angka kemiskinan yang masih tinggi, nampaknya menyumbangkan permasalahan yang dihadapi India. Tingginya ketidaksetaraan gender di India diungkapkan oleh Permataningtyas di tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender sebagai Tantangan Utama Good Governance di India” mengungkapkan bahwa:

“kebanyakan kebijakan yang dihasilkan akan menguntungkan laki-laki karena sudut pandangnya hanya dari laki-laki sehingga semakin memperpanjang budaya patriarki yang ada di samping itu semakin masif pula diskriminasi serta gap yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan.”(Krishnaveni, 2017 dalam Permataningtyas 2021).

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi yang baik di negara anggota G20, ternyata tidak semuanya membawa pengaruh yang positif terhadap Gender Inequality Index, tidak ada satupun negara yang mampu menembus 10 besar posisi dunia enam negara menempati rangking ke 65 -112 dunia. Diakui sebgaiian besar negara anggota G20 telah menghasilkan HDI dan GDI yang sangat baik hasilnya,sekalipun masih menyisakan 3 negara dengan HDI yang masih berada pada rangking diatas 100 yaitu Afrika Selatan, India dan Indonesia. Kesetaraan gender bukanlah masalah yang hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang saja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga masih masih dihadapi oleh negara-negara maju. Sekalipun kesetaraan gender sudah menjadi rezim internasional dan menjadi kesepakatan global yang akan ditanggulangi bersama, maka sangat tepat isu gender menjadi salah satu isu prioritas dalam setiap pertemuan KTT G20.

Daftar Pustaka

- Afriandi, Putri, A., & Harza, Z. (2022). Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska Revolusi Mesir 2011. *PIR Journal*, 13-30.
- BPS. (2020). *IKG (Indeks Ketimpangan Gender)*. Retrieved from Badan PAmerika Serikatt Statistik: <https://sirAmerikaSerikat.bps.go.id/sirAmerikaSerikat/index.php/indikator/1010>
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Retrieved from Badan PAmerika Serikatt Statistik: <https://sirAmerikaSerikat.bps.go.id/sirAmerikaSerikat/index.php/indikator/46>
- Harianty. (2021, Maret 29). *Tiongkok Masih Berupaya Promosikan Kesetaraan Gender*. Retrieved from Medcom.Id: <https://www.medcom.id/internasional/opini/yKXD7DOK-tiongkok-masih-berupaya-promosikan-kesetaraan-gender>
- Kristina. (2022, Maret 24). *Mengenal G20: Anggota, Tujuan, dan Peran Indonesia di Dalamnya*. Retrieved from detikcom: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5998561/mengenal-g20-anggota-tujuan-dan-peran-indonesia-di-dalamnya>
- Mulyani, S. (2017, Agustus 24). *Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Manusia*. Retrieved from Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada: <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/1913-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-melalui-pembangunan-manusia>
- Menteri PPPA: Indonesia Peringkat 101 dari 156 dalam Hal Gender Gap".: <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/12391921/menteri-pppa-indonesia-peringkat-101-dari-156-dalam-hal-gender-gap?page=all>.
- Permataningtyas, Winny. (2021). Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender sebagai Tantangan Utama Good Governance di India. *Jurnal Academia Praja*. Volume 4 Nomor 1 – Februari.
- Rahmi, S. R. (2019). Alasan Amerika Serikat Tidak Meratifikasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 7 No. 4*, 1563-1574.
- Sukirno, S. (2010). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.

BAB VI

Penutup

Dinamika isu isu sosial politik kontemporer di dimaknai sebagai gerak isu isu sosial politik kekinian yang banyak berkembang dan menjadi pokok bahasan di berbagai diskusi, seminar, workshop, bahkan di warung-warung kopi dan sejenisnya dari kalangan pemerintahan, komunitas masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat sampai ke tengah masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Perubahan yang terjadi sedemikian cepat di tingkat global, nasional, maupun lokal seperti revolusi industry 4.0, pandemi covid 19, konflik antar negara, ancaman Perang Dunia ke 3, globalisasi perdagangan, terorisme, radikalisme, masalah kemiskinan dan kelaparan, korupsi, disintegrasi bangsa, SARA, narkoba, *cyber crime*, konsolidasi demokrasi, dll menimbulkan berbagai isu sosial politik kekinian yang perlu segera dibahas dan disikapi agar tidak menimbulkan permasalahan kontra produktif di tengah masyarakat.

Book chapter yang ditulis oleh para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya ini membahas sebagian dari isu isu sosial politik kontemporer yang terjadi di Indonesia maupun di dunia sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca di seluruh pelosok tanah air.

Oleh karena itu *Book chapter* ini menarik dan perlu untuk dibaca oleh para akademisi, mahasiswa, pejabat pemerintahan, pengamat sosial politik, lembaga swadaya masyarakat para tokoh masyarakat dan masyarakat luas karena bukan hanya membahas isu isu sosial politik secara pasif melainkan dapat merangsang tumbuhnya inspirasi dan solusi dalam mengatasi dan mengantisipasi berbagai isu sosial politik di tingkat lokal, nasional, maupun global.-

NAMA PENULIS

Nama	Golongan/ Pangkat/ Jabfung	Unit Kerja	e-mail
Dra. Dyah Hapsari Eko N, M.Si	Pembina Utama Muda / IV.c / Lektor Kepala	Sosiologi	dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id
Dr. Zulfikri Suleman, M.A	Pembina / IV.a / Lektor Kepala	Ilmu Hubungan Internasional	Zuleman2003@yahoo.com
Dr. Andy Alfatih, MPA	Pembina / IV.a / Lektor Kepala	Ilmu Administrasi Publik	andylafatih@fisip.unsri.ac.id
Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum	Pembina / IV.a / Lektor Kepala	Sosiologi	dadanghikmahpurnama@unsri.ac.id
Dr. Ridha Taqwa, M.Si	Pembina / IV.a / Lektor Kepala	Sosiologi	ridhahtaqwa@fisip.unsri.ac.id
Drs. Tri Agus Susanto, MA	Pembina / IV.a / Lektor Kepala	Sosiologi	triagussusanto@fisip.unsri.ac.id
Dra. Eva Lidya, M.Si	Pembina / IV.a / Lektor Kepala	Sosiologi	evalidya@fisip.unsri.ac.id
Dra. Yusnaini, M.Si	Pembina / IV.a / Lektor Kepala	Sosiologi	yusnaini@fisip.unsri.ac.id
Dr. Andries Lionardo, M.Si	Penata Tk.I / III.d / Lektor Kepala	Ilmu Komunikasi	andrieslionardo@fisip.unsri.ac.id

Drs. Djunaidi, MSLS	Pembina Utama Madya / IV.d / Lektor	Ilmu Hubungan Internasional	djunaidi@unsri.ac.id
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM	Pembina Utama Muda / IV.c / Lektor	Ilmu Hubungan Internasional	anadjib.salatti@ gmail.com
Dr. Yoyok Hendarso, M.A	Penata Tk.I / III.d / Lektor	Ilmu Administrasi Publik	yoyokhendarso@ fisip.unsri.ac.id
Dra. Retno Susilowati, MM	Penata Tk.I / III.d / Lektor	Ilmu Hubungan Internasional	retno_susilowati@ fisip.unsri.ac.id
Mery Yanti, S.Sos., M.A	Penata Tk. I / III.d / Lektor	Sosiologi	mery.yanti@fisip. unsri.ac.id
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.	Penata / III.c / Lektor	Ilmu Administrasi Publik	nurbudiyanto@fisip. unsri.ac.id
Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si.	Penata / III.c / Lektor	Sosiologi	dianadewisartika@ fisip.unsri.ac.id
Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Administrasi Publik	senaprabujaya@fisip. unsri.ac.id
Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A.	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Sosiologi	gitaisyanawulan@ fisip.unsri.ac.id
Vieronica Varbi Sununianti, S,Sos., M.Si.	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Sosiologi	vieronicavarbis@ unsri.ac.id
Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A.	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	gunawanlestarielake@ fisip.unsri.ac.id

Sari Mutiara Aisyah, S.I.P., M.A	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	sarimutiara@fisip. unsri.ac.id
Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Sosiologi	muhammadizzudin@ fisip.unsri.ac.id
Januar Eko Aryansah, S.I.P., S.H., M.Si	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	januareko@fisip. unsri.ac.id
Yosi Arianti, S.Pd., M.Si	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Sosiologi	yosiarianti@fisip. unsri.ac.id
Ferdiansyah Rivai, S.I.P., MA	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	ferdiansyah@unsri. ac.id
Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	nur.supli@unsri.ac.id
Randi, S.Sos., M.Sos	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	randi@fisip.unsri. ac.id
Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Sosiologi	yulasteriyani@fisip. unsri.ac.id
Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	yusuf_abror@fisip. unsri.ac.id
Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Komunikasi	farishasestrim@fisip. unsri.ac.id
Safira Soraida, S.Sos., M.Sos.	Penata Muda / III.a/ Asisten Ahli	Sosiologi	safiratoraida@fisip. unsri.ac.id

Abdul Halim, S.IP., M.A.	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Ilmu Hubungan Internasional	abdul.halim@fisip. unsri.ac.id
Febrimarani Malinda, S.Sos., M.A	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Sosiologi	ferbrimarani@fisip. unsri.ac.id
Annisa Rahmawati, S.I.Kom., M.I.Kom	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Ilmu Komunikasi	annisarahmawati@ fisip.unsri.ac.id
Nurul Aulia, S.IP., M.A	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Ilmu Hubungan Internasional	aulia22nurul@fisip. unsri.ac.id
Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Ilmu Hubungan Internasional	ramdanlamato@fisip. unsri.ac.id
Safitri Elfandari, M.I.Kom	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Ilmu Komunikasi	andrisafitri88@gmail. com
Eko Pebryan Jaya, M.I.Kom	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Ilmu Komunikasi	prajaoki70@gmail. com
Muhamad Hidayatul Ilham, M.I.Kom	Penata Muda Tk.I / III.b / Tenaga Pengajar	Ilmu Komunikasi	hidayatullahilham@ fisip.unsri.ac.id

Adi Inggit Handoko, M.I.Kom	Tenaga Pengajar	Ilmu Komunikasi	adiinggit@fisip.unsri.ac.id
Khairunnas, S.I.P., M.I.Pol	Tenaga Pengajar	Ilmu Hubungan Internasional	khairunnas@fisip.unsri.ac.id
Rahmat Rafinzar, S.I.P., M.A.P	Tenaga Pengajar	Ilmu Administrasi Publik	rahmatrafinzar@fisip.unsri.ac.id
Dimes Akbar Perdana, S.A.P., MPA	Tenaga Pengajar	Ilmu Administrasi Publik	dimesakbarperdana@fisip.unsri.ac.id

DATA EDITOR

Nama	Golongan/ Pangkat/ Jabfung	Unit Kerja	e-mail
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM	Pembina Utama Muda / IV.c / Lektor	Ilmu Hubungan Internasional	anadjib.salatti@gmail.com
Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.	Penata Muda Tk.I / III.b / Asisten Ahli	Ilmu Hubungan Internasional	yusuf_abror@fisip.unsri.ac.id

Dinamika Isu-Isu Sosial Politik Kontemporer

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude matches < 5%

Exclude bibliography On